

ABUSAMA, S.H.
BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN





H. MISNADI
WAKIL BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN TAHUN 2025-2029





okusbapperida@gmail.com
0735-3274015
Jl. Serasan Seandanan No 12 Komplek Perkantoran Pemkab OKUS
BAPPERIDA OKU SELATAN

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

TAHUN 2025-2029

KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

TAHUN 2025



BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir Di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

14. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
15. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2023 Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2021-2040 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2021 Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2024 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
dan
BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Selatan.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan.
5. Perangkat Daerah Perencana adalah Perangkat Daerah yang menangani urusan perencanaan di Kabupaten.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yaitu tahun 2025-2029.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra-PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2025-2029.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-PD adalah dokumen perencanaan PD untuk perode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Kabupaten maupun yang ditempuh dengan mendorong partsipasi masyarakat.

BAB II
KEDUDUKAN RPJMD TAHUN 2025-2029

Pasal 2

(1) Dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten dalam menyelenggarakan dan melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun.
(2) Dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan pedoman bagi Bupati dalam RKPD yang merupakan rencana pembangunan tahunan.
(3) RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi:
    a. Pemerintah Kabupaten dalam menyusun RKPD; dan
    b. PD dalam menyusun Renstra-PD.

Pasal 3

(1) Dalam rangka menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan jangka menengah, Bupati dan Wakil Bupati yang terpilih dalam pemilihan kepala daerah serentak berikutnya diwajibkan menyusun RPJMD untuk periode berikutnya.
(2) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindarkan kekosongan rencana pembangunan daerah, Bupati yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun RKPD untuk tahun pertama periode pemerintahan Bupati berikutnya.
(3) RKPD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun pertama periode pemerintahan Bupati berikutnya.

BAB III
SISTEMATIKA RPJMD

Pasal 4

(1) RPJMD Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
    a. BAB I PENDAHULUAN
    b. BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH
    c. BAB III VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
    d. BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH dan
    e. BAB V PENUTUP.
(2) Dokumen RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RPJMD

Pasal 5

(1) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD mencakup pelaksanaan RPJMD dan RKPD serta Renstra-PD.
(2) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Perencana.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Ditetapkan di Muaradua
pada tanggal 20 Agustus 2025

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

ABUSAMA

Diundangkan di Muaradua
pada tanggal 20 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU SELATAN,

H. M. RAHMATTULLAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
TAHUN 2025 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN: (2-51/2025)

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas karunia dan hidayah-Nya akhirnya penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2025-2029 dapat tersusun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah selesai disusun sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

RPJMD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2025-2029, merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati periode 2025-2030 yaitu "**OKU Selatan Berjaya**" yang menjadi pedoman dan sekaligus juga instrumen pengukuran kinerja pemerintahan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Dalam pencapaian target pembangunan RPJMD melibatkan seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan serta peran penting masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, mengedepankan kolaborasi dan sinergi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah Pusat, serta mendorong peran aktif dunia usaha.

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2025-2029 ini, kami ucapkan terima kasih. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridhai kita semua.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Muaradua, 20 Agustus 2025

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

ABUSAMA, SH

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i
DAFTAR TABEL iv
DAFTAR GAMBAR xxi

BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan I-3
1.3. Hubungan Antara Dokumen RPJMD Dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya I-7
1.3.1. RPJMD dan RPJPD Kabupaten Ogan Komering UluSelatan I-8
1.3.2. RPJMD Dengan Renstra PD I-9
1.3.3. RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) I-10
1.3.4. RPJMD dan RTRW Kabupaten Ogan Komering UluSelatan. I-10
1.3.5. RPJMD dan KLHS Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan I-11
1.3.6. RPJMD dan RPJMN I-11
1.3.7. RPJMD dan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan I-12
1.4. Maksud dan Tujuan I-12
1.4.1. Maksud I-12
1.4.2. Tujuan I-13
1.5. Sistematika Penulisan I-13

BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH
2.1. Aspek Geografi dan Demografi II-1
2.1.1. Posisi dan Peran Strategis Daerah II-1
2.1.2. Potensi Sumber Daya Alam II-18
2.1.3. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup II-21
2.1.4. Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan II-23
2.1.5. Lingkungan Hidup Berkualitas II-27
2.1.6. Resilensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim II-29
2.1.7. Demografi II-30

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat II-34
2.2.1. Kesejahteraan Ekonomi II-34
2.2.2. Kesehatan Untuk Semua II-48
2.2.3. Pendidikan Berkualitas yang Merata II-50
2.2.4. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif II-52
2.2.5. Perlindungan Sosial yang Adaptif II-56

2.3. Aspek Daya Saing Daerah II-56
2.3.1. Daya Saing Sumber Daya Manusia II-56
2.3.2. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi II-58
2.3.3. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global II-61
2.3.4. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi II-62
2.3.5. Indeks Daya Saing Daerah II-66

2.4. Aspek Pelayanan Umum II-67
2.4.1. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif II-67
2.4.2. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial II-68

2.5. Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan II-70
2.5.1. Fokus Layanan Urusan Pemerintah Wajib II-70

2.5.2. Fokus Layanan Urusan Pemerintah Pilihan II-92
2.5.3. Penunjang Urusan II-94
2.6. Evaluasi Kinerja Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan II-98
2.7. Arah Pengembangan Infrastruktur Kewilayahan II-117
2.7.1. Pengembangan Infrastruktur Pemerintah Pusat II-117
2.7.2. Pengembangan Infrastruktur Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan II-118
2.8. Gambaran Keuangan Daerah II-122
2.8.1. Kinerja Pelaksanaan APBD II-124
2.8.2. Proyeksi Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2025-2030 ..... II-142
2.9. Permasalahan dan Isu Strategis II-152
2.9.1. Permasalahan Pembangunan Daerah II-153
2.9.2. Isu Strategis Daerah II-163
2.9.3. Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis Daerah Tahun 2025-2029 ..... II-169

BAB III VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
3.1. Visi dan Misi III-1
3.2. Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 ..... III-3
3.3. Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah III-12
3.3.1. Strategi Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran RPJMD III-12
3.3.2. Arah Kebijakan III-29
3.3.3. Program-Program Prioritas Daerah Dalam Pencapaian Tujuan dan Sasaran III-32
3.4. Penyesuaian dengan RPJMN Nasional III-44
3.5. Penyesuaian dengan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan III-45

BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
4.1. Program Perangkat Daerah IV-1
4.2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah IV-71
4.2.1. Indikator Kinerja Utama (IKU) IV-71
4.2.2. Indikator Kinerja Daerah (IKD) IV-73

BAB V PENUTUP
5.1. Kaidah Pelaksanaan V-1
5.2. Pedoman Transisi V-3

DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Luas Wilayah dan Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2024 ..... II-2
Tabel II.2 Jenis Tanah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan..... II-4
Tabel II.3 Nama Sungai dan Panjang Sungai Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan..... II-5
Tabel II.4 Luas Daerah Aliran Sungai (DAS) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan..... II-6
Tabel II.5 Tutupan Lahan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan II-7
Tabel II.6 Penggunaan Lahan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan... II-8
Tabel II.7 Data Luasan dan Klasifikasi Bahya II-9
Tabel II.8 Potensi Penduduk Terpapar di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan II-10
Tabel II.9 Rekapitulasi Potensi Kerugian Fisik,Kerugian Ekonomi dan Potensi Kerusakan Lingkungan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan..... II-10
Tabel II.10 Indeks Kapasitas Daerah (IKD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2023..... II-11
Tabel II.11 Rekapitulasi Kelas Risiko di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan II-12
Tabel II.12 Wilayah Potensi Gerakan Tanah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan..... II-14
Tabel II.13 Topografi Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan..... II-16
Tabel II.14 Geologi Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan..... II-17
Tabel II.15 Produksi Tanaman Pangan (ton) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020-2024 ..... II-18
Tabel II.16 Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya per hektar (Ton/Ha) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020-2024 ..... II-18
Tabel II.17 Produksi Sayur-Sayuran (ton) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020-2024 ..... II-18
Tabel II.18 Provitas Sayur-Sayuran Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020-2024 ..... II-19
Tabel II.19 Produksi Buah-Buahan (ton) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020-2024 ..... II-19
Tabel II.20 Provitas Buah-Buahan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020-2024..... II-19
Tabel II.21 Populasi Ternak (ekor) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020-2024..... II-19
Tabel II.22 Produksi Perkebunan (ton) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020-2024 ..... II-20
Tabel II.23 Potensi dan Objek Wisata Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan II-21
Tabel II.24 Daya Dukung dan Daya Tampung Air Menurut Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2024..... II-22
Tabel II.25 Status Air di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2024 ..... II-22
Tabel II.26 Daya Dukung Daya Tampung Air Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2045..... II-23
Tabel II.27 Data Indeks Ketersediaan, Indeks Keterjangkauan, Indeks Pemanfaatan dan Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020-2024..... II-27
Tabel II.28 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020-2024 ..... II-28
Tabel II.29 Jumlah Penduduk (Jiwa) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020-2024..... II-30
Tabel II.30 Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020-2024 ..... II-30

Tabel II.31 Kepadatan Penduduk Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020-2024 ..... II-31
Tabel II.32 Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020-2024 ..... II-32
Tabel II.33 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2024..... II-32
Tabel II.34 Proyeksi dan Analisis Penduduk Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2026-2030 ..... II-33
Tabel II.35 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020-2024 .... II-36
Tabel II.36 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020-2024 .... II-37
Tabel II.37 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020-2024 ..... II-38
Tabel II.38 Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020-2024 (persen) II-40
Tabel II.39 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020-2024..... II-43
Tabel II.40 Rekap Data Ground Check Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (GC DTSEN) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2025..... II-44
Tabel II.41 Indikator Komponen Penyusun Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020-2024 .... II-48
Tabel II.42 Perkembangan Komponen Pembentuk Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020-2024..... II-54
Tabel II.43 Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (UCJ) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2024..... II-56
Tabel II.44 Skor Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020-2024 ..... II-59
Tabel II.45 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (Miliar Rupiah) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020-2024 .... II-59
Tabel II.46 Rasio Kewirausahaan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020-2024 ..... II-60
Tabel II.47 Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020-2024..... II-61
Tabel II.48 Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020-2024 ..... II-62
Tabel II.49 Persentase Desa Mandiri Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020-2024 ..... II-65
Tabel II.50 Lama Proses Perizinan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020-2024..... II-65
Tabel II.51 Jenis dan Jumlah Bank dan Cabang Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020-2024..... II-65
Tabel II.52 Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020-2024 ..... II-66
Tabel II.53 Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Usaha Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020-2024 ..... II-66
Tabel II.54 Indeks SPBE Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2024..... II-68
Tabel II.55 Capaian Kinerja Urusan Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020-2024..... II-71
Tabel II.56 Capaian Kinerja Urusan Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020-2024..... II-72
Tabel II.57 Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020-2024..... II-76
Tabel II.58 Capaian Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan

Tahun 2020-2024 ..... II-77
Tabel II.59 Capaian Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020-2024 ..... II-78
Tabel II.60 Capaian Kinerja Urusan Sosial Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020-2024 ..... II-79
Tabel II.61 Capaian Kinerja Urusan Tenaga Kerja Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020-2024..... II-81
Tabel II.62 Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020-2024..... II-81
Tabel II.63 Capaian Kinerja Urusan Pangan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020-2024 ..... II-82
Tabel II.64 Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020-2024..... II-82
Tabel II.65 Capaian Kinerja Urusan Administrasi Kependuddukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020-2024..... II-84
Tabel II.66 Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020-2024 .... II-85
Tabel II.67 Capaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020-2024..... II-86
Tabel II.68 Capaian Kinerja Urusan Perhubungan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020-2024..... II-86
Tabel II.69 Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020-2024 .... II-87
Tabel II.70 Capaian Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020-2024..... II-88
Tabel II.71 Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020-2024..... II-88
Tabel II.72 Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020-2024 .... II-89
Tabel II.73 Capaian Kinerja Urusan Statistik Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020-2024 ..... II-89
Tabel II.74 Capaian KinerjaUrusan Persandian Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020-2024..... II-90
Tabel II.75 Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020-2024..... II-90
Tabel II.76 Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020-2024..... II-91
Tabel II.77 Capaian Kinerja Urusan Kearsipan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020-2024..... II-91
Tabel II.78 Capaian Kinerja Urusan Pariwisata Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020-2024..... II-92
Tabel II.79 Jumlah Kunjungan Pariwisata II-92
Tabel II.80 Capaian Kinerja Urusan Pertanian Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020-2024..... II-93
Tabel II.81 Capaian Kinerja Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020-2024 .... II-93
Tabel II.82 Capaian Kinerja Urusan Perdagangan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020-2024..... II-93
Tabel II.83 Capaian Kinerja Urusan Perindustrian Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020-2024..... II-94
Tabel II.84 Capaian Kinerja Urusan Transmigrasi Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020-2024..... II-94
Tabel II.85 Capaian Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020-2024 ..... II-94
Tabel II.86 Capaian Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020-2024 .... II-95

Tabel II.87 Capaian Kinerja Urusan Keuangan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020-2024..... II-96
Tabel II.88 Capaian Kinerja Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020-2024..... II-96
Tabel II.89 Capaian Kinerja Urusan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020-2024 .... II-97
Tabel II.90 Capaian Kinerja Urusan Pengawasan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020-2024..... II-97
Tabel II.91 Capaian Kinerja Urusan Sekretariat Dewan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020-2024..... II-97
Tabel II.92 Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020-2024 .... II-99
Tabel II.93 Skala interval Otonomi Fiskal..... II-123
Tabel II.94 Derajat Otonomi Fiskal Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020-2024 ..... II-124
Tabel II.95 Realisasi APBD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan 2020-2024..... II-128
Tabel II.96 Neraca Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020-2024..... II-134
Tabel II.97 Proyeksi Kerangka Pendanaan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2026-2030 ..... II-148
Tabel II.98 Daftar Isu Panjang (Long-List) Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan..... II-170
Tabel II.99 Rumusan Isu Strategis Berdasarkan Gap Capaian TPB..... II-171
Tabel II.100 Hasil Skoring Pokja KLHS RPJPD Kabupaten OKUS 2025-2045..... II-173
Tabel III.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2025-2029 ..... III-6
Tabel III.2 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan III-21
Tabel III.3 Arah KebijakanPemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.. ..... III-29
Tabel III.4 Tema Penahapan Pembangunan..... III-32
Tabel III.5 Keterkaitan Sasaran dan Program Prioritas Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2025-2029..... III-34
Tabel III.6 Keterkaitan Sasaran dan Program Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2025-2029 .... III-39
Tabel IV.1 Program Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2026-2030 ..... IV-2
Tabel IV.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2025-2030 ..... IV-72
Tabel IV.3 Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2025-2030 ..... IV-74

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1 Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya I-8
Gambar II.1 Peta Administrasi Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan . II-2
Gambar II.2 Data Bencana Yang Terjadi Di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020-2024 ..... II-13
Gambar II.3 Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020-2024 ..... II-24
Gambar II.4 Prevalansi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Persen) di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020-202 .. II-24
Gambar II.5 Produksi Listrik (kWh) di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020-2023 ..... II-25
Gambar II.6 Persentase Rumah Tangga Menggunakan Sumber Air Minum Bersih Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020-2024..... II-26
Gambar II.7 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Air Minum Layak Di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020-2024..... II-26
Gambar II.8 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Sanitasi Layak dan Aman di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020-2024 ..... II-29
Gambar II.9 Indeks Risiko Bencana Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020-2024 ..... II-29
Gambar II.10 Persentase Penduduk diatas Garis Kemiskinan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020-2024 ..... II-42
Gambar II.11 Persentase Tingkat Kemiskinan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020-2024 ..... II-42
Gambar II.12 Perkembangan PDRB Per Kapita (Juta Rupiah) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020-2024 ..... II-45
Gambar II.13 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020-2024..... II-46
Gambar II.14 Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020-2024 ..... II-47
Gambar II.15 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020-2024 ..... II-47
Gambar II.16 Pengeluaran Per Kapita Yang Disesuaikan (Purchasing Power Parity/PPP) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020-2024..... II-48
Gambar II.17 Angka Harapan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020-2024 ..... II-49
Gambar II.18 Stunting di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2021-2024..... II-50
Gambar II.19 Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020-2024 ..... II-50
Gambar II.20 Harapan Lama Sekolah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020-2024 ..... II-51
Gambar II.21 Angka Melek Huruf Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020-2024..... II-52
Gambar II.22 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat II-52
Gambar II.23 Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020-2024..... II-53
Gambar II.24 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020-2024..... II-55
Gambar II.25 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020-2024..... II-56
Gambar II.26 Rasio Ketergantungan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020-2024 ..... II-57
Gambar II.27 Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Tahun 2024 ..... II-57

Gambar II.28 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020-2024..... II-58
Gambar II.29 Nilai Tukar Petani Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020-2024..... II-60
Gambar II.30 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020-2024..... II-61
Gambar II.31 Persentase Net Ekspor Barang dan Jasa Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020-2024..... II-62
Gambar II.32 Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020-2024 II-63
Gambar II.33 Jumlah Orang/Barang melalui Dermaga/Bandara/Terminal per Tahun Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020-2024..... II-64
Gambar II.34 Persentase Luas Wilayah Produktif Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020-2024..... II-64
Gambar II.35 Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2024 ..... II-67
Gambar II.36 Persentase Penegakan Perda Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020-2024 ..... II-69
Gambar II.37 Angka Kriminalitas Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020-2024..... II-69
Gambar III.1 Keterkaitan Misi Pembangunan Nasional dengan Misi Pembangunan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan III-44
Gambar III.2 Keterkaitan Misi Pembangunan Provinsi Sumsel dengan Misi Pembangunan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan III-46

Lampiran Peraturan Daerah
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
Nomor 2 Tahun 2025
Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Tahun 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah merupakan amanat konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 mengamanatkan bahwa negara harus menyelenggarakan pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses sistematis yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk menentukan tujuan, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan dalam jangka waktu tertentu. Proses ini melibatkan berbagai tahapan, mulai dari pengumpulan data dan informasi, analisis potensi dan permasalahan daerah, perumusan visi dan misi, hingga penetapan program dan kegiatan prioritas daerah. Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kesenjangan antarwilayah, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menjadi landasan hukum utama dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah. Peraturan-peraturan ini mengatur tentang sistem perencanaan yang terintegrasi dan partisipatif, yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Penyusunan dokumen RPJMD merupakan perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun oleh setiap Pemerintah Daerah. Penyusunan RPJMD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2025-2029 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 41 huruf e, yang diawali dengan penyusunan dokumen rancangan teknokratik RPJMD yang dilakukan Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi (tupoksi) di bidang perencanaan pembangunan daerah, dengan melibatkan berbagai pihak sesuai dengan bidang keahlian dan tupoksi masing-masing. Dokumen ini menjadi pedoman utama bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah

selama lima tahun ke depan, dengan tujuan untuk mencapai kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan masyarakat. RPJMD disusun berdasarkan potensi dan sumber daya yang dimiliki daerah, serta memperhatikan isu-isu strategis dan tantangan pembangunan yang dihadapi. Selain itu, RPJMD juga menjadi landasan bagi penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan dokumen perencanaan lainnya di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Pada tanggal 27 November 2024 Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Periode Tahun 2025-2030. Berdasarkan hasil pilkada, maka Bupati yang ditetapkan pasangan Abusama, S.H. dan Wakil Bupati yang ditetapkan Drs. H. Misnadi, M.Si., M.M. Periode 2025-2030, serta telah dilantik berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3–221 Tahun 2025 dan Nomor 100.2.1.3–1719 Tahun 2025 pada tanggal 20 Februari 2025. Selanjutnya sebagaimana diatur dalam pasal 264 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Bupati dan Wakil Bupati terpilih berkewajiban menyusun RPJMD dan menetapkannya dalam bentuk Peraturan Daerah paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan harus memperhatikan prinsip-prinsip partisipatif, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Partisipasi masyarakat menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa program dan kegiatan pembangunan yang dirumuskan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Transparansi dan akuntabilitas diperlukan untuk memastikan bahwa pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program dilakukan secara efisien dan efektif, serta mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah. Prinsip berkelanjutan juga harus diperhatikan untuk memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan tidak merusak lingkungan hidup dan dapat memberikan manfaat bagi generasi mendatang. Perencanaan pembangunan daerah juga harus terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan RPJMD Tingkat Provinsi. Integrasi ini penting untuk memastikan bahwa program dan kegiatan pembangunan di daerah sejalan dengan arah kebijakan pembangunan yang lebih luas. Selain itu, integrasi juga diperlukan untuk menghindari tumpang tindih program dan kegiatan pembangunan, serta untuk menciptakan sinergi antar tingkat pemerintahan.

Perencanaan pembangunan daerah diperlukan untuk mengelola sumber daya tersebut secara efektif dan efisien, sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal bagi kesejahteraan masyarakat. Melalui perencanaan yang matang,

daerah dapat mengidentifikasi prioritas pembangunan, mengalokasikan anggaran secara tepat sasaran, dan mengukur kinerja pembangunan secara terukur. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap sumberdaya yang ada dimanfaatkan secara maksimal untuk mencapai tujuan pembangunan daerah. Dengan perencanaan pembangunan daerah yang baik, diharapkan pembangunan di daerah dapat berjalan secara terarah, efektif, dan efisien, serta dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan RPJMD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2025-2029, didasarkan pada beberapa peraturan perundangan yang berlaku terkait dengan dokumen perencanaan daerah, antara lain:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir Di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11);

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); selanjutnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
14. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);
15. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
23. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
24. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
33. Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 781);
34. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 6);
35. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perauran Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah

Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2019 Nomor 8);

36. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kebupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2021-2040 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2021 Nomor 3);
37. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2023 Nomor 5);
38. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2024 Nomor 4);
39. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
40. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2025 tentang Peoman Penyusunan Rencana Jangka Menengah Daeran dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

1.3. Hubungan Antara Dokumen RPJMD Dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya

Keberadaan Dokumen RPJMD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2025-2029 memiliki hubungan dan tidak terlepas dengan dokumen perencanaan lainnya karena perencanaan pembangunan umumnya disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggab terhadap perubahan. Adapun hubungan Dokumen RPJMD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dengan dokumen perencanaan lainnya adalah, sebagai berikut:

a. Dokumen RPJMD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2025-2029 merupakan implementasi RPJM Nasional dan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan kondisi, kebutuhan serta tantangan yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
b. Penyusunan RPJMD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2025-2029 berpedoman Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kebupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2021-2040. Hal ini dimaksudkan untuk menyelaraskan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan,

strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dengan kebijakan pengembangan wilayah, rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan arahan pemanfaatan ruang.

c. Dokumen RPJMD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2025-2029 merupakan pedoman umum terhadap penyusunan Renstra PD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan pada periode yang sama.

d. Penjabaran operasional tahunan Dokumen RPJMD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2025-2029 dilakukan melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

e. Penjabaran dari Renstra PD adalah Renja PD yang merupakan dokumen perencanaan tahunan bagi setiap OPD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Hubungan RPJMD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar I.1 berikut:

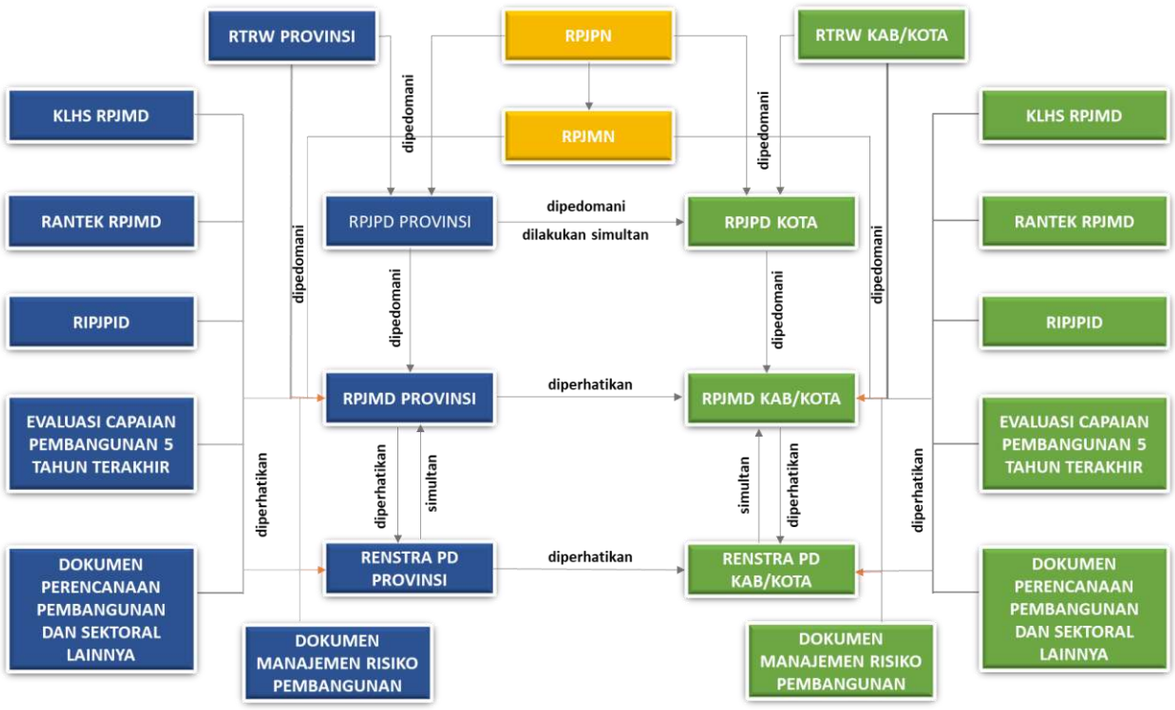

Gambar I.1
Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
Sumber: Intruksi Menteri Nomor 2 Tahun 2025

1.3.1. RPJMD dan RPJPD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan

RPJMD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2025-2029 merupakan pelaksanaan dari arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2025-2045 Tahap Pertama (2025-2029). Pada RPJPD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tahun 2025-2045

dinyatakan visi yang ingin dicapai oleh Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan pada tahun 2045 adalah: “OKU Selatan Hebat 2045”.

Dalam mewujudkan visi tersebut ditempuh melalui misi pembangunan daerah, sebagai berikut:

1. Mewujudkan Pemerintah Daerah Yang Harmonis dan andal dalam melaksanakan Transformasi Kesehatan, Pendidikan, Sosial, Tata Kelola dan Lingkungan Hidup.
2. Mewujudkan Ekonomi yang maju dan Berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
3. Mewujudkan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yang Aman dan Tenteram.

Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Pembangunan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan pada Tahap Pertama RPJPD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2025-2045, adalah sebagai berikut:

1. Transformasi kelembagaan Pemerintahan Daerah tepat fungsi, tepat guna dan tepat aturan, peningkatan kualitas SDM, regulasi yang efektif, digitalisasi pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat, dengan sasaran pokok:
   a. Terciptanya kualitas kesehatan masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yang handal melalui pelayanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas, serta optimalisasi sistem kesehatan yang tangguh dan responsif;
   b. Terciptanya pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yang inklusif dan adaptif serta relevan yang didukung sarana dan prasarana yang berkualitas dan mudah dijangkau penduduk usia sekolah;
   c. Memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yang merata dan berkeadilan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah berbasis keluarga yang harmonis;
   d. Terbentuknya struktur kelembagaan pemerintahan yang berorientasi pelayanan publik dengan tata kelola digital yang maju; dan
   e. Terjaganya lingkungan hidup Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yang harmonis dengan kemajuan pertumbuhan penduduk dan andal dalam mendukung gerak perekonomian.
2. Hilirisasi komiditi unggulan perkebunan serta penguatan riset pengembangan komoditas baru, dengan sasaran pokok: Pertumbuhan ekonomi stabil berbasis agrobisnis dan agrowisata secara inklusif dan berkelanjutan;
3. Penguatan daya dukung Pemerintah Daerah terhadap pelaksanaan urusan absolute Pemerintah Pusat, dengan sasaran pokok: suasana aman dan

tenteram bagi seluruh masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dalam berpolitik dan berusaha serta beribadah.

1.3.2. RPJMD Dengan Renstra Perangkat Daerah

Renstra Perangkat Daerah merupakan bagian dari RPJMD yang tidak bisa dipisahkan, karena pada dasarnya RPJMD merupakan gradasi dari Renstra Perangkat Daerah. Sasaran RPJMD termasuk program prioritas akan dicapai melalui Renstra Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun. Implementasi dari RPJMD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dituangkan di dalam Renstra masing-masing perangkat daerah sesuai tugas dan fungsinya. Bupati Ogan Komering Ulu Selatan bertanggungjawab terhadap pencapaian tujuan RPJMD, sedangkan Kepala Perangkat Daerah bertanggungjawab terhadap pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah yang harus dipertanggungjawabkan setiap tahun dan akhir masa jabatan. Di sini, keberhasilan Kepala Perangkat Daerah dalam mencapai target kinerja *impact* dan *outcome* dalam Renstra Perangkat Daerah, secara langsung dan tidak langsung akan memengaruhi pencapaian visi dan misi serta janji politik Bupati yang telah dijabarkan dalam RPJMD.

1.3.3. RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

RPJMD dilaksanakan dari tahun ke tahun melalui RKPD. Sasaran tahunan dan arah kebijakan RPJMD harus dipedomani dalam menentukan prioritas dan sasaran pembangunan tiap tahun dalam RKPD. Program pembangunan daerah yang sejatinya adalah program prioritas Bupati dalam mencapai visi dan misi RPJMD harus terpetakan dengan baik, kapan dilaksanakan secara spesifik dari satu RKPD ke RKPD tahap berikutnya. Perangkat Daerah menyusun program dan kegiatan prioritas tahunan dalam Renja Perangkat Daerah. Dalam rangka sinergi dan sinkronisasi antara RPJMD, RKPD, dan Renja Perangkat Daerah setiap tahun diselenggarakan Musrenbang RKPD Kabupaten bertujuan sebagai penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan dengan para pemangku kepentingan dengan Pemerintah Daerah.

1.3.4. RPJMD dan RTRW Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan

Implementasi RPJMD didasarkan pada RTRW Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, baik dari aspek kebijakan maupun operasionalisasi dan keselarasannya dengan rencana program pembangunan untuk menjamin kelangsungan dan daya dukung lingkungan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Dengan kata lain, pendekatan pembangunan sektoral harus

dilaksanakan secara serasi dan seimbang dengan pendekatan pembangunan regional. Suatu pembangunan yang berdimensi kewilayahan juga memperhatikan pentingnya pembangunan terhadap suatu kawasan terpilih atau strategis berdasarkan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi program pembangunan secara terpadu yang memerhatikan kondisi dan potensi serta pemanfaatan ruang sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah. Strategi dan kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dalam RPJMD merupakan bagian tidak terpisahkan dari RTRW.

1.3.5. RPJMD dan KLHS Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan

Instrumen perlindungan di tingkat perencanaan adalah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Peraturan Pemerintah ini mengamanatkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Dengan kata lain KLHS ini dibuat dan dilaksanakan untuk mewujudkan RPJMD yang sesuai dengan prinsip berkelanjutan. Oleh karenanya, dokumen KLHS inilah yang kemudian menjadi bahan pertimbangan dan penyempurnaan dalam perumusan kebijakan rencana pembangunan daerah, termasuk Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yang akan dirumuskan dalam RPJMD.

1.3.6. RPJMD dan RPJMN

RPJMD juga harus memedomani RPJMN sekurang-kurangnya untuk sinergitas dan sinkronisasi arsitektur kinerja baik di tingkat *impact* maupun *outcome* pembangunan nasional dan daerah. Pada tingkat *impact*, indikator kinerja sasaran RPJMD harus memerhatikan apa yang ingin dicapai dalam sasaran RPJMN. Pada tingkat *outcome*, prioritas pembangunan daerah harus memerhatikan isu-isu dan strategi pembangunan nasional untuk sinkronisasi kebijakan. Penyelarasan RPJMD dengan RPJMN didasarkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 263 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah,

serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

Visi RPJMN Tahun 2025-20294, yaitu “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Visi tersebut mengandung arti pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra-putri terbaik bangsa dengan kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh Pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045. Visi ini dicapai melalui delapan Misi Presiden yang dituangkan dalam delapan Asta Cita, yaitu:

1. Memperkokoh ideology Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan system pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industry kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba;
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

1.3.7. RPJMD dan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan

RPJMD juga harus memedomani RPJMD Provinsi Sumatera Selatan sekurang-kurangnya untuk sinergitas dan sinkronisasi arsitektur kinerja baik di tingkat *impact* maupun *outcome* pembangunan Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Pada tingkat *impact*, indikator kinerja sasaran RPJMD harus memerhatikan apa yang ingin dicapai dalam sasaran RPJMD Provinsi Sumatera Selatan. Pada tingkat *outcome*, prioritas

pembangunan daerah harus memerhatikan isu-isu dan strategi pembangunan Provinsi Sumatera Selatan untuk sinkronisasi kebijakan.

1.4. Maksud dan Tujuan

1.4.1. Maksud

Penyusunan RPJMD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2025-2029 adalah sebagai pedoman untuk memberikan arah terhadap kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program organisasi perangkat daerah, lintas organisasi perangkat daerah dan program kewilayahan dalam rangka menjamin keberlanjutan pembangunan jangka panjang dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun yang akan datang sehingga secara nyata dan bertahap dapat mewujudkan cita-cita masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

1.4.2. Tujuan

Adapun tujuan dari penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2025-2029 adalah, sebagai berikut:

1. Menerjemahkan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih ke dalam berbagai prioritas dan kebijakan pembangunan.
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran teknis RPJMD pada masing-masing perangkat daerah periode pembangunan tahun 2025-2029 berdasarkan urusan dan kewenangan yang ada dalam tugas dan fungsi perangkat daerah.
3. Menyediakan pedoman dalam penyusunan RKPD yang merupakan perencanaan tahunan berupa program beserta target dan pagu yang bersifat indikatif, sebagai bahan lebih lanjut pada penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
4. Mewujudkan keselarasan perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan pembangunan Nasional dan Provinsi Sumatera Selatan.
5. Memberikan fondasi yang baik bagi reformasi penyelenggaraan, pengendalian dan evaluasi kinerja pembangunan daerah di masa mendatang.
6. Sebagai pedoman dalam melakukan evaluasi capaian kinerja Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

1.5. Sistematika Penulisan

Penyajian dokumen RPJMD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2025-2029 mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan latar belakang penyusunan RPJMD, dasar hukum, hubungan antar dokumen RPJMD dan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, serta maksud dan tujuan penyusunan dokumen RPJMD.

BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH

Memberikan gambaran kondisi daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan terutama pada penyajian data-data dan informasi dengan pendeketan 4 (empat) aspek pembangunan, yaitu aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah, aspek pelayanan umum, gambaran umum keuangan daerah yaitu realisasi APBD Tahun Anggaran 2020-2024 dan proyeksi keuangan daerah Tahun Anggaran 2026-2030, beserta permasalahan pembangunan daerah dan Isu strategis daerah.

BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Menjelaskan visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi, dan arah kebijakan, beserta program prioritas pembangunan daerah dalam RPJMD Tahun 2025-2029.

BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Menjelaskan daftar program Perangkat Daerah dan indikator program, target dan pagu indikatif program Perangkat Daerah tahun 2025-2029. Beserta Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memuat target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui Indikator Kinerja Daerah (IKD).

BAB V PENUTUP

Bab ini menyampaikan dengan singkat harapan pencapaian dari dokumen RPJMD yang telah ditetapkan

BAB II
GAMBARAN UMUM DAERAH

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

Aspek geografi dalam perencanaan pembangunan daerah memiliki sisi strategis utamanya dalam memberikan dukungan baik langsung maupun tidak langsung terhadap pelaksanaan pembangunan daerah. Penjabaran aspek geografi akan memberikan gambaran utuh bagaimana karakteristik wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan baik dalam kaitannya dengan luas dan batasan wilayah, letak geografis, topografi, hingga klimatologi wilayah. Selain itu, akan dilihat pula berbagai potensi pengembangan wilayah dan daerah rawan bencana yang dijabarkan lebih lanjut dalam perencanaan tata ruang wilayah.

Analisis aspek demografi dalam pembangunan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan akan memberikan ukuran, struktur, maupun distribusi/persebaran penduduk baik secara series maupun kewilayahan. Analisis aspek demografi ini menjadi penting mengingat pelaksana utama pembangunan sekaligus obyek pembangunan adalah penduduk, sehingga keterkaitan antara demografi dengan aspek-aspek lain akan menjadi perlu untuk diperhatikan secara seksama.

2.1.1. Posisi dan Peran Strategis Daerah

2.1.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dengan Ibukota Muaradua merupakan salah satu Kabupaten pemekaran di Provinsi Sumatera Selatan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir. Luas Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan berdasarkan Kebijakan Satu Peta (KSP) dan menggunakan batas administrasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri serta batas indikatif antar Kabupaten memiliki luas ±437.687 Ha. Adapun secara administrasi wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan memiliki batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Muaraenim dan Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu; dan
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung.

Tabel II.1
Luas Wilayah dan Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2024

Kode	Kecamatan	Luas (ha)	%	Kelurahan	Desa
16.09.01	Muaradua	13,937	3.20	5	9
16.09.02	Pulau Beringin	21,611	4.90	-	13
16.09.03	Banding Agung	21,272	4.90	1	21
16.09.04	Muaradua Kisam	20,523	4.70	-	18
16.09.05	Simpang	10,777	2.50	-	7
16.09.06	Buay Sandang Aji	31,273	7.10	-	16
16.09.07	Buay Runjung	8,108	1.90	-	14
16.09.08	Mekakau Ilir	27,485	6.30	-	15
16.09.09	Buay Pemaca	63,874	14.60	-	22
16.09.10	Kisam Tinggi	39,097	8.90	-	19
16.09.11	Kisam Ilir	7,748	1.80	-	9
16.09.12	BPR Ranau Tengah	20,337	4.60	1	21
16.09.13	Warkuk Ranau Selatan	24,128	5.50	-	16
16.09.14	Runjung Agung	16,954	3.90	-	9
16.09.15	Sungai Are	18,339	4.20	-	9
16.09.16	Sindang Danau	24,057	5.50	-	7
16.09.17	Buana Pemaca	19,418	4.40	-	8
16.09.18	Tiga Dihaji	28,482	6.50	-	8
16.09.19	Buay Rawan	20,266	4.60	-	11
Jumlah		**437,687**	**100.00**	**7**	**252**

Sumber: Perda No. 3 Tahun 2021 tentang RTRW Kabupaten OKU Selatan Tahun 2021-2040

2.1.1.2. Letak dan Kondisi Geografis

Secara geografis, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan terletak di antara 103°24'22.36"-104°22'8.72" Bujur Timur 4°12'58.36"-4°55'26.97" Lintang Selatan.

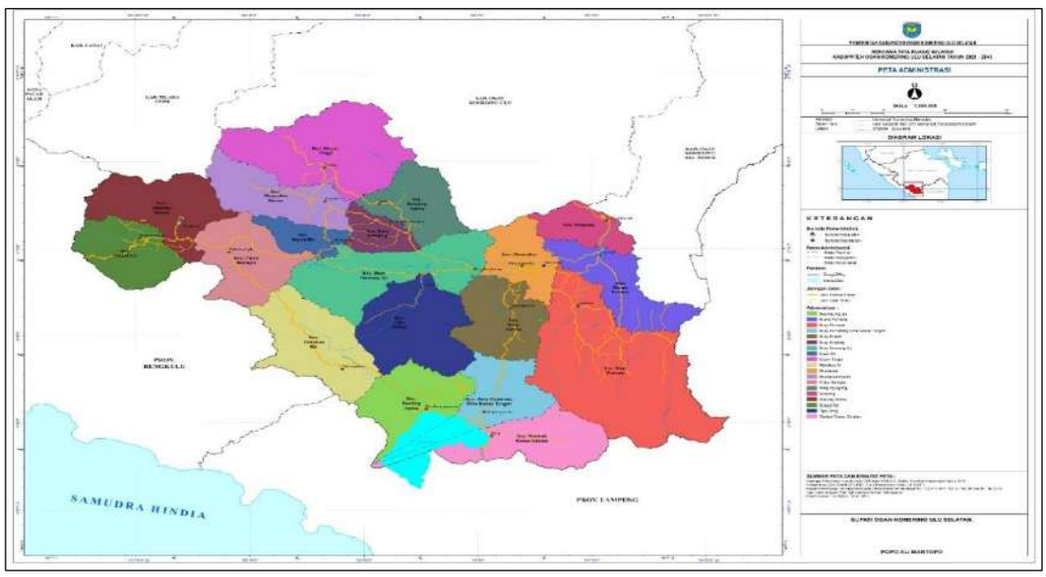

Gambar II.1
Peta Administrasi Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
Sumber: Perda Nomor 3 Tahun 2021 tentang RTRW Kabupaten OKU Selatan Tahun 2021-2040

2.1.1.2.1. Jenis Tanah

Dilihat dari jenis tanahnya secara garis besar, jenis tanah di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan meliputi Jenis Tanah Andosol, Podsolik, Latosol, Regosol, dan Renzina. Di mana jenis tanah tersebut memiliki sifat-sifat tertentu yang dapat menjadi suatu potensi maupun kendala dalam pemanfaatan lahan tertentu. Berikut adalah sifat-sifat tanah berdasarkan jenis tanahnya di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, adalah:

- Tanah Andosol, jenis tanah ini umumnya berwarna hitam, memiliki penampang yang berkembang, dengan horizon-A yang tebal, gembur dan kaya bahan organik. Sifat fisiknya baik, dengan kelulusan sedang. Sifat kimia sedang, peka terhadap erosi. Batuan asal adalah andesit, tufa andesit dan dasit. Di wilayah Indonesia pada umumnya, jenis tanah ini banyak terpakai untuk tanaman perdagangan karena kaya akan bahan organik, N dan K, tetapi miskin akan fosfor.
- Tanah Latosol, jenis tanah ini biasa disebut “laterit”. Penampang umumnya tebal, tanah atasnya mengandung beberapa persen bahan organik. Berwarna coklat, kuning, hingga kemerahan. Bersifat berbutir, teguh, mantap, mengandung kaolinit, bersifat tidak plastis, dan dapat diolah pertanian sepanjang tahun. Secara kimia tanah, jenis tanah ini miskin hara, pH rendah (4,5-5,0), unsur N miskin sehingga perlu pemupukan sempurna untuk pertanian. Jenis tanah ini bersifat meniris, tahan terhadap erosi. Jenis tanah ini cocok untuk tanaman sayur-sayuran, buah-buahan, kebun karet, lada dan tegalan.
- Tanah Podsolik, jenis tanah ini bersifat gembur dan mempunyai perkembangan penampang. Cenderung tidak seberapa mantap dan teguh, peka terhadap pengikisan. Dari segi kimia, jenis tanah ini asam dan miskin, lebih asam dan lebih miskin dari tanah latosol. Untuk keperluan pertanian, jenis tanah ini perlu pemupukan lengkap dan tindak pengawetan. Untuk jenis tanah podsolik coklat biasanya dipakai untuk hutan lindung. Podsolik merah kuning cocok untuk persawahan, perladangan dan perkebunan Karet, Kopi dan Kelapa Sawit dengan perlakuan tambahan.
- Tanah Regosol, jenis tanah ini terbentuk dari bahan induk abu dan pasir vulkan intermedier. Bentuk wilayahnya berombak sampai bergunung. Tanah Regosol belum jelas menempatkan perbedaan horizon-horizon. tanah ini biasanya kasar, tanpa ada struktur tanah, konsistensi lepas sampai gembur dan keasaman tanah dengan pH sekitar 6-7. Dengan begitu, jenis tanah ini kurang baik untuk pertanian.

Tabel II.2

Jenis Tanah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan

No.	Jenis Tanah	Lokasi (Kecamatan)
1.	Aluvial Gleik	Buana Pemaca, Buay Pemaca, Buay Rawan, Buay Runjung, Buay Sandang Aji, Kisam Ilir, Mekakau Ilir, Muaradua, Pulau Beringin,
2.	Andosol Distrik	Buay Pemaca, Warkuk Ranau Selatan
3.	Andosol Eutrik	Sungai Are
4.	Andosol Litik	Buana Pemaca, Buay Pemaca, Buay Pematang Ribu Ranau Tengah, Kisam Ilir, Mekakau Ilir, Muaradua Kisam, Sindang Danau, Sungai Are, Warkuk Ranau Selatan
5.	Andosol Umbrik	Buana Pemaca, Buay Pemaca, Buay Pematang Ribu Ranau Tengah, Sindang Danau, Sungai Are, Warkuk Ranau Selatan
6.	Gleisol Distrik	Banding Agung, Buana Pemaca, Buay Pemaca, Buay Pematang Ribu Ranau Tengah, Buay Runjung, Buay Sandang Aji, Kisam Ilir, Kisam Tinggi, Mekakau Ilir, Muaradua, Pulau Beringin, Simpang, Sindang Danau, Sungai Are, Warkuk Ranau Selatan
7.	Gleisol Fluvik	Buana Pemaca
8.	Kambisol Distrik	Banding Agung, Buana Pemaca, Buay Pemaca, Buay Pematang Ribu Ranau Tengah, Buay Rawan, Buay Runjung, Buay Sandang Aji, Kisam Ilir, Kisam Tinggi Mekakau Ilir, Muaradua, Muaradua Kisam, Pulau Beringin, Runjung Agung, Simpang, Sindang Danau, Sungai Are, Tiga Dihaji, Warkuk Ranau Selatan
9.	Kambisol Eutrik	Banding Agung, Buana Pemaca, Buay Pemaca, Buay Pematang Ribu Ranau Tengah, Buay Rawan, Buay Runjung, Buay Sandang Aji, Kisam Tinggi, Mekakau Ilir, Muaradua, Pulau Beringin, Runjung Agung, Sindang Danau, Tiga Dihaji, Warkuk Ranau Selatan
10.	Kambisol Gleik	Tengah, Buay Rawan, Buay Runjung, Buay Sandang Aji, Kisam Tinggi, Mekakau Ilir Muaradua, Muaradua Kisam, Pulau Beringin, Runjung Agung, Simpang, Tiga Dihaji, Warkuk Ranau Selatan
11.	Kambisol Litik	Banding Agung, Buana Pemaca, Buay Pemaca, Buay Pematang Ribu Ranau Tengah, Buay Rawan, Buay Runjung, Buay Sandang Aji, Kisam Ilir, Kisam Tinggi, Mekakau Ilir, Muaradua, Muaradua Kisam, Pulau Beringin, Runjung Agung, Simpang, Sindang Danau, Sungai Are, Tiga Dihaji
12.	Kambisol Oksik	Buay Sandang Aji, Kisam Ilir
13.	Litosol	Buay Pemaca
14.	Regosol Distrik	Buana Pemaca, Buay Sandang Aji, Muaradua, Simpang
15.	Regosol Eutrik	Pulau Beringi
16.	Singkapan Batuan	Banding Agung, Buay Pemaca, Buay Pematang Ribu Ranau Tengah, Buay Sandang Aji, Kisam Ilir, Kisam Tinggi, Mekakau Ilir, Muaradua Kisam, Pulau Beringin, Sindang Danau, Sungai Are, Tiga Dihaji, Warkuk Ranau Selatan

Sumber: Perda No. 3 Tahun 2021 tentang RTRW Kabupaten OKU Selatan Tahun 2021-2040

2.1.1.2.2. Klimatologi

Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan memiliki iklim tropis dan basah, dengan variasi curah hujan tahunan antara 2500-3000 mm/th dan 3000-3500 mm/th. Berdasarkan kondisi curah hujan tahunan tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa tingkat curah hujan di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tergolong cukup tinggi. Secara umum wilayah dengan curah hujan tinggi akan mempunyai cadangan air hujan yang tinggi pula, yang dapat diatur untuk berbagai keperluan seperti waduk, irigasi, air minum, dan keperluan sehari-hari, pengisian air tanah, dan sebagainya. Sedangkan dibalik itu air hujan yang berlebihan dapat menimbulkan erosi yang besar, longsoran tebing, banjir bandang, dan banjir (biasanya pengaruh banjir sering terasa di wilayah hilirnya).

2.1.1.2.3. Hidrologi

1. Daerah Aliran Sungai

Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dilalui oleh banyak sungai yang bermuara ke Sungai Komering. Sungai-sungai merupakan potensi untuk pengembangan irigasi guna mendukung kegiatan pengembangan pertanian di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Selain itu juga keberadaan sungai-sungai tersebut berpotensi dimanfaatkan untuk pengambilan sumber air baku (PDAM) untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Sungai-sungai yang ada di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan merupakan Sub-Sub DAS dari Sub DAS Komering, Sub DAS Ogan, Sub DAS Mesuji Hulu, dan Sub DAS Lematang. Di mana Sub DAS tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DAS Musi. Kondisi daerah aliran sungai dapat dilihat pada Tabel II.3 dan Tabel II.4 berikut ini.

Tabel II.3
Nama Sungai dan Panjang Sungai Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan

No.	Nama Sungai	Panjang (km)	No.	Nama Sungai	Panjang (km)
1.	Sungai Saka	60	12.	W. Telema	30
2.	A. Gilas	12	13.	Sungai Keruh	20
3.	A. Selulu	35	14.	Sungai Selabung	44
4.	Sungai Mangama	22	15.	W. Ruos	26
5.	Sungai Pilamasin	15	16.	W. Ngepah	10
6.	Sungai Giham	30	17.	Sungai Mekakau	40
7.	Sungai Tahmi	20	18.	A. Beangtai	15
8.	A. Seliam	9	19.	Sungai Kemu	35
9.	Sungai Furu	15	20.	A. Singau	23
10.	Sungai Imus	40	21.	A. Kisam	50
11.	A. Buyuk	25			

Sumber: Perda No. 3 Tahun 2021 tentang RTRW Kabupaten OKU Selatan Tahun 2021-2040

Tabel II.4

Luas Daerah Aliran Sungai (DAS) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan

No.	Nama Sungai	Luas (ha)	No.	Nama Sungai	Luas (ha)
1.	Sungai Saka	6,000	16.	Sungai Ngepah	1,000
2.	Sungai Gilas	1,200	17.	Sungai Mekakau	4,000
3.	Sungai Selulu	3,500	18.	Seungai Beangtai	1,500
4.	Sungai Mangama	2,200	19.	Sungai Kemu	3,500
5.	Sungai Pilamasin	1,500	20.	Sungai Singau	2,300
6.	Sungai Giham	3,000	21.	Sungai Kisam	5,000
7.	Sungai Tahmi	2,000	22.	Sungai Luas Putih	1,500
8.	Sengai Seliam	9,000	23.	Sungai Luas Besar	2,000
9.	Sungai Furu	1,500	24.	Sungai Are	3,000
10.	Sungai Imus	4,000	25.	Sungai Asahan	1,500
11.	Sungai Buyuk	2,500	26.	Sungai Meleki	2,000
12.	Sungai Telema	3,000	27.	Sungai Singalaga	1,000
13.	Sungai Keruh	2,000	28.	Sungai Limping	1,000
14.	Sungai Selabung	4,400	29.	Sungai Keni	2,000
15.	Sungai Ruos	2,600			

Sumber: Perda No. 3 Tahun 2021 tentang RTRW Kabupaten OKU Selatan Tahun 2021-2040

2. Cekungan Air Tanah

Dalam undang-undang sumber daya air, daerah aliran air tanah disebut Cekungan Air Tanah (CAT) yang didefinisikan sebagai suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbunan, pengaliran dan pelepasan air tanah berlangsung. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau bebatuan di bawah permukaan tanah. Air tanah merupakan salah satu sumberdaya air selain air sungai dan air hujan. Cekungan air tanah berdasarkan KEPRES Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penetapan Cekungan Air Tanah dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 2 Tahun 2017 tentang Cekungan Air Tanah Di Indonesia, terdapat cekungan air tanah di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, meliputi:

1. Daerah Imbuhan Air Tanah untuk CAT Lintas Provinsi adalah:
   a. CAT Muaroduo-Curup, meliputi:
      1) Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu
      2) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan meliputi Buay Runjung, Buay Sandang Aji, Kisam Ilir, Kisam Tinggi, Mekakau Ilir, Muaradua, Muaradua Kisam, Pulau Beringin, Runjung Agung, Simpang, Sindang Danau, Sungai Are, Tiga Dihaji.
   b. CAT Metro-Kotabumi, meliputi:
      1) Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung
      2) Kecamatan Banding Agung, Buana Pemaca, Buay Pemaca, BPR Ranau Tengah, Buay Rawan, Buay Sandang Aji, Muaradua, Tiga Dihaji, Warkuk

Ranau Selatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan.

c. CAT Ranau, meliputi:
   1) Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung
   2) Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung
   3) Kecamatan Banding Agung, BPR Ranau Tengah, Buay Sandang Aji, Mekakau Ilir, Pulau Beringin, Sindang Danau, Tiga Dihaji, dan Warkuk Ranau Selatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan

2. Daerah Imbuhan Air Tanah untuk CAT Baturaja merupakan CAT lintas Kabupaten, meliputi :
   a. Kecamatan Ulu Ogan dan Lengkiti di Kabupaten Ogan Komering Ulu
   b. Kecamatan Buana Pemaca, dan Buay Pemaca, Simpang Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

2.1.1.2.4. Tutupan Lahan

Apabila diamati dari pola tutupan lahan menunjukkan terdapat perkembangan penggunaan lahan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yang mempengaruhi terhadap penataan pola ruang wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan kedepan.

Tabel II.5
Tutupan Lahan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan

No.	Tutupan Lahan	Luas (ha)
1.	Bendungan	1
2.	Danau/Situ	9,798
3.	Hutan Rimba	102,270
4.	Landasan Pacu	3
5.	Pasih/Bukit Pasir Darat	24
6.	Perkebunan/Kebun	230,053
7.	Permukiman dan Tempat Kegiatan	3,741
8.	Rawa	17
9.	Sawah	9,124
10.	Semak Belukar	66,775
11.	Sungai	1,830
12.	Tambak	1
13.	Tegalan/Ladang	14,050
Luas		437,687

Sumber: Perda No. 3 Tahun 2021 tentang RTRW Kabupaten OKU Selatan Tahun 2021-2040

2.1.1.2.5. Penggunaan Lahan

Secara garis besar pola pemanfaatan lahan di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan meliputi kawasan peruntukan lindung dan kawasan

peruntukan budidaya. Di mana sebagian besar pemanfaatannya didominasi oleh kawasan peruntukan budidaya, yaitu seluas 223.286 ha atau sekitar 51,01% dari luas total Kabupaten.

Tabel II.6
Penggunaan Lahan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan

No.	Uraian	Luas (ha)	%
1.	Kawasan Peruntukan Lindung	179,203	40.94
	a. Kawasan hutan lindung	117,963	26.95
	b. Kawasan sempadan sungai	19,804	4.52
	c. Kawasan sempadan danau dan waduk	581	0.13
	d. Kawasan konservasi/suaka margasatwa	40,855	9.33
2.	Kawasan Peruntukan Budidaya	223,286	51.01
	a. Kawasan hutan produksi	17,967	4.10
	- Hutan produksi terbatas	10,247	2.34
	- Hutan produksi tetap	7,720	1.76
	b. Kawasan pertanian	205,319	46.91
	- Kawasan tanaman pangan	27,835	6.36
	- Kawasan hortikultura	29,342	6.70
	- Kawasan perkebunan	148,142	33.85
	Total	**402,849**	**92.04**

Sumber: Perda No. 3 Tahun 2021 tentang RTRW Kabupaten OKU Selatan Tahun 2021-2040

2.1.1.2.6. Wilayah Rawan Bencana

Hasil Kajian Risiko bencana Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2023-2027 diperoleh rekapitulasi bahaya, kerentanan, potensi penduduk terpapar, dan potensi kerugian setiap bencana di tingkat kelurahan. Hasil Kajian Risiko bencana ini memaparkan 7 jenis bahaya bencana yang berpotensi terjadi. Berikut ini rangkuman hasil kajian bahaya dari 7 potensi bahaya Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Tabel II.7

Data Luasan dan Klasifikasi Bahaya

No	Jenis Bahaya	Bahaya			Total Luas (ha)	Kelas
		Luas Bahaya (ha)				
		Rendah	Sedang	Tinggi		
1	Gempa Bumi	84.903,75	154.442,34	188.607,51	427.953,60	Tinggi
2	Banjir	37.416,15	16.017,30	20.097,18	73.530,63	Rendah
3	Tanah Longsor	175.727,34	28.142,82	65.610,90	269.481,06	Tinggi
4	Cuaca Ekstrem	5,40	221.154,48	74.902,23	296.062,11	Tinggi
5	Kebakaran Hutan dan Lahan	39.653,10	380.406,42	-	420.059,52	Sedang
6	Kekeringan	-	435.988,35	-	435.988,35	Sedang
7	Banjir Bandang	30.888,27	20.157,57	7.041,60	58.087,44	Rendah

Sumber: Kajian Risiko Bencana, 2024-2029 dan Hasil Analisis, 2024

Tabel diatas menunjukan nilai indeks dari masing-masing jenis bahaya yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Nilai indeks tersebut menentukan kelas bahaya melalui pengelompokan rendah, sedang, dan tinggi. Secara umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan memiliki kelas bahaya yang tinggi dengan rincian sebagai berikut Kelas bahaya tinggi yaitu bahaya gempabumi, tanah longsor, dan cauca ekstrem. Bahaya dengan tingkat sedang adalah kebakaran hutan dan lahan dan kekeringan, sedangkan bahaya tingkat rendah yaitu banjir dan banjir bandang.

Aspek dari pengkajian risiko juga tidak lepas dari pengajian kerentanan. Pengkajian kerentanan ini didapatkan dari komponen kerentanan sosial, fisik, ekonomi, dan lingkungan menghasilkan potensi penduduk terpapar dan potensi kerugian bencana. Adapun rekapitulasi kajian kerentanan untuk penentuan potensi penduduk terpapar bencana di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.8
Potensi Penduduk Terpapar di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan

No	Jenis Bencana	Jumlah Penduduk Terpapar	Kelompok Rentan			Kelas
			Penduduk Disabilitas	Penduduk Miskin	Kelompok Umur Rentan	
1	Gempa Bumi	83,00	10.449,00	143.360,00	83,00	Tinggi
2	Banjir	158.635,00	23,00	3.239,00	48.195,00	Tinggi
3	Tanah Longsor	97.728,00	35,00	2.440,00	28.823,00	Tinggi
4	Cuaca Ekstrem	432.688,00	45,00	8.815,00	124.883,00	Tinggi
5	Kebakaran Hutan dan Lahan	420.059,34	-	111,42	-	Tinggi
6	Kekeringan	493.383,00	83,00	10.433,00	143.207,00	Tinggi
7	Banjir Bandang	107.109,00	23,00	2.194,00	32.643,00	Tinggi

Sumber: Kajian Risiko Bencana, 2024-2029 dan Hasil Analisis, 2024

Hasil rekapitulasi potensi penduduk terpapar di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan menunjukkan bahwa kelas kerentanan termasuk dalam kategori kerentanan tinggi. Jumlah penduduk terpapar dengan kelompok rentan terbanyak adalah bencana gempabumi, Cuaca Ekstrim, dan Kekeringan. Ketiga bencana ini merupakan bencana yang dapat berpotensi terjadi pada seluruh wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Bencana yang memiliki jumlah penduduk terpapar paling sedikit yaitu tanah longsor, karena bencana ini merupakan wilayah tertentu yang tidak bnayak permukiman. Sementara untuk potensi kerugian fisik, kerugian ekonomi dan potensi kerusakan lingkungan sebagai akibat dari kejadian bencana sebagaimana tergambar pada tabel di bawah ini.

Tabel II.9
Rekapitulasi Potensi Kerugian Fisik, Kerugian Ekonomi dan Potensi Kerusakan Lingkungan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan

Jenis Bahaya	Potensi Kerugian (Juta Rupiah)				Potensi Kerusakan Lingkungan	
	Kerugian Fisik	Kerugian Ekonomi	Jumlah Kerugian	Kelas	Luas (ha)	Kelas
Gempa Bumi	900.113.930,00	196,44	900.114.126,44	Tinggi	56.741,13	Tinggi
Banjir	26.865.080,00	139,66	26.865.219,66	Tinggi	70.151,13	Tinggi
Tanah Longsor	28.518.260,00	13,68	28.518.273,68	Tinggi	254.174,31	
Cuaca Ekstrem	236,32	236,32	472,65	Rendah	112,10	Rendah
Kebakaran Hutan dan Lahan	371.467,89	178,38	371.646,27	Sedang	467,00	Rendah

Jenis Bahaya	Potensi Kerugian (Juta Rupiah)				Potensi Kerusakan Lingkungan	
	Kerugian Fisik	Kerugian Ekonomi	Jumlah Kerugian	Kelas	Luas (ha)	Kelas
Kekeringan	147,26	147,26	294,52	Rendah	-	-
Banjir Bandang	28.089.080,00	12,18	28.089.092,18	Tinggi	56.741,13	Tinggi

Sumber: Kajian Risiko Bencana, 2024-2029 dan Hasil Analisis, 2025

Rekapitulasi potensi kerugian fisik, ekonomi dan lingkungan untuk Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tergolong Tinggi. Kajian Risiko bencana tentunya juga berisi mengenai kapasitas daerah dan Masyarakat yang dimiliki oleh Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Berikut merupakan Indeks Kapasitas Daerah di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2024.

Tabel II.10
Indeks Kapasitas Daerah (IKD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2023

No.	PRIORITAS	INDEKS PRIORITAS	INDEKS KAPASITAS DAERAH	TINGKAT KAPASITAS DAERAH
	Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan	0,88	0,67	Sedang
	Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu	0,80		
	Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik	0,90		
	Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana	0,70		
	Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana	0,27		
	Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	0,71		
	Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana	0,90		

Sumber: IKD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, 2024. Terverifikasi BNPB.

Analisis dalam kajian risiko bencana meliputi analisis potensi bahaya, kerentanan, kapasitas daerah, hingga mengarahkan pada kesimpulan tingkat risiko bencana di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Penentuan bahaya berdasarkan pada kondisi fisik wilayah yang memiliki potensi untuk mengancam penduduk yang tinggal bersinggungan dengan bahaya tertentu. Kajian kerentanan terhadap suatu bencana merupakan potensi kerugian maupun kerusakan yang dapat terjadi bila bencana melanda wilayah dengan ancaman bencana. Penilaian kapasitas merupakan upaya yang dilakukan untuk mengetahui kemampuan masyarakat dan daerah dalam menghadapi bencana.

Ketiganya saling berinteraksi dalam lingkup pemerintahan sehingga menghasilkan risiko bencana di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Berdasarkan hasil Kajian Risiko Bencana (KRB) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2024-2029 dan FGD penentuan prioritas bencana terdapat 7 (tujuh) jenis potensi bahaya yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan meliputi gempabumi, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan,cuaca ekstrem (angin puting beliung), dan banjir bandang. Rangkuman kelas risiko hasil dari pengkajian risiko bencana di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel II.11
Rekapitulasi Kelas Risiko di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan

No	Jenis Bahaya	Kelas Bahaya	Kelas Kerentanan	Kelas Kapasitas	Kelas Risiko
1	Gempa Bumi	Tinggi	Sedang	Sedang	Sedang
2	Banjir	Rendah	Sedang	Sedang	Rendah
3	Tanah Longsor	Tinggi	Sedang	Sedang	Tinggi
4	Cuaca Ekstrem	Tinggi	Sedang	Sedang	Sedang
5	Kebakaran Hutan dan Lahan	Sedang	Sedang	Rendah	Sedang
6	Kekeringan	Sedang	Sedang	Rendah	Sedang
7	Banjir Bandang	Rendah	Sedang	Rendah	Rendah

Sumber: Kajian Risiko Bencana, 2024-2029 dan Hasil Analisis, 2024

Berdasarkan rekapitulasi kelas risiko bencana di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan seluruh ancaman bencana masuk dalam kategori **Tinggi**. Tingkat risiko tersebut diperoleh dari penggabungan tingkat bahaya, tingkat kerentanan, dan tingkat kapasitas berdasarkan hasil pengkajian risiko bencana di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Sehingga perencanaan yang terkoordinasi dan tersinergi perlu ditingkatkan untuk mengurangi risiko bencana yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan memiliki beberapa kawasan yang memiliki potensi bencana alam. Adapun bencana alam yang rawan terjadi adalah bencana gempa bumi, gerakan tanah/longsor, bencana banjir dan puting beliung. Kawasan potensi bencana alam ini membutuhkan perhatian khusus, agar dalam pengembangan kedepannya pun disertai upaya pengendalian pemanfaatan ruang serta mitigasi bencananya.

Sepanjang tahun 2020 sampai tahun 2024, kejadian bencana tanah longsor dan kebakaran paling banyak terjadi, yaitu sebanyak 162 kejadian. Banjir sebanyak 8 kejadian, angin putting beliung sebanyak 4 kejadian, dan karhutla sebanyak 4 kejadian. Untuk lebih jelasnya data bencana yang terjadi dapat di lihat pada Gambar II.2 berikut ini.

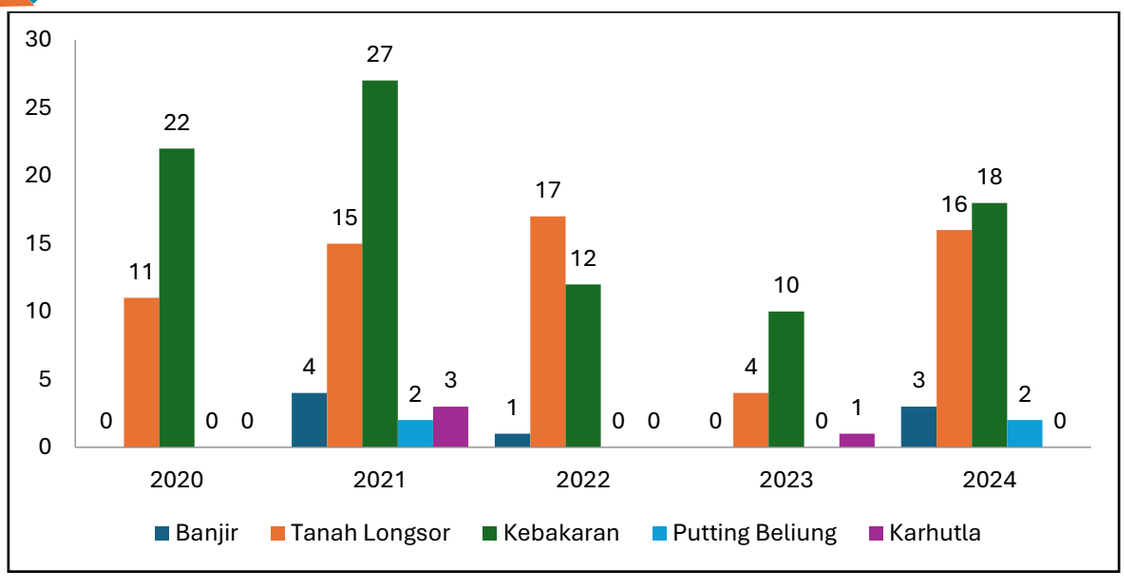

Gambar II.2
Data Bencana Yang Terjadi Di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
Tahun 2020-2024
Sumber: BPBD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, 2025

Berikut ini adalah penjelasan lebih lanjut mengenai kawasan rawan bencana di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

1) Kawasan Rawan Bencana Gerakan Tanah/Longsor

Longsoran merupakan salah satu jenis gerakan massa tanah atau batuan, ataupun percampuran keduanya, menuruni atau keluar lereng akibat dari terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng tersebut. Tanah longsor terjadi karena ada gangguan kestabilan pada tanah/batuan penyusun lereng. Penyebab longsoran dapat dibedakan menjadi penyebab yang berupa:

- Faktor pengontrol gangguan kestabilan lereng.
- Proses pemicu longsoran.

Gangguan kestabilan lereng ini dikontrol oleh kondisi morfologi (terutama kemiringan lereng), kondisi batuan ataupun tanah penyusun lereng dan kondisi hidrologi atau tata air pada lereng. Meskipun suatu lereng rentan atau berpotensi untuk longsor, karena kondisi kemiringan lereng, batuan/tanah dan tata airnya, namun lereng tersebut belum akan longsor atau terganggu kestabilannya tanpa dipicu oleh proses pemicu. Proses pemicu longsoran dapat berupa:

- Peningkatan kandungan air dalam lereng, sehingga terjadi akumulasi air yang merenggangkan ikatan antar butir tanah dan akhirnya mendorong butir-butir tanah untuk longsor. Peningkatan kandungan air ini sering disebabkan oleh meresapnya air hujan, air kolam/selokan yang bocor atau air sawah kedalam lereng.
- Getaran pada lereng akibat gempa bumi ataupun ledakan, penggalian, getaran alat/kendaraan. Gempa bumi pada tanah pasir dengan kandungan air sering

mengakibatkan liquefaction (tanah kehilangan kekuatan geser dan daya dukung, yang diiringi dengan penggenangan tanah oleh air dari bawah tanah).

- Peningkatan beban yang melampaui daya dukung tanah atau kuat geser tanah. Beban yang berlebihan ini dapat berupa beban bangunan ataupun pohon-pohon yang terlalu rimbun dan rapat yang ditanam pada lereng lebih curam dari 40 derajat.
- Pemotongan kaki lereng secara sembarangan yang mengakibatkan lereng kehilangan gaya penyangga.

Dalam peta risiko bencana erosi/longsor yang dirilis Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), beberapa Kecamatan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan berpotensi mengalami bencana longsor, yaitu; Kecamatan Banding Agung, Muaradua, Muaradua Kisam, Pulau Beringin, Simpang, Buay Sandang Aji, Kisam Tinggi dan Mekakau Ilir.

Tabel II.12
Wilayah Potensi Gerakan Tanah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan

No.	Kecamatan	Potensi Gerakan Tanah
1.	Banding Agung	Menengah-Tinggi
2.	Muaradua	Menengah
3.	Muaradua Kisam	Menengah-Tinggi
4.	Pulau Beringin	Menengah-Tinggi

Sumber: Perda Nomor. 3 Tahun 2021 tentang RTRW Kabupaten OKU Selatan Tahun 2021-2040

2) Kawasan Rawan Gempa Bumi

Gempa bumi merupakan peristiwa pelepasan energi yang menyebabkan dislokasi (pergeseran) pada bagian dalam bumi secara tiba-tiba. Penyebab terjadinya gempa bumi.

1. Proses tektonik akibat pergerakan kulit/lempeng bumi
2. Aktivitas sesar di permukaan bumi
3. Pergerakan geomorfologi secara lokal, contohnya terjadi runtuhan tanah
4. Aktivitas gunung api
5. Ledakan Nuklir

Mekanisme perusakan terjadi karena energi getaran gempa dirambatkan ke seluruh bagian bumi. Di permukaan bumi, getaran tersebut dapat menyebabkan kerusakan dan runtuhnya bangunan sehingga dapat menimbulkan korban jiwa. Getaran gempa juga dapat memicu terjadinya tanah longsor, runtuhan batuan, dan kerusakan tanah lainnya yang merusak permukiman penduduk. Gempa bumi juga menyebabkan bencana ikutan berupa kebakaran, kecelakaan industri dan transportasi serta banjir akibat runtuhnya bendungan maupun tanggul penahan lainnya. Posisi geografis Kabupaten Ogan

Komering Ulu Selatan diantara 103°24'22.36"-104°22'8.72" Bujur Timur 4°12'58.36"-4°55'26.97" Lintang Selatan yang dekat dengan jalur sesar aktif Sumatera, menyebabkan daerah ini rawan terhadap gempa tektonik.

Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), seluruh wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan memiliki tingkat resiko bencana gempa bumi yang tinggi apabila dibandingkan dengan wilayah lainnya di Provinsi Sumatera Selatan. Untuk itu, mitigasi bencana untuk mengantisipasi dan menanggulangi bencana gempa bumi pun harus dipersiapkan.

3) Kawasan Rawan Banjir

Potensi bencana alam lainnya yang dimiliki oleh Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan adalah bencana banjir. Kawasan yang rawan terhadap bencana banjir ini terdapat di Kecamatan Simpang dan Kecamatan Buay Sandang Aji. Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), seluruh wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan memiliki tingkat resiko bencana banjir yang rendah apabila dibandingkan dengan wilayah lainnya di Provinsi Sumatera Selatan. Walaupun begitu, mitigasi bencana untuk mengantisipasi dan menanggulangi bencana pun tetap harus dipersiapkan.

4) Kawasan Rawan Puting Beliung

Selain bencana tanah longsor, banjir, dan gempa bumi, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan pun rawan akan bencana angin puting beliung. Beberapa kawasan rawan puting beliung terdapat di Kecamatan Sungai Are, Kisam Tinggi, dan Simpang.

5) Kawasan Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan

Kawasan rawan bencana kebakran hutan dan lahan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan terdapat di Kecamatan Muaradua, Buana Pemaca, Buay Sandang Aji, dan Buay Rawan. Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan telah membentuk Satuan Tugas Siaga Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan, yang mana Satgas ini sebagai motor penggerak dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan khususnya di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

2.1.1.3. Topografi

Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sebagian besar berada pada ketinggian 100-750 m dpl. Ketinggian ini menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan merupakan wilayah yang bergelombang dan berbukit. Sedangkan di bagian barat dan selatan merupakan

wilayah pegunungan (ketinggian 750-1000 m dpl dan >1000 m dpl). Kondisi topografi dapat dilihat pada Tabel II.8 berikut ini.

Tabel II.13
Topografi Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan

No.	Kecamatan	Ketinggian dari Permukaan Laut (Meter Dpl)					
		0-200	200-500	500-750	750-1000	>1000	Jumlah
1.	Muaradua	7,210	6,505	200	22	-	13,937
2.	Pulau Beringin	-	116	3,978	9,449	8,067	13,543
3.	Banding Agung	-	132	17,686	1,683	1,771	19,501
4.	Muaradua Kisam	-	70	6,103	3,498	10,853	9,671
5.	Simpang	5,445	4,746	548	38	-	10,777
6.	Buay Sandang Aji	3,838	21,225	5,571	612	27	31,246
7.	Buay Runjung	21	7,155	932	-	-	8,108
8.	Mekakau Ilir	-	5,773	14,483	4,330	2,899	24,586
9.	Buay Pemaca	5,199	30,026	15,234	6,899	6,516	57,358
10.	Kisam Tinggi	-	3,465	13,624	13,282	8,728	30,371
11.	Kisam Ilir	-	1,609	2,711	1,597	1,830	5,917
12.	BPR Ranau Tengah	-	3,918	12,830	2,244	1,345	18,992
13.	Warkuk Ranau Selatan	-	-	6,148	6,466	11,514	12,614
14.	Runjung Agung	43	15,135	1,717	59	-	16,954
15.	Sungai Are	-	749	6,845	7,525	3,219	15,119
16.	Sindang Danau	-	-	463	5,707	17,887	6,170
17.	Buana Pemaca	10,458	8,960	-	-	-	19,418
18.	Tiga Dihaji	882	19,906	7,386	294	15	28,468
19.	Buay Rawan	2,786	17,354	126	-	-	20,266
Jumlah		35,882	146,844	116,585	63,705	74,671	437,687

Sumber: Perda No. 3 Tahun 2021 tentang RTRW Kabupaten OKU Selatan Tahun 2021-2040

Dilihat dari faktor kemiringan lereng, wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan memiliki kemiringan lereng yang cukup bervariasi yaitu sebagai berikut:

- Kemiringan lereng antara 0-5%, menunjukkan daerah dengan kemiringan landai. Wilayah dengan kemiringan ini masih dapat digunakan untuk pembangunan berbagai sumber daya buatan kecuali untuk lapangan terbang dan jalan kereta api.
- Kemiringan lereng antara 5-15%, menunjukkan daerah yang cukup miring. Wilayah dengan kemiringan ini masih memiliki kemampuan untuk pembangunan rekreasi umum, bangunan terstruktur, pembangunan daerah perkotaan, perumahan konvensional, jalan umum, dan kurang baik untuk pembangunan sistem septik tank, jalan raya, lapangan terbang, dan jalan kereta api.

- Kemiringan lereng 15-25%, menunjukkan daerah yang dengan kemiringan terjal. Kemiringan lereng dengan kemiringan ini apabila mempunyai tutupan lahan hutan dapat dikategorikan sebagai kawasan.
- Kemiringan lereng 25-40%, menunjukkan daerah dengan kemiringan sangat terjal. Pada daerah ini harus sudah diklasifikasikan sebagai kawasan lindung.
- Kemiringan lereng >40 menunjukkan daerah dengan fungsi sebagai kawasan lindung.

2.1.1.4. Morfologi Wilayah

Morfologi wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan secara umum terbagi menjadi tiga kelompok yaitu morfologi dataran/landai, bukit/perbukitan (bergelombang rendah-sedang) dan gunung/pegunungan (perbukitan terjal). Morfologi dataran rendah umumnya terdapat di daerah bagian tengah wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Morfologi perbukitan bergelombang rendah-sedang sebagian besar menempati daerah bagian barat Kabupaten. Wilayah perbukitan dan pegunungan terletak di bagian utara dan selatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

2.1.1.5. Geologi

Secara geologis wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan terbentuk pada zaman tersier dan kwarter oleh batuan granit, tufa andesit dan formasi andesit tua. Dari susunan batuan-batuan tersebut terkandung berbagai macam kekayaan alam yang potensial antara lain batubara, batu marmer, minyak bumi, batu kapur, emas, nikel, besi, intan, pasir, koral, dan lain-lainnya. Berdasarkan kondisi geologinya, jenis batuan di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dapat dilihat pada Tabel II.9 berikut ini.

Tabel II.14
Geologi Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan

No.	Kecamatan	Aluvium	Andesit Tua	Formasi Lahat Anggota Tufa Kikim	Formasi Palembang Anggota Bawah	Formasi Palembang Anggota Tengah	Tufa Ranau
1.	Banding Agung	0.00	0.00	64,738.06	0.00	0.00	22,167.94
2.	Mekakau Ilir						15,820.93
3.	Pulau Beringin						22,185.24
4.	Muaradua						551.04
5.	Kisam Tinggi	0.00	3,600.71	36,966.14	0.00	0.00	1,133.16
6.	Muaradua						20,506.96
7.	Buay Sandang						29,972.29
8.	Buay Runjung						2,184.97
9.	Simpang						22,015.38

No.	Kecamatan	Aluvium	Andesit Tua	Formasi Lahat Anggota Tufa Kikim	Formasi Palembang Anggota Bawah	Formasi Palembang Anggota Tengah	Tufa Ranau
10.	Buay Pemaca	0.00	0.00	31,725.36	0.00	3,449.62	36,277.02
Jumlah		**5,155.79**	**28,280.87**	**303,749.44**	**17,765.85**	**23,627.11**	**172,814.94**

Sumber: Perda No. 3 Tahun 2021 tentang RTRW Kabupaten OKU Selatan Tahun 2021-2040

2.1.2. Potensi Sumber Daya Alam

2.1.2.1. Produksi Sektor Pertanian

Produksi sektor pertanian secara umummengalami mengalami penurunan pada jenis barang lainnya. Beberapa yang mengalami penurunan produksi seperti Jagung, Padi, maupun Duku yang merupakan buah-buahan. Namun terdapat juga jenis barang yang mengalami peningkatan produksi seperti Alpukat, Ketela Rambat, Pepaya dan Pisang.

Tabel II.15
Produksi Tanaman Pangan (ton)
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020-2024

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Padi	194,779.62	202.416,960	182.447,34	80.415,36	60.701,90
2.	Jagung	365,193.40	410.242,31	427.188,60	382.283,72	343.320,12
3.	Ketela Pohon	1,238.04	1.408,50	375,60	419,90	352,17
4.	Ketela Rambat	139.68	245,30	326,20	57,64	629,76
5.	Kedelai	194.40	-	-	-	-
6.	Kacang Hijau	1.25	-	-	4,98	-

Sumber: Dinas Pertanian, Tahun 2025

Tabel II.16
Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya per hektar (Ton/Ha)
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020-2024

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Provitas Padi (ton/ha)	4,50	4,74	4,74	5,76	5,95
2.	Provitas Jagung (ton/ha)	7,00	7,17	7,17	6,49	6,27
3.	Provitas Kedelai (ton/ha)	-	-	-	-	-

Sumber: Dinas Pertanian, Tahun 2025

Tabel II.17
Produksi Sayur-Sayuran (ton)
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020-2024

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Bawang Daun	1,844	1.336,60	2.484,00	3.881,00	2.791,00
2.	Kentang	-	-	-	-	-
3.	Kubis	1,954	7.400,00	2.280,00	4.557,00	3.733,00
4.	Petsai/Sawi	1,611	2.202,00	2.300,00	4.000,00	4.142,50

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
5.	Kacang Merah	563	310,00	800,00	701,00	350,00
6.	Kacang Panjang	1,352	1.633,00	1.070,00	1.085,00	1.061,00
7.	Cabe Besar	12,924	1.084,00	6.863,00	8.121,00	8.132,50
8.	Cabe Rawit	15,443	1.060,00	6.522,00	9.000,00	8.107,50

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Tahun 2025

Tabel II.18
Provitas Sayur-Sayuran
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020-2024

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Provitas cabe (ton/ha)	10.29	6,19	37,09	46,40	40,66
2.	Provitas bawang merah (ton/ha)	3.00	3,10	3,50	3,52	3,52

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Tahun 2025

Tabel II.19
Produksi Buah-Buahan (ton)
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020-2024

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Alpukat	6,014	3.019,80	7.173,00	3.486,60	6.250,00
2.	Duku	9,190	10.685,00	30.000,00	25.010,00	23.523,00
3.	Durian	1,979	8.390,00	1.200,00	1.430,50	3.565,10
4.	Jeruk	15,111	175,15	200,00	224,10	562,50
5.	Mangga	15,630	124,66	614,30	210,30	321,20
6.	Nangka	164	-	-	-	-
7.	Pepaya	7,464	3.985,00	2.228,80	3.000,00	6.927,00
8.	Pisang	632.63	6.280,50	2.776,40	3.754,70	4.657,80

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Tahun 2025

Tabel II.20
Provitas Buah-Buahan
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020-2024

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Provitas Pisang (ton/ha)	48,05	48,30	41,45	47,54	38,50
2.	Provitas Alpukat (ton/ha)	50,10	50,33	14,34	58,11	49,48
3.	Provitas Durian (ton/ha)	5,24	5,54	5,01	6,32	14,99
4.	Provitas Duku (ton/ha)	6,85	7,01	8,51	7,42	10,00

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Tahun 2025

Populasi ternak secara umum juga mengalami penurunan di mana pada tahun 2020 populasi Sapi 13.840 ekor menjadi 7,119 ekor ditahun 2024. Selain itu, seluruh populasi ternak juga mengalami penurunan termasuk Kerbau, Domba maupun Kambing.

Tabel II.21
Populasi Ternak (ekor)
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020-2024

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Sapi	13.840	16,746	13,760	10,724	7,119
2.	Kerbau	370	448	215	79	18

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
3.	Domba	67	20	42	61	121
4.	Kambing	31.857	42,018	36,910	33,567	34,869

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Tahun 2025

2.1.2.2. Produksi Sektor Perkebunan

Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan merupakan penghasil Kopi Robusta terbesar di Sumatera Selatan dengan luas tanaman Kopi mencapai 70.799 ha, dengan produksi 50,85 ribu ton yang tersebar di 19 Kecamatan yang kesemuanya diusahakan oleh rakyat/perkebunan rakyat. Tanaman Kopi merupakan komoditi unggulan dengan rata-rata produksi 0,69 ton/ha. Beberapa faktor penyebab masih sangat rendahnya produksi diantaranya belum optimalnya pengembangan dan pemasaran hasil Kopi rakyat, kualitas SDM yang belum merata untuk mendukung usaha perkebunan dan hama penyakit.

Daerah ini sangat potensial untuk tanaman kopi karena didukung oleh iklim yang cocok untuk tumbuhnya tanaman tersebut. Tanaman ini tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, terutama di Kecamatan Banding Agung, Buay Pemaca, Muaradua Kisam, Kisam Tinggi, dan Pulau Beringin. Selain kopi, tanaman perkebunan yang banyak diusahakan oleh rakyat di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, yaitu tanaman karet, kakao, lada, dan beberapa komoditi lainnya. Perkembangan produksi perkebunan periode tahun 2020-2024 disajikan pada Tabel II.17 berikut ini.

Tabel II.22
Produksi Perkebunan (ton)
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020-2024

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Kopi Robusta	50,854.44	62.463,55	62.297,04	61.616,24	65.436,00
2.	Karet	3,481.50	3.439,70	34.02,30	3.114,10	3.190,00
3.	Kakao	554.40	477	478,00	486,60	488,40
4.	Lada	2,749.75	2.952,90	2.941,00	2.770,78	2.875,55
5.	Tembakau	26.40	4,80	4,20	4,20	4,20

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Tahun 2025

2.1.2.3. Potensi Pariwisata

Untuk menunjang perkembangannya suatu daerah tentunya diperlukan adanya tempat wisata yang dapat menarik wisatawan baik wisatawan nusanatara maupun wisatawan mancanegara, yang akhirnya dapat menambah pendapatan asli daerah. Oleh karena itu, objek wisata perlu dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang baik. Objek wisata yang sudah populer di masyarakat (objek wisata utama) yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yaitu Danau Ranau.

Danau Ranau merupakan danau terbesar dan terindah di Sumatera Selatan yang terletak di Kecamatan Banding Agung, BPR Ranau Tengah, dan Warkuk Ranau Selatan. Berjarak sekitar 342 km dari kota Palembang, 130 km dari Kota Baturaja dan 50 km dari Kota Muaradua. Sementara dari Bandar Lampung, danau ini dapat ditempuh melalui Bukit Kemuning dan Liwa. Danau Ranau ini mempunyai luas sekitar 8 x 16 km dengan latar belakang Gunung Seminung, dikelilingi oleh bukit dan lembah dengan udara yang sejuk.

Tabel II.23
Potensi dan Objek Wisata
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan

No.	Nama Objek Wisata	Tempat/ (Kecamatan)	Jarak Dari Ibukota Kabupaten (km)
1.	Danau Ranau	Banding Agung	50
2.	Air Panas Gunung Seminung	Banding Agung	55
3.	Air Terjun Subik Tuha	Banding Agung	65
4.	Air Terjun La'ai	Banding Agung	65
5.	Gunung Seminung	Banding Agung	65
6.	Makam Pahit Lidah	Banding Agung	50
7.	Pantai Senangkalan	Banding Agung	55
8.	Pulau Marisa	Banding Agung	50
9.	Goa Kubu Manuk	Banding Agung	55
10.	Goa Kubu Rawong	Banding Agung	55
11.	Batu Bersusun	Banding Agung	50
12.	Batu Kursi	Banding Agung	50
13.	Danau Rakihan	Sindang Danau	75
14.	Air Panas Jelijih	Sindang Danau	75
15.	Air Terjun Chuhup Tinggi	Pulau Beringin	75
16.	Danau Halim	Muaradua	17
17.	Air Terjun Manduriang	BPR Ranau Tengah	27
18.	Air Terjun Lumai	Buay Rawan	17
19.	Air Terjun Mehanggin	Muaradua	10
20.	Air Terjun Kabayan	Buay Sandang Aji	10
21.	Air Terjun Selundong	Buay Sandang Aji	10
22.	Makam Suka Banjar	Buay Sandang Aji	10
23.	Air Terjun Papan	Buay Runjung	35
24.	Goa Burung Walet	Buay Runjung	35
25.	Air Terjun Tanjung Besar	Mekakau Ilir	71

Sumber; Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Tahun 2025

2.1.3. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

2.1.3.1. Potensi Air

Daya dukung air mengacu pada kemampuan lingkungan menyediakan air untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia secara berkelanjutan. Pada tahun 2024, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan memiliki ketersediaan air sebesar

4,58 miliar m³ per tahun dengan kebutuhan air masyarakat sebesar 1,69 miliar m³ per tahun. Hal ini menunjukkan bahwa daya dukung air masih dalam kondisi sangat baik, dengan cadangan air mencapai 2,88 miliar m³. Surplus ini menunjukkan bahwa lingkungan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan masih mampu mendukung kehidupan masyarakat dan kegiatan pembangunan secara berkelanjutan. Ke depan, pemanfaatan air yang bijak perlu dipertahankan agar daya tampung lingkungan tidak menurun akibat pencemaran atau eksploitasi berlebih.

Tabel II.24
Daya Dukung dan Daya Tampung Air Menurut
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2024

Kabupaten	Luas Wilayah (ha)	Jumlah Populasi (Jiwa)	Ketersediaan Air	Kebutuhan Air (m3/tahun)	Cadangan Air (m3/tahun)
OKU Selatan	437,687	406.938	4.581.573.091,32	1.697.528.338,89	2.884.044.752,42

Sumber: Laporan Akhir KLHS RPJMD Kabupaten OKU Selatan

Secara umum, kondisi air di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan pada tahun 2024 masih sangat baik. Diketahui bahwa dari total 437,687 hektar wilayah yang dianalisis, sebanyak 431.539,31 hektar (98,47%) masih berada dalam status belum terlampaui. Hampir seluruh wilayah masih memiliki air yang cukup dan bersih untuk mendukung kehidupan masyarakat dan lingkungan. Namun, terdapat 6.697,33 hektar (1,53%) wilayah yang telah mengalami tekanan daya dukung atau daya tampung air, yang menandakan sudah mulai mengalami tekanan, dan ini perlu dijaga serta diperhatikan ke depan, agar tidak semakin meluas.

Tabel II.25
Status Air di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2024

Kabupaten	Status DDDT Air (ha)		Total Keseluruhan
	Belum Terlampaui	Terlampaui	
OKU Selatan	431,539.31	6,697.33	438,236.64

Sumber: Laporan Akhir KLHS RPJMD Kabupaten OKU Selatan

Berdasarkan proyeksi daya dukung dan daya tampung air Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tahun 2045, diketahui bahwa total kebutuhan air diperkirakan mencapai 1,89 miliar m³ per tahun. Sementara itu, ketersediaan air tetap berada pada angka 4,58 miliar m³, sehingga memberikan surplus air sebesar 2,69 miliar m³. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara umum, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan memiliki daya dukung air yang sangat

mencukupi untuk mendukung kebutuhan masyarakat dan pembangunan jangka panjang.

Tabel II.26
Daya Dukung Daya Tampung Air Menurut Kabupaten OKU Selatan
Tahun 2045

Kab	DDDT Air								
	Kebutuhan Air pada Lahan (M3/Tahun)	Kebutuhan Air Domestik	Kebutuhan Air Total (m3/Tahun)	Ketersediaan Air (m3/Tahun)	Selisih (m3/Tahun)	Belum Terlampaui		Terlampaui	
						Luas (Ha)	Luas (%)	Luas (Ha)	Luas (%)
OKU Selatan	1.862.079.952	27.950.314	1.890.030.266	4.581.573.091	2.691.542.825	429.479	98,00%	8.758	2,00 %

Sumber: Laporan Akhir KLHS RPJMD Kabupaten OKU Selatan

Secara spasial, 98% wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan masih berada dalam status belum terlampaui, sedangkan 2% wilayah sudah terlampaui, yang berarti telah mengalami tekanan terhadap sumber daya air. Wilayah-wilayah ini perlu menjadi perhatian dalam penataan ruang, pengelolaan air, serta perlindungan lingkungan hidup untuk menjaga keberlanjutan ekosistem air di masa depan.

2.1.4. Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan

2.1.4.1. Indeks Ketahanan Pangan

Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan menunjukkan tren peningkatan yang stabil dari tahun 2020 hingga 2023. Pada 2020 indeks berada pada angka 73,86 dan terus meningkat menjadi 76,15 tahun 2023, pada tahun 2024 menurun menjadi 75,32. Meskipun ada sedikit penurunan pada tahun 2024 dibandingkan tahun sebelumnya, angka ini tetap menunjukkan adanya perbaikan ketahanan pangan yang signifikan. Peningkatan ini mencerminkan upaya Pemerintah Daerah dalam meningkatkan ketersediaan, distribusi, dan akses pangan, serta memperkuat ketahanan pangan lokal.

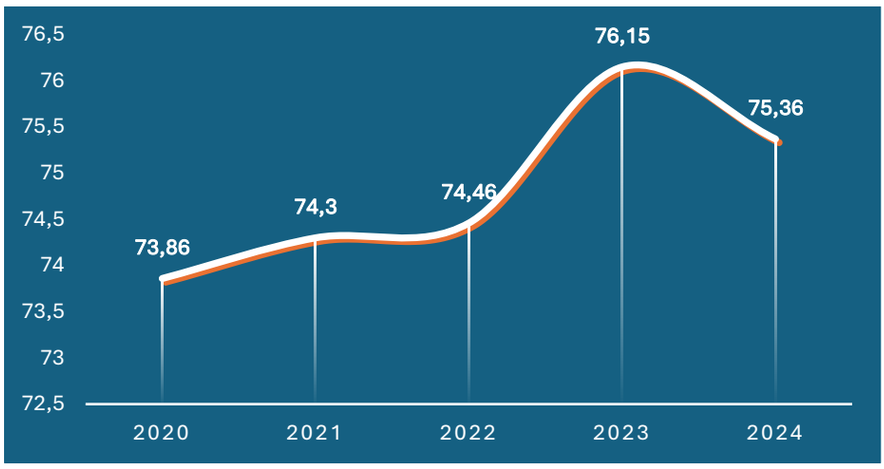

Gambar II.3
Indeks Ketahanan Pangan
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020-2024
Sumber: Badan Pangan Nasional, Tahun 2025

2.1.4.2. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan

Prevalansi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan selama lima tahun terakhir. Meskipun ada kenaikan pada tahun 2022, ada juga penurunan tajam pada tahun 2021 dan sedikit penurunan lagi pada 2023, dan kembali mengalami kenaikan tahun 2024. Hal ini menunjukkan perlunya perhatian dalam mengidentifikasi penyebab fluktuasi untuk merumuskan kebijakan yang tepat guna mengurangi dampak negatif dan memaksimalkan potensi positif di masa depan.

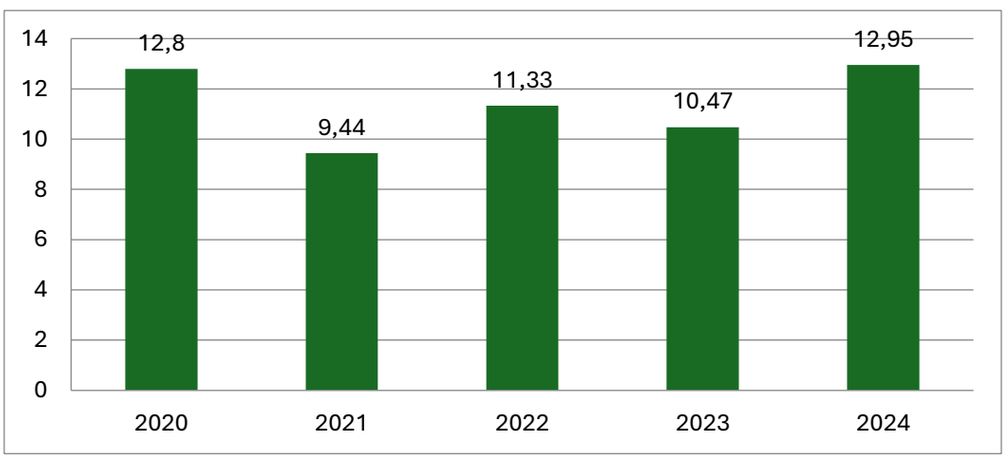

Gambar II.4
Prevalansi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Persen)
di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020-2024
Sumber: Badan Pusat Statistik, Tahun 2025

2.1.4.3. Produksi Listrik

Produksi listrik di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan menunjukkan tren kenaikan yang stabil dari tahun 2019 hingga 2023. Pada 2019, produksi listrik tercatat 71.712.490,59 kWh, dan meningkat secara konsisten hingga mencapai 104.933.099 kWh pada 2023. Peningkatan produksi listrik ini

mencerminkan adanya pertumbuhan kebutuhan listrik yang signifikan, baik dari sektor rumah tangga maupun industri. Kenaikan yang relatif stabil ini juga menunjukkan adanya upaya peningkatan kapasitas produksi energi di daerah tersebut. Meskipun ada penurunan dalam laju pertumbuhannya di tahun 2022 dan 2023, angka tersebut tetap menunjukkan adanya perkembangan positif.

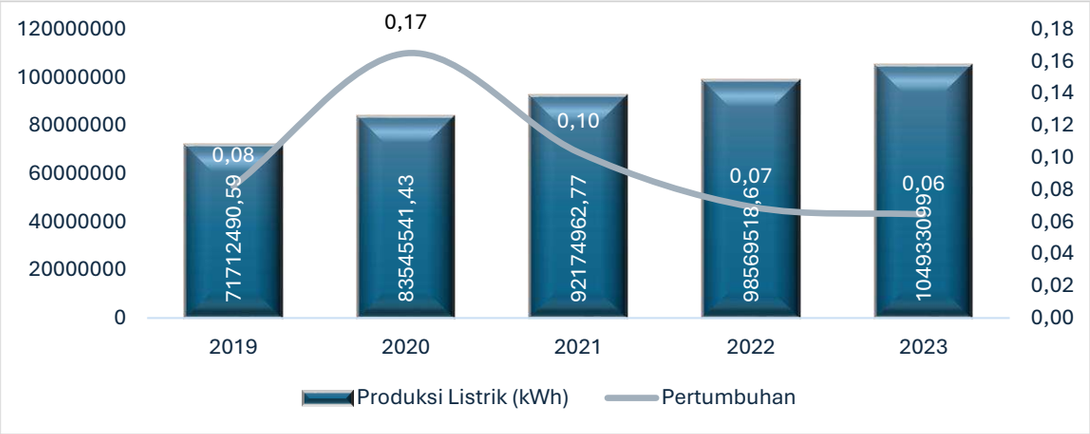

Gambar II.5
Produksi Listrik (kWh) di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020-2023
Sumber: Badan Pusat Statistik, Tahun 2025

2.1.4.4. Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum

Data persentase rumah tangga yang menggunakan sumber air minum bersih di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan menunjukkan fluktuasi yang signifikan. Pada 2020, sekitar 50,20% rumah tangga sudah memiliki akses ke air minum bersih. Namun, pada 2023 terjadi penurunan drastis menjadi hanya 45,16%, yang mungkin disebabkan oleh masalah tertentu seperti gangguan distribusi atau kondisi lainnya. Setelah itu, pada 2023 angka tersebut kembali meningkat menjadi 50,23%, meskipun masih lebih rendah dibandingkan tahun 2021. Pada 2024, persentasenya kembali naik sedikit menjadi 55,35%. Secara keseluruhan, meskipun ada penurunan pada 2022, wilayah ini menunjukkan pemulihan dengan peningkatan yang stabil dalam beberapa tahun terakhir.

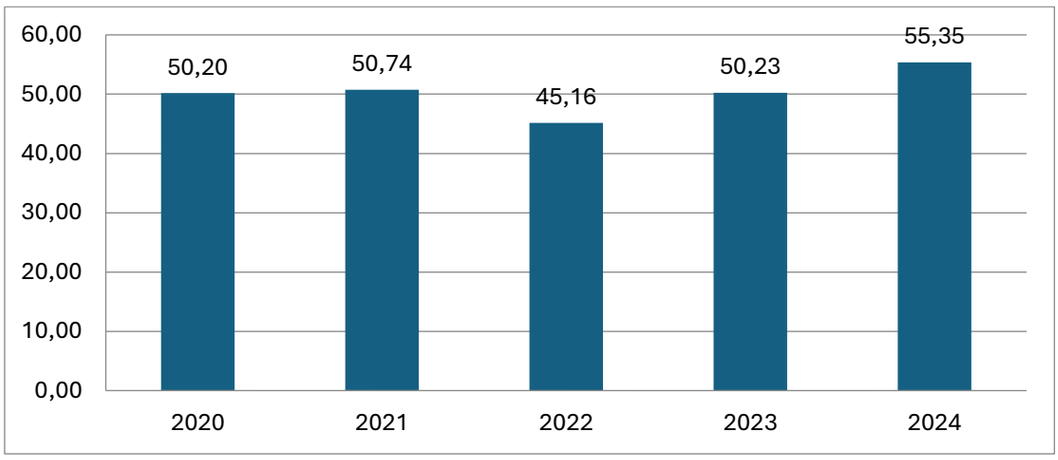

Gambar II.6
Persentase Rumah Tangga Menggunakan Sumber Air Minum Bersih Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020-2024
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan, Tahun 2025

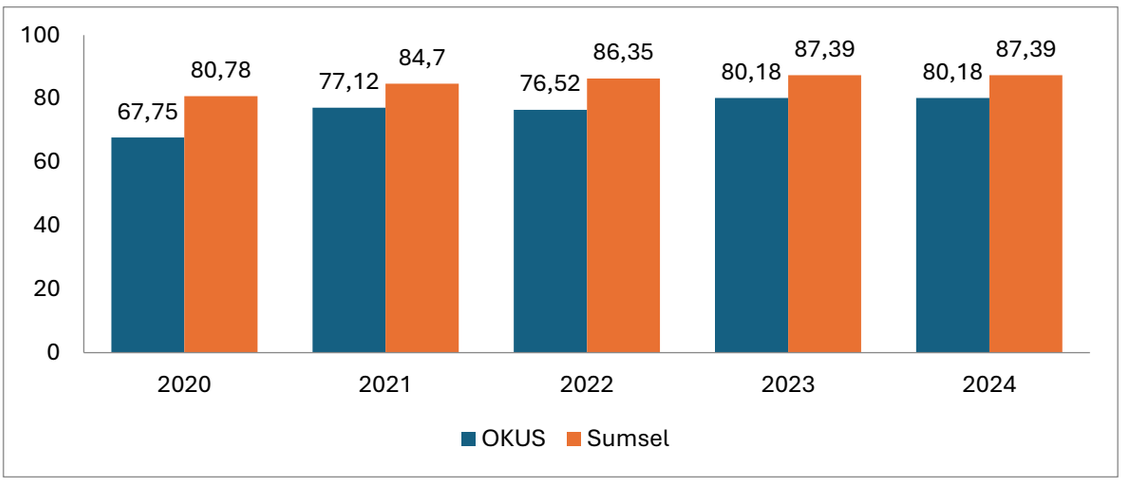

Gambar II.7
Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Air Minum Layak Di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020-2024
Sumber: Badan Pusat Statistik, Tahun 2025

Akses rumah tangga terhadap air minum layak di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan menunjukkan peningkatan yang signifikan selama periode 2020-2024. Persentase rumah tangga yang memiliki akses naik dari 83,26% pada tahun 2020 menjadi 87,15% pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan adanya upaya nyata dalam penyediaan layanan air bersih, meskipun masih berada di bawah rata-rata Provinsi Sumatera Selatan (87,23% pada 2024). Diperlukan percepatan pemerataan akses, terutama di wilayah pedesaan dan pelosok, untuk memastikan terpenuhinya hak dasar masyarakat terhadap air minum layak.

2.1.4.5. Potensi Pangan

Pada tahun 2023 Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan menunjukkan ketersediaan pangan yang sangat baik dengan nilai 93,68, namun terjadi penurunan signifikan pada tahun 2024 menjadi 88,52. Penurunan ini

mengindikasikan adanya tantangan dalam ketersediaan pangan, yang mungkin disebabkan oleh faktor-faktor eksternal seperti perubahan iklim atau gangguan produksi. Meski demikian, indeks keterjangkauan dan pemanfaatan pangan mengalami peningkatan pada tahun 2024, menunjukkan adanya kemajuan dalam akses pangan dan konsumsi yang lebih baik. Penurunan sedikit pada komposit (dari 76,15 menjadi 75,37) mencerminkan pentingnya terus memperkuat ketersediaan pangan guna mendukung ketahanan pangan secara menyeluruh.

Tabel II.27
Data Indeks Ketersediaan, Indeks Keterjangkauan, Indeks Pemanfaatan dan Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020-2024

Tahun	Ketersediaan	Keterjangkauan	Pemanfaatan	Komposit
2020	95,17	75,06	56,99	73,86
2021	95,41	71,55	60,53	74,30
2022	94,46	73,42	60,23	74,46
2023	93.68	76.25	62.93	76.15
2024	88.52	76.57	64.60	75.37

Sumber: Badan Pangan Nasional, Tahun 2025

2.1.5.Lingkungan Hidup Berkualitas

2.1.5.1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Nilai Indeks Kualitas Air (IKA) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2024 didapatkan berdasarkan hasil uji air sungai pada 18 titik pemantauan yang dilakukan dalam 2 (dua) periode ukur (musim kemarau dan musim hujan) oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Hasil perhitungan menunjukkan jika nilai Indeks Kualitas Air (IKA) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2024 sudah memenuhi target dan masuk dalam kategori SEDANG. Pada musim kemarau terpantau hanya lokasi pantau di Sungai Selabung Hulu (Desa Rantau Nipis) yang berstatus CEMAR RINGAN. Sedangkan, pada musim penghujan hampir seluruh lokasi pantau berstatus CEMAR RINGAN, kecuali Sungai Saka (Desa Negeri Agung), Sungai Mekakau Hulu (Desa Pulau Beringin), dan Sungai Mekakau Tengah (Desa Gunung Batu) yang berstatus MEMENUHI Baku Mutu Air Sungai.

Nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2024 didapatkan berdasarkan hasil uji menggunakan metode *Passive Sampler* pada 4 (empat) titik pemantauan yang mewakili zona transportasi, industri, perkantoran dan permukiman dalam 2 (dua) periode ukur (musim kemarau dan musim hujan) oleh Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan, dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Hasil perhitungan

menunjukkan jika nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2024 belum memenuhi target, meskipun secara umum sudah masuk dalam kategori SANGAT BAIK.

Nilai Indeks Kualitas Lahan (IKL) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2024 didapatkan berdasarkan hasil deliniasi terhadap pohon/vegetasi non perkebunan yang memenuhi syarat perhitungan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Hasil perhitungan menunjukkan jika nilai Indeks Kualitas Lahan (IKL) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2024 belum memenuhi target dan masuk ke dalam kategori KURANG. Kurangnya ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan konversi lahan pertanian/perkebunan menjadi faktor utama rendahnya nilai Indeks Kualitas Lahan (IKL) di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan parameter utama yang menggambarkan kondisi lingkungan hidup di lokasi tersebut. Nilai ini juga yang menjadi tolok ukur penilaian terhadap capaian seorang Kepala Daerah dalam pengelolaan dan perlindungan Lingkungan Hidup. Nilai IKLH ini didapat dari perpaduan nilai IKA, IKU dan IKL yang diolah menggunakan metode dan koefisien sesuai peraturan perundang-undangan. Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2024 sudah memenuhi target dan masuk kategori SEDANG.

Tabel II.28
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020-2024

No.	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)		69,51	68,88	66,41	69.35
	- Indeks Kualitas Air (IKA)		65,56	61,85	54.44	60.56
	- Indeks Kulitas Udara (IKU)		89,00	90,89	91.25	92.19
	- Indeks Kualitas Lahan (IKL)		40,27	40,27	41.01	42.15

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Tahun 2025

2.1.5.2. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman

Akses rumah tangga terhadap sanitasi layak dan aman di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam periode 2020-2024. Pada 2020, hanya 53,86% rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak, namun angka ini meningkat menjadi 63,22% pada 2024. Peningkatan ini menunjukkan adanya langkah-langkah penting dalam pembangunan sanitasi yang lebih baik, meskipun masih jauh dari rata-rata

Provinsi Sumatera Selatan yang mencapai 80,54% pada 2023. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memenuhi target sanitasi nasional, masih diperlukan peningkatan infrastruktur sanitasi, khususnya di wilayah pedesaan dan daerah yang lebih terpencil.

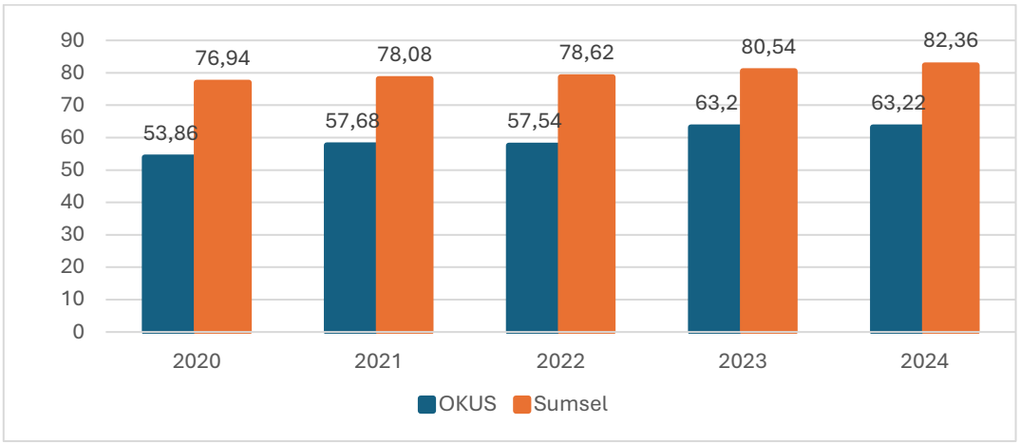

Gambar II.8
Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Sanitasi Layak dan Aman di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020-2024
Sumber: Badan Pusat Statistik, Tahun 2025

2.1.6.Resilensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

2.1.6.1. Indeks Risiko Bencana

Indeks risiko bencana menunjukkan adanya fluktuasi signifikan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan antara tahun 2020 hingga 2024. Risiko bencana di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tetap relatif tinggi dengan nilai indeks risiko bencana yang bervariasi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya mitigasi atau perubahan kondisi yang positif, wilayah ini masih perlu fokus lebih pada perencanaan dan pengurangan risiko bencana agar dapat mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh bencana di masa depan.

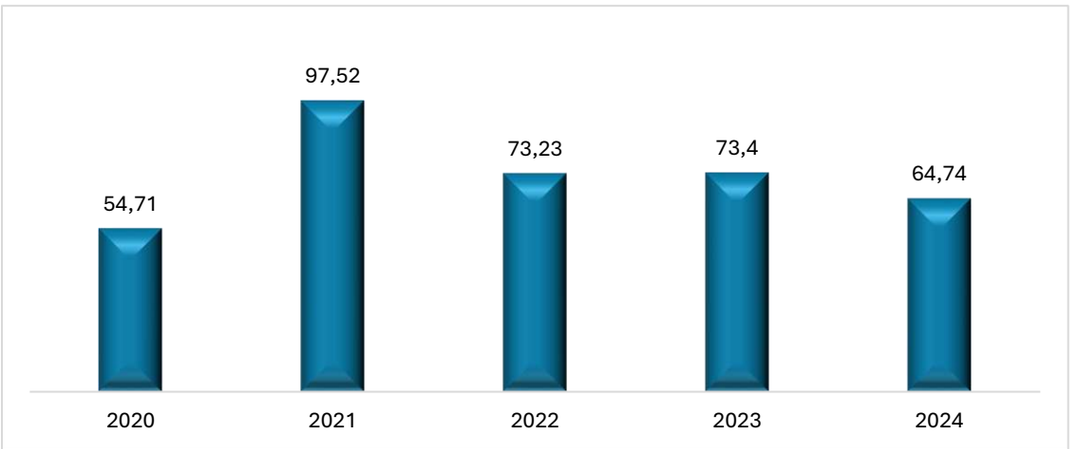

Gambar II.9
Indeks Risiko Bencana Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020-2024
Sumber: https://inarisk.bnpb.go.id/irbi

2.1.7.Demografi

2.1.7.1. Jumlah Penduduk, Kepadatan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin

Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2024 memiliki jumlah penduduk sebesar 406.938 jiwa yang tersebar di 19 Kecamatan. Sebaran penduduk tidak merata, dengan konsentrasi tertinggi di Kecamatan Muaradua (12,44%), Kecamagan Buay Pemaca (10,84%), dan Kecamatan Pulau Beringin (7,37%), sedangkan Kecamatan Kisam Ilir dan Kecamatan Tiga Dihaji hanya menyumbang kurang dari 2,5% dari total penduduk.

Tabel II.29
Jumlah Penduduk (Jiwa)
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020-2024

No.	Kecamatan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Mekakau Ilir	23.917	24.461	25.152	24.692	23.958
2.	Banding Agung	25.955	26.631	27.472	26.940	26.205
3.	Warkuk Ranau Selatan	25.032	25.371	25.852	25.275	24.254
4.	BPR Ranau Tengah	25.972	26.558	27.303	26.928	25.905
5.	Buay Pemaca	44.880	45.365	46.101	45.936	44.123
6.	Simpang	18.086	18.529	19.086	19.227	18.853
7.	Buana Pemaca	15.907	16.235	16.658	17.120	16.859
8.	Muaradua	50.076	50.929	52.077	51.692	50.628
9.	Buay Rawan	18.767	19.420	20.203	20.264	20.107
10.	Buay Sandang Aji	21.334	21.793	22.380	22.018	20.842
11.	Tiga Dihaji	11.046	11.197	11.411	10.795	10.131
12.	Buay Runjung	12.811	13.086	13.439	13.091	12.391
13.	Runjung Agung	13.978	14.222	14.549	13.655	12.933
14.	Kisam Tinggi	19.820	19.967	20.222	19.646	18.687
15.	Muaradua Kisam	20.144	20.405	20.780	20.389	19.852
16.	Kisam Ilir	7.963	8.016	8.112	8.456	8.041
17.	Pulau Beringin	30.375	31.087	31.986	31.151	29.995
18.	Sindang Danau	11.408	11.660	11.981	11.739	11.544
19.	Sungai Are	11.510	11.684	11.923	11.990	11.630
Jumlah		**408.981**	**416.616**	**426.687**	**421.004**	**406.938**

Sumber: BPS Kabupaten OKU Selatan, Tahun 2025

Tabel II.30
Laju Pertumbuhan Penduduk
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020-2024

No.	Kecamatan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Mekakau Ilir	19,17	2,27	2,82	-1,83	-2,97
2.	Banding Agung	22,12	2,60	3,16	-1,94	-2,73
3.	Warkuk Ranau Selatan	8,20	1,35	1,90	-2,23	-4,04
4.	BPR Ranau Tengah	17,76	2,26	2,81	-1,37	-3,80
5.	Buay Pemaca	2,66	1,08	1,62	-0,36	-3,95
6.	Simpang	23,82	2,45	3,01	0,74	-1,95
7.	Buana Pemaca	19,84	2,06	2,61	2,77	-1,52
8.	Muaradua	4,65	1,70	2,25	-0,74	-2,06
9.	Buay Rawan	39,10	3,48	4,03	0,30	-0,77

No.	Kecamatan	2020	2021	2022	2023	2024
10.	Buay Sandang Aji	16,75	2,15	2,69	-1,62	-5,34
11.	Tiga Dihaji	12,50	1,37	1,91	-5,40	-6,15
12.	Buay Runjung	20,03	2,15	2,70	-2,59	-5,35
13.	Runjung Agung	15,02	1,75	2,30	-6,14	-5,29
14.	Kisam Tinggi	1,64	0,74	1,28	-2,85	-4,88
15.	Muaradua Kisam	8,51	1,30	1,84	-1,88	-2,63
16.	Kisam Ilir	4,80	0,67	1,20	4,24	-4,91
17.	Pulau Beringin	18,60	2,34	2,89	-2,61	-3,71
18.	Sindang Danau	21,85	2,21	2,75	-2,02	-1,66
19.	Sungai Are	14,28	1,51	2,05	0,56	-3,00
Jumlah		**13,26**	**1,87**	**2,42**	**-1,33**	**-3,34**

Sumber: BPS Kabupaten OKU Selatan, Tahun 2025

Tabel II.31
Kepadatan Penduduk
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020-2024

No.	Kecamatan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Mekakau Ilir	91,58	93,67	93,52	92,90	91,74
2.	Banding Agung	93,91	96,36	96,21	95,32	94,82
3.	Warkuk Ranau Selatan	104,53	105,94	104,89	103,10	101,28
4.	BPR Ranau Tengah	73,53	75,19	75,01	74,67	73,34
5.	Buay Pemaca	62,81	63,49	63,25	62,75	61,75
6.	Simpang	52,84	54,13	54,03	54,03	55,08
7.	Buana Pemaca	83,68	85,49	85,24	87,75	88,68
8.	Muaradua	191,17	194,42	194,21	193,54	193,27
9.	Buay Rawan	112,38	116,29	116,01	117,24	120,40
10.	Buay Sandang Aji	47,41	48,43	48,15	47,24	46,32
11.	Tiga Dihaji	71,98	72,97	72,83	71,1	66,02
12.	Buay Runjung	74,83	76,44	76,2	74,53	72,38
13.	Runjung Agung	88,80	90,35	90,02	88,87	82,16
14.	Kisam Tinggi	47,53	47,88	47,25	46,12	44,81
15.	Muaradua Kisam	91,65	92,83	92,71	91	90,32
16.	Kisam Ilir	58,54	58,93	58,46	58,89	59,12
17.	Pulau Beringin	63,74	65,24	65,1	64,21	62,95
18.	Sindang Danau	54,32	55,52	55,25	55,09	54,97
19.	Sungai Are	38,82	39,41	39,21	39,11	39,23
Jumlah		**74,44**	**75,83**	**75,54**	**75,01**	**74,07**

Sumber: BPS Kabupaten OKU Selatan, Tahun 2025

Dari sisi kepadatan rata-rata Kabupaten adalah 74 jiwa/km². Kecamatan Muaradua merupakan Kecamatan terpadat (193 jiwa/km²), sementara Kecamatan Sungai Are dan Kecamatan Kisam Tinggi termasuk wilayah dengan kepadatan rendah (di bawah 50 jiwa/km²). Hal ini menunjukkan kebutuhan pembangunan yang berbeda antar wilayah.

Tabel II.32
Rasio Jenis Kelamin Penduduk
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020-2024

No.	Kecamatan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Mekakau Ilir	108,26	104,61	107,3	108,3	109,02
2.	Banding Agung	107,44	104,05	106,4	107,4	106,01
3.	Warkuk Ranau Selatan	107,15	104,59	107,1	107,1	107.35
4.	BPR Ranau Tengah	108,58	103,56	105,6	108,6	108.34
5.	Buay Pemaca	109,75	105,17	108,7	109,7	109,00
6.	Simpang	106,86	104,81	106,9	106,9	107.34
7.	Buana Pemaca	111,44	106,45	108,4	111,4	109.17
8.	Muaradua	105,43	129,63	104,4	105,4	104.91
9.	Buay Rawan	107,55	96,18	104,6	107,6	106.93
10.	Buay Sandang Aji	109,92	106,41	107,9	109,9	109.68
11.	Tiga Dihaji	111,37	107,35	109,3	111,3	109.84
12.	Buay Runjung	107,26	103,58	105,3	107,3	108.57
13.	Runjung Agung	108,85	105,31	107,9	108,9	110.43
14.	Kisam Tinggi	110,14	105,82	108,1	110,1	110.16
15.	Muaradua Kisam	108,83	125,87	106,8	108,8	109.61
16.	Kisam Ilir	107,53	101,61	105,5	107,5	109,02
17.	Pulau Beringin	104,00	101,31	102,9	104,9	105,01
18.	Sindang Danau	106,07	102,99	101,1	106,1	107.14
19.	Sungai Are	109,39	105,60	106,4	109,4	110.19
Jumlah		**107,98**	**107,84**	**106,3**	**108,0**	**107.83**

Sumber: BPS Kabupaten OKU Selatan, Tahun 2025

Rasio jenis kelamin secara umum seimbang, dengan rata-rata 107,83 (sekitar 108 laki-laki per 100 perempuan). Rasio tertinggi tercatat di Kecamatan Runjung Agung dan Kecamatan Sungai Are, sedangkan terendah di Kecamatan Muaradua.

Tabel II.33
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2024

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
0-4	13,424	12,484	25,908
5-9	17,084	15,858	32,942
10-14	17,919	16,799	34,718
15-19	18,654	17,688	36,342
20-24	18,042	17,114	35,156
25-29	16,546	15,230	31,776
30-34	15,444	14,672	30,116
35-39	17,557	16,282	33,839
40-44	16,905	15,446	32,351
45-49	15,180	13,936	29,116
50-54	12,324	11,026	23,350
55-59	9,898	9,571	19,469
60-64	8,062	7,517	15,579
65-69	6,571	5,466	12,037
70-74	3,884	3,274	7,158

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
75+	3,640	3,441	7,081
OKU Selatan	**211,134**	**195,804**	**406,938**

Sumber: BPS Kabupaten OKU Selatan, Tahun 2025

2.1.7.2. Proyeksi dan Analisis Penduduk Tahun 2026-2030

Proyeksi penduduk adalah perhitungan yang dilakukan berdasarkan komponen-komponen laju pertumbuhan penduduk, seperti kelahiran, kematian dan perpindahan penduduk (migrasi). Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dalam membuat kebijakan dan perencanaan pembangunan perlu memahami perhitungan dan asumsi yang ada di balik proyeksi penduduk. Memahami penyebab-penyebab dan dampak yang bisa muncul dalam hasil perhitungan tiap komponen, dapat memberikan masukan dalam pembuatan kebijakan, dan penyusunan rencana pembangunan. Misalnya tingkat kematiannya yang tinggi karena tingkat kesehatan masyarakat rendah dan jumlah fasilitas kesehatannya kurang, contoh lainnya, tingkat kelahiran yang tinggi berdampak pada kebutuhan akan perumahan dan lapangan pekerjaan yang meningkat di masa depan.

Angka yang dipakai dalam proyeksi jumlah penduduk Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan merupakan angka optimis sebagaimana tertulis dalam buku Proyeksi Penduduk Indonesia 2020-2050 dengan asumsi proyeksi penduduk yang disajikan ini menerapkan metode komponen *kohort* dengan pendekatan *deterministik* yang menghasilkan estimasi titik, serta dihitung dengan aplikasi *Rural Urban Projection* (RUP). Metode ini menggunakan beberapa asumsi untuk memproyeksikan penduduk di masa depan, seperti asumsi kelahiran dengan menggunakan indikator *Total Fertility Rate* (TFR), asumsi kematian dengan menggunakan indikator *Infant Mortality Rate* (IMR) dan Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir, serta migrasi dengan menggunakan indikator *Age-Specific Net Migration Rate* (ASNMR). Berikut proyeksi jumlah penduduk Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dalam dokumen rencana ini.

Tabel II.34
Proyeksi dan Analisis Penduduk
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2026-2030

No.	Kecamatan	Satuan	Tahun				
			2026	2027	2028	2029	2030
1	Muaradua	Jiwa	53.787	54.408	55.010	55.600	56.174
2	Pulau Beringin	Jiwa	32.827	33.204	33.573	33.932	34.282
3	Banding Agung	Jiwa	28.122	28.445	28.759	29.068	29.369
4	Muaradua Kisam	Jiwa	21.547	21.795	22.037	22.272	22.502
5	Simpang	Jiwa	19.568	19.791	20.011	20.224	20.434
6	Buay Sandang Aji	Jiwa	23.014	23.277	23.535	23.787	24.033
7	Buay Runjung	Jiwa	13.818	13.977	14.132	14.283	14.431
8	Mekakau Ilir	Jiwa	25.830	26.127	26.417	26.699	26.975
9	Buay Pemaca	Jiwa	47.906	48.456	48.994	49.516	50.029

No.	Kecamatan	Satuan	Tahun				
			2026	2027	2028	2029	2030
10	Kisam Tinggi	Jiwa	21.084	21.328	21.564	21.795	22.020
11	Kisam Ilir	Jiwa	8.465	8.561	8.657	8.749	8.840
12	BPR Ranau Tengah	Jiwa	28.045	28.367	28.680	28.989	29.289
13	Warkuk Ranau Selatan	Jiwa	26.792	27.098	27.400	27.693	27.978
14	Runjung Agung	Jiwa	15.019	15.190	15.360	15.524	15.684
15	Sungai Are	Jiwa	12.338	12.479	12.619	12.753	12.884
16	Sindang Danau	Jiwa	12.313	12.454	12.593	12.727	12.858
17	Buana Pemaca	Jiwa	17.143	17.340	17.534	17.720	17.904
18	Tiga Dihaji	Jiwa	11.825	11.961	12.092	12.223	12.349
19	Buay Rawan	Jiwa	20.507	20.742	20.973	21.196	21.415
Total			**439.950**	**445.000**	**449.940**	**454.750**	**459.450**

Sumber: Perda Nomor 4 Tahun 2024 tentang RPJPD 2025-2045

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat akan menjelaskan tentang perkembangan kesejahteraan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yang ditinjau dari sisi kesejahteraan dan pemerataan ekonomi serta kesejahteraan sosial. Pada aspek ini akan terlihat sebuah “potret kehidupan” masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, serta analisis dan kajian singkat terkait kehidupan sosial ekonomi secara umum yang mencakup kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta seni budaya, dan olahraga.

2.2.1.Kesejahteraan Ekonomi

Fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi ini akan menjabarkan hasil pembangunan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan utamanya terkait bidang perekonomian wilayah. Fokus ini akan mengkaji lebih dalam berbagai indikator-indikator perekonomian baik makro maupun mikro yang secara langsung maupun tidak langsung merupakan esensi dari pergerakan roda perekonomian (pembangunan perekonomian) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Pada hakekatnya, pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, memeratakan distribusi pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional, dan transformasi kegiatan perekonomian dari primer ke sekunder dan tersier. Oleh karena itu, penting adanya melihat berbagai indikator pada tujuan pembangunan tersebut demi peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah.

2.2.1.1. Perkembangan PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan dan tingkat kesejahteraan masyarakat dari sisi makro ekonomi. PDRB merupakan jumlah nilai tambah bruto yang timbul akibat adanya berbagai kegiatan ekonomi atau proses produksi yang tercipta di suatu

daerah atau region dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi dimiliki daerah tersebut atau bukan.

Nilai tambah PDRB di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan mengalami peningkatan di setiap tahunnya yang terlihat dari kenaikan PDRB dari 8,97 triliun rupiah pada tahun 2020 menjadi 11,91 triliun rupiah pada tahun 2024. Angka ini tentu saja capaian positif dalam perekonomian makro daerah yang diharapkan akan berimbas terhadap pertumbuhan ekonomi maupun kesejahteraan masyarakat.

Tabel II.35
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah)
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020-2024

No.	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023*	2024**
A	Pertanian, kehutanan, dan perikanan	2,803.53	3,015.53	3,159.98	3,286.45	3.545.33
B	Pertambangan dan penggalian	160.91	167.04	179.71	189.30	195.27
C	Industri pengolahan	712.96	762.88	831.10	931.53	974.97
D	Pengadaan listrik dan gas	8.61	9.48	10.17	10.76	11.67
E	Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	4.44	4.44	4.50	4.63	4.63
F	Konstruksi	1,509.80	1,610.57	1,772.55	1,931.47	2,074.69
G	Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor	2,019.14	2,141.53	2,412.42	2,665.65	2,909.59
H	Transportasi dan pergudangan	81.23	83.03	94.02	101.09	104.96
I	Penyediaan akomodasi dan makan minum	99.19	105.59	120.26	136.03	147.19
J	Informasi dan komunikasi	68.77	75.66	82.21	88.56	94.03
K	Jasa keuangan dan asuransi	81.66	84.81	89.09	92.44	96.29
L	Real estate	440.83	456.15	496.86	530.68	541.33
MN	Jasa perusahaan	2.43	2.48	2.59	2.79	2.88
O	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	432.90	443.99	468.16	489.12	518.88
P	Jasa pendidikan	356.10	370.68	395.86	409.87	445.02
Q	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	116.87	121.07	127.45	129.245	143.85
RSTU	Jasa lainnya	72.36	75.31	82.56	90.76	97.80
Produk Domestik Regional Bruto		**8,971.73**	**9,530.24**	**10,328.50**	**11,090.39**	**11,908.37**

*angka sementara
**angka sangat sementara
Sumber: BPS Kabupaten OKU Selatan, Tahun 2025

Tabel II.36
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah)
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020-2024

No.	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023*	2024**
A	Pertanian, kehutanan, dan perikanan	2,026.02	2,129.83	2,176.01	2,188.43	2,222.08
B	Pertambangan dan penggalian	109.25	113.22	120.97	123.05	125.62
C	Industri pengolahan	429.99	443.04	464.58	503.52	507.15
D	Pengadaan listrik dan gas	3.64	3.90	4.11	4.31	4.64
E	Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	2.09	2.04	2.04	2.09	2.08
F	Konstruksi	931.13	955.99	1,017.82	1,077.15	1,155.32
G	Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor	1,026.01	1,082.25	1,172.46	1,272.34	1,380.99
H	Transportasi dan pergudangan	44.81	45.70	48.90	50.96	51.91
I	Penyediaan akomodasi dan makan minum	50.18	53.30	58.99	65.61	70.42
J	Informasi dan komunikasi	38.81	42.62	46.00	49.13	51.82
K	Jasa keuangan dan asuransi	53.92	54.94	55.17	57.15	58.97
L	Real estate	312.55	323.40	342.57	362.41	376.42
MN	Jasa perusahaan	1.46	1.48	1.50	1.56	1.58
O	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	322.58	329.34	343.08	352.28	373.56
P	Jasa pendidikan	251.32	259.75	270.30	272.80	287.07
Q	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	75.59	77.41	79.81	79.18	86.76
RSTU	Jasa lainnya	54.73	56.42	59.66	63.69	68.43
Produk Domestik Regional Bruto		**5,734.09**	**5,975.14**	**6,263.99**	**6,525.68**	**6,824.83**

*angka sementara
**angka sangat sementara
Sumber: BPS Kabupaten OKU Selatan, Tahun 2025

2.2.1.2. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi daerah menunjukkan dinamika yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pasca pandemi, yakni mulai tahun 2021 hingga tahun 2023, terjadi proses pemulihan ekonomi yang cukup merata, meskipun tidak semua sektor pulih dengan kecepatan yang sama. Sektor akomodasi dan makan minum, yang sempat terpukul, mulai menunjukkan pemulihan signifikan. Demikian pula dengan sektor industri pengolahan dan perdagangan yang kembali mencatatkan pertumbuhan yang cukup tinggi. Sementara itu, sektor informasi dan komunikasi terus menunjukkan performa yang kuat dan konsisten sepanjang periode. Meskipun pemulihan sudah terjadi secara keseluruhan, pertumbuhan PDRB belum sepenuhnya kembali ke tingkat sebelum pandemi. Tahun 2023 misalnya, pertumbuhan PDRB masih berada di angka 4,58%, lebih rendah dibandingkan puncaknya pada tahun 2019 yang mencapai 5,08%. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pemulihan telah berlangsung, tantangan struktural dan ketidakpastian global masih membayangi prospek pertumbuhan ke depan.

Secara umum, data ini menunjukkan pentingnya diversifikasi ekonomi dan penguatan sektor-sektor yang tangguh terhadap guncangan, seperti sektor digital dan energi, untuk menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi di masa depan.

Tabel II.37
Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020-2024

No.	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023*	2024**
A	Pertanian, kehutanan, dan perikanan	0.67	5.10	2.19	0.57	1,54
B	Pertambangan dan penggalian	-0.14	3.64	6.84	1.72	2,09
C	Industri pengolahan	-0.84	3.03	4.86	8.38	0,72
D	Pengadaan listrik dan gas	10.08	7.11	5.34	4.75	7,73
E	Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	5.25	-2.52	0.41	2.24	-0,67
F	Konstruksi	-0.03	2.67	6.47	5.83	7,26
G	Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor	-1.24	5.48	8.34	8.52	8,54
H	Transportasi dan pergudangan	-3.58	1.98	7.00	4.23	1,86
I	Penyediaan akomodasi dan makan minum	-0.54	6.22	10.67	11.22	7,33
J	Informasi dan komunikasi	9.83	9.80	7.94	6.81	5,46
K	Jasa keuangan dan asuransi	1.15	1.89	0.42	3.58	3,19
L	Real estate	2.88	3.47	5.93	5.79	3,87
M,N	Jasa perusahaan	-2.13	1.68	1.10	4.54	1,20

No.	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023*	2024**
O	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	0.94	2.10	4.17	4.68	6,04
P	Jasa pendidikan	1.80	3.35	4.06	0.93	5,23
Q	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	6.04	2.40	3.11	-0.78	9,56
R,S,T,U	Jasa lainnya	2.87	3.10	5.74	6.76	7,44
Produk Domestik Regional Bruto		**0.37**	**4.19**	**4.85**	**4.18**	**4,58**

*angka sementara
**angka sangat sementara
Sumber: BPS Kabupaten OKU Selatan, Tahun 2025

2.2.1.3. Distribusi PDRB

Struktur ekonomi Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan secara umum dapat dilihat dari distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku. Terlihat bahwa perekonomian Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan di mana pada tahun 2024 memiliki kontribusi terhadap perekonomian daerah sebesar 29,77%. Selain sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor lain yang memiliki dominasi cukup tinggi adalah sektor perdagangan besar dan eceran; termasuk reparasi kendaraan bermotor sebesar 24,43%, dan sektor konstruksi sebesar 16,51%. Sedangkan sektor yang minim kontribusi adalah sektor jasa perusahaan dengan kontribusi perekonomian sebesar 0,02%

Tabel II.38
Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020-2024 (persen)

No.	Sektor	2020		2021		2022		2023*		2024**	
		ADHB	ADHK	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK
A	Pertanian, kehutanan, dan perikanan	31.25	35.33	31.65	35.61	30.65	34.76	29.56	33.54	29.77	33.54
B	Pertambangan dan penggalian	1.79	1.91	1.75	1.89	1.74	1.93	1.71	1.89	1.64	1.89
C	Industri pengolahan	7.95	7.50	8.00	7.41	8.04	7.42	8.40	7.72	8.19	7.72
D	Pengadaan listrik dan gas	0.10	0.06	0.10	0.07	0.10	0.07	0.10	0.07	0.10	0.07
E	Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	0.05	0.04	0.05	0.03	0.04	0.03	0.04	0.03	0.04	0.03
F	Konstruksi	16.83	16.24	16.90	16.04	17.14	16.25	17.42	16.51	17.42	16.51
G	Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor	22.51	17.89	22.47	18.11	23.32	18.72	24.11	19.50	24.43	19.50
H	Transportasi dan pergudangan	0.91	0.78	0.87	0.76	0.91	0.78	0.91	0.78	0.88	0.78
I	Penyediaan akomodasi dan makan minum	1.11	0.88	1.11	0.89	1.16	0.94	1.23	1.01	1.24	1.01
J	Informasi dan komunikasi	0.77	0.68	0.79	0.71	0.79	0.73		0.75	0.79	0.75
K	Jasa keuangan dan asuransi	0.91	0.94	0.89	0.92	0.86	0.88	0.80	0.88	0.81	0.88
L	Real estate	4.91	5.45	4.79	5.41	4.80	5.47	0.83	5.55	4.55	5.55

M,N	Jasa perusahaan	0.03	0.03	0.03	0.02	0.03	0.02	4.79	0.02	0.22	0.02
O	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	4.83	5.63	4.66	5.51	4.53	5.40	0.03	5.40	4.36	5.40
P	Jasa pendidikan	3.97	4.38	3.89	4.35	3.84	4.35	4.41	4.18	3.74	4.18
Q	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	1.30	1.32	1.27	1.30	1.26	1.31	3.70	1.21	1.21	1.21
R,S,T,U	Jasa lainnya	0.81	0.95	0.79	0.94	0.80	0.95	1.17	0.98	0.82	0.98
Total		**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**

*angka sementara
**angka sangat sementara
Sumber: BPS Kabupaten OKU Selatan, Tahun 2025

2.2.1.4. Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan (diukur dari sisi pengeluaran). Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Oleh karena itu, penduduk yang mampu dan sejahtera diasumsikan merupakan penduduk di atas garis kemiskinan. Penduduk di atas garis kemiskinan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan mengalami penurunan begitu pula dengan persentasenya. Pada tahun 2024, persentase penduduk di atas garis kemiskinan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan mencapai 90,14%.

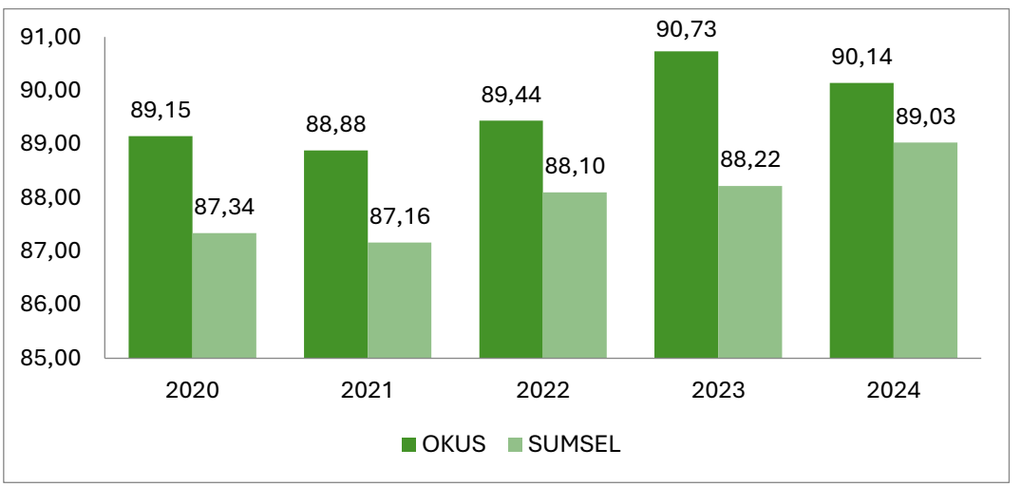

Gambar II.10
Persentase Penduduk diatas Garis Kemiskinan
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020-2024
Sumber: BPS Kabupaten OKU Selatan, Tahun 2025

Pada tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan mampu menurunkan angka kemiskinan menjadi 1 (satu) digit sebesar 9,86% di tahun 2024 sedangkan pada tahun 2023 sebesar 10,36% menurun sebesar 0,5%.

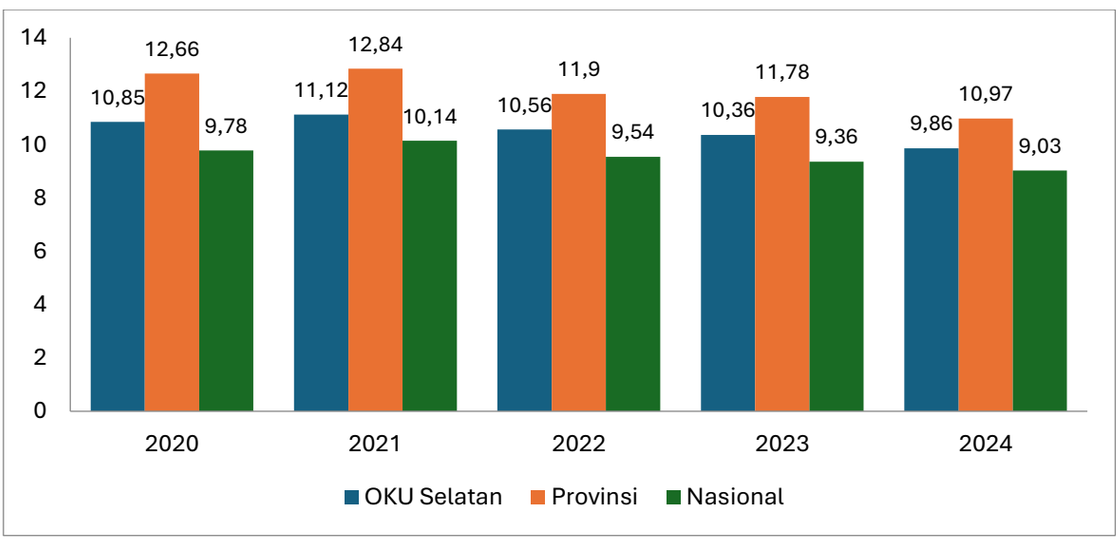

Gambar II.11
Persentase Tingkat Kemiskinan
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020-2024
Sumber: BPS Kabupaten OKU Selatan, Tahun 2025

Jika dilihat dari sisi jumlah, kemiskinan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan cenderung mengalami peningkatan penurunan, pada tahun 2020 tingkat kemiskinan mencapai 10,85 persen sampai ditahun 2024 mencapai 9,86 persen.

Tabel II.39
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020-2024

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu)	Persentase Penduduk Miskin	P1	P2	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)
2020	39.50	10.85	1.17	0.23	341,148
2021	41.23	11.12	1.28	0.24	359,859
2022	39.61	10.56	1.09	0.20	379.854
2023	39.30	10.36	1.86	0.58	413,228
2024	37.81	9.86	1.68	0.38	436.420

Sumber: BPS Kabupaten OKU Selatan, Tahun 2025

Tingkat kedalaman kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Tingkat kedalalaman kemiskinan (P1) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan periode 2020-2024 berfluktuatif. Pada tahun 2020, tingkat kedalaman kemiskinan (P1) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan adalah sebesar 1,17 poin dan mengalami kenaikan sebesar 0,11 poin menjadi 1,28 poin di tahun 2021. Pada tahun 2022, tingkat kedalaman kemiskinan (P1) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan mengalami penurunan menjadi 1,09 poin dan naik kembali sebesar 0,77 poin menjadi 1,86 poin di tahun 2023. Pada tahun 2024, tingkat kedalaman kemiskinan (P1) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan turun kembali 0,18 poin menjadi 1,68 poin.

Tingkat keparahan kemiskinan (P2) merupakan ukuran tingkat ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, maka semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Tingkat keparahan kemiskinan (P2) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan periode 2020-2024 berfluktuatif. Pada tahun 2020, tingkat keparahan kemiskinan (P2) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan adalah sebesar 0,23 poin dan mengalami kenaikan sebesar 0,01 poin menjadi 0,24 poin di tahun 2021. Pada tahun 2022, tingkat keparahan kemiskinan (P2) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan kembali mengalami penurunan menjadi 0,20 poin dan naik kembali sebesar 0,38 poin menjadi 0,58 poin di tahun 2023. Pada tahun

2024, tingkat keparahan kemiskinan (P2) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan turun kembali 0,2 poin menjadi 0,38 poin.

Upaya penanggulangan kemiskinan dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, yang secara simultan dilaksanakan dalam rangka mencapai target Indikator Kinerja Daerah khususnya indikator pada aspek kesejahteraan masyarakat yang mencakup upaya dalam bidang ekonomi non pertanian, ekonomi pertanian, pendidikan, kesehatan, dan program keluarga berencana, serta prasarana pendukungnya.

Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), adalah sistem basis data terpadu yang dikembangkan untuk mencatat dan mengelola informasi sosial ekonomi seluruh penduduk Indonesia. DTSEN bertujuan untuk menyajikan data yang akurat dan terintegrasi sebagai acuan utama dalam penyaluran berbagai program bantuan sosial dan kebijakan Pemerintah lainnya. DTSEN dikembangkan untuk menggantikan DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) dan menjadi acuan utama dalam penyaluran berbagai program bantuan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Dengan DTSEN, diharapkan penyaluran bantuan sosial menjadi lebih tepat sasaran, transparan, dan efisien. Selain itu, DTSEN juga membantu Pemerintah dalam merencanakan program pembangunan yang lebih terukur dan berkelanjutan.

Permerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan telah melakukan *Ground Check* Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (GC DTSEN), di mana sebanyak 20.038 target dan sudah di survey sebanyak 20.038 atau mencapai 100%, dengan harapan data DTSEN tersebut dapat digunakan sebagai acuan utama yang akan diambil Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dalam mewujudkan program pemberdayaan yang lebih tepat sasaran.

Tabel II.40
Rekap Data *Ground Check* Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (GCDTSEN)
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2025

No.	Nama Kecamatan	SDM PKH	Target GC	Sudah di Survey	Belum Di survey	%
1.	Banding Agung	3	1.553	1.553	0	100%
2.	Buana Pemaca	5	1.618	1.618	0	100%
3.	Buay Pemaca	3	1.222	1.222	0	100%
4.	BPR Ranau Tengah	1	669	669	0	100%
5.	Buay Rawan	2	917	917	0	100%
6.	Buay Runjung	2	744	744	0	100%
7.	Buay Sandang Aji	3	1.464	1.464	0	100%
8.	Kisam Ilir	1	402	402	0	100%

No.	Nama Kecamatan	SDM PKH	Target GC	Sudah di Survey	Belum Di survey	%
9.	Kisam Tinggi	1	369	369	0	100%
10.	Mekakau Ilir	2	888	888	0	100%
11.	Muaradua	11	3.234	3.234	0	100%
12.	Muaradua Kisam	1	113	113	0	100%
13.	Pulau Beringin	4	1.909	1.909	0	100%
14.	Runjung Agung	1	620	620	0	100%
15.	Simpang	3	1.059	1.059	0	100%
16.	Sindang Danau	2	743	743	0	100%
17.	Sungai Are	2	682	682	0	100%
18.	Tiga Dihaji	2	771	771	0	100%
19.	Warkuk Ranau Selatan	3	1.061	1.061	0	100%
	Total	**52**	**20.038**	**20.038**	**0**	**100%**

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Tahun 2025

2.2.1.5. PDRB per Kapita

Tingkat kesejahteraan masyarakat, dapat dilihat secara makro berdasarkan PDRB per kapita yaitu gambaran rata-rata pendapatan yang diterima oleh penduduk secara makro sehingga untuk analisis lebih lanjut diperlukan analisis ketimpangan pendapatan. Meskipun ukuran ini memiliki kelemahan karena perlakuan yang dibagi rata tersebut, namun setidak-tidaknya dapat memberikan gambaran awal perkembangan tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. PDRB per kapita mengalami peningkatan disetiap tahunnya di mana hal ini menggambarkan kesejahteraan masyarakat yang meningkat. Pada tahun 2024, PDRB per kapita Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan mencapai 27,72 juta rupiah per tahun per kapita.

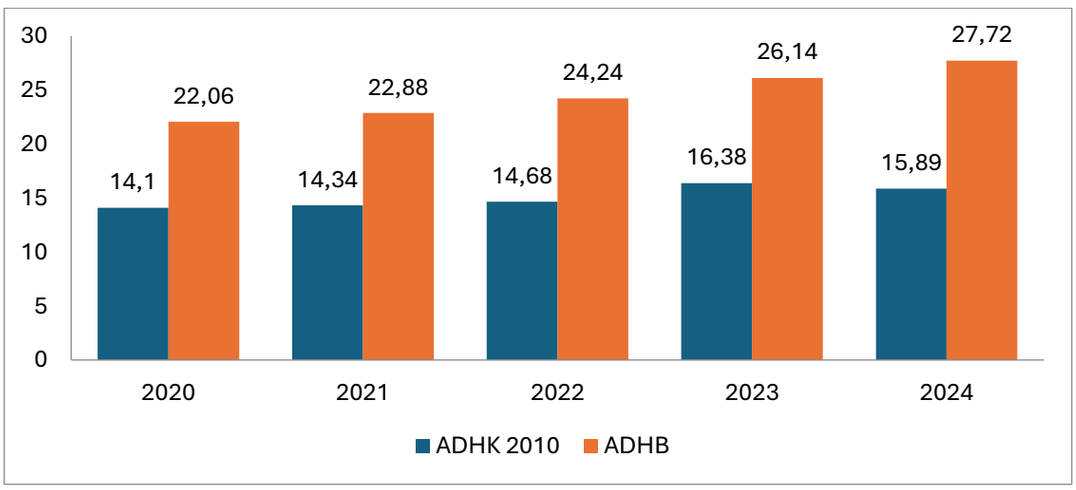

Gambar II.12
Perkembangan PDRB Per Kapita (Juta Rupiah)
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020-2024
Sumber: BPS Kabupaten OKU Selatan, Tahun 2025

2.2.1.6. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan mengalami fluktuasi selama kurun waktu 2020-2024. Hal ini menunjukan bahwa setiap tahun pada periode tersebut terdapat perubahan jumlah angkatan kerja di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yang terserap di pasar tenaga kerja.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan menunjukkan tren penurunan dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, TPT berada di angka 3,28% dan menurun pada 2021 menjadi 3,23%, dan terus menurun hingga mencapai 1,80% pada tahun 2024. Penurunan ini mencerminkan perbaikan kondisi ketenagakerjaan dan peningkatan kesempatan kerja di daerah. Meski demikian, perhatian tetap perlu diberikan pada kualitas pekerjaan, terutama di sektor informal. Ke depan, penguatan sektor formal dan peningkatan kompetensi tenaga kerja menjadi kunci menjaga keberlanjutan capaian ini.

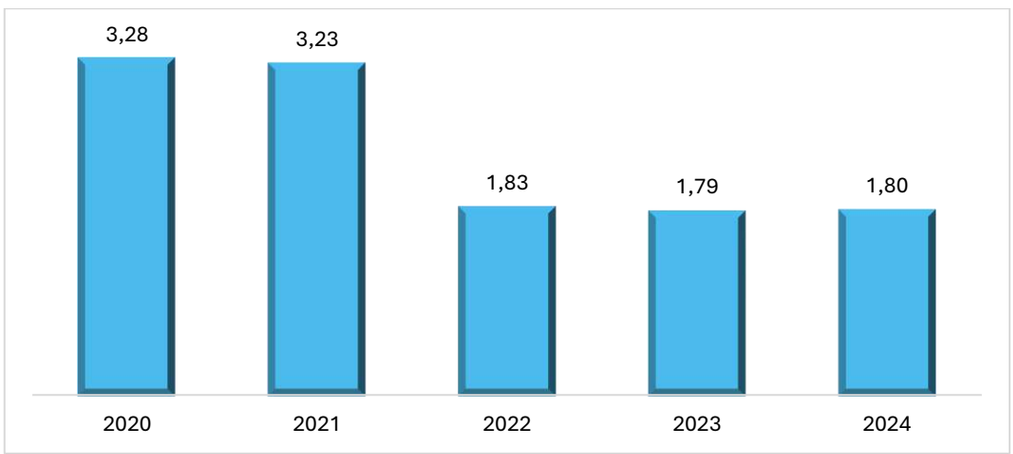

Gambar II.13
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020-2024
Sumber: BPS Kabupaten OKU Selatan, Tahun 2025

2.2.1.7. Indeks Gini

Indeks gini merupakan sebuah teori yang digunakan untuk menentukan apakah pola pengeluaran suatu masyarakat berada pada ketimpangan taraf rendah, sedang atau tinggi dengan koefisien gini rasio yang digunakan antara 0-1 (>0 dan <1). Berdasarkan data yang ada dapat dilihat bahwa, indeks gini Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan selama periode 2020-2024 cenderung mengalami peningkatan.

Pada tahun 2024 indeks gini Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sebesar 0,356 Artinya, nilai indeks gini >0 akan tetapi <1 yang termasuk pada pola pengeluaran masyarakat dengan ketimpangan rendah. Terjadinya ketimpangan pendapatan antar penduduk di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain karena sedikitnya

ketersediaan lapangan kerja, melambatnya pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan pengangguran. Perkembangan rasio indeks gini Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dapat dilihat pada Gambar II.14 berikut ini.

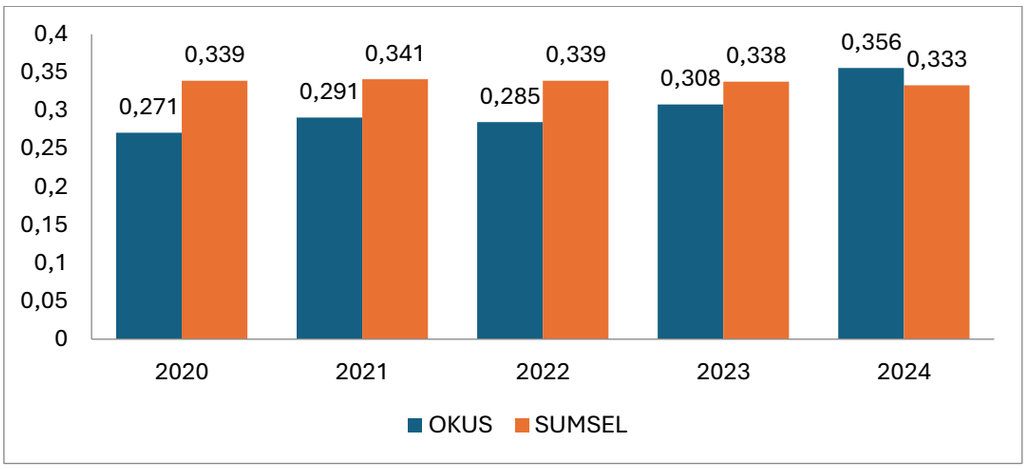

Gambar II.14
Perkembangan Indeks Gini
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020-2024
Sumber: BPS Kabupaten OKU Selatan, Tahun 2025

2.2.1.8. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan periode 2020-2024 menunjukkan tren perlahan meningkat, meskipun mengalami pertumbuhan yang sangat lambat selama pandemi. Pada tahun 2020 hanya sebesar 65,3 kemudian mengalami peningkatan secara konstan hingga sampai tahun terakhir tahun 2024 menjadi sebesar 70. Kenaikan pada tahun 2024 menjadi sinyal positif bahwa kualitas hidup masyarakat mulai membaik. Namun dibandingkan dengan rata-rata Provinsi, IPM Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan masih tertinggal. Oleh karena itu, diperlukan upaya dalam meningkatkan kualitas pendidikan, memperkuat layanan kesehatan, dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

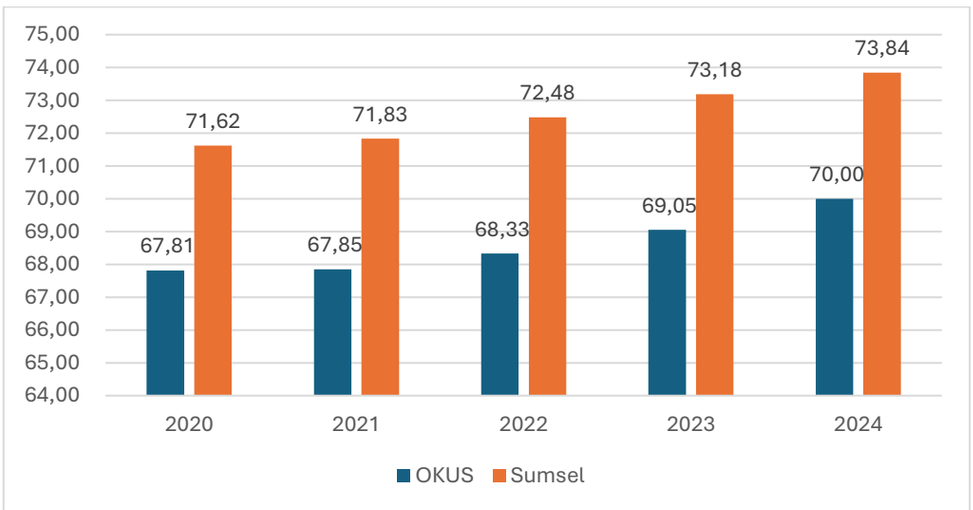

Gambar II.15
Indeks Pembangunan Manusia
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020-2024
Sumber: BPS Kabupaten OKU Selatan, Tahun 2025

Tabel II.41
Indikator Komponen Penyusun Indeks Pembangunan Manusia
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Angka Harapan Hidup	67,04	72,70	72,88	73,21	73,44
Harapan Lama Sekolah	11.75	11.76	11.78	11.79	11.82
Rata-rata Lama Sekolah	7.84	7.85	7.86	8.05	8.25
Pengeluaran riil per kapita	8,580	8,858	8,895	9,176	9,680

Sumber: BPS Kabupaten OKU Selatan, Tahun 2025

Indeks daya beli merupakan salah satu komponen IPM. Indeks daya beli dicerminkan oleh pengeluaran riil per kapita yang telah disesuaikan. Indeks daya beli penduduk menggambarkan kondisi relatif daya beli antar wilayah dan antar waktu. Sehubungan dengan hal tersebut, daya beli pendudukk yang dicerminkan dari komponen IPM ini tidak dapat diinterpretasikan berdasarkan angka nominalnya, tapi secara riil, dengan membandingkannya antar wilayah dan antar waktu.

Daya beli masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tahun 2020 sebesar 8.580 ribu per kapita per tahun, meningkat sebesar 8.858 ribu per kapita per tahun pada tahun 2021, kenaikan tersebut terus berlanjut pada tahun 2022 naik menjadi 8.895 ribu per kapita per tahun, tahun 2023 naik menjadi 9.176, dan terakhir tahun 2024 menjadi 9.680 per kapita per tahun.

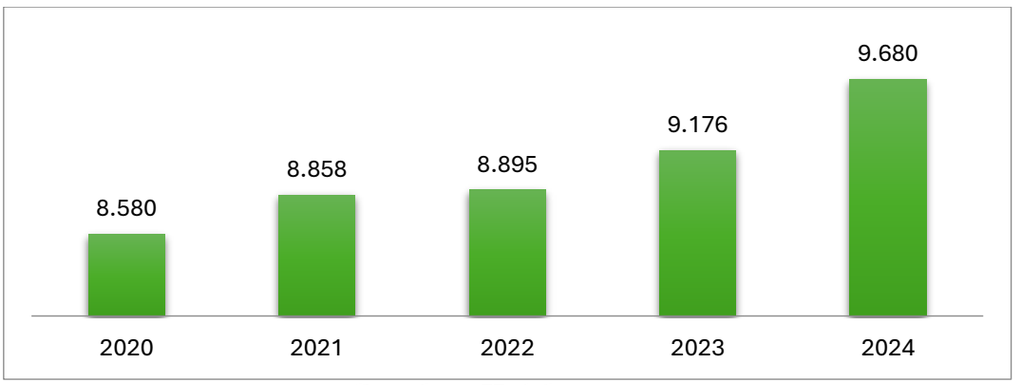

Gambar II.16
Pengeluaran Per Kapita Yang Disesuaikan (*Purchasing Power Parity*/PPP)
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020-2024
Sumber: BPS Kabupaten OKU Selatan, Tahun 2025

2.2.2.Kesehatan Untuk Semua

2.2.2.1. Usia Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan indikator penyusun indeks pembangunan manusia dalam bidang kesehatan di mana angka tersebut mengindikasikan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. AHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat.

Angka Harapan Hidup di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan mengalami peningkatan di setiap tahunnya yang mengindikasikan peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Pada tahun 2024, angka harapan hidup di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan mencapai 73,44 tahun yang artinya seorang bayi yang lahir pada tahun 2024 akan memiliki harapan hidup hingga berumur 73 tahun.

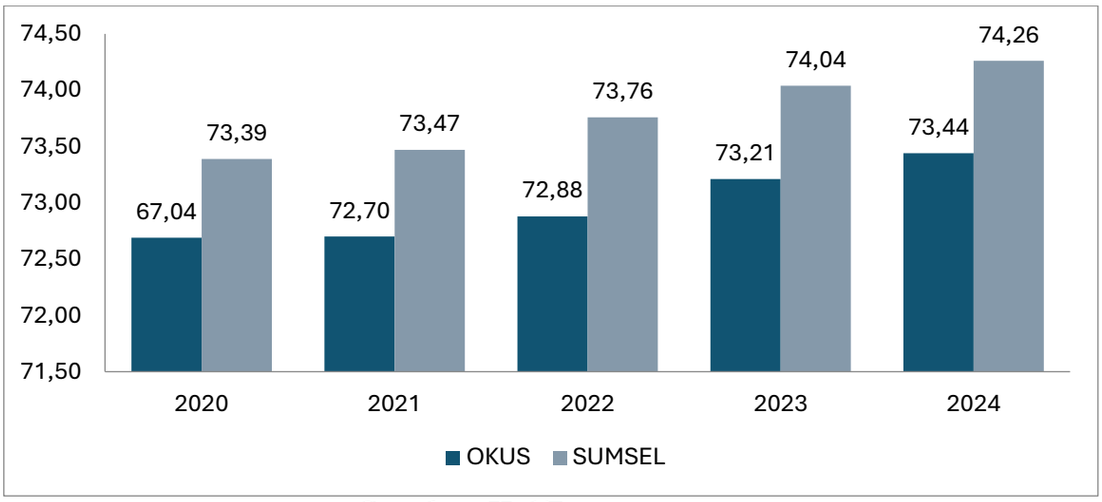

Gambar II.17
Angka Harapan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020-2024
Sumber: BPS Kabupaten OKU Selatan, Tahun 2025

2.2.2.2. Prevalansi Stunting

Prevalensi stunting di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan menunjukkan tren penurunan yang cukup signifikan. Pada tahun 2021, angka stunting di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tercatat sebesar 24,8%, yang saat itu berada setara dengan rata-rata Provinsi Sumatera Selatan. Tahun 2022, angka stunting di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan menurun menjadi 19,4%, atau mengalami penurunan sebesar 5,4 persen poin. Di tingkat Provinsi, penurunan juga terjadi, dari 24,8% menjadi 18,6%. Pada tahun 2023 angka stunting baik Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan maupun Provinsi Sumatera Selatan mengalami kenaikan, kecuali angka Nasional. Pada tahun 2024 angka stunting di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan kembali mengalami penurunan menjadi sebesar 12,4%, begitu pula angka stunting Provinsi Sumatera Selatan dan Nasional.

Penurunan ini menunjukkan bahwa intervensi penanganan stunting mulai menunjukkan hasil, terutama di tingkat kabupaten. Namun demikian, dengan angka stunting masih berada di atas ambang batas target nasional sebesar 14% pada tahun 2024, dibutuhkan langkah-langkah lanjutan yang lebih intensif dan terkoordinasi.

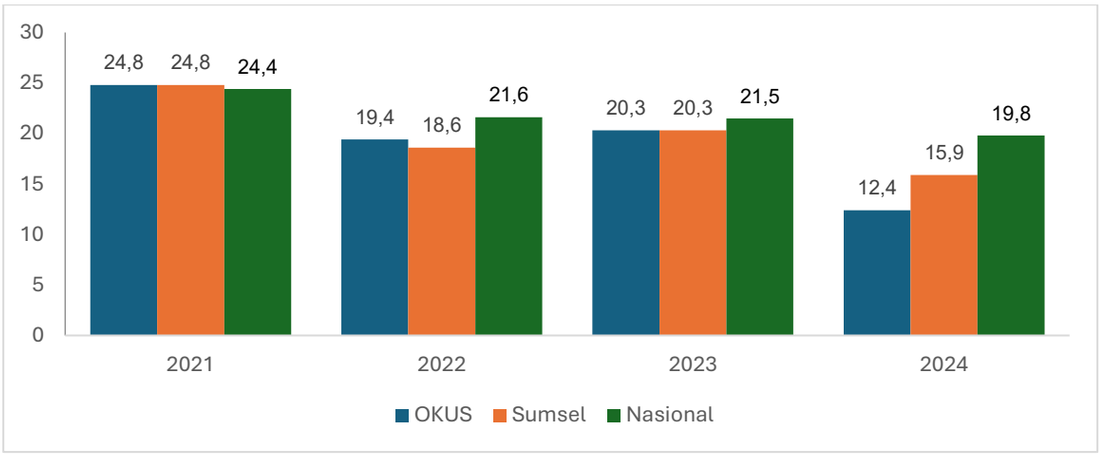

Gambar II.18
Stunting di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2021-2024
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten OKU Selatan, Tahun 2025

2.2.3.Pendidikan Berkualitas yang Merata

2.2.3.1. Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Angka RLS merupakan kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki, dan pendidikan yang telah ditamatkan. Angka ini mengindikasikan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk suatu wilayah dalam mengenyam pendidikan sekolah formal. Adapun cakupan penduduk yang dihitung dalam RLS adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas dengan asumsi pada umur 25 tahun, proses pendidikan sudah berakhir.

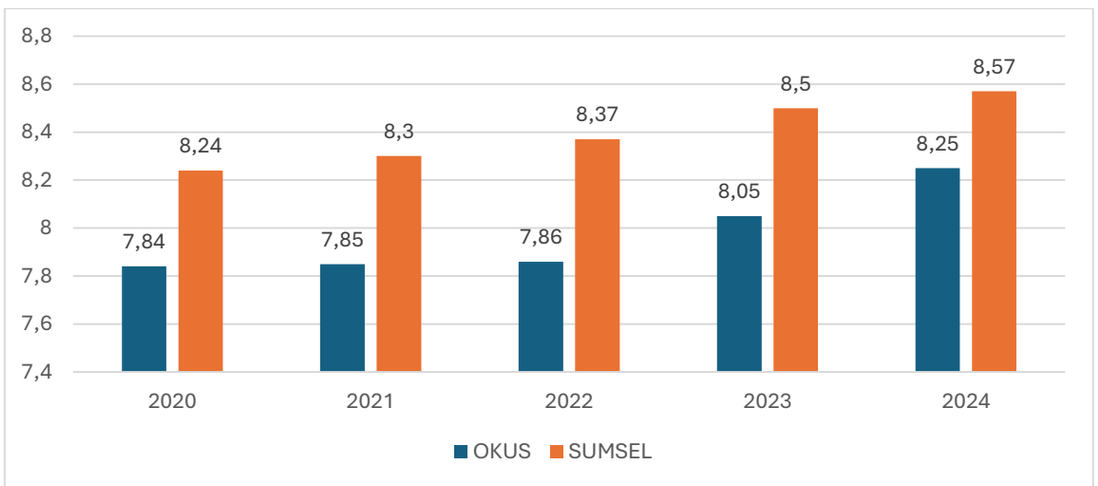

Gambar II.19
Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020-2024
Sumber: BPS Kabupaten OKU Selatan, Tahun 2025

Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan mengalami kenaikan di setiap tahunnya hingga pada tahun 2024 mencapai 8,25 tahun. Angka ini mengindikasikan bahwa penduduk yang berusia 25 tahun ke

atas di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan rata-rata mengenyam pendidikan selama 8-9 tahun atau memiliki jenjang pendidikan hingga SMP kelas VIII. Selain Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), indikator lain yang memperlihatkan kualitas pendidikan suatu wilayah adalah Harapan Lama Sekolah. Harapan Lama Sekolah (HLS) dapat didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.

2.2.3.2. Harapan Lama Sekolah

Nilai Harapan Lama Sekolah yang semakin tinggi, dapat menggambarkan bahwa rata-rata lamanya sekolah seseorang diharapkan akan semakin besar (semakin tinggi pendidikan yang ditempuh). Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan mengalami peningkatan di setiap tahunnya di mana pada tahun 2024 mencapai 11,82 tahun. Angka ini mengindikasikan bahwa penduduk yang berusia 7 (tujuh) tahun ke atas pada tahun 2024 memiliki kesempatan atau harapan untuk bersekolah hingga 11,82 tahun atau mengenyam pendidikan hingga Sekolah Menengah Atas Kelas XII.

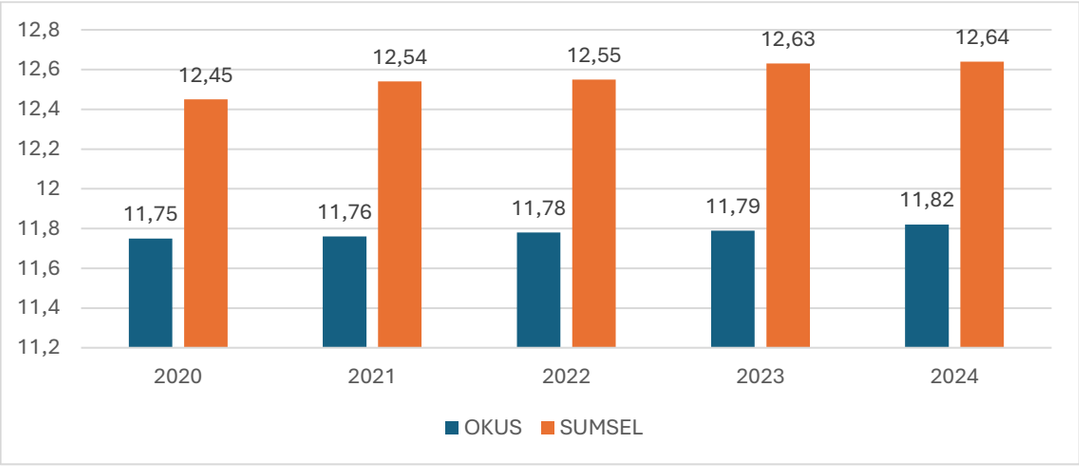

Gambar II.20
Harapan Lama Sekolah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020-2024
Sumber: BPS Kabupaten OKU Selatan, Tahun 2025

2.2.3.3. Angka Literasi/Numerasi

Pembangunan daerah akan mampu diperoleh secara optimal jika sumber daya manusia pelaksana pembangunan lebih berkualitas. Kualitas sumber daya manusia dalam hal ini diindikasikan dengan tingkat pendidikan individu. Indikator pertama dalam pendidikan adalah angka melek huruf yang menggambarkan kemampuan membaca dan menulis masyarakat suatu wilayah. Kemampuan membaca dan menulis dipandang sebagai kemampuan dasar minimal yang harus dimiliki oleh setiap individu agar memiliki peluang untuk terlibat dan berpartisipasi dalam pembangunan.

Angka Melek Huruf Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan mengalami kenaikan dari tahun 2020-2024 paling tinggi mencapai 99,55% ditahun 2023. Namun pada tahun 2024, angka melek huruf mengalami penurunan menjadi 99,41%. Hal ini harus menjadi perhatian Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kualitas pendidikan dasar kepada masyarakat.

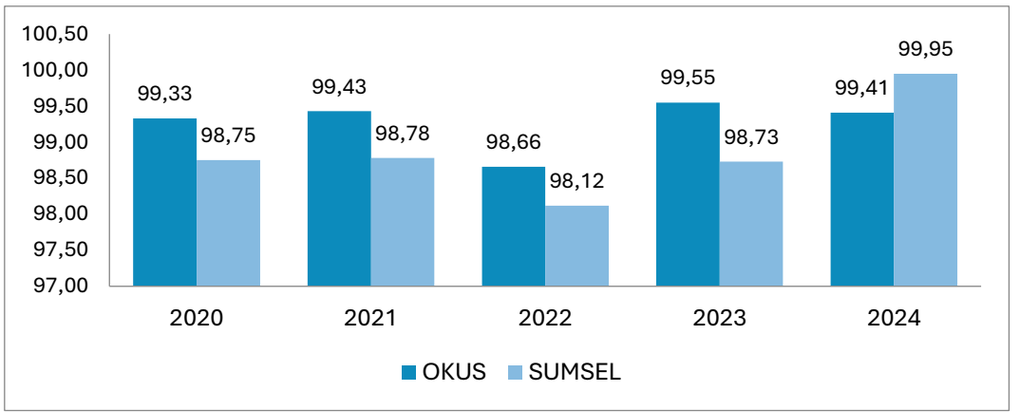

Gambar II.21
Angka Melek Huruf Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020-2024
Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan, Tahun 2025

2.2.3.4. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Berdasarkan data Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan telah terjadi penurunan yang signifikan antara tahun 2023 dan tahun 2024. Pada tahun 2023, IPLM tercatat sebesar 52,61, namun pada tahun 2024 angka tersebut turun drastis menjadi 29,27. Penurunan sebesar 23,34 poin, atau setara dengan sekitar 44,34 persen, mencerminkan kemunduran yang cukup serius dalam pembangunan literasi Masyarakat di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

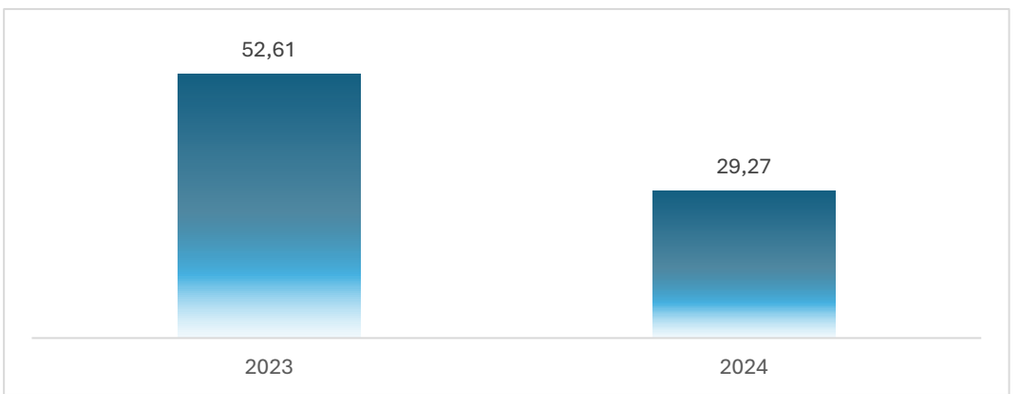

Gambar II.22
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2023-2024
Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan, Tahun 2025

2.2.4. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif

2.2.4.1. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) adalah ukuran yang digunakan untuk mengukur kesenjangan antara pencapaian laki-laki dan perempuan dalam tiga

dimensi utama: kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan partisipasi di pasar tenaga kerja. IKG berkisar antara 0 hingga 1, dengan nilai yang lebih tinggi menunjukkan tingkat ketimpangan yang lebih besar.

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan menunjukkan tren penurunan dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, IKG berada di angka 0,603 dan menurun pada 2021 menjadi 0,595, dan terus menurun hingga mencapai 0,570 pada tahun 2024. Penurunan ini menunjukkan perbaikan dalam kesenjangan gender di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

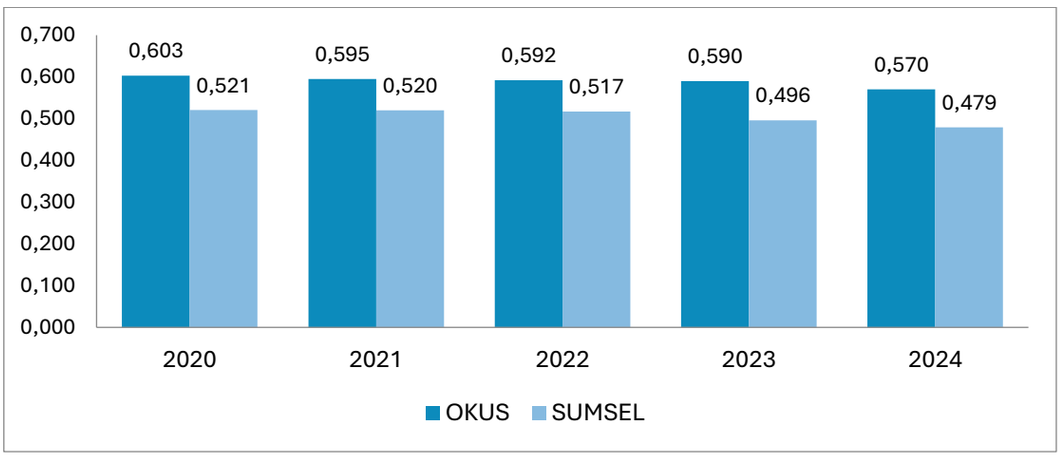

Gambar II.23
Indeks Ketimpangan Gender (IKG)
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020-2024
Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan, Tahun 2025

2.2.4.2. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Menciptakan kondisi setara dan mengurangi ketimpangan gender menjadi beberapa hal yang menjadi fokus pembangunan. Hal tersebut guna menciptaan keadaan yang adil dan ideal antara laki-laki dan perempuan, memiliki kesempatan yang sama dalam peningkatan kualitas hidup seperti kesehatan, pendidikan dan ekonomi tanpa adanya diskriminasi. Kualitas pembangunan manusia tinggi dan merata tentu akan mendorong pembangunan gender ke arah yang lebih baik. Itulah sebabnya pembangunan manusia dan pembangunan gender merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dan menarik untuk dianalisis. Sebelum membahas lebih jauh tentang Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, perlu diamati data-data yang berkaitan penyusun IPG tersebut.

Tabel II.42
Perkembangan Komponen Pembentuk Indeks Pembangunan Gender
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020-2024

Tahun	Komponen IPG								IPG
	Angka Harapan Hidup		Harapan Lama Sekolah		Rata-Rata Lama Sekolah		Pengeluaran Per Kapita		
	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	
2020	64.98	68.97	11.50	12.13	7.98	7.76	12,180	7,360	92.62
2021	65.08	68.98	11.62	12.14	7.99	7.77	12,189	7,361	92.39
2022	65.32	69.27	11.74	12.16	8.00	7.79	12,560	7,608	92.40
2023	65.94	69.92	11.78	12.17	8.22	7.93	12,898	7,859	92.39
2024	68,25	68,25	11,81	12,20	8,25	8,25	9,680	9,680	92,43

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan, Tahun 2025

Pada tahun 2023 maupun tahun 2024, angka harapan hidup (AHH) penduduk perempuan cenderung lebih tinggi daripada penduduk laki-laki. Pada Tabel 2.28 di atas walaupun mengalami peningkatan dari tahun 2023 ke tahun 2024 namun AHH penduduk perempuan selalu lebih tinggi. Ini artinya, penduduk perempuan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan cenderung lebih sehat dan lebih panjang umur dibandingkan penduduk laki-laki.

Penduduk laki-laki cenderung bersekolah lebih lama jika dibandingkan dengan penduduk perempuan. Hal ini terlihat dari Tabel 2.28 yang menunjukan bahwa rata-rata lama sekolah (RLS) laki-laki selalu lebih tinggi daripada perempuan baik di tahun 2023 maupun tahun 2024. Kemudian, harapan lama sekolah (HLS) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tahun 2023 dan 2024 selalu lebih besar perempuan dibanding laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa peluang atau harapan penduduk perempuan untuk terus melanjutkan pendidikan lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk laki-laki. Pengeluaran per kapita yang disesuaikan penduduk laki-laki cenderung lebih besar dibandingkan dengan penduduk perempuan. Hal ini terlihat dari Tabel 2.28 di atas. Pada tahun 2024, pengeluaran per kapita yang disesuaikan penduduk laki-laki sebesar Rp.9.680 juta sedangkan penduduk perempuan hanya sebesar Rp.9.680 juta.

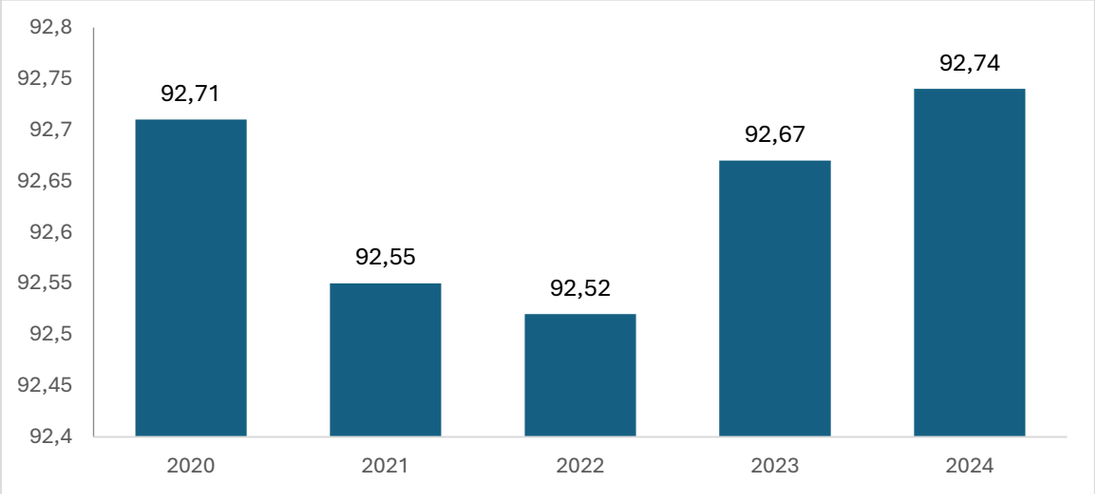

Gambar II.24
Indeks Pembangunan Gender (IPG)
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020-2024
Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan, Tahun 2025

Jika dilihat pembangunan gender (IPG) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tahun 2020 sampai tahun 2024, terlihat terjadi penurunan IPG dari tahun 2020 ke tahun 2021. Pada tahun 2020 IPG Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sebesar 92,71 poin, turun menjadi 92,55 poin pada tahun 2021. Kemudian tahun 2022 turun kembali menjadi 92,52 poin, dan kembali meningkat menjadi 92,67 poin di tahun 2023. Terakhir meningkat kembali menjadi 92,74 poin tahun 2024.

2.2.4.3. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Sampai dengan tahun 2024 indeks pemberdayaan gender di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan baru mencapai 58,28 meningkat dibandingkan tahun 2023 sebesar 57,80. Hal ini cukup memperlihatkan minimnya pemberdayaan perempuan di mana capaian skornya yang kurang maksimal. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dibentuk dari beberapa indikator yaitu persentase perempuan di parlemen, persentase perempuan sebagai tenaga profesional, dan persentase sumbangan pendapatan perempuan. Oleh karena itu, sangat penting untuk memperhatikan data-data dari indikator tersebut.

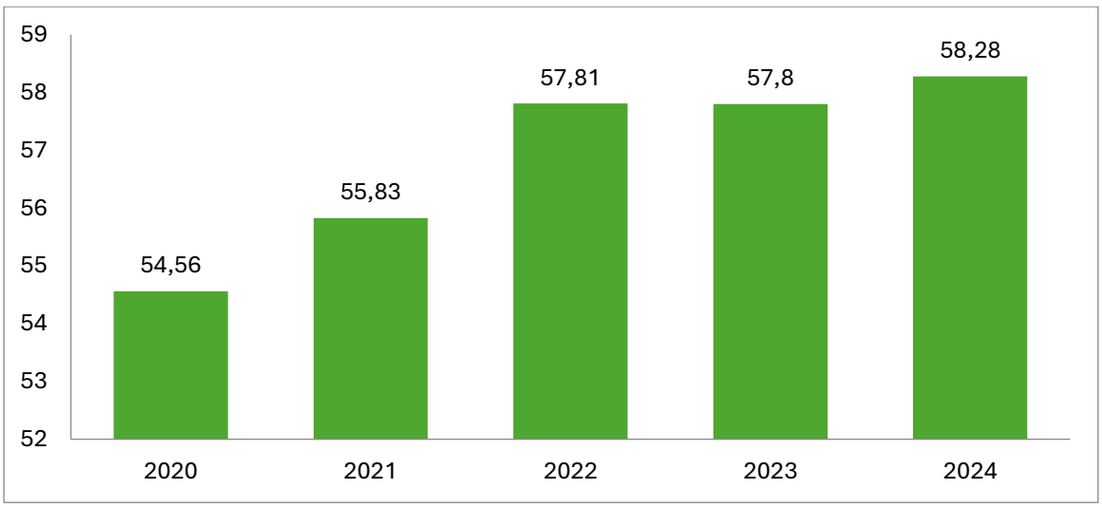

Gambar II.25
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020-2024
Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan, Tahun 2025

2.2.5.Perlindungan Sosial yang Adaptif

2.2.5.1. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan merupakan salah satu Program Prioritas Nasional, merupakan program bidang Kesehatan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan Masyarakat, penciptaan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, Jaminan Sosial Ketenagakerjaan merupakan prioritas pada bidang Penguatan Sumber Daya Manusia, Pendidikan dan Kesehatan, Pencegahan stunting, dan kemiskinan ekstrim. Sampai dengan tahun 2024 di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Cakupan *Universal Coverage* Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (UCJ) sebanyak 37.814 peserta aktif atau baru mencapai 36,17% dari 96.987 potensi peserta.

Tabel II.43
***Universal Coverage* Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (UCJ)**
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2024

No.	Sektor	Potensi Peserta	Peserta Aktif	%
1.	Penerima upah	20656	20656	100,00
2.	Bukan penerima upah	73.425	6,684	9,10
3.	Jasa konstruksi	10474	10474	100,00
	Total	96.987	37.814	36,17

Sumber: BPJS Ketenagakerjaan Cabang Baturaja, Tahun 2025

2.3. Aspek Daya Saing Daerah

2.3.1 Daya Saing Sumber Daya Manusia

2.3.1.1. Angka Ketergantungan

Angka Ketergantungan atau angka beban tanggungan penduduk Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan cenderung fluktuatif namun

menunjukkan tren penurunan secara keseluruhan. Angka ketergantungan mencapai 42,89 pada tahun 2024. Angka ini mengindikasikan bahwa dari setiap 100 orang yang berusia produktif harus menanggung sebanyak 42-43 penduduk usia tidak produktif baik itu usia 0-14 tahun dan usia 65 ke atas. Sumatera Selatan menunjukkan angka ketergantungan yang relatif lebih stabil dibandingkan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, meskipun juga memperlihatkan tren penurunan yang kecil.

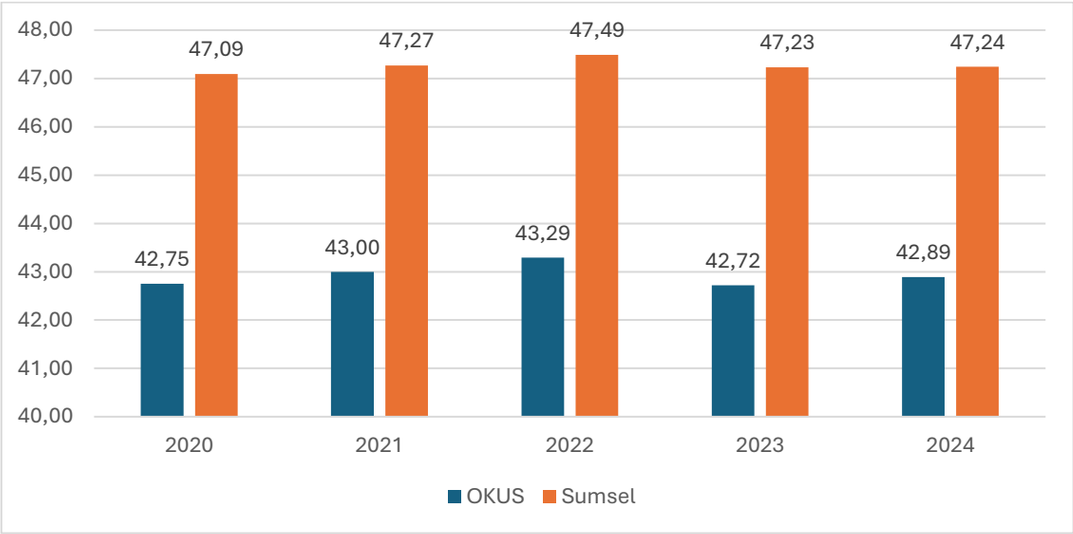

Gambar II.26
Rasio Ketergantungan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020-2024
Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025

2.3.1.2. Kualitas Tenaga Kerja

Penduduk yang memiliki pekerjaan sebagian besar hanya memiliki jenjang pendidikan sekolah dasar yakni sebesar 39,83% dan pendidikan sekolah menengah atas sebesar 31,20%. Angka ini memperlihatkan kualitas tenaga kerja di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yang belum memiliki daya saing dan masih perlu adanya peningkatan keterampilan dalam memasuki dunia usaha/pekerjaan.

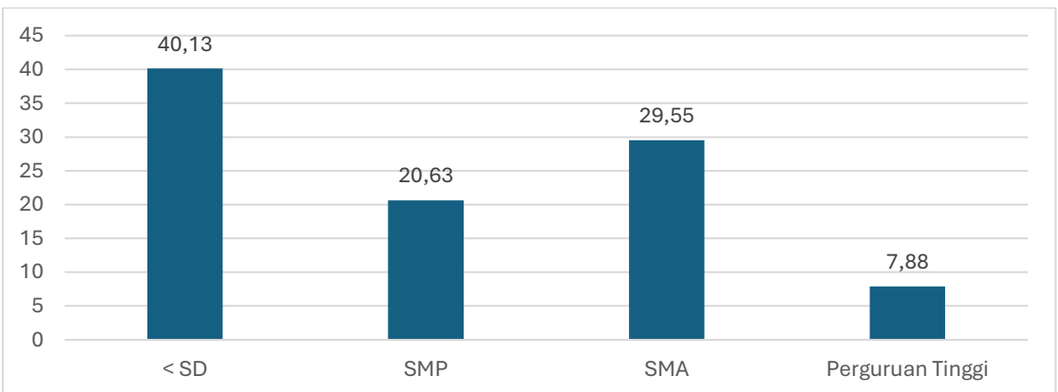

Gambar II.27
Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Tahun 2024
Sumber: BPS Kabupaten OKU Selatan, Tahun 2025

2.3.2. Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi

2.3.2.1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan persentase jumlah angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. Indikator ini mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian daerah tersebut.

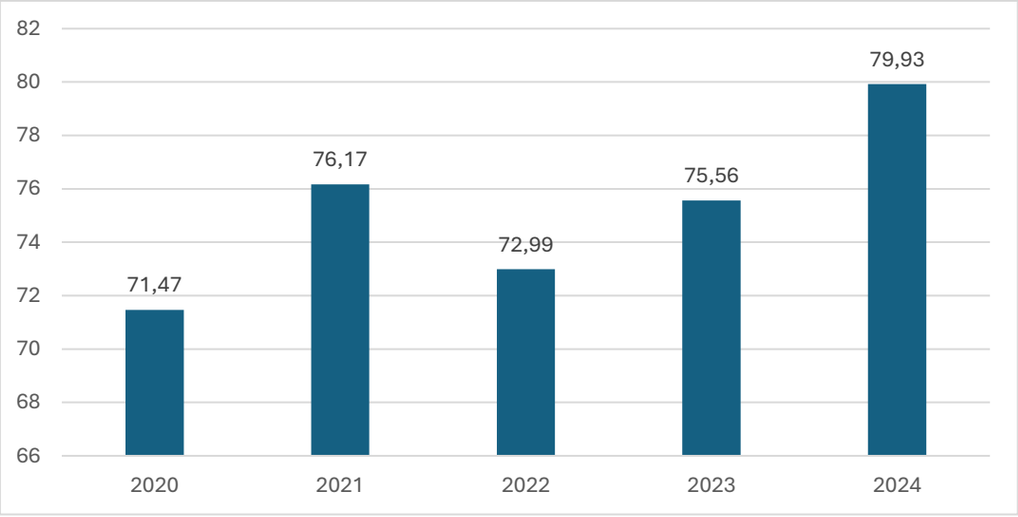

Gambar II.28
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020-2024
Sumber: BPS Kabupaten OKU Selatan, Tahun 2025

Dilihat dari indikator ini, TPAK Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan cenderung fluktuatif dari tahun 2020-2024. Pada tahun 2021 TPAK mengalami peningkatan menjadi 76,17%, dan kembali mengalami penurunan menjadi 72,99% pada tahun 2022, hingga tahun 2023 mencapai angka 75,56% artinya di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dari 100 penduduk usia 15 tahun keatas, sebanyak sekitar 75 orang tersedia untuk memproduksi barang atau jasa pada tahun ini.

2.3.2.2. Indeks Inovasi Daerah

Indeks Inovasi Daerah merupakan salah satu instrumen penting yang digunakan untuk mengukur sejauh mana daerah mampu menciptakan dan menerapkan kebijakan atau program inovatif yang mendukung pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, dan pembangunan daerah. Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan memperoleh predikat "Inovatif" pada tahun 2021 sampai tahun 2024, yang menunjukkan bahwa di tahun-tahun tersebut, Pemerintah Daerah berhasil menunjukkan adanya inisiatif, kreativitas, dan kebaruan dalam pelaksanaan program atau kebijakan publik. Namun, keberlanjutan inovasi

masih menjadi tantangan karena predikat sempat "Kurang Inovatif" di tahun 2022.

Tabel II.44
Skor Indeks Inovasi Daerah
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020-2024

Tahun	Skor Indeks	Peringkat	Predikat
2020	358	175	Kurang Inovatif
2021	36,59	211	Inovatif
2022	32,44	300	Kurang Inovatif
2023	42,04	234	Inovatif
2024	46,41	198	Inovatif

Sumber: Bapperida Kabupaten OKU Selatan, Tahun 2025

2.3.2.3. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga

Pengeluaran konsumsi rumah tangga menunjukkan nilai pengeluaran yang dilakukan oleh rumah tangga untuk membeli barang dan jasa. Terlihat adanya tren peningkatan yang konsisten dari tahun 2020 hingga tahun 2024. Di mulai dari Rp.5,911.41 miliar pada tahun 2020, PKRT ADHB terus meningkat setiap tahunnya, mencapai Rp7,853.61 miliar pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan peningkatan nilai nominal pengeluaran rumah tangga di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, yang bisa disebabkan oleh peningkatan volume konsumsi, kenaikan harga barang dan jasa (inflasi), atau kombinasi keduanya.

Berdasarkan harga konstan 2010, setelah tahun 2020, PKRT ADHK Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan menunjukkan tren pertumbuhan positif, meningkat dari Rp.3,536.25 miliar pada tahun 2021 hingga mencapai Rp.4,086.94 miliar pada tahun 2024. Pengeluaran konsumsi rumah tangga di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan mengalami peningkatan secara nominal sepanjang periode tahun 2020-2024.

Tabel II.45
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (Miliar Rupiah)
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
ADHB	5,911.41	6,122.34	6,854.10	7,406.80	7,853.61
ADHK 2010	3,489.13	3,536.25	3,735.42	3,914.19	4,086.94

Sumber: BPS Kabupaten OKU Selatan, Tahun 2025

2.3.2.4. Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) menunjukkan kesejahteraan petani di suatu wilayah. Dari NTP yang terlihat, kesejahteraan petani di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan mengalami peningkatan di mana NTP pada tahun 2024 menjadi 120,97.

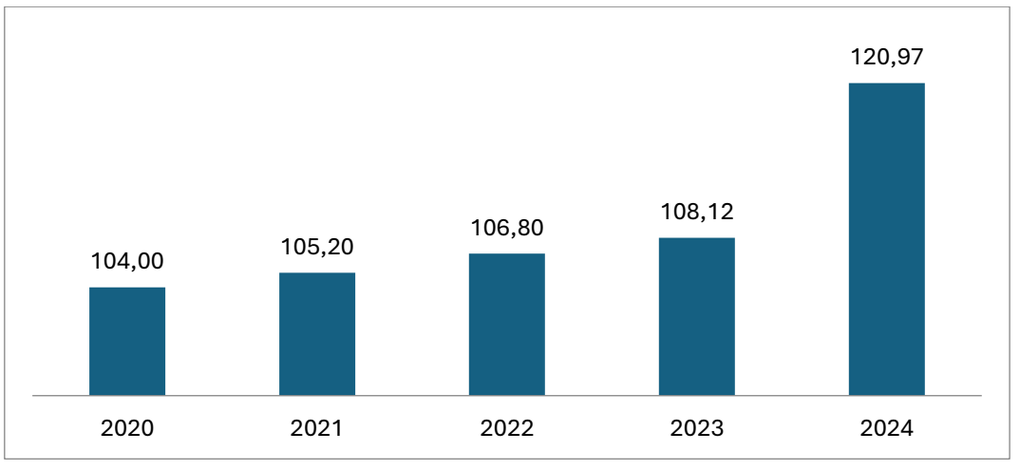

Gambar II.29
Nilai Tukar Petani Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020-2024
Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten OKU Selatan, Tahun 2025

Peningkatan NTP diartikan sebagai peningkatan kesejahteraan petani. Melalui hasil penghitungan yang telah dilakukan, di mana NTP tahun 2024 adalah 120,97 berarti nilai NTP>100 yang berarti bahwa petani di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan mengalami surplus, di mana pendapatan yang diterima oleh petani lebih besar dari pada pengeluarannya. Selain itu juga, nilai NTP Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Ini terlihat dari Gambar 2.25 di atas, di mana pada tahun 2020 nilai NTP=104 memiliki artian bahwa, kesejahteraan petani tidak mengalami perubahan.

2.3.2.5 Rasio Kewirausahaan

Penumbuhan wirausaha pemula dan wirausaha produktif yang belum optimal. Penumbuhan wirausaha penting dilakukan untuk meningkatkan rasio kewirausahaan di daerah. Rasio kewirausahaan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dapat dilihat tabel II.41, yang mana mengalami kenaikan dari tahun 2020 sebesar 19,65 persen sampai 2024 sebesar 21,95 persen. Dari data tersebut terdapat kenaikan capaian tetapi belum secara signifikan yang seharusnya dapat dioptimalka guna menunjang pertumbuhan ekonomi.

Tabel II.46
Rasio Kewirausahaan
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio Kewirausahaan	19,65	19,65	20,69	21,15	21,95

Sumber: *Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 5 Tahun 2024*

2.3.2.5 Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum

Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum merupakan kontribusi (persentase nilai) PDRB dari sektor akomodasi dan makan minum terhadap total PDRB suatu daerah, atau laju pertumbuhan ekonomi dari sektor tersebut dalam periode tertentu. Pada sektor makan dan minum diwilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sangat dipengaruhi oleh pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah serta ramainya kunjungan masyarakat luar daerah. Berikut ini merupakan Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tahun 2020-2024.

Tabel II.47
Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio Kewirausahaan	1,11	1,11	1,16	1,23	1,24

Sumber : BPS Kabupaten OKU Selatan, Tahun 2025

2.3.3. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

2.3.3.1. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)

Secara keseluruhan, PMTB Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan berfluktuasi namun menunjukkan tren pertumbuhan positif, meskipun sempat mengalami penurunan kecil pada tahun 2021. Peningkatan yang terjadi pada tahun-tahun setelahnya menunjukkan adanya pemulihan dan peningkatan investasi yang signifikan, baik dari sektor Pemerintah maupun swasta. Penting bagi Pemerintah Daerah untuk terus mendorong kebijakan yang dapat menarik investasi, meningkatkan daya saing ekonomi daerah, dan memperkuat sektor-sektor produktif yang ada.

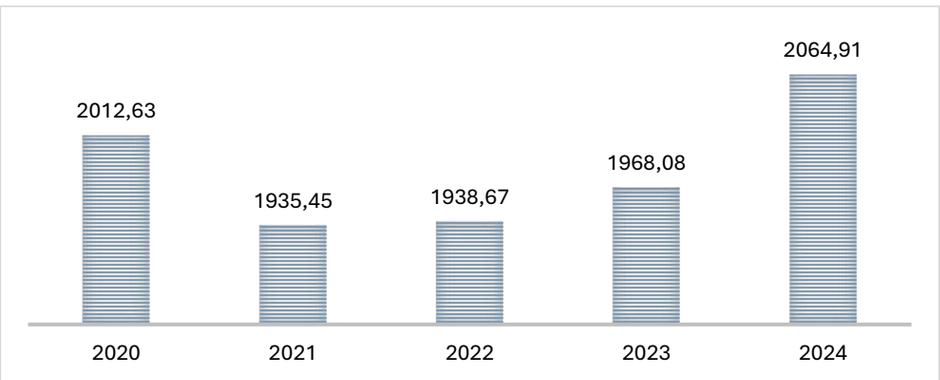

Gambar II.30
Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020-2024
Sumber: BPS Kabupaten OKU Selatan, Tahun 2025

2.3.3.2. Ekspor Barang dan Jasa

Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan periode tahun 2020-2024 mengalami defisit perdagangan barang dan jasa yang konsisten, ditunjukkan oleh nilai negatif pada setiap tahun. Hal ini berarti nilai impor barang dan jasa lebih besar dibandingkan ekspor yang dilakukan oleh daerah tersebut. Meskipun ada sedikit penurunan defisit pada tahun 2021 hingga 2024, namun belum ada perubahan yang signifikan menuju surplus perdagangan. Pemerintah Daerah perlu meningkatkan keterlibatan sektor swasta dan mendorong inovasi dalam produk ekspor untuk mengurangi ketergantungan pada impor dan memperkuat perekonomian lokal.

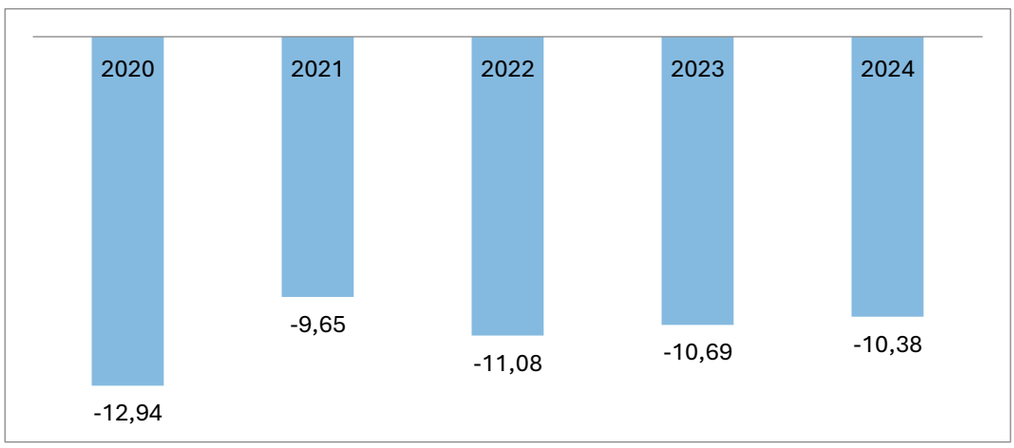

Gambar II.31
Persentase Net Ekspor Barang dan Jasa
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020-2024
Sumber: BPS Kabupaten OKU Selatan, Tahun 2025

2.3.4. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

2.3.4.1. Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Ketersediaan infrastruktur yang memadai merupakan salah satu faktor daya tarik suatu daerah meningkatkan daya saing daerah. Ketersediaan fasillitas wilayah/infrastruktur Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dapat dijabarkan sebagai berikut:

2.3.4.1.1. Perhubungan

2.3.4.1.1.1. Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan dihitung untuk mengetahui tingkat ketersediaan sarana jalan dapat memberi akses tiap kendaraan. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan adalah perbandingan panjang jalan terhadap jumlah kendaraan.

Tabel II.48
Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020-2024

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Panjang Jalan	626.87	550.66	708.129	708,129	898.105

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
2.	Jumlah Kendaraan	430	500	567	351	300
	- Bis	93	97	71	49	43
	- Truk	47	134	145	80	57
	- Truk Ringan	60	100	181	44	31
	- Pick Up	230	169	170	179	169
3.	**(1/2)**	**1.46**	**1.1**	**0,98**	**2,02**	**2,99**

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten OKU Selatan, Tahun 2025

Rasio panjang jalan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020-2024 rasio panjang jalan meningkat sebesar 2,99% dengan nilai rasio terbesar pada tahun 2024 dan terendah pada tahun 2022.

2.3.4.1.1.2. Jumlah Orang/Barang Yang Terangkut Angkutan Umum

Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan terus mengalami fluktuatif dengan nilai terendah pada tahun 2021 sebesar 591, namun pada tahun 2023 jumlahnya meningkat dengan nilai 137,479. Perkembangan jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum tahun 2020-2024 disajikan pada Gambar II.32 berikut ini.

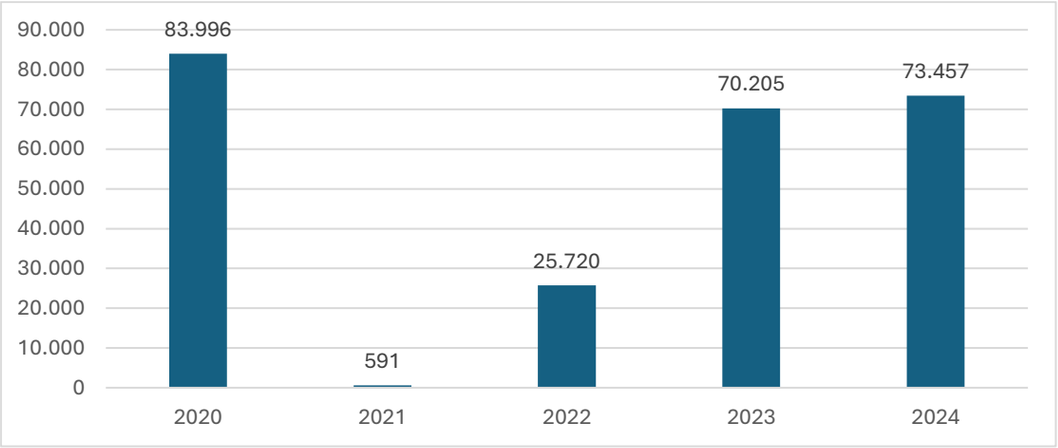

Gambar II.32
Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020-2024
Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten OKU Selatan, Tahun 2025

2.3.4.1.1.3. Jumlah Orang/Barang Melalui Dermaga/Bandara/Terminal Per Tahun

Data jumlah orang dan barang yang melalui dermaga, bandara, dan terminal di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan tren penurunan yang cukup drastis, terutama pada tahun 2021 yang kemungkinan besar disebabkan oleh pembatasan mobilitas dan aktivitas selama pandemi dengan hanya 5.668 pergerakan tercatat (angka terendah dalam lima tahun terakhir)

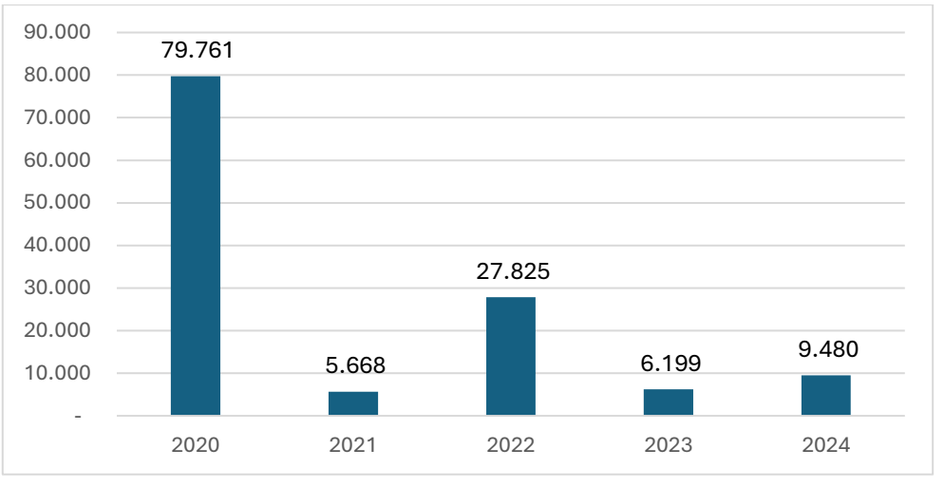

Gambar II.33
Jumlah Orang/Barang melalui Dermaga/Bandara/Terminal per Tahun
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020-2024
Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten OKU Selatan, Tahun 2025

2.3.4.1.2. Penataan Ruang

Luas wilayah produktif adalah persentase realisasi luas wilayah produktif terhadap luas rencana kawasan budidaya sesuai dengan RTRW. Luas wilayah produktif diasumsikan bahwa wilayah produktif yang dimaksud adalah wilayah pertanian lahan basah, pertanian lahan kering, dan perkebunan. Sehingga dapat dilakukan perhitungan untuk mengetahui luas wilayah produktif. Luas wilayah produktif pada wilayah budidaya juga mengalami peningkatan hingga mencapai 99,45% pada tahun 2024.

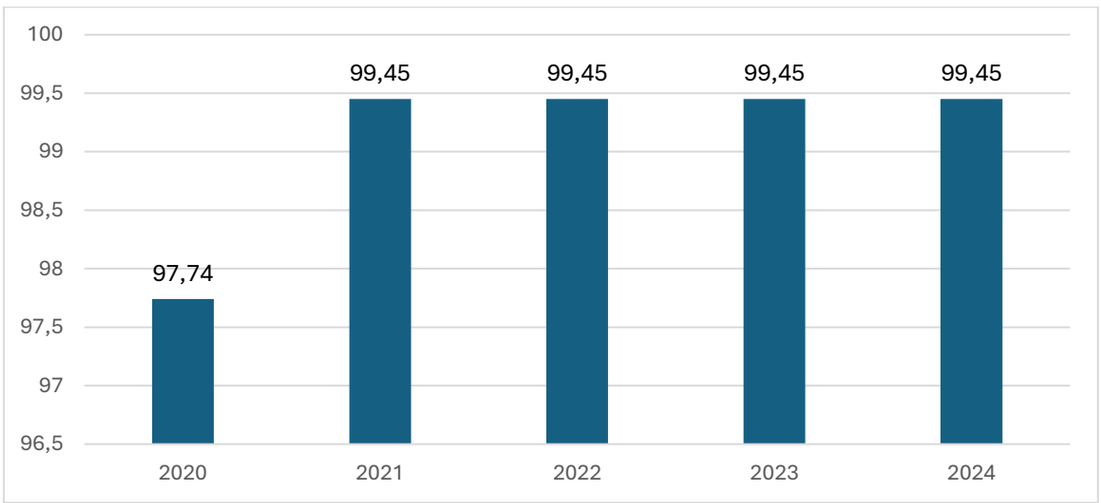

Gambar II.34
Persentase Luas Wilayah Produktif
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020-2024
Sumber: Dinas PUPR Kabupaten OKU Selatan, Tahun 2025

2.3.4.2. Persentase Desa Mandiri

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam pembangunan Desa meliputi pemenuhan 4 aspek, yaitu: (1) kebutuhan dasar, (2) pelayanan dasar, (3) lingkungan, dan (4) kegiatan pemberdayaan masyarakat

desa. Desa mandiri adalah Desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar yang mencukupi, infrastruktur yang memadai, aksesibilitas/transportasi yang tidak sulit, pelayanan umum yang bagus, serta penyelenggaraan pemerintahan yang sudah sangat baik. Desa Mandiri adalah Desa yang memiliki nilai Indeks Pembangunan Desa (IPD) lebih dari 75.

Tabel II.49
Persentase Desa Mandiri
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020-2024

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah desa berkembang yang memeuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa membangun per tahun	0	0	0	0	0
2.	Jumlah desa berkembang (per awal tahun n)	97	131	152	152	152
3.	(1/2 x 100)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sumber: Dinas PMPD Kabupaten OKU Selatan, Tahun 2025

2.3.4.3. Lama Proses Perizinan

Proses perijinan usaha di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan juga semakin efektif dengan menurunnya lama proses perijinan dari 2 (dua) hari di tahun 2016-2017 menjadi 1 (satu) hari saja di tahun 2020 sampai tahun 2020.

Tabel II.50
Lama Proses Perizinan
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020-2024

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Lama proses perizinan	1 hari	1 hari	1 hari	1 hari	1 hari

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten OKU Selatan, Tahun 2025

2.3.4.4. Perbankan

Jumlah bank di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan pada dasarnya tidak ada perubahan di mana jumlah bank umum konvensional sebanyak 6 unit pada tahun 2020 sampai tahun 2024.

Tabel II.51
Jenis dan Jumlah Bank dan Cabang
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020-2024

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Bank Umum					
	Konvensional	6	6	6	6	6
	Syariah	0	0	0	0	0
2.	BPR					
	Konvensional	0	0	0	0	0
	Syariah	0	0	0	0	0

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten OKU Selatan, Tahun 2025

2.3.4.5. Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah

Dalam meningkatkan pemasukan pendapatan asli daerah, Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan telah mengeluarkan Peraturan Daerah terkait pajak dan retribusi dengan jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah sebanyak 33 pajak.

Tabel II.52
Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020-2024

No.	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah	33	33	33	33	33

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten OKU Selatan, Tahun 2025

2.3.4.6. Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Usaha

Selain itu, terdapat 1 (satu) Peraturan Daerah yang mendukung iklim usaha untuk memberi jaminan kepada pelaku usaha sehingga meningkatkan iklim investasi usaha di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Tabel II.53
Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Usaha
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020-2024

No.	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah perda yang mendukung iklim usaha	1	1	1	1	1

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten OKU Selatan, Tahun 2025

Periode tahun 2020-2024 terdapat 1 (satu) Peraturan Daerah (Perda) yang mendukung iklim usaha di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, yaitu: Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Izin Usaha Angkutan Umum.

2.3.5. Indeks Daya Saing Daerah

Hasil penilaian Indeks Daya Saing Daerah (IDSD), Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan memperoleh skor keseluruhan sebesar 3,25. Skor ini mencerminkan capaian daya saing daerah yang masih berada pada level sedang dan menunjukkan adanya peluang peningkatan diberbagai aspek. Dari 12 pilar penilaian, kinerja terbaik tercermin pada Pilar 7 (Ketenagakerjaan) dengan skor 4,84, mengindikasikan tingkat partisipasi angkatan kerja yang tinggi serta dinamika pasar kerja yang cukup baik. Pilar-pilar lain yang juga menunjukkan capaian positif adalah Pilar 1 (Institusi) dengan skor 4,13, Pilar 3 (Adopsi Teknologi Informasi dan Komunikasi) dengan skor 4,00, dan Pilar 10 (Dinamisme Bisnis) dengan skor 3,91. Capaian ini menandakan bahwa

Pemerintah Daerah telah membangun institusi yang relatif stabil dan adaptif terhadap perkembangan teknologi serta mendukung iklim usaha yang kondusif.

Meskipun demikian, terdapat beberapa pilar yang menunjukkan skor rendah dan memerlukan perhatian serius, seperti Pilar 9 (Sistem Keuangan) dengan skor 0,84, Pilar 12 (Ukuran Pasar) dengan skor 1,00, dan Pilar 8 (Pasar Produk) dengan skor 1,93. Ketiga pilar ini mengindikasikan masih terbatasnya akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal, kecilnya daya beli dan potensi pasar lokal, serta belum optimalnya pengembangan dan pemasaran produk-produk unggulan daerah. Selain itu, Pilar 11 (Kapabilitas Inovasi) dan Pilar 2 (Infrastruktur) juga memerlukan peningkatan lebih lanjut guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang inovatif dan inklusif.

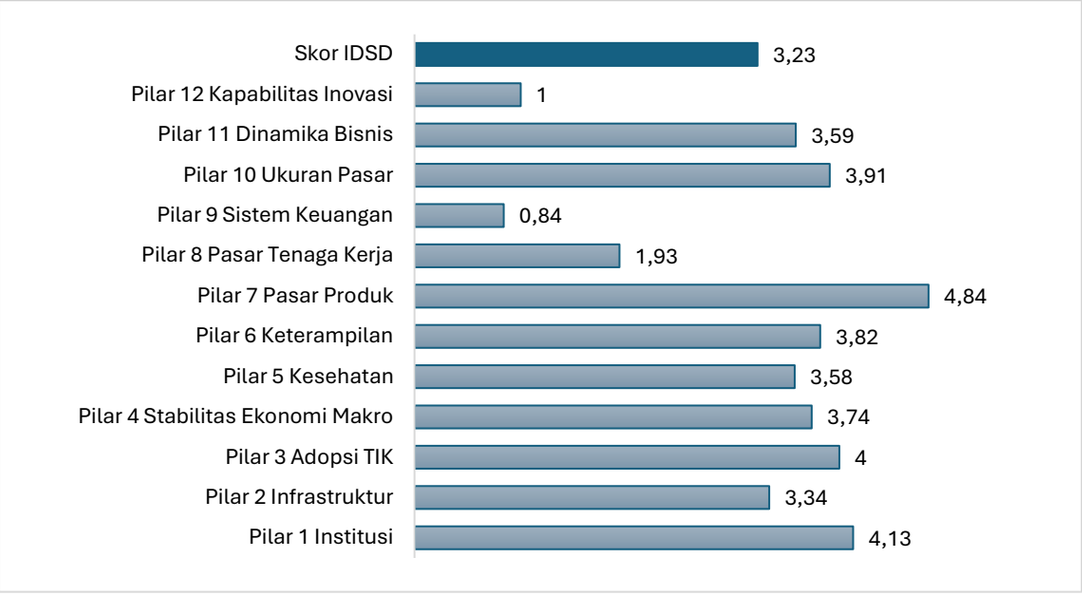

Gambar II.35
Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2024
Sumber: Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), 2024

2.4. Aspek Pelayanan Umum

2.4.1.Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

2.4.1.1. Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Untuk memastikan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu, maka Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE agar penerapan SPBE dapat berjalan efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas dan optimal. Untuk mengukur perkembangan penerapan SPBE di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional melaksanakan Evaluasi SPBE. Pada tahun 2024, telah dilaksanakan Evaluasi SPBE dengan menggunakan instrumen sebagaimana telah diatur melalui Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE dengan nilai evaluasi 2,34 ditahun 2024.

Laporan Hasil Evaluasi SPBE ini, diharapkan dapat dimanfaatkan dalam menentukan arah tindak lanjut yang harus dilakukan dalam mendorong peningkatan penerapan SPBE secara menyeluruh pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah di masa mendatang, dalam rangka meningkatkan kualitas layanan SPBE kepada masyarakat dan terwujudnya Pemerintah Digital dalam kerangka Transformasi Digital Pemerintah.

Tabel II.54
Indeks SPBE Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2024

Tahun	Nilai Evaluasi (skala 1 s/d 5)	Keterangan
2020	Tidak mengikuti Evaluasi	
2021	2,19	Baik
2022	1,93	Cukup
2023	2.31	Cukup
2024	2.34	Cukup

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten OKU Selatan, Tahun 2025

2.4.2. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial

2.4.2.1. Persentase Penegakan Perda

Persentase penegakan Peraturan Daerah di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dari tahun 2020 hingga tahun 2024 menunjukkan tren yang positif dan konsisten meningkat. Pada tahun 2018, tingkat penegakan Perda berada di angka 70%, kemudian mengalami peningkatan signifikan menjadi 80% pada tahun 2019. Peningkatan ini berlanjut secara drastis pada tahun 2020 hingga mencapai 100%, dan capaian maksimal ini berhasil dipertahankan selama dua tahun berikutnya, yakni 2021 dan 2022. Konsistensi pada angka 100% dalam tiga tahun terakhir menunjukkan adanya perbaikan signifikan dalam sistem penegakan hukum daerah, efektivitas pelaksanaan kebijakan, serta peningkatan kepatuhan terhadap Perda di wilayah Ogan Komering Ulu Selatan. Hal ini bisa menjadi indikator keberhasilan pemerintah daerah dalam menegakkan aturan dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

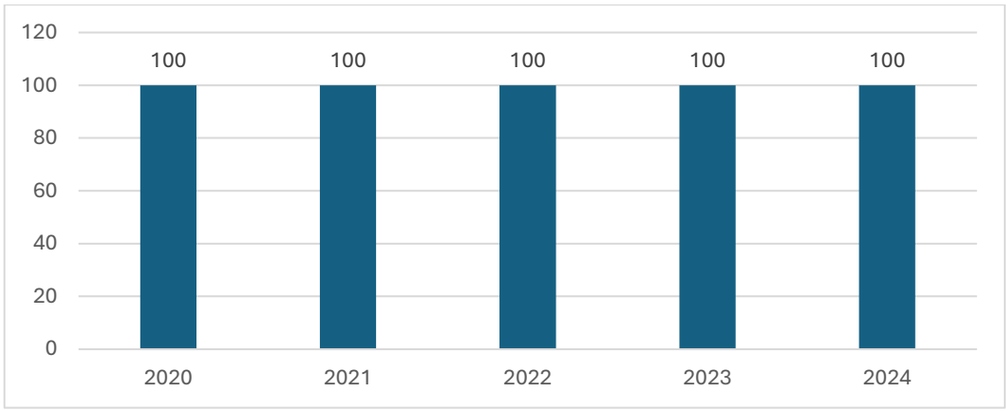

Gambar II.36
Persentase Penegakan Perda
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020-2024
Sumber: Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten OKU Selatan, Tahun 2025

2.4.2.2. Angka Kriminalitas

Angka kriminalitas berkaitan dengan jumlah tindak kejahatan yang terdiri dari penganiayaan, pencurian/perampokan, pembunuhan, penipuan, kesusilaan dan pelanggaran lainnya. Angka kriminalitas menunjukkan kondusivitas keamanan di suatu wilayah. Angka kriminalitas di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sempat mengalami penurunan hingga angka kriminalitas yang ditangani mencapai 0,48 pada tahun 2020. Kemudian meningkat menjadi 4,22 pada tahun 2021, dan terakhir menurun kembali menjadi 0,04 pada tahun 2024.

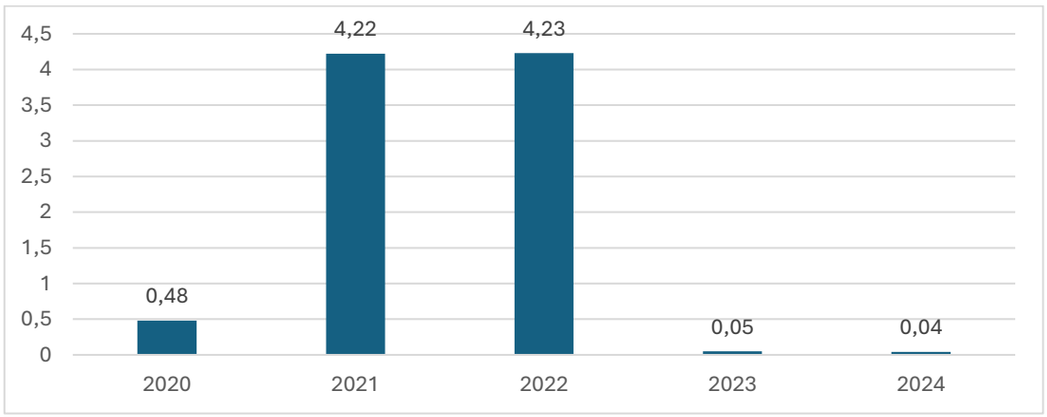

Gambar II.37
Angka Kriminalitas Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020-2024
Sumber: LKJIP Kabupaten OKU Selatan, Tahun 2024

Telah dianalisis faktor penghambat dan pendorong dalam menekan angka kriminalitas. Faktor penghambat dari penekanan angka kriminalitas yaitu:

a. Lingkungan fisik yang kurang aman, seperti wilayah yang minim pencahayaan atau kurangnya pengawasan, dapat memberikan peluang bagi kegiatan kriminal.

b. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang risiko dan konsekuensi kriminalitas dapat menghambat upaya pencegahan. Peningkatan kesadaran masyarakat melalui edukasi dapat membantu mengurangi faktor ini.
c. Masalah narkotika dan ketergantungan dapat menjadi pendorong kriminalitas. Penyalahgunaan zat dapat mengarah pada kegiatan ilegal untuk mendapatkan dana atau obat-obatan terlarang.

Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan berupaya terus melakukan penekanan angka kriminalitas antara lain, yaitu:

1) Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam program keamanan komunitas dan pembentukan kelompok keamanan warga.
2) Peningkatan pengawasan wilayah publik melalui penggunaan teknologi, seperti kamera pengawas dan pencahayaan yang memadai.
3) Program pendidikan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang konsekuensi hukum dari perilaku kriminal dan cara-cara mencegahnya.

2.5. Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

2.5.1.Fokus Layanan Urusan Pemerintah Wajib

2.5.1.1. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

2.5.1.1.1. Pendidikan

Urusan pendidikan memiliki peran penting dalam peningkatan sumber daya manusia, karena dipandang mampu meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam menyelesaikan masalahnya secara tepat. Arah kebijakan pendidikan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan adalah peningkatan kualitas pendidikan melalui peningkatan akses pendidikan yang merata dan berkualitas sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada semua jenjang pendidikan baik formal maupun non formal, dan secara *impact* dapat diukur melalui Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS).

Beberapa capaian pembangunan daerah di bidang pendidikan cukup terlihat sisi positifnya seperti angka kelulusan yang mencapai 100 persen pada semua jenjang hingga semakin meningkatnya kondisi fisik bangunan sekolah di semua jenjang pendidikan. Secara lengkapnya, berikut capaian kinerja urusan pendidikan sebagai hasil dari pembangunan daerah.

Tabel II.55
Capaian Kinerja Urusan Pendidikan
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020-2024

No	Uraian	Satuan	Realisasi Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persen	47.62	44.71	44.24	44,67	44,55
2	Angka Partisipasi Kasar						
	▪ SD/MI	Persen	110.60	110.54	111.55	110.78	110,81
	▪ SLTP/MTS	Persen	87.88	89.92	90.83	88.26	88,51
	▪ SLTA/SMK/MA	Persen	76.53	79.95	78.00	80.48	81,78
3.	Angka Partisipasi Murni						
	▪ SD/MI	Persen	99.00	99.04	99.94	99.60	99,72
	▪ SMP/MTs	Persen	78.68	79.06	80.20	80.14	80.43
	▪ SMA/SMK/MA	Persen	61.83	61.88	61.60	56.94	57.46
4	Angka Partisipasi Sekolah						
	▪ 7-12	Persen	99.74	99.60	99.21	99,56	99,76
	▪ 13-15	Persen	91.39	91.61	91.42	91,71	91,90
	▪ 16-18	Persen	69.41	71.03	71.56	71,78	71,82
5	Angka Kelulusan						
	▪ Angka kelulusan (AL) SD/MI	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	▪ Angka kelulusan (AL) SMP/MTs	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	▪ Angka kelulusan (AL) SMA/ SMK/ MA	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6	Angka Melanjutkan (AM)						
	▪ Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	Persen	88.28	113.91	114.44	114.74	114.86
	▪ Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	Persen	69.91	92.01	90.03	90.23	90.35
7	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	Persen	93.33	98.31	98.98	99.28	99.41
8	Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik	Persen	73.40	75.53	93.62	93.82	94.12
9	Persentase SD/MI Berakreditasi Minimal B	Persen	43.51	45.08	52.88	53.08	53.29
10	Persentase SMP/MTs Berakreditasi Minimal B	Persen	33.68	36.84	47.37	47.57	47.66

No	Uraian	Satuan	Realisasi Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
11	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar						
	▪ SD/MI	Rasio	1:167	1:137	1:138	1:148	1:151
	▪ SMP/MTs	Rasio	1:326	1:237	1:235	1:245	1:249
12	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar						
	▪ SD/MI	Rasio	1:12.45	1:12.78	1:11.13	1:11.15	1:11.16
	▪ SMP/MTs	Rasio	1:13.49	1:11.72	1:9.47	1:9.49	1:9.52
13	Rasio guru terhadap murid pendidikan menengah	Rasio	1:13.37	1:10.89	1:13.44	1:13.48	1:13.54
14	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	Persen	75.11	85.92	89.11	89.16	89.77
15	Pencapaian Pemenuhan SPM PAUD	Persen	47.62	44.85	53.95	52.05	52.35
16	Pencapaian Pemenuhan SPM Pendidikan SD	Persen	84.95	98.42	88.77	88.97	89.07
17	Pencapaian Pemenuhan SPM Pendidikan SMP	Persen	56.08	75.86	51.43	51.83	52.03
18	Pencapaian Pemenuhan SPM Pendidikan Kesetaraan	Persen	2.00	2.02	3.20	3.40	3.42

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten OKU Selatan, Tahun 2025

2.5.1.1.2. Kesehatan

Perkembangan bidang kesehatan suatu daerah menjadi salah satu tujuan pokok Pemerintah Daerah untuk menyejahterakan masyarakatnya dalam kerangka peningkatan kualitas sumber daya manusia yang sehat jasmani dan rohani. Terkait dengan hal tersebut, bidang kesehatan sendiri juga menjadi salah satu indikator dalam menentukan keberhasilan pembangunan daerah dari segi fasilitas, sarana prasarana, pemerataan kesehatan, hingga tingkat kesehatan penduduk suatu wilayah. Pada urusan kesehatan, pencapaian kinerja Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tersaji pada Tabel II.49 berikut.

Tabel II.56
Capaian Kinerja Urusan Kesehatan
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020-2024

No	Uraian	Satuan	Realisasi Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Penduduk Yang Mempunyai Keluhan Kesehatan	Persen	17.46	16.95	21.47	20.17	23.55
2	Jumlah Kematian Bayi	Bayi	46	18	9	12	10
3	Jumlah Kematian Ibu	Ibu	5	5	3	2	2
4	Persentase balita gizi buruk	Persen	0.420	0.423	0.134	0.50	0,101

No	Uraian	Satuan	Realisasi Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
5	Prevalensi balita gizi kurang	Persen	0.24	1.29	0.52	2.6	0,02
6	Cakupan Desa Siaga Aktif	Persen	88.41	91.89	92.66	89,96	91,89
7	Rasio posyandu per satuan balita	Rasio	8.66	13.29	12.50	10.08	10.22
8	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	Rasio	1:5,960	1:5,798	1:7,085	1:7,069	1:7,055
9	Rasio rumah sakit per satuan penduduk	Rasio	0.00240	0.00240	0.00239	0,00235	0,00232
10	Rasio dokter per satuan penduduk	Rasio	0.074	0.139	0.050	0.063	0.076
11	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	Rasio	2.65	3.46	2.92	2,96	2,98
12	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	Persen	94.92	88.41	81.26	77.60	77.65
13	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	Persen	83.01	62.54	75.67	80.30	80.37
14	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
15	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	Persen	90.31	92.98	90.63	74.60	74.66
16	Cakupan balita pneumonia yang ditangani	Persen	0.36	0.17	0.00	0.00	0.00
17	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	Persen	30.25	24.87	46.23	49.19	49.76
18	Tingkat prevalensi tuberkulosis (per 100.000 penduduk)		98.75	59.89	126.06	71.90	71.96
19	Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)		0.48	0.72	3.83	4.71	4.78
20	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	Persen	32.80	21.91	46.22	49.19	49.45
21	Proporsi kasus tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	Persen	32,80	54,80	7,59	11,45	11,76
22	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

No	Uraian	Satuan	Realisasi Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
23	Penderita diare yang ditangani	Persen	46.41	100.00	100.00	13.48	13.51
24	Angka kejadian malaria		0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
26	Tingkat kematian akibat malaria		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
27	Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat	Persen	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	Persen	0.0005	0.0000	0.0007	0.0014	0.0010
29	Cakupan kunjungan bayi	Persen	99.61	99.10	86.54	87.26	87.32
30	Cakupan puskesmas		0.0046	0.0046	0.0045	0.0044	0.0054
31	Cakupan pembantu puskesmas	Persen	15.48	18.14	13.13		
32	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	Persen	97.12	92.98	86.59	99.17	99.47
34	Cakupan pelayanan nifas	Persen	94.92	95.83	74.91	71.92	72.13
36	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	Persen	98.31	0.00	0.21	1.36	1.36
38	Cakupan pelayanan anak balita	Persen	70.26	63.29	67.27	76.27	76.65
39	Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat	Persen	10.63	14.49	92.18	97.10	97.22
40	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
41	Jumlah puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa	PKM	19	19	19	19	19
44	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Desa/ Kel	221	259	259	259	259
45	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)	Desa/ Kel	171	198	212	220	220
46	Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin di Puskesmas	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
47	Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persen	97,12	92,98	86,59	99,52	84,25

No	Uraian	Satuan	Realisasi Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
48	Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan	Persen	94,91	88,41	81,26	97,21	93,31
49	Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persen	84,32	96,12	86,54	99,73	83,39
50	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Persen	92.07	62,33	51,18	96,62	91,02
51	Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persen	11,00	13,00	92,18	97,63	95,38
52	Persentase Orang Usia 15-59 Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar	Persen	3.23	32.38	20.38	20.48	20.48
53	Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun Ke Atas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standard	Persen	19,68	78,46	88,92	67,10	88,02
54	Persentase Penderita Hipertensi Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persen	10.12	38.84	11.40	11.45	11.45
55	Persentase Penderita DM Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persen	10.12	47.82	15.1	15.14	15.14
56	Persentase ODGJ Berat Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa Sesuai Standar	Persen	61.71	45.41	80.80	80.85	80.85
57	Persentase Orang Terduga TBC Mendapatkan Pelayanan TBC Sesuai Standar	Persen	32.80	19.91	35.18	35.21	35.21
58	Persentase Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pelayanan Deteksi Dini HIV Sesuai Standar	Persen	4.03	2.75	27.36	27.38	27.38

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten OKU Selatan, Tahun 2025

2.5.1.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dalam rangka mendukung pembangunan infrastruktur dan tata ruang yang berkelanjutan, Pemerintah Daerah telah menunjukkan berbagai upaya untuk memperbaiki kualitas infrastruktur dasar, terutama di sektor pekerjaan umum dan penataan ruang. Data indikator kinerja daerah untuk periode tahun 2020 hingga tahun 2024 memberikan gambaran yang cukup komprehensif mengenai pencapaian-pencapaian yang telah diraih, sekaligus tantangan yang masih harus dihadapi.

Tabel II.57
Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020-2024

No	Uraian	Satuan	Realisasi Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Pekerjaan Umum						
1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	Persen	53.37	76.98	78.61	75.42	58,73
2	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	Rasio	0.1504	0.1699	0.1699	0.2155	0,2117
3	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	Persen	2.07	1.84	1.87	1,48	1,48
4	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak	Persen	53,86	57,68	57,54	63,20	63,40
5	Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	Persen	40.71	40.68	39.73	37,46	35,65
6	Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor	Persen	15.58	0.76	0.28	4,27	2,13
7	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	Persen	67.25	58.95	58,25	58,49	61,94
8	Persentase rumah tangga dengan sumber air minum layak	Persen	67,75	77,12	76,52	80,18	80,18
9	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	Persen	0.11	0.18	0.19	0.19	0,18
10	Capaian Pelayanan SPALD-S Akses Dasar Air Limbah Domestik	Persen	71.46	73,63	74,33	76,56	80,58
11	Capaian Pelayanan SPALD- S Akses Aman Air Limbah Domestik	Persen	58.86	63,38	70,49	72,1	74,21
12	Capaian Pelayanan SPALD-T Akses Aman Air Limbah Domestik	Persen	66.43	1.16	2.12	2,20	2,98

No	Uraian	Satuan	Realisasi Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
13	Capaian Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Persen	0.1504	0.1699	0.1699	0.2155	0,2117
	Penataan Ruang						
1	Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah	Rasio	50.72	28.92	28.92	36.33	36,30
2	Jumlah bangunan ber-IMB	Unit	239	391	393	402	428

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten OKU Selatan, Tahun 2025

2.5.1.1.4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Secara umum, Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman mengalami kenaikan di mana persentase rumah layak huni meningkat hingga 77,06% dan persentase lingkungan pemukiman kumuh menurun hingga 3,36%. Selain itu, penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana mencapai 100% pada tahun 2024.

Tabel II.58
Capaian Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020-2024

No	Uraian	Satuan	Realisasi Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase rumah layak huni	Persen	77.13	77.90	77.98	77,1	77,06
2	Rasio permukiman layak huni	Rasio	0.96	0.96	0.97	0,97	0,98
3	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	Persen	3.68	3.63	3.36	3.36	3.36
4	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Persen	75.00	100.00	100.00	100.00	100.00
5	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sumber: Dinas Perkimtan Kabupaten OKU Selatan, Tahun 2025

2.5.1.1.5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Capaian inerja urusan ketentraman, kerertiban umum dan perlindungan Masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dapat dilihat pada Tabel II.52 berikut.

Tabel II.59
Capaian Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020-2024

No	Uraian	Satuan	Realisasi Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	Persen	0.1678	0.1677	0.1674	0.1674	0.1674
2	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Persen	75.00	76.92	52.63	52.64	52.64
3	Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Per 10.000 Penduduk	Rasio	6.64	6.64	6.60	6.60	6.60
4	Jumlah Linmas Pemilu Per Jumlah 10.000 Penduduk	Rasio	93.53	93.48	93.34	93.34	93.34
5	Jumlah Kegiatan Pembinaan Terhadap LSM, Ormas, dan OKP	Kegiatan	1	1	1	1	1
6	Jumlah Kegiatan Pembinaan Politik Daerah	Kegiatan	1	1	1	1	1
7	Jumlah Organisasi Kemasyarakatan	Ormas	25	25	25	25	25
8	Jumlah desa tangguh bencana yang terbentuk	Desa	2	2	2	2	2
9	Banyaknya sistem peringatan dini	Sistem	1	1	1	1	1
10	Dokumen strategi Pengurangan Risiko Bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah						
11	▪ Rencana Penanggulangan Bencana Daerah (RPBD),	Dokumen	0	1	1	1	1
	▪ Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana (RAD PRB),	Dokumen	0	0	0	1	1
	▪ Rencana Aksi Daerah Adaptasi Perubahan Iklim (RAD API).	Dokumen	0	0	0	1	1
	▪ Rencana kontigensi Menghadapi Bencana Banjir Kabupaten OKU Selatan	Dokumen	1	1	2	2	2
	▪ Kajian Pengurangan Resiko Bencana (PRB) Kabupaten OKU Selatan	Dokumen	1	1	1	2	2
12	Komunikasi Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

No	Uraian	Satuan	Realisasi Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
13	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persen	49.75	49.72	49.65	49.65	49.65
14	Respon Cepat Darurat Bencana	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
15	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Persen	34.00	40.00	39.00	39.00	39.00

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja, BPBD dan Dinas Damkarmat Kabupaten OKU Selatan, Tahun 2025

2.5.1.1.6. Urusan Sosial

Dalam urusan sosial, Pemerintah Daerah telah melakukan berbagai upaya untuk memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan, dengan fokus pada penyediaan bantuan dan jaminan sosial. Pemerintah Daerah juga berperan dalam rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas, anak telantar, lanjut usia telantar, dan tuna sosial (termasuk gelandangan dan pengemis).

Tabel II.60
Capaian Kinerja Urusan Sosial
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020-2024

No	Uraian	Satuan	Realisasi Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	Persen	28.33	32.48	32.48	99.65	99.65
2	Persentase PMKS yang tertangani	Persen	28.33	32.48	29,65	29,65	29,65
3	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	Persen	7.13	7.79	4.11	9.05	9.05
4	Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha sosial (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	Persen	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
5	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial	Persen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Persentase korban bencana yang menerima	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

No	Uraian	Satuan	Realisasi Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	bantuan sosial selama masa tanggap darurat						
7	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	Persen	86.53	100.00	100.00	100.00	100.00
8	Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapatkan Bantuan Tunai Bersyarat/ Program Keluarga Harapan	KPM	18,383	20,280	18,589	18,589	18,589
9	Jumlah sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi						
	▪ Jumlah panti asuhan	Panti	6	6	6	6	6
	▪ Jumlah panti jompo	Panti	0	0	0	0	0
	▪ Panti rehabilitasi	Panti	0	0	0	0	0
10	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar Di Luar Panti Sosial	Persen	66.67	66.67	66.67	75.69	100
11	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar Di Luar Panti Sosial	Persen	28.57	28.57	28.57	73.68	100
12	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Telantar Di Luar Panti Sosial	Persen	64.00	50.00	37.50	76.47	99.56
13	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis Di Luar Panti Sosial	Persen	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00
14	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah kabupaten/kota	Persen	100.00	7.99	25.52	100	100

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten OKU Selatan, Tahun 2025

2.5.1.2. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

2.5.1.2.1. Tenaga Kerja

Pembangunan di bidang tenaga kerja difokuskan pada peningkatan kualitas daya saing tenaga kerja sebagaimana tercermin dalam indikator yang menggambarkan dinamika pasar tenaga kerja, yang akan bertujuan untuk menurunkan tingkat pengangguran terbuka.

Tabel II.61
Capaian Kinerja Urusan Tenaga Kerja
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020-2024

No	Uraian	Satuan	Realisasi Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Tingkat partisipasi angkatan kerja	Persen	71.47	76.17	72.99	75.56	79.93
2	Tingkat pengangguran terbuka	Persen	3.28	3.23	1.83	1.79	1.80

Sumber: Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten OKU Selatan, Tahun 2025

2.5.1.2.2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dalam rangka mencapai kehidupan masyarakat yang lebih baik, Pemerintah berupaya untuk terus melakukan pembangunan kualitas hidup manusia melalui kegiatan pembangunan. Upaya tersebut pada dasarnya ditujukan untuk kepentingan seluruh penduduk tanpa membedakan jenis kelamin tertentu, akan tetapi pada pelaksanannya masih terdapat kelompok-kelompok yang mengalami ketertinggalan dalam proses pembangunan tersebut; baik dari segi akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat. Salah satu hal yang menyebabkan ketertinggalan dari beberapa kelompok tersebut adalah masih belum terciptanya kondisi yang seimbang antara laki-laki dan perempuan. Pembangunan dewasa ini seringkali mengabaikan isu tentang kesetaraan dan keadilan gender. Kondisi ini diperburuk oleh persoalan lain seperti budaya, atau agama yang terkadang dapat menjadi faktor penghambat untuk mencapai kesetaraan gender.

Tabel II.62
Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020-2024

No	Uraian	Satuan	Realisasi Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Persen	92,71	92,55	92,52	92,67	92,74
2	Indeks Pemberdayaan Gendar (IDG)	Persen	54,56	55,83	57,81	57,80	58,28
3	Rasio KDRT	Rasio	0.0545	0.0527	0.0576	0.0545	0,0510
4	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan	Perda	1	1	1	1	1

Sumber: Dinas PPPAPPKB Kabupaten OKU Selatan, Tahun 2025

2.5.1.2.3. Pangan

Pangan merupakan hal yang penting untuk diperhatikan karena merupakan kebutuhan primer/dasar bagi masyarakat. Oleh karena itu,

Pemerintah Daerah berupaya seoptimal mungkin untuk mewujudkan capaian kinerja positif pada urusan pangan.

Tabel II.63
Capaian Kinerja Urusan Pangan
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020-2024

No	Uraian	Satuan	Realisasi Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Ketersediaan pangan utama	Persen	99.42	104.20	114.50	101,47	116,16
2	Ketersediaan energi dan protein perkapita						
	▪ Ketersediaan energi perkapita (Kkal)	Kkal	3,186	3.422	3.456	3.443	4.222
	▪ Ketersediaan protein perkapita (gr)	Gr	78.96	106,27	84,06	91,89	76,28
3	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	Persen	0.00	0.00	0.00	100,00	100,00

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten OKU Selatan, Tahun 2025

2.5.1.2.4. Lingkungan Hidup

Menurut Undang Undang Nomor 23 Tahun 1997, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Sebagai bagian dari wilayah Sumatera, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan memiliki ekosistem yang sangat beranekaragam dan membentuk lingkungan hidup yang mampu memberikan manfaat terhadap kehidupan. Sedangkan aktivitas ekonomi yang berlangsung memiliki potensi menyebabkan degradasi kualitas lingkungan hidup seperti sektor pertambangan dan penggalian.

Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan belum sepenuhnya mendokumentasikan berbagai rencana untuk mempertahankan kualitas lingkungan hidup wilayah. Meskipun begitu, upaya untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan mengantisipasi degradasi lingkungan hidup sangat terasa. Berikut capaian kinerja urusan lingkungan hidup.

Tabel II.64
Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020-2024

No	Uraian	Satuan	Realisasi Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

No	Uraian	Satuan	Realisasi Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	PUU LH d yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota						
2	Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat pengawas lingkungan hidup di daerah (PPLHD) di kabupaten/kota						
	▪ Jumlah PPLHD yang dilatih dan/atau dibina	Orang	0	0	0	0	0
	▪ Jumlah sarana prasarana PPLHD yang memenuhi standar minimum	Unit	0	0	0	0	0
3	Jumlah MHA yang diakui		1	1	1	1	1
4	Jumlah MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional yang di verifikasi		1	1	1	1	1
5	Jumlah hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional yang terverifikasi		1	1	1	1	1
6	Penetapan hak MHA		0	0	0	0	0
7	Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan	Persen	0	0	0	0	0
8	Terfasilitasi penyediaan sarana/prasarana	Persen	0	0	0	0	0
9	Jumlah pelatihan yang diberikan kepada lembaga kemasyarakatan yang ada di satu kabupaten/kota	Pelatihan	0	0	0	0	0
10	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup		Ada	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
11	Pengaduan 83okasi83kat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, 83okasi usaha dan dampaknya di daerah kabupaten/kota	Persen	100.00	0	0	0	0
12	Timbulan sampah yang ditangani	Persen	76.89	37.60	60.00	87.77	90.01
13	Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R	Persen	0	0	0	0	0
14	Persentase cakupan area pelayanan	Persen	0.69	45.92	45.92	45.92	45.92
15	Persentase jumlah sampah yang tertangani	Persen	9.18	9.18	9.18	9.18	9.18

No	Uraian	Satuan	Realisasi Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
16	Nilai TPA (Program Adipura) ≥ 71		0	0	0	0	0
17	Persentase izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diterbitkan	Persen	0	0	0	0	0
18	Persentase pengelolaan sampah oleh swasta yang taat terhadap peraturan perundang-undangan	Persen	0	0	0	0	0
19	Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	Persen	3.19	3.19	3.19	3.14	3.20
20	Jumlah Limbah B3 Yang Terkelola dan Proporsi Limbah B3 Yang Diolah Sesuai Peraturan Perundangan (sektor industri)		0	0	0	0	0

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten OKU Selatan, Tahun 2025

2.5.1.2.5. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan memiliki database kependudukan sekaligus telah menerapkan KTP Nasional berbasis Nomor Induk Kependudukan. Berikut capaian urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020-2024.

Tabel II.65
Capaian Kinerja Urusan Administrasi Kependuddukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020-2024

No	Uraian	Satuan	Realisasi Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk	Rasio	0.88	0.90	0.80	0.785	0.783
2	Persentase Anak Yang Memiliki Akta Kelahiran	Persen	96.41	99.22	99.67	99.73	99.69
3	Rasio pasangan berakte nikah	Rasio	-	-	-	31,02	30,76
4	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK		Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah
6	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	Persen	52.12	59.79	67.60	78,50	78.33

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten OKU Selatan, Tahun 2025

2.5.1.2.6. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan di mana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Pemberdayaan masyarakat hanya bisa terjadi apabila warganya ikut berpartisipasi. Suatu usaha hanya berhasil dinilai sebagai "pemberdayaan masyarakat" apabila kelompok komunitas atau masyarakat tersebut menjadi agen pembangunan atau dikenal juga sebagai subyek. Di sini subyek merupakan motor penggerak dan bukan penerima manfaat atau obyek saja.

Tabel II.66
Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020-2024

No	Uraian	Satuan	Realisasi Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	Persen	91,27	51.19	51.19	60	60
2	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	Rata-rata	0,08	0.07	0.07	0.07	0.07
3	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	Rata-rata	0.52	0.54	0.54	0.54	0.54
4	Persentase LPM berprestasi	Persen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Persentase PKK aktif	Persen	100.00	65.47	65.47	65.47	65.47
6	Persentase Posyandu aktif	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Sumber : Dinas PMPD Kabupaten OKU Selatan, Tahun 2025

2.5.1.2.7. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Salah satu prasyarat untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia adalah dengan mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dengan pengendalian kuantitas penduduk melalui keluarga berencana. Sebagaimana diketahui bahwa kependudukan merupakan isu sentral dalam pembangunan. Penduduk merupakan subjek sekaligus objek pembangunan, sehingga berbagai upaya pembangunan tentu saja dilakukan dalam upaya pencapaian kesejahteraan penduduk.

Dalam rangka upaya pengendalian jumlah penduduk, maka Pemerintah menerapkan Program Keluarga Berencana (KB). Program KB dan kesehatan reproduksi saat ini tidak hanya ditujukan untuk penurunan angka kelahiran, namun dikaitkan pula dengan tujuan untuk pemenuhan hak-hak reproduksi,

promosi, pencegahan, dan penanganan masalah-masalah kesehatan reproduksi dan seksual, serta kesehatan dan kesejahteraan ibu, bayi, dan anak.

Tabel II.67
Capaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020-2024

No	Uraian	Satuan	Realisasi Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	Persen	0.03	1,8	2,4	1,30	1,28
2	Rata-rata jumlah anak per keluarga	Rata-rata	2.25	0.39	0.39	0,73	1,07
3	Ratio akseptor KB	Rasio	0.65	0.66	0.19	0,74	0,65
4	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49	Persen	69.03	46.60	69.79	49,90	73,01
5	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19)	Persen	1.35	4.02	4.02	26,7	24,9
6	Cakupan pasangan usia subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	Persen	0.93	26.38	27.49	38,78	26,34
7	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	Persen	30.07	12.96	18.94	8,62	6,43
8	Persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	Persen	2,08	53.46	18,93	22,33	16,25
9	Cakupan peserta KB aktif	Persen	69.03	46.60	68.55	74,08	73.01

Sumber: Dinas PPPAPPKB Kabupaten OKU Selatan, Tahun 2025

2.5.1.2.8. Perhubungan

Sektor perhubungan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan semakin berkembang dikarenakan meningkatnya pula aktivitas serta jumlah penduduk yang tinggal. Pada tahun 2024, terjadi kenaikan jumlah arus penumpang angkutan umum hingga mencapai 94.465 orang. Hal ini juga terlihat dari Jumlah Uji Kir Angkutan Umum yang mencapai 618 unit. Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Daerah juga melakukan pemasangan rambu-rambu sehingga menjadi 1.118 unit pada tahun 2024.

Tabel II.68
Capaian Kinerja Urusan Perhubungan
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020-2024

No	Urusan	Satuan	Realisasi Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah arus penumpang angkutan umum	Orang	83,996	86,499	89,077	91,731	94,465
2	Rasio ijin trayek per 10.000 penduduk	Rasio	0.43	0.44	0.45	0.46	0.47
3	Jumlah uji kir angkutan umum	Unit	430	471	516	564	618

No	Urusan	Satuan	Realisasi Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	▪ Mobil penumpang umum	Unit	0	0	0	0	0
	▪ Mobil bus	Unit	93	98	104	109	115
	▪ Mobil barang	Unit	337	373	412	455	503
	▪ Kereta gandengan	Unit	0	0	0	0	0
	▪ Kereta tempelan	Unit	0	0	0	0	0
4	Jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bis						
	▪ Jumlah dermaga	Buah	2	2	2	2	3
	▪ Terminal type B Muaradua	Buah	1	1	1	1	1
5	Pemasangan Rambu-rambu	Buah	576	680	802	947	1,118

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten OKU Selatan, Tahun 2025

2.5.1.2.9. Komunikasi dan Informatika

Cakupan layanan telekomunikasi di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya di mana pada tahun 2024 cakupan layanannya menjadi 63,32 persen. Selain itu, akses internet juga semakin dirasakan masyarakat di mana capaian proporsi rumah tangga dengan akses internet juga meningkat menjadi 0,87 pada tahun 2024.

Tabel II.69
Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020-2024

No	Uraian	Satuan	Realisasi Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di Tingkat Kecamatan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Cakupan layanan telekomunikasi	Persen	49,81	51.20	52.12	54,31	63,32
3	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	Persen	78.14	78.36	85.79	78,40	78,21
4	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	Persen	0.70	0.71	0.71	0,80	0,87
5	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	Persen	0.45	0.45	0.45	0.45	0.14

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten OKU Selatan, Tahun 2025

2.5.1.2.10. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Capaian kinerja urusan koperasi, usaha kecil dan menengah mulai menunjukkan hasil yang optimal. Namun, geliat perekonomian terasa dari meningkatnya persentase usaha mikro kecil sebesar 97,68 persen pada tahun 2024. Namun yang perlu digarisbawahi adalah belum adanya BPR/LKM.

Tabel II.70
Capaian Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020-2024

No	Uraian	Satuan	Realisasi Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase koperasi aktif	Persen	18.33	21.51	22.63	23,83	54,16
2	Persentase usaha mikro dan kecil	Persen	99.07	97.31	97.71	97.42	97.68
3	Jumlah BPR/LKM	Unit	0	0	0	0	0

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM, Perindag OKU Selatan Tahun 2025

2.5.1.2.11. Penanaman Modal

Investasi merupakan salah satu variabel pertumbuhan ekonomi daerah, tingkat investasi juga menjadi salah satu ukuran tingkat daya saing daerah dalam penciptaan lapangan pekerjaan dan investasi yang kondusif. Secara umum, pergerakan investasi di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan meningkat cukup pesat yang terlihat dari meningkatnya nilai investasi berskala nasional.

Tabel II.71
Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020-2024

No	Uraian	Satuan	Realisasi Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Investor	11	23	29	39	42
2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Rupiah	906.9 Milyar	919.6 Milyar	976.1 Milyar	1,056.8 Miliyar	1,710 Milyar
3	Rasio daya serap tenaga kerja	Rasio	48.91	29.96	24.90	25.46	27.56

Sumber: Dinas PM dan PTSP Kabupaten OKU Selatan, Tahun 2025

2.5.1.2.12. Kepemudaan dan Olah Raga

Baik persentase organisasi pemuda maupun cakupan pembinaan olahraga mengalami kenaikan pada tahun 2024 hingga mencapai 100 persen. Hal ini menunjukkan keaktifan pemuda dan aktivitas olahraga di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan mengalami peningkatan. Berikut capaian kinerja urusan kepemudaan dan olahraga secara lengkap.

Tabel II.72
Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olah Raga
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020-2024

No	Uraian	Satuan	Realisasi Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase organisasi pemuda yang aktif	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2	Jumlah kegiatan kepemudaan	Kegiatan	6	6	3	4	4
3	Cakupan pembinaan olahraga	Persen	77.78	77.78	100.00	100.00	100.00
4	Cakupan pelatih yang bersertifikasi	Persen	18.52	18.52	18.52	18.52	18.52

Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten OKU Selatan. Tahun 2025

2.5.1.2.13. Statistik

Indikator yang digunakan untuk menggambarkan Urusan Statistik berdasarkan Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 adalah ketersediaan dokumen perencanaan, khususnya publikasi dari instansi Badan Pusat Statistik. Beberapa publikasi yang menjadi landasan dalam melihat indikator pembangunan daerah seperti:

1 Buku “Kabupaten Dalam Angka”
2 Buku “PDRB Kabupaten”

Kedua dokumen di atas tersedia di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan disusun oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yakni “Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Dalam Angka” dan PDRB Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Menurut Lapangan Usaha”. Penyusunan kedua buku tersebut penting kaitannya dengan keberadaan data yang digunakan dalam merancang kebijakan dan penyusunan program kegiatan.

Tabel II.73
Capaian Kinerja Urusan Statistik
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja Daerah	Realisasi Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Buku ”kabupaten dalam angka”	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Buku ”PDRB”	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten OKU Selatan, Tahun 2025

2.5.1.2.14. Persandian

Urusan persandian memang belum terlalu diperhatikan oleh Pemerintah Daerah yang terlihat dari minimnya perangkat daerah yang menggunakan sandi dalam komunikasi antar perangkat daerah.

Tabel II.74
Capaian Kinerja Urusan Persandian
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020-2024

No	Uraian	Satuan	Realisasi Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	Persen	1.89	2.08	2.08	2.08	2.08

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten OKU Selatan, Tahun 2025

2.5.1.2.15. Kebudayaan

Kebudayaan menjadi bagian penting dalam proses pembangunan daerah, khususnya dalam rangka mengedepankan kearifan lokal daerah. Pada tahun 2024, terdapat 2 event penyelenggaraan festival seni dan budaya. Secara total benda, situs dan kawasan cagar budaya baru mencapai 4,88 persen yang dilestarikan.

Tabel II.75
Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020-2024

No	Uraian	Satuan	Realisasi Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Event	1	4	5	2	2
2	Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	Persen	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88
3	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	Karya Budaya	0	0	0	0	0
4	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	Cagar Budaya	0	0	0	0	0

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten OKU Selatan, Tahun 2025

2.5.1.2.16. Perpustakaan

Peningkatan pengunjung perpustakaan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan menunjukkan peningkatan kesadaran masyarakat akan arti pentingnya membaca. Pada tahun 2024, jumlah kunjungan ke perpustakaan mencapai

2,947 pengunjung. Selain itu, koleksi judul buku juga meningkat yang mencapai 8,842 koleksi judul buku.

Tabel II.76
Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020-2024

No	Uraian	Satuan	Realisasi Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Orang	1,690	1,874	1,955	2,250	2,947
2	Rasio perpustakaan per satuan penduduk	Rasio	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
3	Jumlah rata-rata pengunjung pepustakaan/tahun	Orang	1,200	1,200	1,200	1,250	5,162
4	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	Judul	5,081	5,081	5,831	8,763	8,842
5	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	Orang	0	0	1	1	2

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten OKU Selatan, Tahun 2025

2.5.1.2.17. Kearsipan

Arsip berfungsi secara langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penyelenggaraan kehidupan kebangsaaan serta dipergunakan pula dalam penyelenggaraan administrasi negara, sehingga sistem kearsipan harus dapat berjalan dengan baik di setiap penyelenggaran Pemerintahan Daerah. Salah satu ukuran yang dilakukan adalah penerapan kearsipan secara baku di setiap perangkat daerah, di mana Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan baru mencapai 8,33 persen perangkat daerah yang menerapkan arsip secara baku tersebut.

Tabel II.77
Capaian Kinerja Urusan Kearsipan
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020-2024

No	Uraian	Satuan	Realisasi Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	Persen	7.55	8.33	8.33	8.33	8.33
2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan						
	▪ Menunjukkan jumlah Kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan	Kegiatan	0	0	1	1	4

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten OKU Selatan, Tahun 2025

2.5.2. Fokus Layanan Urusan Pemerintah Pilihan

Urusan pilihan merupakan Urusan Pemerintah yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Berikut adalah urusan pilihan yang merupakan bagian dari hasil pembangunan daerah dalam berbagai bidang.

2.5.2.1 Pariwisata

Untuk menunjang perkembangannya suatu daerah tentunya diperlukan adanya tempat wisata yang dapat menarik wisatawan baik wisatawan nusanatara maupun wisatawan mancanegara, yang akhirnya dapat menambah pendapatan asli daerah. Oleh karena itu, objek wisata perlu dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang baik. Objek wisata yang sudah populer di masyarakat (objek wisata utama) yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yaitu Danau Ranau.

Tabel II.78
Capaian Kinerja Urusan Pariwisata
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020-2024

No	Uraian	Satuan	Realisasi Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Kunjungan wisata	Orang	11,959	18,335	22,703	75,827	36,309
2	PAD sektor pariwisata	Persen	0.27	0.46	0.93	1,716	1,11

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten OKU Selatan, Tahun 2025

Tabel II.79
Jumlah Kunjungan Pariwisata

No	Uraian	Satuan	Realisasi Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah kunjungan wisata nusantara	Orang	524.571.392	613.299.459	734.864.693	825.797.301	1.021.084.031
2	Jumlah kunjungan wisata mancanegara	Orang	4.052.923	1.557.530	5.889.031	11.677.825	13.902.420

Sumber: BPS, Tahun 2025

2.5.2.2 Pertanian

Cakupan bina kelompok tani di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan mengalami peningkatan di mana pada tahun 2024 mencapai 65,02 persen. Hal ini juga berdampak pada produktivitas beberapa komoditas pertanian yang secara umum juga mengalami peningkatan.

Tabel II.80
Capaian Kinerja Urusan Pertanian
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020-2024

No	Uraian	Satuan	Realisasi Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	Persen	31.25	31.65	30.65	29,56	29.83
2	Cakupan bina kelompok petani	Persen	47.10	47,10	33,66	33,49	65,02

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten OKU Selatan, Tahun 2025

2.5.2.3 Energi dan Sumber Daya Mineral

Rasio elektrifikasi adalah perbandingan jumlah pelanggan rumah tangga yang memiliki sumber penerangan baik dari listrik Perusahaan Listrik Negara (PLN) maupun listrik non-PLN dengan jumlah rumah tangga. Listrik PLN adalah sumber penerangan listrik yang dikelola oleh PLN. Listrik non-PLN adalah sumber penerangan listrik yang dikelola oleh instansi/pihak lain selain PLN termasuk yang menggunakan sumber penerangan dari *accu* (aki), generator, dan pembangkit listrik tenaga surya (yang tidak dikelola oleh PLN). Kapasitas energi di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan secara umum mengalami peningkatan. Rasio elektrifikasi juga meningkat hingga mencapai 92,91% pada tahun 2024.

Tabel II.81
Capaian Kinerja Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020-2024

No	Uraian	Satuan	Realisasi Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Rasio Elektrifikasi	Persen	69,91	75,59	78,74	84,75	92,91

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, serta Pertanahan, Tahun 2021

2.5.2.4 Perdagangan

Perdagangan merupakan sektor yang memiliki kontribusi positif dalam perekonomian daerah. Hal ini terlihat dari kontribusi dominan kepada perekonomian makro hingga mencapai 24,43%.

Tabel II.82
Capaian Kinerja Urusan Perdagangan
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020-2024

No	Uraian	Satuan	Realisasi Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Kontribusi perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda terhadap PDRB	Persen	22.51	22.47	23.32	23.99	24,43

Sumber: BPS Kabupaten OKU Selatan, Tahun 2025

2.5.2.5 Perindustrian

Salah satu sektor yang juga dominan mempengaruhi perekonomian makro Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan adalah sektor industri di mana pada tahun 2024 mencapai 8,19% kontribusinya terhadap perekonomian daerah.

Tabel II.83
Capaian Kinerja Urusan Perindustrian
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020-2024

No	Uraian	Satuan	Realisasi Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB	Persen	7.95	8.00	8.03	8.01	8,19

Sumber: BPS Kabupaten OKU Selatan, Tahun 2025

2.5.2.6 Transmigrasi

Berikut capaian kinerja urusan transmigrasi Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020-2024.

Tabel II.84
Kinerja Daerah Urusan Transmigrasi
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020-2024

No	Uraian	Satuan	Realisasi Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase transmigran swakarsa	Persen	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00

Sumber: Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten OKU Selatan, Tahun 2025

2.5.2.7 Kelautan dan Perikanan

Produksi perikanan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan mengalami peningkatan sebanyak 91,25 persen. Sejalan dengan konsumsi ikan meningkat sebesar 98,42 persen.

Tabel II.85
Capaian Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020-2024

No	Uraian	Satuan	Realisasi Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Produksi perikanan	Persen	29.50	48.18	48.75	89,55	91,25
2	Konsumsi ikan	Persen	96.25	97.92	98.33	96.00	98.42
3	Produksi perikanan kelompok nelayan	Persen	13.32	22.99	34.96	33,46	35,26

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten OKU Selatan, Tahun 2025

2.5.3. Penunjang Urusan

Penunjang Urusan Pemerintah terdiri dari perencanaan pembangunan, keuangan, kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan, penelitian dan

pengembangan. Penunjang Urusan Pemerintah ini memberikan peluang kepada daerah untuk mempercepat terwujudnya tata pemerintahan yang baik. Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan besar untuk mendorong proses kebijakan menjadi lebih partisipatif, responsif, dan akuntabel karena kendali dari proses kebijakan dan alokasi anggaran sepenuhnya ada di tangan Pemerintah Daerah. Untuk itu salah satu isu kebijakan umum yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan adalah bagaimana menciptakan pemerintahan yang mengimplementasikan reformasi birokrasi demi pencapaian *good governance*.

2.5.3.1 Perencanaan Pembangunan

Dalam fungsi perencanaan, ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan serta dokumen perencanaan teknis strategis merupakan salah satu kinerja yang harus dilaksanakan. Dalam perjalanan pembangunan selama ini, dokumen perencanaan secara lengkap dan terintegrasi telah dirumuskan oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan seperti yang terlihat dari Tabel II.78 berikut.

Tabel II.86
Capaian Kinerja Perencanaan Pembangunan
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020-2024

No	Uraian	Realisasi Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Bapperida Kabupaten OKU Selatan, Tahun 2025

2.5.3.2 Keuangan

Capaian kinerja urusan keuangan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan cukup baik di mana penetapan APBD tepat waktu dan anggaran prioritas pendidikan maupun kesehatan juga dialokasikan sesuai dengan perencanaan Pemerintah Pusat sehingga memiliki perencanaan yang terintegrasi dengan Pemerintah Pusat.

Tabel II.87
Capaian Kinerja Urusan Keuangan
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020-2024

No	Uraian	Satuan	Realisasi Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase SILPA	Persen	0.19	0.36	1.73	5,3	5,9
2	Persentase belanja pendidikan (20%)	Persen	22.60	24.90	21.92	21,90	22,67
3	Persentase belanja kesehatan (10%)	Persen	10.22	12.71	11.19	15,40	19,02
4	Penetapan APBD		Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu

Sumber: BPKAD Kabupaten OKU Selatan, Tahun 2025

2.5.3.3 Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Sebanyak 56,96 persen ASN di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural untuk menjabat menjadi pejabat struktural. Angka ini masih belum mencukupi untuk menduduki kursi jabatan di Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yang memiliki total 732 jabatan.

Tabel II.88
Capaian Kinerja Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020-2024

No	Uraian	Satuan	Realisasi Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	Persen	37.23	35.88	56.96	56.96	56.96
2	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Persen	5.73	0.00	0.51	0.51	0.51

Sumber: BKPSDM Kabupaten OKU Selatan, Tahun 2025

2.5.3.4 Penelitian dan Pengembangan

Tujuan yang akan dicapai Pemerintah dalam fungsinya sebagai fungsi penelitian dan pengembangan yaitu untuk mencapai kualitas perencanaan berbasis penelitian dan pengembangan yang salah satu caranya melalui semakin berkembangnya jejaring/*network* dengan stakeholder lain yang terkait (Pemerintah, swasta, akademisi). Untuk mewujudkan hal tersebut terdapat beberapa kendala antara lain masih terdapatnya kesenjangan antara implementasi dan kebijakan dan belum optimalnya data/informasi dan hasil-hasil kajian penelitian dan pengembangan serta inovasi daerah.

Tabel II.89
Capaian Kinerja Urusan Penelitian dan Pengembangan
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020-2024

No	Uraian	Satuan	Realisasi Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Perangkat Daerah Yang Difasilitasi Dalam Penerapan Inovasi Daerah	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2	Skor Indeks Inovasi Daerah	Skor	358	36.59	32.44	42,04	46,41

Sumber: Bapperida Kabupaten OKU Selatan, Tahun 2025

2.5.3.5 Pengawasan

Capaian Kinerja Urusan Pengawasan dalam hal teknis maupun administrasi cukup baik di tubuh Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Hal ini terlihat dari persentase tindak lanjut temuan BPK sebesar 86,78 persen di tahun 2024 dan menurunnya pelanggaran pegawai dalam kedisiplinan atau administrasi kerja.

Tabel II.90
Capaian Kinerja Urusan Pengawasan
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020-2024

No	Uraian	Satuan	Realisasi Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase tindak lanjut temuan	Persen	91.04	79.17	72.22	92,04	86,78
2	Persentase pelanggaran pegawai	Persen	0.0772	0.0012	0.0013	0.748	0
3	Jumlah temuan BPK	Kasus	48	3	4	55	27

Sumber: Inspektorat Kabupaten OKU Selatan, Tahun 2025

2.5.3.6 Sekretariat Dewan

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Sekretariat Dewan telah memiliki rencana kerja tahunan pada setiap alat-alat kelengkapan DPRD di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Tabel II.91
Kinerja Sekretariat Dewan
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja Daerah	Realisasi Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten OKU Selatan, Tahun 2025

2.6. Evaluasi Kinerja Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan

Dalam merumuskan perencanaan, sasaran, arah kebijakan, hingga program prioritas setiap tahapan pembangunan, khususnya rencana pembangunan jangka menengah, Pemerintah Daerah perlu melihat kembali capaian pelaksanaan pembangunan pada periode sebelumnya. Hal ini dilakukan melalui evaluasi dan analisis terhadap pencapaian indikator-indikator pembangunan daerah sebagaimana yang telah disepakati dan ditetapkan dalam perencanaan pembangunan tersebut. Selain itu, evaluasi setiap tahapan pembangunaan akan menyelaraskan setiap program kegiatan ke arah satu koridor pencapaian tujuan pembangunan jangka panjang Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan serta menunjang pencapaian tujuan pembangunan jangka menengah nasional.

Evaluasi dilaksanakan untuk mengetahui indikator-indikator mana saja yang telah tercapai, mana yang belum tercapai, apa saja kendala dan hambatannya, dan apa yang harus disempurnakan, dihapus/diganti agar pencapaian target pembangunan lebih optimal. Selain itu, evaluasi ini juga akan menghasilkan identifikasi permasalahan baru yang timbul dalam pembangunan, faktor-faktor efisiensi anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan sehingga dapat diantisipasi sejak dini dan dirumuskan respon yang sesuai dalam penyusunan perencanaan pembangunan ke depan. Berikut capaian indikator pembangunan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, selanjutnya dapat di lihat pada Tabel II.84 berikut ini:

Tabel II.92
Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020-2024

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi Kinerja					Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
			2020	2021	2022	2023	2024	
2.2.	**Aspek Kesejahteraan Masyarakat**							
2.2.1	**Kesejahteraan Ekonomi**							
2.2.1.1	Perkembangan PDRB							
	▪ PDRB ADHB	Milyar Rp	8,971.73	9,530.24	10,328.50	11,090.39	11,908.37	<
	▪ PDRB ADHK	Milyar Rp	5,734.09	5,975.14	6,263.99	6,525.68	6,824.83	>
2.2.1.2	Laju pertumbuhan ekonomi	Persen	0.37	4.19	4.85	4.18	4,58	<
2.2.1.3	Distribusi PDRB	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
2.2.1.4	Persentase penduduk miskin	Persen	10.85	11.12	10.56	10.36	9.86	
2.2.1.5	PDRB Perkapita							
	▪ ADHB	Juta Rp	14.10	14,.40	14.68	16.38	15.89	<
	▪ ADHK	Juta Rp	22.06	22.88	24.24	26.14	27.72	<
2.2.1.6	Tingkat pengangguran terbuka	Persen	3.28	3.23	1.83	1.79	1.80	
2.2.1.7	Indeks Gini	Indeks	0.271	0.291	0.285	0.308	0.356	>
2.2.1.8	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	65.30	67.85	68.33	69.05	70.00	>
2.2.2	**Kesehatan Untuk Semua**							
2.2.2.1	Angka usia harapan hidup	Tahun	72,69	72,70	72,88	73,21	73,44	
2.2.2.2	Prevalensi stunting	Persen	-	24.8	19.4	20.3	12.4	
2.2.3	**Pendidikan Berkualitas yang Merata**							
2.2.3.1	Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	7.84	7.85	7.86	8.05	8.25	<
2.2.3.2	Angka harapan lama sekolah	Tahun	11.75	11.76	11.78	11.79	11.82	<
2.2.3.3	Angka melek huruf	Persen	99.33	99.43	98.66	99.55	99,41	
2.2.3.4	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Persen	-	-	-	52.61	29.27	
2.2.4	**Pembangunan Gender**							
2.2.4.1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Persen	92.71	92.55	92.52	92.67	92,74	<
2.2.4.2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Persen	54,56	55,83	57,81	57,80	58,28	>

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi Kinerja					Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
			2020	2021	2022	2023	2024	
2.3	**Aspek Daya Saing Daerah**							
2.3.1	**Daya Saing Sumber Daya Manusia**							
2.3.1.1	Rasio ketergantungan	Rasio	42.75	43.00	43.29	42.72	42,89	
2.3.1.2	Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi							
	▪ ≤SD	Persen	39.39	38.81	39.39	38.81	38.81	=
	▪ SMP	Persen	20.76	22.08	20.76	22.08	22.08	=
	▪ SMA	Persen	22.15	19.79	26.24	24.71	24.71	=
	▪ Perguruan Tinggi	Persen	4.33	4.43	9.52	20.75	7,88	=
2.3.2	**Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi**							
2.3.2.1	Tingkat partisipasi angkatan kerja	Persen	71.47	76.17	72.99	75.56	79,93	=
2.3.2.2	Indeks Inovasi Daerah	Skor	358	36,59	32,44	42,04	46,41	>
2.3.2.3	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga							
	▪ ADHB	Milyar Rp	5,911.41	6,122.34	6,854.10	7,406.80	7,853.61	>
	▪ ADHK 2010	Milyar Rp	3,489.13	3,536.25	3,735.42	3,914.19	4,086.94	>
2.3.2.4	Nilai Tukar Petani		104.00	105.20	106.80	108.12	120.97	>
2.3.3	**Integrasi Ekonomi Domestik dan Global**							
2.3.3.1	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)		2012,63	1935,45	1938,67	1968,08	2064,91	
2.3.3.2	Ekspor Barang dan Jasa		-12,94	-9,65	-11,08	-10,69	-10,38	
2.3.4	**Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi**							
2.3.4.1	Fasilitas Wilayah/Infrastruktur							
2.3.4.1.1	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	Rasio	1.46	1.1	0,98	2,02	2,99	>
2.3.4.1.1.1	Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum	Orang	83.996	591	25.720	70.205	73.457	>
2.3.4.1.1.2	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun	Orang	79.761	5.668	27.825	6.199	9.480	<
2.3.4.1.2	Penataan Ruang							
	▪ Luas wilayah produktif	Persen	97.74	99.45	99.45	99.45	99,45	>
2.3.4.2	Persentase Desa Mandiri	Persen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi Kinerja					Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
			2020	2021	2022	2023	2024	
2.3.4.3	Lama proses perizinan	Hari	1	1	1	1	1	=
2.3.4.4	Perbankan							
	▪ Jenis dan jumlah bank dan cabang	Unit	6	6	6	6	6	
2.3.4.5	Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah		33	33	33	33	33	=
2.3.4.6	Jumlah perda yang mendukung iklim usaha	Perda	1	1	1	1	1	=
2.3.5	**Indeks Daya Saing Daerah**							
	▪ Skor Indeks Daya Saing Daerah	Skor	-	-	-	-	3,23	>
2.3.6	**Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif**							
2.3.6.1	Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)		-	2,19	1,93	2,31	2,34	<
2.3.7	**Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial**							
2.3.7.1	Persentase Penegakan PERDA	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	=
2.3.7.2	Angka kriminalitas		0.48	4.22	4.23	0.05	0.04	>
2.4	**Aspek Pelayanan Umum**							
2.4.1	**Fokus Layanan Urusan Pemerintah Wajib**							
2.4.1.1	**Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar**							
2.4.1.1.1	**Pendidikan**							
	Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persen	47.62	44.71	44.24	44,67	44,55	<
	Angka Partisipasi Kasar							
	▪ SD/MI	Persen	110.60	110.54	111.55	110.78	110,81	<
	▪ SLTP/MTS	Persen	87.88	89.92	90.83	88.26	88,51	<
	▪ SLTA/SMK/MA	Persen	76.53	79.95	78.00	80.48	81,78	>
	Angka Partisipasi Murni							
	▪ SD/MI	Persen	99.00	99.04	99.94	99.60	99,72	>
	▪ SMP/MTs	Persen	78.68	79.06	80.20	80.14	80.43	<
	▪ SMA/SMK/MA	Persen	61.83	61.88	61.60	56.94	57.46	<
	Angka Partisipasi Sekolah							

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi Kinerja					Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
			2020	2021	2022	2023	2024	
	▪ 7-12	Persen	99.74	99.60	99.21	99,56	99,76	>
	▪ 13-15	Persen	91.39	91.61	91.42	91,71	91,90	=
	▪ 16-18	Persen	69.41	71.03	71.56	71,78	71,82	>
	Angka Kelulusan							
	▪ Angka kelulusan (AL) SD/MI	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	=
	▪ Angka kelulusan (AL) SMP/MTs	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	=
	▪ Angka kelulusan (AL) SMA/ SMK/ MA	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	=
	Angka Melanjutkan (AM)							
	▪ Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	Persen	88.28	113.91	114.44	114.74	114.86	>
	▪ Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	Persen	69.91	92.01	90.03	90.23	90.35	>
	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	Persen	93.33	98.31	98.98	99.28	99.41	>
	Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik	Persen	73.40	75.53	93.62	93.82	94.12	>
	Persentase SD/MI Berakreditasi Minimal B	Persen	43.51	45.08	52.88	53.08	53.29	<
	Persentase SMP/MTs Berakreditasi Minimal B	Persen	33.68	36.84	47.37	47.57	47.66	<
	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar							
	▪ SD/MI	Rasio	1:167	1:137	1:138	1:148	1:151	>
	▪ SMP/MTs	Rasio	1:326	1:237	1:235	1:245	1:249	<
	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar							
	▪ SD/MI	Rasio	1:12.45	1:12.78	1:11.13	1:11.15	1:11.16	<
	▪ SMP/MTs	Rasio	1:13.49	1:11.72	1:9.47	1:9.49	1:9.52	<
	Rasio guru terhadap murid pendidikan menengah	Rasio	1:13.37	1:10.89	1:13.44	1:13.48	1:13.54	>
	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	Persen	75.11	85.92	89.11	89.16	89.77	<
	Pencapaian Pemenuhan SPM PAUD	Persen	47.62	44.85	53.95	52.05	52.35	
	Pencapaian Pemenuhan SPM Pendidikan SD	Persen	84.95	98.42	88.77	88.97	89.07	
	Pencapaian Pemenuhan SPM Pendidikan SMP	Persen	56.08	75.86	51.43	51.83	52.03	
	Pencapaian Pemenuhan SPM Pendidikan Kesetaraan	Persen	2.00	2.02	3.20	3.40	3.42	
2.4.1.1.2	**Kesehatan**							

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi Kinerja					Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
			2020	2021	2022	2023	2024	
	Persentase Penduduk Yang Mempunyai Keluhan Kesehatan	Persen	17.46	16.95	21.47	20.17	23.55	>
	Jumlah Kematian Bayi	Bayi	46	18	9	12	10	<
	Jumlah Kematian Ibu	Ibu	5	5	3	2	2	=
	Persentase balita gizi buruk	Persen	0.420	0.423	0.134	0.50	0,101	<
	Prevalensi balita gizi kurang	Persen	0.24	1.29	0.52	2.6	0,02	>
	Cakupan Desa Siaga Aktif	Persen	88.41	91.89	92.66	89,96	91,89	<
	Rasio posyandu per satuan balita	Rasio	8.66	13.29	12.50	10.08	10.22	<
	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	Rasio	1:5,960	1:5,798	1:7,085	1:7,069	1:7,055	=
	Rasio rumah sakit per satuan penduduk	Rasio	0.00240	0.00240	0.00239	0,00235	0,00232	=
	Rasio dokter per satuan penduduk	Rasio	0.074	0.139	0.050	0.063	0.076	=
	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	Rasio	2.65	3.46	2.92	2,96	2,98	=
	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	Persen	94.92	88.41	81.26	77.60	77.65	<
	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	Persen	83.01	62.54	75.67	80.30	80.37	<
	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	=
	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	Persen	90.31	92.98	90.63	74.60	74.66	<
	Cakupan balita pneumonia yang ditangani	Persen	0.36	0.17	0.00	0.00	0.00	=
	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	Persen	30.25	24.87	46.23	49.19	49.76	<
	Tingkat prevalensi tuberkulosis (per 100.000 penduduk)		98.75	59.89	126.06	71.90	71.96	<
	Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)		0.48	0.72	3.83	4.71	4.78	>
	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	Persen	32.80	21.91	46.22	49.19	49.45	<
	Proporsi kasus tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	Persen	32,80	54,80	7,59	11,45	11,76	<
	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	=
	Penderita diare yang ditangani	Persen	46.41	100.00	100.00	13.48	13.51	<
	Angka kejadian malaria		0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	=

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi Kinerja					Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
			2020	2021	2022	2023	2024	
	Tingkat kematian akibat malaria		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	=
	Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat	Persen	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<
	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	Persen	0.0005	0.0000	0.0007	0.0014	0.0010	=
	Cakupan kunjungan bayi	Persen	99.61	99.10	86.54	87.26	87.32	<
	Cakupan puskesmas		0.0046	0.0046	0.0045	0.0044	0.0054	=
	Cakupan pembantu puskesmas	Persen	15.48	18.14	13.13	13.13	13.13	<
	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	Persen	97.12	92.98	86.59	99.17	99.47	>
	Cakupan pelayanan nifas	Persen	94.92	95.83	74.91	71.92	72.13	<
	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	Persen	98.31	0.00	0.21	1.36	1.36	<
	Cakupan pelayanan anak balita	Persen	70.26	63.29	67.27	76.27	76.65	>
	Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat	Persen	10.63	14.49	92.18	97.10	97.22	>
	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	=
	Jumlah puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa	PKM	19	19	19	19	19	=
	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Desa/Kel	221	259	259	259	259	>
	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)	Desa/Kel	171	198	212	220	220	<
	Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin di Puskesmas	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	=
	Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persen	97,12	92,98	86,59	99,52	84,25	=
	Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan	Persen	94,91	88,41	81,26	97,21	93,31	=
	Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persen	84,32	96,12	86,54	99,73	83,39	=
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Persen	92.07	62,33	51,18	96,62	91,02	=
	Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persen	11,00	13,00	92,18	97,63	95,38	=

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi Kinerja					Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
			2020	2021	2022	2023	2024	
	Persentase Orang Usia 15-59 Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar	Persen	3.23	32.38	20.38	20.48	20.48	=
	Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun Ke Atas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standard	Persen	19,68	78,46	88,92	67,10	88,02	=
	Persentase Penderita Hipertensi Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persen	10.12	38.84	11.40	11.45	11.45	=
	Persentase Penderita DM Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persen	10.12	47.82	15.1	15.14	15.14	=
	Persentase ODGJ Berat Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa Sesuai Standar	Persen	61.71	45.41	80.80	80.85	80.85	=
	Persentase Orang Terduga TBC Mendapatkan Pelayanan TBC Sesuai Standar	Persen	32.80	19.91	35.18	35.21	35.21	=
	Persentase Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pelayanan Deteksi Dini HIV Sesuai Standar	Persen	4.03	2.75	27.36	27.38	27.38	=
2.4.1.1.3	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**							
	Pekerjaan Umum							
	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	Persen	53.37	76.98	78.61	75.42	58,73	<
	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	Rasio	0.1504	0. 1699	0.1699	0.2155	0,2117	>
	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	Persen	2.07	1.84	1.87	1,48	1,48	<
	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak	Persen	53,86	57,68	57,54	63,20	63,22	<
	Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	Persen	40.71	40.68	39.73	37,46	35,65	<
	Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor	Persen	15.58	0.76	0.28	4,27	2,13	<
	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	Persen	67.25	58.95	58,25	58,49	61,94	>
	Persentase rumah tangga dengan sumber air minum layak	Persen	67,75	77,12	76,52	80,18	80,18	<
	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	Persen	0.11	0.18	0.19	0.19	0,18	>

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi Kinerja					Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
			2020	2021	2022	2023	2024	
	Capaian Pelayanan SPALD-S Akses Dasar Air Limbah Domestik	Persen	71.46	73,63	74,33	74,56	80,58	<
	Capaian Pelayanan SPALD- S Akses Aman Air Limbah Domestik	Persen	58.86	63,38	70,49	72,45	74,21	=
	Capaian Pelayanan SPALD-T Akses Aman Air Limbah Domestik	Persen	66.43	1.16	2.12	2,18	2,45	=
	Capaian Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Persen	0.1504	0. 1699	0.1699	0.2155	0,2117	=
	Penataan Ruang							
	Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah	Rasio	50.72	28.92	28.92	36.33	36,30	<
	Jumlah bangunan ber-IMB	Unit	239	391	393	402	428	<
2.4.1.1.3	**Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**							
	Persentase rumah layak huni	Persen	77.13	77.90	77.98	77,1	77,06	>
	Rasio permukiman layak huni	Rasio	0.96	0.96	0.97	0,97	0,98	>
	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	Persen	3.68	3.63	3.36	3.36	3.36	=
	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Persen	75.00	100.00	100.00	100.00	100.00	=
	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	=
2.4.1.1.4	**Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat**							
	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	Persen	0.1678	0.1677	0.1674	0.1674	0.1674	>
	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Persen	75.00	76.92	52.63	52.64	52.64	<
	Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Per 10.000 Penduduk	Rasio	6.64	6.64	6.60	6.60	6.60	<
	Jumlah Linmas Pemilu Per Jumlah 10.000 Penduduk	Rasio	93.53	93.48	93.34	93.34	93.34	<

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi Kinerja					Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
			2020	2021	2022	2023	2024	
	Jumlah Kegiatan Pembinaan Terhadap LSM, Ormas, dan OKP	Kegiatan	1	1	1	1	1	<
	Jumlah Kegiatan Pembinaan Politik Daerah	Kegiatan	1	1	1	1	1	<
	Jumlah Organisasi Kemasyarakatan	Ormas	25	25	25	25	25	
	Jumlah desa tangguh bencana yang terbentuk	Desa	2	2	2	2	2	=
	Banyaknya sistem peringatan dini	Sistem	1	1	1	1	1	<
	Dokumen strategi Pengurangan Risiko Bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah							
	▪ Rencana Penanggulangan Bencana Daerah (RPBD),	Dokumen	0	1	1	1	1	=
	▪ Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana (RAD PRB),	Dokumen	0	0	0	1	1	=
	▪ Rencana Aksi Daerah Adaptasi Perubahan Iklim (RAD API).	Dokumen	0	0	0	1	1	=
	▪ Rencana kontigensi Menghadapi Bencana Banjir Kabupaten OKU Selatan	Dokumen	1	1	2	2	2	=
	▪ Kajian Pengurangan Resiko Bencana (PRB) Kabupaten OKU Selatan	Dokumen	1	1	1	2	2	<
	Komunikasi Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	=
	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persen	49.75	49.72	49.65	49.65	49.65	=
	Respon Cepat Darurat Bencana	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	=
	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Persen	34.00	40.00	39.00	39.00	39.00	=
2.4.1.1.4	**Urusan Sosial**							
	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	Persen	28.33	32.48	32.48	32.48	32.48	>
	Persentase PMKS yang tertangani	Persen	28.33	32.48	29,65	29,65	29,65	>
	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	Persen	7.13	7.79	4.11	9.05	9.05	>
	Persentase panti 107ocial yang menerima program pemberdayaan 107ocial melalui kelompok usaha 107ocial107 (KUBE) atau kelompok 107ocial ekonomi sejenis lainnya	Persen	0.00	0.02	0.00	0.40	0.40	>

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi Kinerja					Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
			2020	2021	2022	2023	2024	
	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial	Persen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<
	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	=
	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	Persen	86.53	100.00	100.00	100.00	100.00	>
	Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapatkan Bantuan Tunai Bersyarat/ Program Keluarga Harapan	KPM	18,383	20,280	18,589	18,589	18,589	>
	Jumlah sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi							
	▪ Jumlah panti asuhan	Panti	6	6	6	6	6	=
	▪ Jumlah panti jompo	Panti	0	0	0	0	0	<
	▪ Panti rehabilitasi	Panti	0	0	0	0	0	<
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar Di Luar Panti Sosial	Persen	66.67	66.67	66.67	66.67	66.67	=
	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar Di Luar Panti Sosial	Persen	28.57	28.57	28.57	28.57	28.57	=
	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Telantar Di Luar Panti Sosial	Persen	64.00	50.00	37.50	37.50	37.50	=
	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis Di Luar Panti Sosial	Persen	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	=
	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah kabupaten/kota	Persen	100.00	7.99	25.52	25.52	25.52	=
2.4.1.2	**Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar**							
2.4.1.2.1	**Tenaga Kerja**							
	Tingkat partisipasi angkatan kerja	Persen	71.47	76.17	72.99	75.56	79.93	=
	Tingkat pengangguran terbuka	Persen	3.28	3.23	1.83	1.81	1.80	=
2.4.1.2.2	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**							
	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Persen	92,71	92,55	92,52	92,67	92,74	<

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi Kinerja					Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
			2020	2021	2022	2023	2024	
	Indeks Pemberdayaan Gendar (IDG)	Persen	54,56	55,83	57,81	57,80	58,28	>
	Rasio KDRT	Rasio	0.0545	0.0527	0.0576	0,0545	0.0510	<
	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan	Perda	1	1	1	1	1	<
2.4.1.2.3	**Pangan**							
	Ketersediaan pangan utama	Persen	99.42	104.20	114.50	101,47	116,16	<
	Ketersediaan energi dan protein perkapita							
	▪ Ketersediaan energi perkapita (Kkal)	Kkal	3,186	3.422	3.456	3.443	4.222	=
	▪ Ketersediaan protein perkapita (gr)	Gr	78.96	106,27	84,06	91,89	76,28	=
	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	Persen	0.00	0.00	0.00	100,00	100,00	<
2.4.1.2.4	**Lingkungan Hidup**							
	Pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	=
	Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat pengawas lingkungan hidup di daerah (PPLHD) di kabupaten/kota							
	▪ Jumlah PPLHD yang dilatih dan/atau dibina		0	0	0	0	0	<
	▪ Jumlah sarana prasarana PPLHD yang memenuhi standar minimum		0	0	0	0	0	<
	Jumlah MHA yang diakui		1	1	1	1	1	<
	Jumlah MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional yang di verifikasi		1	1	1	1	1	<
	Jumlah hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional yang terverifikasi		1	1	1	1	1	<
	Penetapan hak MHA		0	0	0	0	0	<
	Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan	Persen	0	0	0	0	0	<
	Terfasilitasi penyediaan sarana/prasarana	Persen	0	0	0	0	0	<
	Jumlah pelatihan yang diberikan kepada lembaga kemasyarakatan yang ada di satu kabupaten/kota	Pelatihan	0	0	0	0	0	<

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi Kinerja					Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
			2020	2021	2022	2023	2024	
	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup		Ada	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	<
	Pengaduan 110okasi110kat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, 110okasi usaha dan dampaknya di daerah kabupaten/kota	Persen	100.00	0	0	0	0	<
	Timbulan sampah yang ditangani	Persen	76.89	37.60	60.00	87.77	90.01	>
	Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R	Persen	0	0	0	0	0	>
	Persentase cakupan area pelayanan	Persen	0.69	45.92	45.92	45.92	45.92	<
	Persentase jumlah sampah yang tertangani	Persen	9.18	9.18	9.18	9.18	9.18	<
	Nilai TPA (Program Adipura) ≥ 71		0	0	0	0	0	<
	Persentase izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diterbitkan	Persen	0	0	0	0	0	<
	Persentase pengelolaan sampah oleh swasta yang taat terhadap peraturan perundang-undangan	Persen	0	0	0	0	0	<
	Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	Persen	3.19	3.19	3.19	3.14	3.20	=
	Jumlah Limbah B3 Yang Terkelola dan Proporsi Limbah B3 Yang Diolah Sesuai Peraturan Perundangan (sektor industri)		0	0	0	0	0	=
2.4.1.2.5	**Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**							
	Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk	Rasio	0.88	0.90	0.80	0.785	0.783	<
	Persentase Anak Yang Memiliki Akta Kelahiran	Persen	96.41	99.22	99.67	99.73	99.69	>
	Rasio pasangan berakte nikah	Rasio	-	-	-	31,02	30,76	>
	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	=
	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK		Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	=
	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	Persen	52.12	59.79	67.60	78,50	78.33	<
2.4.1.2.6	**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**							

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi Kinerja					Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
			2020	2021	2022	2023	2024	
	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	Persen	91,27	51.19	51.19	60	60	
	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	Rata-rata	0,08	0.07	0.07	0.07	0.07	<
	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	Rata-rata	0.52	0.54	0.54	0.54	0.54	<
	Persentase LPM berprestasi	Persen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<
	Persentase PKK aktif	Persen	100.00	65.47	65.47	65.47	65.47	<
	Persentase Posyandu aktif	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	=
2.4.1.2.7	**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**							
	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	Persen	0.03	1,8	2,4	1,30	1,28	>
	Rata-rata jumlah anak per keluarga	Rata-rata	2.25	0.39	0.39	0,73	1,07	<
	Ratio akseptor KB	Rasio	0.65	0.66	0.19	0,74	0,65	<
	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 – 49	Persen	69.03	46.60	69.79	49,90	73,01	>
	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19)	Persen	1.35	4.02	4.02	26,7	24,9	>
	Cakupan pasangan usia subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	Persen	0.93	26.38	27.49	38,78	26,34	>
	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	Persen	30.07	12.96	18.94	8,62	6,43	>
	Persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	Persen	2,08	53.46	18,93	22,33	16,25	<
	Cakupan peserta KB aktif	Persen	69.03	46.60	68.55	74,08	73.01	>
2.4.1.2.8	**Perhubungan**							
	Jumlah arus penumpang angkutan umum	Orang	83,996	86,499	89,077	91,731	94,465	=
	Rasio ijin trayek per 10.000 penduduk	Rasio	0.43	0.44	0.45	0.46	0.47	=
	Jumlah uji kir angkutan umum	Unit	430	471	516	564	618	=
	▪ Mobil penumpang umum	Unit	0	0	0	0	0	=
	▪ Mobil bus	Unit	93	98	104	109	115	=
	▪ Mobil barang	Unit	337	373	412	455	503	=
	▪ Kereta gandengan	Unit	0	0	0	0	0	=

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi Kinerja					Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
			2020	2021	2022	2023	2024	
	▪ Kereta tempelan	Unit	0	0	0	0	0	=
	Jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bis							
	▪ Jumlah dermaga	Buah	2	2	2	2	3	=
	▪ Terminal type B Muaradua	Buah	1	1	1	1	1	=
	Pemasangan Rambu-rambu	Buah	576	680	802	947	1,118	=
2.4.1.2.9	**Komunikasi dan Informatika**							
	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di Tingkat Kecamatan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	=
	Cakupan layanan telekomunikasi	Persen	49,81	51.20	52.12	54,31	63,32	>
	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	Persen	78.14	78.36	85.79	78,40	78,21	>
	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	Persen	0.70	0.71	0.71	0,80	0,87	>
	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	Persen	0.45	0.45	0.45	0.45	0.14	<
2.4.1.2.10	**Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah**							
	Persentase koperasi aktif	Persen	18.33	21.51	22.63	23,83	54,16	>
	Persentase usaha mikro dan kecil	Persen	99.07	97.31	97.71	97.42	97.68	>
	Jumlah BPR/LKM	Unit	0	0	0	0	0	<
2.4.1.2.11	**Penanaman Modal**							
	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Investor	11	23	29	39	42	>
	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Milyar Rupiah	906.9	919.6	976.1	1,056.8	1,710	<
	Rasio daya serap tenaga kerja	Rasio	48.91	29.96	24.90	25.46	27.56	<
2.4.1.2.12	**Kepemudaan dan Olah Raga**							
	Persentase organisasi pemuda yang aktif	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	=
	Jumlah kegiatan kepemudaan	Kegiatan	6	6	3	4	4	=
	Cakupan pembinaan olahraga	Persen	77.78	77.78	100.00	100.00	100.00	>

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi Kinerja					Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
			2020	2021	2022	2023	2024	
	Cakupan pelatih yang bersertifikasi	Persen	18.52	18.52	18.52	18.52	18.52	<
2.4.1.2.13	**Statistik**							
	Buku ”kabupaten dalam angka”		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	=
	Buku ”PDRB”		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	=
	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi		Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	<
2.4.1.2.14	**Persandian**							
	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	Persen	1.89	2.08	2.08	2.08	2.08	<
2.4.1.2.15	**Kebudayaan**							
	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Event	1	4	5	2	2	<
	Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	Persen	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	<
	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	Karya Budaya	0	0	0	0	0	<
	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	Cagar Budaya	0	0	0	0	0	<
2.4.1.2.16	**Perpustakaan**							
	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Orang	1,690	1,874	1,955	2,250	61,947	>
	Rasio perpustakaan per satuan penduduk	Rasio	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	=
	Jumlah rata-rata pengunjung pepustakaan/ tahun	Orang	1.200	1.200	1.200	1.250	5.162	>
	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	Judul	5,081	5,081	5,831	18,763	72542	>
	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	Orang	0	0	1	1	2	<
2.4.1.2.17	**Kearsipan**							

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi Kinerja					Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
			2020	2021	2022	2023	2024	
	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	Persen	7.55	8.33	8.33	8.33	8.33	<
	Peningkatan SDM pengelola kearsipan							
	▪ Menunjukkan jumlah Kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan	Kegiatan	0	0	1	1	4	<
2.4.1.3	**Fokus Layanan Urusan Pemerintah Pilihan**							
2.4.1.3.1	**Pariwisata**							
	Kunjungan wisata	Orang	11,959	18,335	22,703	75,827	36,309	<
	PAD sektor pariwisata	Persen	0.27	0.46	0.93	1,716	1,11	<
2.4.1.3.2	**Pertanian**							
	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	Persen	31.25	31.65	30.65	29,56	29.83	<
	Cakupan bina kelompok petani	Persen	47.10	47,10	33,66	33,49	65,02	>
2.4.1.3.3	**Energi dan Sumber Daya Mineral**							
	Rasio Elektrifikasi	Persen	69,91	75,59	78,74	84,75	92,91	>
2.4.1.3.4	**Perdagangan**							
	Kontribusi perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda terhadap PDRB	Persen	22.51	22.47	23.32	23.99	24,43	>
2.4.1.3.5	**Perindustrian**							
	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB	Persen	7.95	8.00	8.03	8.01	8,19	=
2.4.1.3.7	**Transmigrasi**							
	Persentase transmigran swakarsa	Persen	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	=
2.4.1.3.7	**Kelautan dan Perikanan**							
	Produksi perikanan	Persen	29.50	48.18	48.75	89,55	91,25	>
	Konsumsi ikan	Persen	96.25	97.92	98.33	96.00	98.42	<
	Produksi perikanan kelompok nelayan	Persen	13.32	22.99	34.96	33,46	35,26	>

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi Kinerja					Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
			2020	2021	2022	2023	2024	
2.4.1.4	**Penunjang Urusan**							
2.4.1.4.1	**Perencanaan Pembangunan**							
	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	=
	Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	=
	Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	=
2.4.1.4.2	**Keuangan**							
	Persentase SILPA	Persen	0.19	0.36	1.73	5,3	5,9	>
	Persentase belanja pendidikan (20%)	Persen	22.60	24.90	21.92	21,90	22,67	>
	Persentase belanja kesehatan (10%)	Persen	10.22	12.71	11.19	15,40	19,02	>
	Penetapan APBD		Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	=
2.4.1.4.3	**Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan**							
	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	Persen	37.23	35.88	56.96	56.96	56.96	<
	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Persen	5.73	0.00	0.51	0.51	0.51	>
2.4.1.4.4	**Penelitian dan Pengembangan**							
	Persentase Perangkat Daerah Yang Difasilitasi Dalam Penerapan Inovasi Daerah	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	=
	Skor Indeks Inovasi Daerah	Skor	358	36.59	32.44	42,04	46,41	=
2.4.1.4.5	**Pengawasan**							
	Persentase tindak lanjut temuan	Persen	91.04	79.17	72.22	92,04	86,78	<
	Persentase pelanggaran pegawai	Persen	0.0772	0.0012	0.0013	0.748	0	>
	Jumlah temuan BPK	Kasus	48	3	4	55	27	>
2.4.1.4.6	**Sekretariat Dewan**							

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi Kinerja					Interpretasi belum tercapai (<); sesuai (=); melampaui (>)
			2020	2021	2022	2023	2024	
	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	Dokumen	Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	=

2.7 Arah Pengembangan Infrastruktur Kewilayahan

2.7.1 Pengembangan Infrastruktur Pemerintah Pusat

Sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Nasional Tahun 2025-2029 pada Lampiran IV arah pembangunan kewilayahan Rencana Pembangunan Nasional Tahun 2025-2029 bahwa terdapat beberapa lokasi prioritas di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dengan *Highlight* indikasi intervensi sebagai berikut :

1. Peningkatan tipe RS dari tipe D menjadi C di RSUD Ogan Komering Ulu Selatan
2. Peningkatan produktivitas perkebunan dan kualitas produksi (sawit, karet, kopi, dan kelapa)
3. Pengembangan dan perlindungan kawasan pertanian komoditas prioritas industri (sawit, karet, kopi, dan kelapa)
4. Penyediaan salana dan plasarana pendulmng produksi pertanian (sawit, karet, kopi, dan kelapa)
5. Pengendatian OPT dan DPI pada komoditas produksi industii {sawit, karet, kopi, dan kelapa)
6. Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaa! Air berkelanjutan untuk pertanian sawit, karet, kopi, dan kelapa
7. Peningkatan bioprospeksi, bioteknologi, keamaran hayati, serta akses dan pembagian keuntungan sumber daya Benetik
8. Pengembangan produk bioekonomi hutan melalui agroforestry
9. Peningkatan fungsi sosial kawasan hutan
10. Peningkatan upaya pencegahan dan mitigasi
11. Peningkatan layanan peringatan dini dan penanganan kedaruratan Bencana
12. Peningkatan resiliensi masyarakat terhadap bencana

Dalam upaya mendukung dan pencapaian pengembangan kewilayahan nasional, Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan telah mendukung dengan melalui beberapa Program pada Perangkat Daerah, pada bidang Kesehatan telah didukung dengan pemusnahan aset daerah pada RSUD Muaradua guna Pembangunan Gedung RSUD Muaradua dari tipe D ke tipe C. Dalam upaya peningkatan ekonomi dan kebencanaan pada sektor pertanian dan kebencanaan telah didukung

dengan program prioritas Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sebagaimana terdapat pada prioritas Pembangunan pada Tabel III.6

2.7.2 Pengembagan Infrastruktur Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

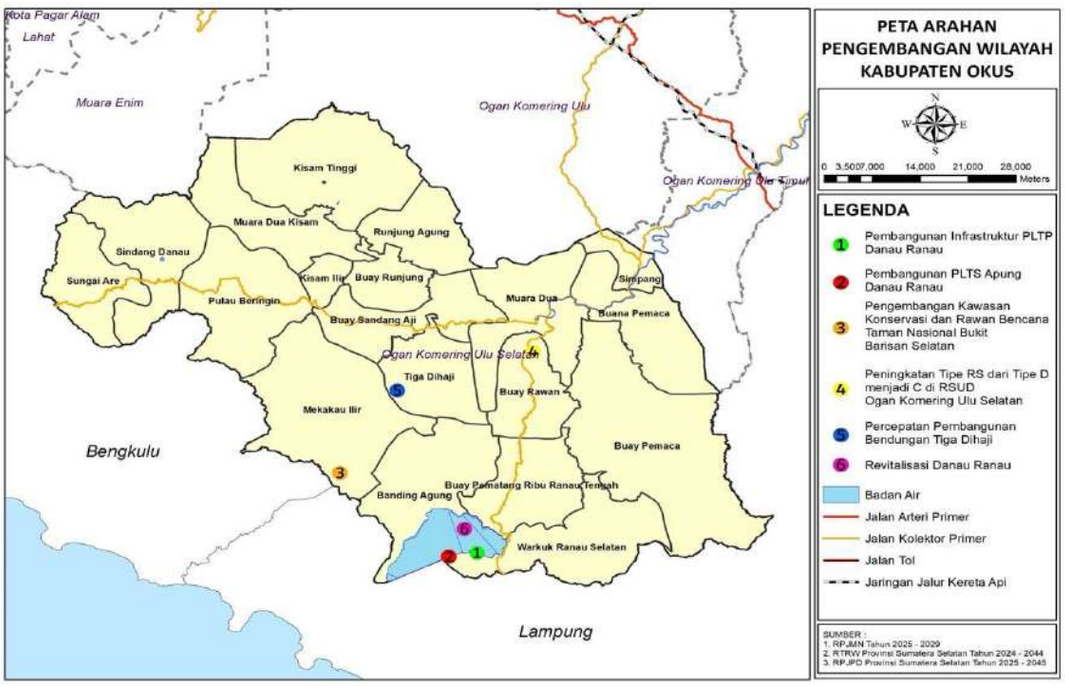

Gambar II.

Peta Arahan Pengembangan Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan

Sumber : RPJMD Sumatera Selatan 2025-2029

Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan memiliki 1 (satu) Kawasan Strategis Nasional (KSN) Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, dan 1 (satu) Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Muaradua. Arah pengembangan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sebagai bagian dari KSP Kawasan Martapura dan Sekitarnya yaitu, pengembangan potensi kawasan melalui pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan, pengembangan kawasan ekonomi terpadu Danau Ranau, pengembangan kawasan wisata minat khusus dengan memanfaatkan potensi alam Danau Ranau berupa pengembangan pelabuhan dermaga Danau Ranau dan dermaga wisata, Pengembangan energi panas bumi Ulu Danau sebagai salah satu energi terbarukan, pengembangan potensi sumber daya mineral logam bijih besi, pengembangan *food estate* sentra produksi padi, peningkatan konektivitas antar dan inter kawasan terutama ke simpul transportasi untuk mendukung fungsi kawasan melalui pengembangan

jaringan jalan dan bandara udara Banding Agung, serta menjaga kawasan yang berfungsi lindung.

KSP Kawasan Martapura dan sekitarnya meliputi 3 (tiga) wilayah kabupaten antara lain Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

1) Kawasan wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur meliputi Kecamatan Martapura, Kecamatan Bunga Mayang, Kecamatan Jaya Pura, Kecamatan Buay Pemuka Peliung, Kecamatan Buay Madang, Kecamatan Buay Madang Timur, Kecamatan Belitang Madang Raya, dan Kecamatan Belitang;
2) Kawasan wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu meliputi Kecamatan Sosoh Buay Rayap, Kecamatan Pengandonan, Kecamatan Semidang Aji, Kecamatan Baturaja Timur dan Kecamatan Baturaja Barat; dan
3) Kawasan wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan meliputi Kecamatan Mekakau Ilir, Kecamatan Banding Agung, Kecamatan Warkuk Ranau Selatan, Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah, Kecamatan Buay Pemaca, Kecamatan Simpang, Kecamatan Buana Pemaca, Kecamatan Muaradua, Kecamatan Buay Rawan, Kecamatan Buay Sandang Aji, Kecamatan Tiga Dihaji, Kecamatan Kisam Ilir, Kecamatan Pulau Beringin, Kecamatan Sindang Danau dan Kecamatan Sungai Are.

Tujuan pengembangan KSP Kawasan Martapura dan Sekitarnya adalah mengembangkan potensi sumber daya alam secara berkelanjutan berbasis pertanian, energi dan pariwisata dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung ruang.

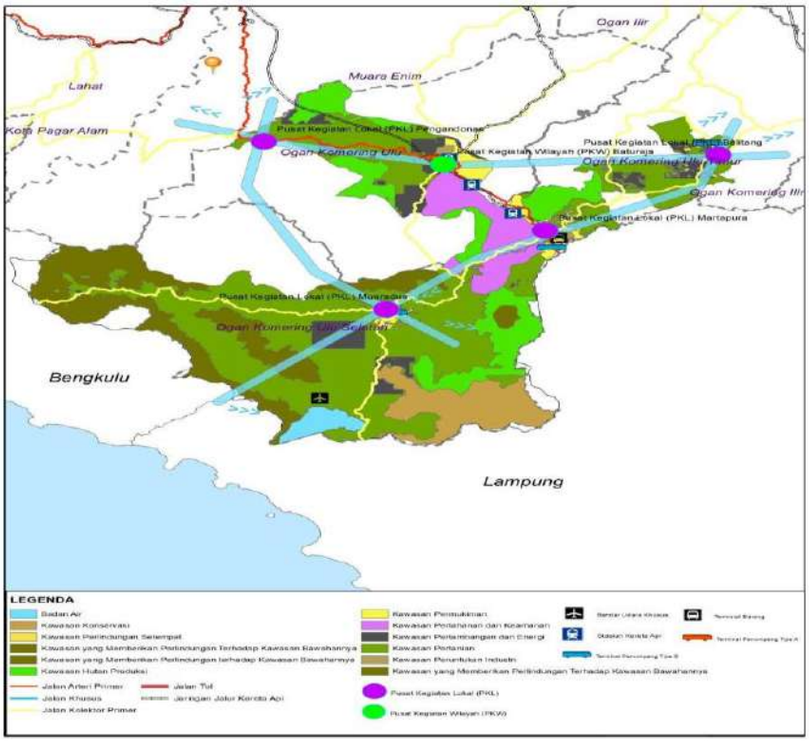

Gambar II
KSP Kawasan Martapura dan Sekitarnya
Sumber : RPJMD Sumatera Selatan 2025-2029

Arah pengembangan KSP Kawasan Martapura dan Sekitarnya adalah sebagai berikut:

a. pengembangan potensi kawasan melalui pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan;
b. pengembangan Kawasan agropolitan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
c. pengembangan kawasan wisata Goa Harimau dan Goa Puteri di Kabupaten Ogan Komering Ulu;
d. pengembangan Kawasan wisata minat khusus dengan memanfaatkan potensi alam Danau Ranau dan pelabuhan dermaga Danau Ranau serta dermaga wisata;
e. pengembangan energi panas bumi sebagai salah satu energi terbarukan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
f. pengembangan energi alternatif ramah lingkungan melalui pemanfaatan biodiesel/biofuel berbasis kelapa sawit di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
g. pengembangan potensi sumber daya mineral logam bijih besi sebagai komoditas unggulan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;

h. pengembangan *food estate* sentra produksi padi di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
i. peningkatan konektivitas antar dan inter Kawasan, terutama ke simpul transportasi untuk mendukung fungsi Kawasan melalui pengembangan jaringan jalan dan Bandar Udara Banding Agung;
j. pengendalian Kawasan yang berfungsi lindung.

Selain prioritas Proyek Strategis Nasional di atas, berikut prioritas pembangunan wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan pada tahun 2025-2029, antara lain diarahkan pada:

1) Konservasi sumber daya air melalui rehabilitasi hutan dan lahan pada *catchment area* Sub-DAS Ogan dan Sub-DAS Komering.
2) Pembangunan infrastruktur pemantauan kualitas air di sungai dan danau pada Sub-DAS Ogan dan Sub-DAS Komering.
3) Revitalisasi Danau Ranau.
4) Pembangunan infrastruktur PLTP Danau Ranau.
5) Pembangunan PLTS Apung Danau Ranau.
6) Peningkatan tipe RS dari tipe D menjadi C di RSUD Ogan Komering Ulu Selatan.
7) Peningkatan produktivitas perkebunan dan kualitas produksi (sawit, karet, kopi dan kelapa).
8) Pengembangan dan perlindungan kawasan pertanian komoditas prioritas industri (sawit, karet, kopi dan kelapa).
9) Penyediaan sarana dan prasarana pendukung produksi pertanian (sawit, karet, kopi dan kelapa).
10) Pengendalian OPT dan DPI pada komoditas produksi industri (sawit, karet, kopi dan kelapa).
11) Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian sawit, karet, kopi dan kelapa.
12) Pengembangan produk bioekonomi hutan melalui agroforestri dan silvopastura.
13) Pengembangan Kawasan Konservasi dan Rawan Bencana Taman Nasional Bukit Barisan Selatan.
14) Pelestarian Kawasan Situs Bersejarah.
15) Peningkatan kerjasama dengan kawasan perbatasan.

16) Pengembangan informasi kebencanaan, pencegahan dan kesiapsiagaan, serta tanggap darurat penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan, serta longsor.
17) Pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan.
18) Peningkatan konektivitas antar dan inter kawasan, terutama ke simpul transportasi.
19) Menjaga kawasan yang berfungsi lindung.
20) Perluasan akses internet dan digitalisasi.
21) Mempercepat industrialisasi dan pemberdayaan aktivitas ekonomi dari sektor-sektor unggulan daerah untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk.
22) Dukungan promosi dan kemudahan investasi.
23) Mengadakan program pelatihan spesifik yang sesuai dengan kebutuhan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI).
24) Meningkatkan aksesibilitas pelayanan dasar melalui pembangunan unit sekolah baru dan penguatan peran puskesmas pembantu.
25) Peningkatan kapasitas tenaga pendidik dan tenaga kesehatan serta standarisasi kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan.

2.8. Gambaran Keuangan Daerah

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah perlu dikuatkan untuk memacu perekonomian nasional. Perekonomian daerah yang kuat akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, serta mengurangi kemiskinan dan kesenjangan ekonomi. Pembangunan perekonomian di daerah dapat menumbuhkan kegiatan-kegiatan sektor lapangan usaha sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan taraf hidup masyarakat di daerah tersebut. Pertumbuhan ekonomi daerah yang melemah dapat mempengaruhi keuangan daerah juga, sehingga proses pengelolaan keuangan daerah harus sesuai dengan aturan yang telah ditentukan.

Pada dasarnya pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Dalam konteks ini lebih difokuskan kepada pengawasan keuangan daerah yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Keuangan daerah selain diatur dengan Peraturan Pemerintah juga mengikuti Peraturan Menteri Keuangan dan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara yang ditetapkan setiap tahun, dan anggaran pendapatan dan belanja daerah masing-masing

daerah yang disinkronkan dan dikelola secara sistematis. Keuangan daerah dituangkan sepenuhnya ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Keuangan daerah haruslah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan prinsip keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Selain itu, tuntutan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem Pemerintah semakin meningkat pada era reformasi saat ini, tidak terkecuali transparansi dalam pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah. Transparansi dapat diartikan sebagai suatu situasi di mana masyarakat dapat mengetahui dengan jelas semua kebijaksanaan dan tindakan yang diambil oleh Pemerintah dalam menjalankan fungsinya beserta sumber daya yang digunakan. Sedangkan akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dalam melakukan tahapan perencanaan pengelolaan keuangan daerah, haruslah memperhatikan kinerja keuangan masa lalu. Kinerja keuangan masa lalu dianalisis sekurang kurangnya 5 (lima) tahun ke belakang, akan diketahui rata-rata pertumbuhan yang dijadikan sebagai acuan analisis proyeksi kemampuan keuangan ke depan. Analisis terhadap kinerja keuangan masa lalu mencakup kinerja pelaksanaan APBD dan neraca daerah.

Sebagai tahap awal dalam menganalisis kinerja keuangan daerah pada masa-masa lalu perlu diketahui kemampuan pendanaan pembangunan pemerintahan daerah selama ini. Derajat Otonomi Fiskal Daerah (DOFD) sebagai salah satu indikator untuk menganalisis kemampuan keuangan daerah diukur melalui kontribusi realisasi PAD terhadap APBD. Kesinambungan penyelenggaraan pembangunan di masa datang ditentukan sejauhmana kemandirian pembiayaan tersedia untuk melaksanakan pembangunan daerah. Semakin tinggi nilai DOFD menunjukkan semakin kuat kemandirian pembiayaan pembangunan.

Tabel II.93
Skala interval Otonomi Fiskal

No.	Derajat Otonomi Fiskal (DOF) (%)	Kemampuan Keuangan Daerah
1.	0,00-10,00	Sangat Kurang
2.	10,01-20,00	Kurang
3.	20,01-30,00	Sedang

No.	Derajat Otonomi Fiskal (DOF) (%)	Kemampuan Keuangan Daerah
4.	30,01-40,00	Cukup
5.	40,01-50,00	Baik
6.	>50	Sangat Baik

Sumber: Wulandari, 2001

Kondisi kemandirian keuangan daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan berdasarkan DOFD dalam 5 (lima) tahun terakhir (2020-2024) mengalami fluktuasi. Di tahun sebelumnya yakni tahun 2019, DOFD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sebesar 4,14%, kemudian di tahun 2020 mengalami menurunan sebesar 0,69% menjadi 3,45%. Setelah mengalami penurunan, di tahun 2021 terjadi peningkatan kembali menjadi 4,75%, kemudian menurun menjadi 4,09% pada tahun 2022, pada tahun 2023 meningkat kembali menjadi 4,34% dan terakhir terjadi penurunan di tahun 2024 sebesar 3,15%.

Berdasarkan klasifikasinya, rata-rata nilai DOFD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yang sebesar 3,95% masih masuk kategori sangat kurang bahkan jauh di bawah 10%. Dengan melihat kondisi tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan harus semakin lebih kreatif dan inovatif dalam menggali sumber-sumber keuangan daerahnya sehingga penerimaannya tidak tergantung kepada Pemerintah Pusat maupun Provinsi. Perkembangan DOFD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan periode tahun 2020-2024, dapat dilihat pada Tabel II.86 berikut ini.

Tabel II.94
Derajat Otonomi Fiskal Daerah
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020-2024

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Total Pendapatan	Persentase
2020	46.947.369.117,43	1.362.285.274.507,00	3,45
2021	60.796.162.001,13	1.278.699.653.187,87	4,75
2022	59.377.351.313,13	1.452.759.047.745,55	4,09
2023	60.015.654.299,95	1.384.409.457.415,73	4,34
2024	48.584.329.273,32	1.542.264.201.660,19	3,15
Rata-Rata	**275.720.866.004,96**	**7.020.417.634.516,34**	**3,93**

Sumber: BPKAD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Tahun 2025 (diolah)

2.8.1.Kinerja Pelaksanaan APBD

Kinerja keuangan merupakan prospek atau masa depan, pertumbuhan dan potensi perkembangan yang baik bagi suatu daerah. Kinerja keuangan diperlukan informasinya untuk menilai perubahan potensial sumber daya ekonomi yang dikendalikan untuk memprediksi kapasitas hasil dari sumber

daya yang tersedia. Kinerja keuangan daerah diukur dari kinerja pelaksanaan APBD. Kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dapat dilihat dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pendapatan daerah merupakan hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Belanja daerah merupakan kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sementara itu pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, ada sedikit perubahan strukur pendapatan daerah, terdiri dari:

a. Pendapatan asli daerah (PAD) yang terdiri dari pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
b. Pendapatan transfer yang terdiri dari transfer Pemerintah Pusat (dana perimbangan, dana insentif daerah, dana otonomi khusus, dan dana Desa); dan transfer antar daerah (pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan);
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi pendapatan hibah, dana darurat, dan pendapatan lainnya.

Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dalam 5 (lima) tahun terakhir (2020-2024) mengalami kenaikan dengan rata-rata naik sebesar 3,15% per tahun. Jika dilihat dari komponen pendapatan daerah dalam kurun waktu tahun 2020-2024 terlihat bahwa semua sumber pendapatan mengalami kenaikan di mana rata-rata kenaikan pendapatan asli daerah (PAD) sebesar 0,86%, rata-rata kenaikan pendapatan transper sebesar 4,36% dan rata-rata lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar -31,51%. Secara lebih rinci rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel II.87.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Belanja Daerah merupakan semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan

pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran. Belanja daerah dikelompokkan ke dalam Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer. Dengan klasifikasi tersebut, maka penganggaran ke depan akan sama klasifikasinya dengan pelaporannya sehingga akan dapat diperbandingkan dan ditingkatkan kualitas informasi yang disajikan.

Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan, dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Selain itu belanja daerah diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk penyelenggaraan pembangunan berdasarkan pembagian kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta dalam rangka percepatan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran tahun 2025-2029 perlu dilakukan langkah-lakukan dalam meningkatkan sumber pendanaan dari pendapatan daerah maupun pembiayaan.

Dalam kurun 5 (lima) tahun terakhir tahun 2020-2024 realisasi belanja daerah terus mengalami kenaikan dengan rata-rata kenaikan mencapai 3,15% per tahun dari Rp. 1.362.285.274.507,00 di tahun 2020 naik menjadi Rp. 1.551.064.400.039,10 di tahun 2024. Kenaikan belanja tersebut seirama dengan kenaikan pendapatan daerah pada kurun waktu yang sama, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Keseluruhan realisasi belanja daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel II.87.

Pembiayaan daerah merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Dengan kata lain pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Komponen pembiayaan daerah terdiri dari:

1. Penerimaan Pembiayaan Daerah yang didalamnya terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Lalu, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, dan Penerimaan Piutang Daerah.

2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah yang didalamnya terdiri atas Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah, dan Pembayaran Pokok Utang.
3. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan.

Penerimaan pembiayaan daerah di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya kecuali di tahun 2022 mendapatkan Penerimaan Pinjaman Daerah-Lembaga Keuangan Bank sebesar Rp.67,29 milyar, sedangkan pengeluaran pembiayaan digunakan untuk penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah. Secara lebih rinci, perkembangan pembiayaan daerah dan rata-rata pertumbuhan APBD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel II.87 berikut :

Tabel II.95
Realisasi APBD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020-2024

No.	Komponen Pendapatan	Realisasi					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	**Pendapatan**	**1.362.285.274.507,00**	**1.278.699.653.187,87**	**1.452.759.047.745,55**	**1.384.409.457.415,73**	**1.551.064.400.039,10**	**3,15**
1.1	**Pendapatan Asli Daerah**	**46.947.369.117,43**	**60.796.162.001,13**	**59.377.351.313,13**	**60.015.654.299,95**	**55.917.585.907,23**	**0,86**
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	14.508.273.116,00	16.046.807.244,00	18.132.453.304,00	18.509.226.511,00	19.814.770.287,00	7,86
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	12.151.029.559,00	6.420.599.358,00	2.302.047.279,67	3.166.630.352,00	3.154.967.807,00	-32,23
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	4.914.972.178,21	5.877.991.679,42	6.423.278.666,27	8.876.406.113,22	7.738.159.208,83	12,01
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	15.373.094.264,22	32.450.763.719,71	32.519.572.063,19	29.467.391.323,73	25.209.688.604,40	4,94
1.2	**Pendapatan Transfer**	**1.245.983.420.214,57**	**1.154.818.960.990,74**	**1.321.180.875.153,42**	**1.308.488.027.231,78**	**1.478.454.246.978,87**	**4,36**
1.2.1	Transper Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	1.130.384.450.199,00	843.084.691.751,00	960.411.536.109,00	1.178.610.979.741,00	1.116.997.848.596,00	4,23
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil	166.347.247.509,00	105.276.212.582,00	219.128.163.356,00	144.493.066.159,00	229.086.680.000,00	0
1.2.1.2	Dana Alokasi Umum	587.250.613.000,00	580.802.311.000,00	578.741.798.783,00	605.710.916.743,00	652.616.468.300,00	0
1.2.1.3	Dana Alokasi Khusus	152.831.932.690,00	157.006.168.169,00	162.541.573.970,00	212.674.778.959,00	235.294.700.296,00	0
1.2.1.4	Dana Insentif Daerah	0	0	0	0	0	0
1.2.1.5	Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0
1.2.1.6	Dana Penyesuaian	0	0	0	0	0	0
1.2.1.7	Dana Desa	223.954.657.000,00	227.746.579.500,00	213.364.818.763,00	215.732.217.880,00	217.285.528.400,00	0
1.2.2	Transper Antar Daerah	115.598.970.015,57	83.987.689.739,74	147.404.520.281,42	129.877.047.490,78	144.171.122.982,87	5,67
1.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	55.302.526.969,00	54.927.985.871,09	64.746.443.203,91	73.440.139.974,00	86.256.425.352,00	0
1.2.2.2	Pendapatan Bagi Hasil lainnya	60.296.443.046,57	29.059.703.868,65	82.658.077.077,51	56.436.907.516,78	57.914.697.630,87	0
1.3	**Lain-Lain Pendapatan Yang Sah**	**69.354.485.175,00**	**63.084.530.196,00**	**72.200.821.279,00**	**15.905.775.884,00**	**16.692.314.153,00**	**-31,51**
1.3.1	Pendapatan Hibah	69.354.485.175,00	16.214.200.196,00	25.020.898.302,00	42.800.000,00	0	0

No.	Komponen Pendapatan	Realisasi					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
1.3.2	Pendapatan Dana Darurat	0	46.870.330.000,00	0	0	0	0
1.3.3	Pendapatan Lainnya	0	0	47.179.922.977,00	11.625.775.884,00	16.692.314.153,00	76,03
2	**Belanja**	**1.356.759.375.073,22**	**1.256.366.229.325,80**	**1.440.892.304.908,89**	**1.437.247.362.169,02**	**1.522.407.728.472,09**	**1,94**
2.1	**Belanja Operasi**	**763.951.590.222,60**	**743.934.793.328,44**	**766.165.712.865,00**	**852.433.312.270,02**	**953.099.624.367,32**	**4,44**
2.1.1	Belanja Pegawai	420.535.939.637,00	439.771.036.678,72	450.738.766.953,00	471.738.757.026,00	551.259.826.997,00	6,98
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	286.528.635.585,60	285.941.012.505,72	295.969.305.268,00	328.335.258.531,02	334.496.581.916,06	0,49
2.1.2	Belanja Bunga	0	0	0	2.603.199.003,00	2.179.956.172,78	0
2.1.4	Belanja Subsidi	0	0	0	0	279.311.500,00	0
2.1.5	Belanja Hibah	56.087.150.000,00	17.661.273.533,00	13.676.940.644,00	48.144.497.710,00	63.091.147.781,48	1,7
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	799.865.000,00	561.470.611,00	578.070.000,00	1.611.600.000,00	1.792.800.000,00	22,33
2.2	**Belanja Modal**	**283.802.863.525,62**	**229.182.446.083,36**	**391.480.860.774,89**	**313.539.401.548,00**	**258.078.646.666,77**	**-3,14**
2.2.1	Belanja Tanah	0	0	0	0	0	0
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	50.581.527.756,00	34.391.452.343,52	53.190.330.140,00	31.511.176.372,00	39.199.643.151,00	-8,85
2.2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	62.648.862.355,16	75.372.848.535,20	85.015.031.770,89	76.579.834.166,00	73.134.750.867,36	3,78
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	163.258.854.909,96	118.315.975.204,64	253.275.498.864,00	201.262.726.160,00	141.151.856.787,41	-3,7
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	7.313.618.504,50	1.102.170.000,00	0	4.003.146.973,00	4.374.835.861,00	0
2.2.6	Belanja Aset Lainnya	0	0	0	29.500.000,00	217.560.000,00	0
2.3	**Belanja Tak Terduga**	**11.991.969.357,00**	**882.304.500,00**	**960.898.859,00**	**1.347.653.200,00**	**2.224.395.071,00**	**-33,97**
2.3.1	Belanja Tak Terduga	11.991.969.357,00	882.304.500,00	960.898.859,00	1.347.653.200,00	2.224.395.071,00	-33,97
2.4	**Belanja Transfer**	**297.012.951.968,00**	**282.366.685.414,00**	**282.284.832.410,00**	**269.926.995.151,00**	**309.005.062.367,00**	**0,98**
2.4.1	Belanja Transfer Bagi Hasil	0	0	0	0	1.062.378.307,00	0
2.4.1.1	Bagi Hasil Pajak	0	0	0	0		0
2.4.1.2	Bagi Hasil Retribusi	0	0	0	0		0
2.4.1.3	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0	0	0	0		0
							0
2.4.2	Belanja Transfer Bantuan Keuangan	297.012.951.968,00	282.366.685.414,00	282.284.832.410,00	269.926.995.150,00	307.942.684.060,00	0,98

No.	Komponen Pendapatan	Realisasi					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
2.4.2.1	Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	250.000.000,00	325.860.934,00	312.994.840,00	0	0	0
2.4.2.2	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa (Dana Desa dari Pemerintah Pusat dan Bantuan Keuangan Lainnya dari Kab/Kota ke Desa)	295.725.870.560,00	282.040.824.480,00	281.971.837.570,00	0	0	
2.4.2.3	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	1.037.081.408,00	0	0	0	0	0
SURPLUS/(DEFISIT)		**5.525.899.433,78**	**22.333.423.862,07**	**11.866.742.836,66**	**-52.833.904.753,29**	**28.656.671.567,01**	**91,21**
3	**Pembiayaan**						
3.1	**Penerimaan Pembiayaan**	**2,614,368,375.85**	**4,590,267,809.62**	**92,417,997,984.69**	**99.184.740.821,35**	**3.318.582.616,06**	
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	2,614,368,375.85	4,590,267,809.62	92,417,997,984.69	99.184.740.821,35	3.318.582.616,06	
3.1.1.1	Pelampauan Penerimaan PAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.1.2	Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.1.3	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.1.4	Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya	2,614,368,375.85	4,590,267,809.62	25,123,691,671.69	0.00	0.00	0.00
3.1.1.5	Sisa Belanja DAK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.1.6	Sisa Belanja Dana Bagi Hasil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.1.7	Sisa Belanja Dana Penyesuaian	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.1.8	Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bank	0.00	0.00	67,294,306,313.00	0.00	0.00	0.00

No.	Komponen Pendapatan	Realisasi					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
3.1.2	Penerimaan Piutang Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.2.1	Penerimaan Piutang Daerah Dari Pemerintah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2	**Pengeluaran Pembiayaan**	**3,550,000,000.00**	**1,800,000,000.00**	**5,100,000,000.00**	**43,000,000,000.**	**27.294.306.313,46**	
3.2.1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	3,550,000,000.00	1,800,000,000.00	5,100,000,000.00	3.000.000.000,00	0.00	
3.2.1.1	Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	3,550,000,000.00	1,800,000,000.00	5,100,000,000.00	0.00	0.00	
					0.00	0.00	
3.2.2	Pembayaran Pokok Utang	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.2.2.1	Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo Kepada Pemerintah Daerah Lain	0.00	0.00	0.00	40,000,000,000.00	27.294.306.313,46	
Pembiayaan Netto		**-935,631,624.15**	**2,790,267,809.62**	**87,317,997,984.69**	**56.184.740.821,35**	**-23.975.723.697,4**	

Sumber: Bapenda dan BPKAD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Tahun 2025 (diolah)

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Neraca Daerah merupakan salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah. Laporan ini sangat penting bagi Manajemen Pemerintah Daerah, tidak hanya dalam rangka memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku saja, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang terarah dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif.

Neraca Daerah memberikan informasi mengenai posisi keuangan berupa aset, kewajiban (utang), dan ekuitas pada tanggal neraca tersebut dikeluarkan. Aset, kewajiban, dan ekuitas kepada manajemen pemerintahan daerah mengenai likuiditas keuangan dan informasi mengenai fleksibilitas keuangan. Pemberian informasi tersebut merupakan upaya dan tindakan Pemerintah Daerah untuk menjalankan *good government governance* dan bentuk pertanggungjawaban atas posisi kekayaan daerah.

1. Aset

Aset dapat menginformasikan mengenai sumber daya yang dimiliki dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi Pemerintah Daerah maupun masyarakat di masa datang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam satuan moneter. Aset terdiri dari (i) aset lancar; (ii) investasi jangka panjang; (iii) aset tetap; (iv) dana cadangan; dan (v) aset lainnya.

Secara agregat nilai aset Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dari tahun 2020-2024 relatif mengalami kenaikan dengan rata-rata kenaikan mencapai 3,90% per tahun. Tercatat aset Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan pada tahun 2020 senilai Rp.2,91 triliun naik menjadi Rp.3,38 triliun di tahun 2024.

2. Kewajiban

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Kewajiban memberikan informasi tentang utang Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas Pemerintah Daerah. Kewajiban dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua), yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

Secara agregat nilai kewajiban Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dari tahun 2020-2024 relatif mengalami kenaikan dengan rata-rata kenaikan mencapai 165,92% per tahun. Tercatat kewajiban Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan pada tahun 2020 senilai Rp.14,6 milyar naik menjadi Rp 224,59

milyar di tahun 2024, dengan mengalami kenaikan rata-rata pertahun sebesar 108,99%.

3. Ekuitas Dana

Ekuitas dana merupakan selisih antara aset dengan kewajiban Pemerintah Daerah. Ekuitas dana cadangan merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang diinvestasikan dalam dana cadangan untuk tujuan tertentu di masa mendatang. Semakin besar nilai ekuitas dana maka akan semakin bagus juga kondisi keuangan suatu daerah.

Nilai ekuitas dana Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan mempunyai tren yang meningkat dengan rata-rata kenaikan sebesar 3,77% per tahun. Tercatat nilai ekuitas Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan di tahun 2020 sebesar Rp.2,90 triliun dan menjadi Rp.3,16 triliun di tahun 2024. Hal tersebut menunjukkan bahwa selisih antara nilai aset yang ada terhadap kewajiban yang harus dibayarkan terus meningkat. Hal ini perlu diperhatikan oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan terutama berkaitan dengan kualitas pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Berikut ini perkembangan Neraca Daerah selama 5 tahun terakhir dan rata-rata pertumbuhannya.

Tabel II.96
Neraca Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020-2024

Keterangan	Realisasi					Rata-rata Pertumbuhan (%)
	2.020	2.021	2.022	2.023	2.024	
ASET						
ASET LANCAR						
Kas di Kas Daerah	1.498.535.891,62	16.286.704.585,69	98.043.324.849,24	6.871.913.744,00	8.524.852.595,00	3,55
Kas di Bendahara Pengeluaran	25.050.838,00	111.986.351,00	13.829.887,00	142.997,00	730.200,00	1,43
Kas di Bendahara Penerimaan	-	-	32.332.383,00	21.135.566,00	3.934.694,00	-0,58
Kas Lainnya - Sisa Dana BOS dan PSG	-	-	-	66.700.891.762,00	107.136.328.262,00	0,61
Kas di BLUD	-	5.489.749.784,00	5.876.284,11	91.988.071,00	100.429.778,00	4,58
Kas di Bendahara BOS	138.792.788,00	121.113.602,00	89.815.264,00	2.436.854.108,00	34.192.413.895,00	9,69
Kas di Bendahara FKTP	2.927.888.292,00	3.114.137.349,00	999.562.154,00	64.987.271,00	32.253.452,00	-0,51
Kas Lainnya	37.097.152,00	19.720.000,00	10.566.734,00	6.871.913.744,00	8.524.852.595,00	162,16
Investasi Jangka Pendek	-	-	-	-	-	
Piutang Pajak	7.160.027.383,00	5.864.209.008,00	4.082.196.432,00	4.373.652.819,00	5.412.111.929,00	-0,04
Penyisihan Piutang Pajak Tak Tertagih				- 233.572.765.985,00	- 242.266.582.805,00	0,04
Piutang Retribusi	34.547.300,00	14.207.100,00	3.003.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-0,34

Keterangan	Realisasi					Rata-rata Pertumbuhan (%)
	2.020	2.021	2.022	2.023	2.024	
Penyisihan Piutang Retribusi Tak Tertagih				- 2.250.000,00	- 2.250.000,00	-
Piutang Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi	3.109.813.406,00	4.273.605.500,00	2.478.329.082,00	18.751.196.730,00	-	1,38
Piutang Dana Bagi Hasil Pemerintah Pusat	10.544.103.096,00	2.090.117.961,00	2.090.117.961,00	2.092.054.961,00	2.090.117.961,00	- 0,20
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	-	-	1.845.813.453,20	1.476.125.981,00	1.514.449.150,00	- 0,09
Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara	-	-	-	-	-	
Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	-	-	-	-	-	
Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat	-	-	-	-	-	
Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-	-	-	
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	-	-	-	-	-	

Keterangan	Realisasi					Rata-rata Pertumbuhan (%)
	2.020	2.021	2.022	2.023	2.024	
Bagian Tuntutan Perbendaharaan	-	-	-	-	-	
Bagian Tuntutan Ganti rugi	48.722.202,65	-	-	-	-	-1,00
Piutang Lainnya	9.913.905.987,41	10.847.682.761,22	7.686.582.734,11	4.118.528.591.447,00	738.530.523.501,00	133,45
Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-	-	-	-	-	
Penyisihan Piutang Pajak Tak Tertagih	- 3.601.250.013,10	- 2.874.662.192,30	- 1.798.310.984,85	-	-	-0,53
Penyisihan Piutang Retribusi Tak Tertagih	-	- 10.653.525,00	- 2.250.750,00	-	-	-0,89
Beban Dibayar Dimuka	95.833.333,33	54.575.643,53	211.999.310,40	49.247.910.762,00	62.118.047.514,00	58,50
Persediaan	6.153.843.292,86	9.331.509.997,40	24.595.278.210,56	1.238.947.266.192,00	967.680.041.962,00	12,83
Jumlah Aset Lancar	**38.067.816.684,76**	**54.734.003.925,54**	**140.388.066.003,77**	**8.177.612.658.322,00**	**2.899.125.066.379,00**	14,65
INVESTASI JANGKA PANJANG						
Investasi Non Permanen						
Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	-	-	-	-	-	

Keterangan	Realisasi					Rata-rata Pertumbuhan (%)
	2.020	2.021	2.022	2.023	2.024	
Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	-	-	-	-	-	
Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lain	-	-	-	-	-	
Investasi dalam Surat Utang Negara	-	-	-	-	-	
Investasi Dalam Proyek Pembangunan	-	-	-	-	-	
Investasi Non Permanen Lain	-	-	-	-	-	
Jumlah Investasi Non Permanen	-	-	-	-	-	
Investasi Permanen						
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	67.490.431.849,33	63.822.620.053,65	65.953.428.859,59	6.605.529.782.109,00	6.605.529.782.109,00	24,78
Investasi Permanen Lain	-	-	-	-		
Jumlah Investasi Permanen	**67.490.431.849,33**	**63.822.620.053,65**	**65.953.428.859,59**	**6.605.529.782.109,00**	**6.605.529.782.109,00**	24,78
Jumlah Investasi Jangka Panjang	**67.490.431.849,33**	**63.822.620.053,65**	**65.953.428.859,59**	**6.605.529.782.109,00**	**6.605.529.782.109,00**	24,78
ASET TETAP						

Keterangan	Realisasi					Rata-rata Pertumbuhan (%)
	2.020	2.021	2.022	2.023	2.024	
Tanah	209.533.409.026,38	198.353.267.949,58	200.376.517.724,58	20.583.373.005.358,00	22.886.933.005.358,00	25,45
Peralatan dan Mesin	344.483.416.988,80	380.325.850.857,20	445.756.698.451,32	48.202.625.454.128,00	54.824.818.413.428,00	26,89
Gedung dan Bangunan	869.397.540.551,91	975.818.342.319,02	1.036.227.923.092,70	106.413.641.349.737,00	11.051.739.322.605,00	25,25
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	2.992.717.991.021,24	3.167.101.838.796,63	3.335.019.845.291,01	361.284.381.044.964,00	375.475.169.705.539,00	26,87
Aset Tetap Lainnya	68.800.392.367,09	72.860.908.537,09	72.125.191.957,09	7.604.248.663.009,00	8.066.307.989.509,00	26,14
Konstruksi dalam Pengerjaan	73.152.471.650,70	20.488.938.530,05	98.600.982.090,91	7.465.207.713.632,00	19.893.834.237.529,00	19,87
Akumulasi Penyusutan	-1.792.768.456.638,40	-2.006.702.836.281,96	-2.165.588.059.414,97	-242.967.337.473.171,00	-272.834.889.952.681,00	27,88
Jumlah Aset Tetap	**2.765.316.764.967,72**	**2.808.246.310.707,61**	**3.022.519.099.192,64**	**308.586.139.757.657,00**	**318.829.566.624.732,00**	25,31
DANA CADANGAN						
Dana Cadangan	-	-	-	-	-	
Jumlah Dana Cadangan	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
ASET LAINNYA						
Tagihan Penjualan Angsuran	-	-	-	-	-	
Tuntutan Perbendaharaan	-	-	-	-	-	
Tuntutan Ganti rugi	-	-	-	-	-	
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-	-	-	-	

Keterangan	Realisasi					Rata-rata Pertumbuhan (%)
	2.020	2.021	2.022	2.023	2.024	
Aset Tidak Berwujud	3.938.897.330,00	3.388.187.330,00	3.275.412.330,00	3.304.912.330,00	3.304.912.330,00	-0,04
Amortisasi	- 2.938.468.832,50	- 2.734.038.665,00	- 2.889.024.747,50	- 3.024.361.830,00	- 3.031.736.830,00	0,01
Aset Lain-lain	42.527.280.829,86	59.278.379.023,00	84.215.605.074,87	14.560.795.266.425,00	6.508.044.114.878,00	43,04
Jumlah Aset Lainnya	**43.527.709.327,36**	**59.932.527.688,00**	**84.601.992.657,37**	**14.588.850.316.425,00**	**6.535.361.664.878,00**	42,92
JUMLAH ASET	**2.914.402.722.829,17**	**2.986.735.462.374,80**	**3.313.462.586.713,37**	**341.577.113.982.353,00**	**338.488.564.605.938,00**	25,55
KEWAJIBAN						
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK						
Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	7.059.603,00	19.720.000,00	10.566.734,00	-	-	0,11
Utang Belanja		40.999.207.756,18	42.192.636.776,64	12.842.481.976.477,00	22.422.308.375.494,00	101,38
Utang Bunga	8.217.975.309,89	-	503.257.045,54			-1,00
Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	-	-	-	-	-	
Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-	-	-	
Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	-	-	-	-	-	

Keterangan	Realisasi					Rata-rata Pertumbuhan (%)
	2.020	2.021	2.022	2.023	2.024	
Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan bukan Bank	-	-	-	-	-	
Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Obligasi	-	-	-	-	-	
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-	40.000.000.000,00	-	-	
Pendapatan Diterima Dimuka	142.816.006,00	184.146.452,50	234.958.947,67	24.384.293.263,00	36.985.764.325,00	25,97
Utang Jangka Pendek Lainnya	6.275.510.461,14	-	66.099.587,70	184.053.310.008,00	-	927,16
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	**14.643.361.380,03**	**41.203.074.208,68**	**83.007.519.091,56**	**1.470.739.936.982,00**	**22.459.294.139.399,00**	8,45
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG						
Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	-	-	-	-	-	
Utang Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-	-	-	
Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	-	-	27.294.306.313,00	27.294.306.313,00	-	

Keterangan	Realisasi					Rata-rata Pertumbuhan (%)
	2.020	2.021	2.022	2.023	2.024	
Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	-	-	-	-	-	
Utang Dalam Negeri - Obligasi	-	-	-	-	-	
Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-	-	-	-	
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	**-**	**-**	**27.294.306.313,00**	**27.294.306.313,00**	**-**	- 0,50
JUMLAH KEWAJIBAN	**14.643.361.380,03**	**41.203.074.208,68**	**110.301.825.404,56**	**1.743.683.000.112,00**	**22.459.294.139.399,00**	7,54
EKUITAS						
EKUITAS						
Ekuitas	2.899.759.361.449,14	2.945.532.388.166,12	3.203.160.761.308,81	324.140.283.981.233,00	31.602.927.046.654,00	24,85
Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	-	-	-	-	-	
JUMLAH EKUITAS	**2.899.759.361.449,14**	**2.945.532.388.166,12**	**3.203.160.761.308,81**	**324.140.283.981.233,00**	**31.602.927.046.654,00**	24,85
JUMLAH EKUITAS DAN KEWAJIBAN	**2.914.402.722.829,17**	**2.986.735.462.374,80**	**3.313.462.586.713,37**	**341.577.113.982.353,00**	**338.488.564.605.938,00**	25,55

Sumber: BPKAD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Tahun 2025 (diolah)

2.8.2. Proyeksi Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2025-2030

Sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, dijelaskan bahwa kebijakan masa lalu terkait dengan pengelolaan keuangan daerah di Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan merupakan analisis lebih lanjut atas hasil kinerja pelaksanaan APBD selama 5 tahun terakhir dan perkembangan neraca daerah. Kebijakan anggaran dan keuangan yang telah dilaksanakan selama 5 tahun terakhir kemudian dapat menggambarkan kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu terkait proporsi penggunaan anggaran dan hasil analisis pembiayaan.

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, APBD mempunyai fungsi berikut ini:

a) Fungsiotorisasi, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
b) Fungsi perencanaan, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan
c) Fungsi pengawasan, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kesesuaian kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
d) Fungsi alokasi, mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
e) Fungsi distribusi, mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
f) Fungsi stabilisasi, mengandung arti bahwa anggaran Pemerintah Daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan melalui suatu sistem yang terintegrasi dalam rangkaian siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang pelaksanaannya mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/ pemeriksaan sampai pada pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan pendapatan daerah pada tahun 2020-2024 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional, yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja. Selama periode tahun anggaran 2020-2024, kebijakan

umum pendapatan daerah diarahkan pada peningkatan penerimaan daerah melalui:

1. Optimalisasi pendapatan daerah sesuai peraturan yang berlaku dan kondisi daerah.
2. Peningkatan kemampuan dan keterampilan SDM pengelola pendapatan daerah.
3. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya.

Dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah, Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan telah mengambil langkah-langkah, sebagai berikut:

Langkah-Langkah Intensifikasi:

1. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap objek-objek pajak.
2. Melakukan uji petik terhadap objek-objek pajak yang potensial.
3. Meningkatkan frekuensi penagihan melalui metode penyisiran.
4. Mengantisipasi terjadinya penyimpangan penerimaan daerah.
5. Meningkatkan pelayanan terhadap wajib pajak.
6. Melaksanakan rapat koordinasi dengan instansi terkait setiap triwulan.
7. Melakukan penilaian individual Objek Pajak Khusus.
8. Melakukan penyesuaian Zona Nilai Tambah (ZNT) dan peningkatan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).
9. Melakukan pengkajian dan pembahasan terhadap permasalahan yang berkaitan dengan upaya peningkatan pendapatan daerah.
10. Mengoptimalkan teknologi informasi di bidang perpajakan.
11. Merevisi dan mengevaluasi data yang tidak akurat lagi.
12. Melakukan kerjasama dengan perbankan daerah dan PT. Pos Indonesia dalam penerimaan pembayaran.

Langkah-Langkah Ekstensifikasi:

1. Melakukan identifikasi dan inventarisasi potensi yang ada untuk dijadikan sumber pendapatan daerah yang diikuti dengan penyusunan Peraturan Daerah sebagai dasar pemungutan;
2. Membentuk Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pengendalian PAD, Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dalam rangka peningkatan penerimaan PAD;
3. Merevisi Peraturan Daerah yang berkaitan dengan peningkatan pendapatan yang tidak relevan dengan perkembangannya;

4. Melakukan penyuluhan (sosialisasi) pada masyarakat tentang pentingnya membayar pajak/retribusi dan partisipasi pengusaha mendukung program Pemerintah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah;
5. Melakukan pendataan terhadap objek pajak baru;
6. Melakukan penyertaan modal;
7. Menggalang potensi-potensi daerah yang dapat memperbesar usaha ekonomi masyarakat Ogan Komering Ulu Selatan, sehingga dapat menambah objek-objek pajak/retribusi baru;
8. Mengupayakan peningkatan dana perimbangan dari Pemerintah Pusat dengan melakukan koordinasi secara intensif terhadap Kementerian/Lembaga terkait.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Daerah disebutkan sumber pendapatan daerah yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan meliputi: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Selama kurun waktu tahun 2020-2024 kebijakan pengelolaan pendapatan daerah diarahkan pada intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, penerimaan hasil laba BUMD, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan penerimaan Lain-lain PAD yang sah. Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah juga dilakukan dengan mengoptimalkan dana perimbangan termasuk dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil bukan pajak.

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah tahun anggaran 2020-2024, disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan, dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Penentuan besaran belanja yang dianggarkan mengacu pada prioritas utama pembangunan daerah, serta prinsip efisiensi dan efektivitas anggaran yang mengarahkan bahwa penyediaan anggaran dan penghematan sesuai dengan skala prioritas. Adapun kebijakan belanja daerah tahun anggaran 2020-2024 dilakukan melalui pengaturan pola pembelanjaan, antara lain:

1. Peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan system jaminan sosial.
2. Dalam rangka peningkatan daya beli masyarakat serta pengendalian inflasi daerah melalui kebijakan ketahanan pangan dan ketersediaan pasokan pangan.

3. Anggaran belanja akan diarahkan sektor pemberdayaan Kelompok UKM, perdagangan dan perindustrian yang menopang laju pertumbuhan ekonomi dengan didukung pembangunan infrastruktur. Untuk menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan, Pemerintah Daerah mengarahkan anggaran pada kegiatan-kegiatan pengurangan pencemaran lingkungan, pencapaian target kawasan lindung, mitigasi bencana, pengendalian alih fungsi lahan dan pengendalian eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya alam.
4. Kegiatan yang orientasinya terhadap pemenuhan anggaran belanja tetap (*fixedcost)* dan pemenuhan program/kegiatan yang berorientasi kepada standar pelayanan minimal (SPM).
5. Pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan, serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.
6. Kebijakan untuk belanja tidak langsung meliputi hal-hal sebagai berikut:
   a. Mengalokasikan belanja pegawai yang merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan serta pemberian insentif kepada Aparatur Sipil Negara yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
   b. Mengalokasikan belanja subsidi yang digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi dan jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.
   c. Mengalokasikan belanja bantuan sosial yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
   d. Mengalokasikan belanja hibah yang digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau BUMD dan/atau Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.
   e. Mengalokasikan belanja tidak terduga yang merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
7. Langkah-Langkah strategis dan target yang terukur untuk meningkatkan realisasi belanja langsung dimasa mendatang, sebagai berikut;

a. Program dan kegiatan yang diajukan oleh perangkat daerah harus jelas *output* dan *outcome* nya.
b. Program dan kegiatan yang dananya bersumber dari DAK harus jelas Juklak dan Juknisnya, sehingga dalam pelaksanaanya dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
c. Penganggaran belanja modal yang merupakan salah satu komponen belanja langsung penganggarannya harus jelas dan mengacu kepada Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah.
d. Perangkat daerah dalam mengajukan program dan kegiatan harus mengutamakan program yang wajib dan mengikat serta prioritas utama.

8. Merumuskan kebijakan yang strategis dan konkrit untuk menekan belanja kebutuhan aparatur, sebagai berikut:
   a. Melakukan rasionalisasi terhadap belanja kebutuhan aparatur, khususnya kebutuhan aparatur yang ada pada belanja langsung seperti perjalanan dinas, honorarium, uang lembur dan belanja makan minum rapat/diklat/pertemuan.
   b. Melakukan rasionalisasi terhadap belanja kebutuhan aparatur, khususnya kebutuhan aparatur yang ada pada belanja tidak langsung, seperti belanja tambahan penghasilan pegawai, merampingkan jabatan struktural dan jabatan fungsional, serta mengurangi jumlah pegawai.

Analisis pembiayaan menguraikan sekurang-kurangnya mengenai besaran nilai penerimaan pembiayaan dan pengeluaraan pembiayaan. Pada dasarnya pembiayaan netto yang merupakan selisih antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan digunakan untuk menutup defisit belanja daerah. Oleh karena itu besaran defisit belanja daerah juga harus memperhatikan besaran nilai pembiayaan netto yang dapat digunakan untuk menutupnya yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, serta penerimaan piutang daerah.

Kebijakan anggaran merupakan acuan umum dari Rencana Kerja Pembangunan dan merupakan bagian dari perencanaan operasional anggaran dan alokasi sumberdaya, sementara itu kebijakan keuangan daerah diarahkan pada kebijakan penyusunan program dan indikasi kegiatan pada pengelolaan pendapatan dan belanja daerah secara efektif dan efisien. Pada bagian kerangka pendaaan memberikan gambaran tentang proyeksi pendapatan, proyeksi sisa lebih riil perhitungan anggaran (SiLPA), dan proyeksi belanja wajib dan mengikat yang kemudian akan dihitung seberapa besar kapasitas riil daerah untuk pendanaan indikatif pada tahun 2025 hingga tahun 2030.

Proyeksi data masa lalu merupakan proyeksi data untuk lima tahun kedepan yang didasarkan pada rata-rata pertumbuhan selama lima tahun ke belakang dengan mempergunakan data tahun transisi 2024 sebagai tahun dasar mengingat terdapat sumber pendapatan daerah yang baru diterima pada perubahan angggaran tahun 2024. Adapun proyeksi untuk lima tahun kedepan, meliputi: proyeksi pendapatan, serta proyeksi belanja tidak langsung dan belanja langsung yang periodik, wajib, mengikat serta prioritas utama, yang secara rinci dapat dijelaskan pada Tabel II.89 berikut:

Tabel II.97
Proyeksi Kerangka Pendanaan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2026-2030

	Komponen Pendapatan	Baseline Tahun 2024	Proyeksi				
			2026	2027	2028	2029	2030
4	**Pendapatan**	**1.551.064.400.039,10**	**1.560.339.465.152,00**	**1.602.125.334.827,00**	**1.657.939.606.843,00**	**1.698.207.105.754,00**	**1.740.191.727.244,00**
4.1	**Pendapatan Asli Daerah**	**55.917.585.907,23**	**63.785.203.599,00**	**73.076.335.336,00**	**84.078.249.714,00**	**89.383.364.129,00**	**95.095.950.397,00**
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	19.814.770.287,00	20.864.953.112,00	21.970.795.626,00	23.135.247.794,00	24.361.415.927,00	25.652.570.971,00
4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	3.154.967.807,00	3.413.044.173,00	3.692.231.186,00	3.994.255.697,00	4.320.985.813,00	4.674.442.452,00
4.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	7.738.159.208,83	8.786.679.781,00	9.977.274.891,00	11.329.195.638,00	12.864.301.646,00	14.607.414.519,00
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	25.209.688.604,40	30.720.526.533,00	37.436.033.633,00	45.619.550.585,00	47.836.660.743,00	50.161.522.455,00
4.2	**Pendapatan Transfer**	**1.478.454.246.978,87**	**1.484.766.003.386,00**	**1.517.260.741.324,00**	**1.562.073.098.962,00**	**1.597.035.483.458,00**	**1.633.307.518.680,00**
4.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	1.334.283.123.996,00	1.340.594.880.404,00	1.373.089.618.342,00	1.417.901.975.980,00	1.452.864.360.476,00	1.489.136.395.698,00
4.2.1.1	Dana Bagi Hasil	229.086.680.000,00	283.838.396.520,00	298.030.316.346,00	312.931.832.163,00	328.578.423.771,00	345.007.344.959,00
4.2.1.2	Dana Alokasi Umum	652.616.468.300,00	670.432.897.884,00	688.735.715.996,00	707.538.201.042,00	726.853.993.930,00	746.697.107.964,00
4.2.1.3	Dana Alokasi Khusus	235.294.700.296,00	178.132.657.000,00	178.132.657.000,00	189.241.013.775,00	189.241.013.775,00	189.241.013.775,00
4.2.1.5	Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0
4.2.1.7	Dana Desa	217.285.528.400,00	208.190.929.000,00	208.190.929.000,00	208.190.929.000,00	208.190.929.000,00	208.190.929.000,00
4.2.1.8	Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0
4.2.2	Transfer Antar Daerah	144.171.122.982,87	144.171.122.982,00	144.171.122.982,00	144.171.122.982,00	144.171.122.982,00	144.171.122.982,00

	Komponen Pendapatan	Baseline Tahun 2024	Proyeksi				
			2026	2027	2028	2029	2030
4.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	0	0	0	0	0	0
4.2.2.2	Pendapatan Bagi Hasil lainnya	0	0	0	0	0	0
4.3	**Lain-Lain Pendapatan Yang Sah**	**16.692.314.153,00**	**11.788.258.167,00**	**11.788.258.167,00**	**11.788.258.167,00**	**11.788.258.167,00**	**11.788.258.167,00**
4.3.1	Pendapatan Hibah	0					
4.3.2	Pendapatan Dana Darurat	0					
4.3.3	Pendapatan Lainnya	16.692.314.153,00	11.788.258.167,00	11.788.258.167,00	11.788.258.167,00	11.788.258.167,00	11.788.258.167,00
5	**Belanja**	**1.468.402.530.065,59**	**1.563.658.047.769,00**	**1.605.443.917.443,00**	**1.661.258.189.459,00**	**1.701.525.688.370,00**	**1.743.510.309.860,00**
5.1	**Belanja Operasi**	**907.980.608.920,82**	**910.458.862.164,00**	**897.346.396.820,00**	**931.695.028.182,00**	**954.775.277.854,00**	**977.370.664.302,00**
5.1.01	Belanja Pegawai	551.259.826.997,00	553.426.806.435,00	481.633.175.232,00	498.377.456.838,00	510.457.706.510,00	523.053.092.958,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	334.496.581.916,06	293.405.829.289,00	352.086.995.148,00	369.691.344.904,00	380.691.344.904,00	390.691.344.904,00
5.1.03	Belanja Bunga	2.179.956.172,78	0	0	0	0	0
5.1.04	Belanja Subsidi	279.311.500,00	279.311.500,00	279.311.500,00	279.311.500,00	279.311.500,00	279.311.500,00
5.1.05	Belanja Hibah	63.091.147.781,48	61.109.006.361,00	61.109.006.361,00	61.109.006.361,00	61.109.006.361,00	61.109.006.361,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.792.800.000,00	2.237.908.579,00	2.237.908.579,00	2.237.908.579,00	2.237.908.579,00	2.237.908.579,00
5.2	**Belanja Modal**	**258.078.646.666,77**	**341.822.120.455,00**	**396.720.455.473,00**	**418.186.096.127,00**	**435.373.345.366,00**	**454.762.580.408,00**
5.2.01	Belanja Tanah	0	0	0	0	0	0
5.2.02	Belanja Peralatan dan Mesin	39.199.643.151,00	32.677.721.608,00	32.677.721.608,00	32.677.721.608,00	32.677.721.608,00	32.677.721.608,00
5.2.03	Belanja Bangunan dan Gedung	73.134.750.867,36	74.999.456.993,00	74.999.456.993,00	74.999.456.993,00	74.999.456.993,00	74.999.456.993,00
5.2.04	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	141.151.856.787,41	233.097.563.542,00	287.995.898.560,00	309.461.539.214,00	326.648.788.453,00	346.038.023.495,00
5.2.05	Belanja Aset Tetap Lainnya	4.374.835.861,00	136.355.031,00	136.355.031,00	136.355.031,00	136.355.031,00	136.355.031,00
5.2.06	Belanja Aset Lainnya	217.560.000,00	911.023.281,00	911.023.281,00	911.023.281,00	911.023.281,00	911.023.281,00
5.3	**Belanja Tak Terduga**	**2.224.395.071,00**	**2.209.009.867,00**	**2.209.009.867,00**	**2.209.009.867,00**	**2.209.009.867,00**	**2.209.009.867,00**

	Komponen Pendapatan	Baseline Tahun 2024	Proyeksi				
			2026	2027	2028	2029	2030
5.3.01	Belanja Tak Terduga	2.224.395.071,00	2.209.009.867,00	2.209.009.867,00	2.209.009.867,00	2.209.009.867,00	2.209.009.867,00
5.4	**Belanja Transfer**	**309.005.062.367,00**	**309.168.055.283,00**	**309.168.055.283,00**	**309.168.055.283,00**	**309.168.055.283,00**	**309.168.055.283,00**
5.4.01	Belanja Transfer Bagi Hasil	628.047.034,00	628.047.034,00	628.047.034,00	628.047.034,00	628.047.034,00	628.047.034,00
	Bagi Hasil Pajak	0	0	0	0	0	0
	Bagi Hasil Retribusi	0	0	0	0	0	0
	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0	0	0	0	0	0
5.4.02	Belanja Transfer Bantuan Keuangan	308.421.540.205,00	308.540.008.249,00	308.540.008.249,00	308.540.008.249,00	308.540.008.249,00	308.540.008.249,00
	Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	500.000.000,00	0	0	0	0	0
	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa (Dana Desa dari Pemerintah Pusat dan Bantuan Keuangan Lainnya dari Kab/Kota ke Desa)	0	0	0	0	0	0
	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	0	0	0	0	0	0
	SURPLUS/(DEFISIT)	**28.656.671.567,01**	**-3.318.582.617,00**	**-3.318.582.616,00**	**-3.318.582.616,00**	**-3.318.582.616,00**	**-3.318.582.616,00**
6	**Pembiayaan**						
6.1	**Penerimaan Pembiayaan**	**3.318.582.616,06**	**3.318.582.616,00**	**3.318.582.616,00**	**3.318.582.616,00**	**3.318.582.616,00**	**3.318.582.616,00**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	3.318.582.616,06	3.318.582.616,00	3.318.582.616,00	3.318.582.616,00	3.318.582.616,00	3.318.582.616,00
	Pelampauan Penerimaan PAD	0	0	0	0	0	0
	Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan	0	0	0	0	0	0
	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	0	0	0	0	0	0
	Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya	0	0	0	0	0	0
	Sisa Belanja DAK	0	0	0	0	0	0

	Komponen Pendapatan	Baseline Tahun 2024	Proyeksi				
			2026	2027	2028	2029	2030
	Sisa Belanja Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0
	Sisa Belanja Dana Penyesuaian	0	0	0	0	0	0
	Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bank	0	0	0	0	0	0
	Penerimaan Piutang Daerah	0	0	0	0	0	0
	Penerimaan Piutang Daerah Dari Pemerintah	0	0	0	0	0	0
6.2	**Pengeluaran Pembiayaan**	**27.294.306.313,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.2.02	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0	0	0	0	0	0
	Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
	Pembayaran Pokok Utang	27.294.306.313,46	0	0	0	0	0
	Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo Kepada Pemerintah Daerah Lain	0	0	0	0	0	0
	Pembiayaan Netto	**-23.975.723.697,40**	**3.318.582.616,00**	**3.318.582.616,00**	**3.318.582.616,00**	**3.318.582.616,00**	**3.318.582.616,00**

Sumber: Badan Pendapatan Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah serta Hasil Analisis Tahun 2025

Dalam hal proyeksi pendapatan dilakukan berdasarkan pertumbuhan rata-rata pendapatan selama rata-rata lima tahun. Proyeksi pendapatan ini mengacu pada pertumbuhan pendapatan selama tahun 2020-2024. Berdasarkan penghitungan tersebut, proyeksi pendapatan untuk tahun 2026 diperkirakan sebesar Rp. 1,560 trilyun, dan meningkat menjadi Rp.1.602 trilyun pada tahun 2027. Diproyeksikan pada akhir periode RPJMD 2025-2029, pendapatan akan menjadi Rp.1,740 trilyun. Komponen pendapatan yang berkontribusi paling besar diproyeksikan dari Dana Perimbangan. Proyeksi pendapatan ini merupakan sekumpulan angka-angka perkiraan yang dapat berubah dan atau berbeda atau bersifat indikatif sepanjang faktor-faktor penghitungnya atau asumsi-asumsinya tidak mengalami perubahan.

Dengan mempergunakan tahun 2024 sebagai tahun dasar yang juga merupakan tahun transisi dikalikan dengan rata-rata pertumbuhan selama tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, Di mana pendapatan asli daerah tumbuh rata-rata sebesar 3,15 persen, dana perimbangan/pendapatan transfer sebesar 6 persen dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah turun sebesar 1 persen. Adapun asumsi dasar yang digunakan dalam rangka melakukan proyeksi terhadap pendapatan daerah untuk tahun 2026-2030, adalah sebagai berikut :

a. Memperhatikan tingkat pertumbuhan rata-rata dari setiap komponen pendapatan pada tahun 2020-2024 dan menggunakan tahun transisi 2024 sebagai tahun dasar.
b. Adanya perubahan terhadap komponen-komponen pendapatan daerah yang dianggarkan kembali pada tahun 2024.

2.9. Permasalahan dan Isu Strategis

Pada bagian ini akan disampaikan permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis tahun 2025-2029. Rumusan permasalahan pembangunan daerah dan analisis isu strategis merupakan dasar untuk menyesuaikan dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, yang selanjutnya dijabarkan menjadi tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Isu strategis Pembangunan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan merupakan kristalisasi dari permasalahan pembangunan daerah, yang bersumber dari analisis data *existing condition*, dan telaah terhadap isu strategis global, nasional dan regional. Analisis isu-isu strategis juga merupakan salah satu bagian terpenting dari dokumen RPJMD karena menjadi pijakan dalam perumusan program prioritas.

2.9.1.Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara realisasi kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan target pembangunan (harapan) yang telah direncanakan. Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya. Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan, khususnya untuk penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD, termasuk didalamnya prioritas lain dari Kebijakan Nasional/Provinsi yang bersifat mandatori.

Dalam perumusan perencanaan kebijakan pembangunan lima tahun mendatang, permasalahan pembangunan daerah memiliki urgensi vital dalam menyusun setiap tahapan kebijakan agar relevan dan mampu secara optimal mencapai visi pembangunan yang diharapkan. Setelah menelaah kajian data dan informasi, serta menelaah hasil analisis permasalahan pembangunan daerah pada masing-masing bidang urusan sesuai dengan kondisi objektif daerah, diperoleh gambaran permasalahan utama pembangunan daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, yakni: **“Masih Belum Optimalnya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan”.**

Permasalahan utama pembangunan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam 5 (lima) pokok permasalahan, sebagai berikut:

1. Rendahnya kualitas sumber daya manusia;
2. Belum optimalnya pembangunan infrastruktur dasar;
3. Belum optimalnya kinerja perekonomian daerah;
4. Belum terwujudnya implementasi *good governance*; dan
5. Tingginya kemiskinan wilayah.

Dari lima permasalahan pokok daerah tersebut kemudian dijabarkan ke dalam permasalahan dan akar masalah yang lebih spesifik. Penjabaran tersebut dilakukan untuk lebih menggali bagaimana capaian pembangunan daerah yang belum memenuhi harapan. Permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan diidentifikasi melalui kajian data dan informasi pembangunan daerah khususnya data strategis pembangunan. Penjabaran permasalahan pembangunan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan

berdasarkan hasil telaah gambaran umum kondisi pembangunan daerah adalah sebagai berikut.

1. Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan modal dasar pembangunan. Sebagai salah satu penentu keberhasilan pembangunan daerah, sumber daya manusia harus memiliki kualifikasi tertentu berdasarkan kontribusi dibidangnya masing-masing. Sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing secara otomatis akan memberikan sumbangsih atas keberhasilan setiap capaian kinerja pembangunan daerah. Hal tersebut secara positif akan berdampak pada ketercapaian visi dan misi pembangunan daerah serta menjadi daya dorong perwujudan target dari aspek-aspek pembangunan, baik dari sektor ketenagakerjaan, kehidupan sosial masyarakat, hingga infrastruktur dasar kehidupan masyarakat.

a. Belum Optimalnya Kualitas Pendidikan Masyarakat

Pengetahuan (pendidikan) diakui secara luas adalah unsur mendasar dari pembangunan manusia. Pembangunan pendidikan bertujuan untuk meningkatkan mutu peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan dan pelayanan pendidikan dengan memberdayakan kemampuan lokal, serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang dilandasi keimanan dan ketakwaan.

Masih belum optimalnya kualitas pelayanan pendidikan kepada masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan menjadi poin utama dalam permasalahan urusan pendidikan. Masih minimnya rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan menjadi sorotan berbagai pihak dalam melihat pelayanan pendidikan yang berkualitas untuk kemajuan masa depan masyarakat.

Pada tahun 2024, rata-rata lama sekolah di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yang mencapai 8,25 tahun masih berada di bawah rata-rata lama sekolah Provinsi Sumatera Selatan (8,57 tahun). Angka ini menunjukkan bahwa rata-rata lama pendidikan masyarakat di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan hanya sebatas pendidikan SMP (Sekolah Menengah Pertama) kelas dua. Tentu saja angka ini masih jauh dari harapan bahkan belum menyentuh penyelesaian pendidikan dasar.

Masih rendahnya kualitas pendidikan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya kualitas, kuantitas dan

distribusi tenaga pendidik dan kependidikan belum sepenuhnya terkualifikasi dengan baik. Terlihat dari indikator persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV belum mencapai 100 persen dan hanya sejumlah 89,77%. Meskipun secara kuantitas sudah cukup, namun persebaran tenaga pendidik juga masih belum merata, terlebih dari sisi kualitasnya. Selain itu, kualitas dan kuantitas sarana prasarana pendidikan yang belum merata di semua jenjang pendidikan juga menjadi "pekerjaan rumah" bagi instansi yang menanganinya.

b. Belum Optimalnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Kesehatan merupakan salah satu faktor yang utama dalam setiap aktivitas kehidupan manusia, dengan tubuh yang sehat maka manusia dapat melakukan segala aktivitasnya dengan baik. Pelayanan kesehatan merupakan bagian dari tugas Pemerintah Daerah untuk memberikan pelayanan yang optimal terhadap masyarakat yang mengalami keluhan kesehatan. Melihat kondisi saat ini pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat masih belum optimal, hal ini disebabkan pelayanan yang diberikan belum sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan.

Salah satu indikator yang mampu mengukur kondisi kesehatan masyarakat secara keseluruhan adalah angka harapan hidup. Angka harapan hidup (AHH) merupakan indikator penyusun indeks pembangunan manusia dalam bidang kesehatan di mana angka tersebut mengindikasikan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir.

Sebagai indikator yang dapat melihat derajat kesehatan masyarakat secara keseluruhan, AHH menjadi salah satu *impact* yang harus diperhatikan dalam upaya perumusan kebijakan bidang kesehatan daerah. Angka harapan hidup di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan masih berada di bawah rata-rata angka Provinsi. Pada tahun 2024, Angka Harapan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan selama 73,44 tahun yang mengindikasikan bahwa bayi yang lahir pada tahun 2024 memiliki kesempatan untuk hidup hingga berumur 73 tahun, serta prevalensi stunting yang masih tinggi yang dapat berpengaruh pada usia harapan hidup.

Salah satu permasalahan mendasar pada pelayanan kesehatan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan adalah belum meratanya tenaga kesehatan terutama tenaga medis dan para medis hingga ke daerah sulit yang terlihat dari beberapa indikator cakupan layanan kesehatan yang masih berada di bawah 100%, seperti: cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (77,65%), cakupan Desa/Kelurahan

Universal Child Immunization (UCI) (80,37%), cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA (49,76%), dan beberapa cakupan pelayanan puskesmas lainnya

c. Minimnya Peran Serta Perempuan Dalam Pembangunan

Dengan semakin besarnya peran perempuan dalam pembangunan maka pembangunan berbasis gender dengan memberdayakan perempuan secara otomatis akan meningkat. Salah satu tujuan dari *Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Kesetaraan gender mengacu pada persamaan hak, tanggung jawab dan kesempatan antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender juga berarti bahwa laki-laki dan perempuan memiliki peran yang sama dalam merealisasikan apa yang menjadi hak-hak asasi mereka dan mampu berkontribusi dalam pembangunan ekonomi, sosial dan budaya serta politik.

Masih minimnya pemberdayaan perempuan dalam pembangunan menjadi permasalahan penting untuk dikemukakan dalam hal kesetaraan gender. Pada tahun 2024, pencapaian skor indeks pemberdayaan gender yang kurang maksimal sebesar 26,04 sudah cukup mengindikasikan ketimpangan gender utamanya dapat dilihat dari perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam kemampuan ekonomi.

2. Belum Optimalnya Pembangunan Infrastruktur Dasar

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu faktor kunci dalam mempercepat proses pembangunan yakni sebagai roda penggerak keberhasilan pembangunan dasar, baik pendidikan, kesehatan, maupun pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini karena gerak laju pertumbuhan ekonomi daerah tidak dapat dipisahkan dari ketersediaan infrastruktur yang memadai, seperti transportasi, telekomunikasi, sanitasi, energi dan sebagainya. Pembangunan infrastruktur berkualitas dengan kapasitas yang memadai dan merata merupakan faktor penting untuk mendorong konektivitas antar wilayah sehingga dapat mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi. Dibutuhkan jaringan infrastruktur yang efektif guna meningkatkan keterkaitan sektor primer berbasis pertanian dengan sektor industri pendukungnya melalui kluster dan pengembangan kawasan berdasarkan potensi dan unggulan komoditas daerah.

Beberapa perhatian terhadap permasalahan pembangunan infrastruktur dasar di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan ditengarai oleh belum

terpenuhinya pemerataan sarana dan prasarana infrastruktur dasar, dan masih belum optimalnya pemerataan aksesibilitas wilayah yang berkualitas, dengan penjabaran sebagai berikut.

a. Belum Terpenuhinya Pemerataan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Dasar Kehidupan

Infrastruktur dasar kehidupan masyarakat merupakan faktor utama daya saing antar daerah karena belum optimalnya pemerataan infrastruktur akan menjadikan rendahnya kemakmuran masyarakat. Pembangunan infrastruktur diupayakan cenderung lebih ke daerah yang pendapatan per kapitanya lebih rendah agar pembiayaan yang dikeluarkan menjadi minim, dan perbaikan infrastruktur juga diharapkan agar mengurangi kesenjangan, karena untuk mewujudkan ekonomi tidak sekedar tumbuh tinggi namun juga tumbuh secara inklusif dan adil.

Daerah perkotaan dan pedesaan merupakan satu kesatuan wilayah yang seharusnya menjadi perhatian khusus pihak yang berkepentingan dalam hal pembangunan ini, khususnya pembangunan perumahan dan permukiman. Seharusnya hal ini menjadi panduan untuk melaksanakan pemerataan dalam pembangunan antar keduanya. Tetapi yang kita temui di lapangan sekarang adalah semakin pesatnya pembangunan yang dilakukan pada kota, sehingga daerah pedesaan semakin tertinggal. Pesatnya pembangunan perumahan diperkotaan banyak yang tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang kota, inilah yang menyebabkan keadaan perkotaan semakin hari semakin tidak jelas arah pengembangannya.

Belum optimalnya pemerataan berbagai fasilitas penunjang kehidupan masyarakat cukup terlihat di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan di mana fasilitas listrik kepada masyarakat belum sepenuhnya terpenuhi dengan capaian masih di bawah 100% (92,91%) masyarakat yang merasakan akses listrik. Selain itu, hanya sebanyak 50,23% masyarakat yang memiliki akses terhadap air minum bersih. Hal ini tentu menjadi fokus dalam penyediaan kebutuhan dasar kepada masyarakat agar merasakan hasil dari pembangunan daerah.

b. Belum Optimalnya Pemerataan Aksesibilitas Wilayah yang Berkualitas

Peningkatan kualitas jaringan jalan dan penunjang aktivitas perhubungan yang baik, tentunya ditujukan untuk mendukung aksesibilitas masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan untuk melakukan aktivitas, baik ekonomi, sosial, maupun layanan pemerintahan, dan sekaligus memperkuat

daya saing daerah. Namun dalam realitanya, pembangunan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan masih terkendala dengan berbagai sarana dan prasarana aksesibilitas wilayah yang belum optimal, seperti masih cukup tingginya kerusakan jalan (58,73% jalan dalam kondisi baik), belum optimalnya penggunaan sarana transportasi umum, dan sebagainya. Selain itu, dari sisi komunikasi wilayah juga masih cukup terkendala. Cakupan layanan telekomunikasi di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan hanya sebesar 63,32% dengan persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon sebanyak 78,21%.

c. Belum Terciptanya Lingkungan Hidup yang Baik

Lingkungan hidup merupakan hal yang penting bagi kita semua, dimana setiap aktivitas dilakukan dan berinteraksi dengan lingkungan, namun terkadang kita sering mengabaikan kondisi lingkungan serta tidak memperhatikan dampak dan bahaya yang terjadi terhadap aktivitas yang kita lakukan. Kondisi tentunya akan berdampak buruk bagi kelangsungan kahidupan manusia baik jangka pendek maupun jangka panjang serta berdampak pada tidak hanya sekitar kita tetapi terhadap daerah-daerah sekitar kita. Berdasarkan capaian data ditahun 2024 Indeks Kualitas Air (IKA) mencapai 60.56 tentunya angka tersebut capaian yang sangat rendah, perlu dilakukan langkah-langkah konkrit dalam menjaga kualitas air seperti membuang sampah kesungai. Indeks Kulitas Udara (IKU) tahun 2024 cukup bagus yaitu 92.19 yang juga mengalami tren peningkatan dari tahun 2021 sebesar 89.00 hal ini perlu kita jaga agar kualitas udara diwilayah Kabupaten OKU Selatan tetap sehat. Namun pada Indeks Kualitas Lahan (IKL) ditahun 2024 mencapai angka 42.15, angka ini sangat tidak baik salah faktor penyebabnya adalah pembukaan lahan yang secara signifikan tinggi namun tidak dibarengi dengan penghijauan kembali, seperti penanaman kembali komoditas pertanian atau perkebunan.

3. Belum Optimalnya Kinerja Perekonomian Daerah

Perekonomian merupakan tulang punggung bagi terlaksananya pembangunan daerah khususnya dari segi pembiayaan pembangunan. Dalam pelaksanaan pembangunan daerah, pergerakan perekonomian diupayakan stabil dan memiliki trend meningkat dengan tetap memperhatikan keberlangsungan ekosistem lingkungan hidup. Seyogyanya, pembangunan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif dan berkeadilan, serta didukung oleh stabilitas ekonomi yang kokoh. Oleh karena itu, untuk

mewujudkan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yang berdaya saing, perlu adanya pemantapan kondisi perekonomian daerah khususnya ekonomi kerakyatan.

Kapasitas perekonomian suatu wilayah dapat dilihat dari indikator makro laju pertumbuhan perekonomian daerah yang diturunkan dari produk domestik regional bruto wilayah. Perekonomian di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan belum menunjukkan perkembangan yang optimal. Hal ini terlihat dari rendahnya nilai tambah produk (PDRB) di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan di mana pada tahun 2022 hanya mencapai 11,91 triliun rupiah atau hanya menyumbang 1,79% struktur perekonomian di Provinsi Sumatera Selatan. Meskipun belum memiliki daya saing perekonomian yang baik, namun ekonomi di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan terus tumbuh di mana mencapai 4,54% pada tahun 2024.

Permasalahan perekonomian di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan disebabkan oleh belum optimalnya penggalian potensi produk unggulan lokal, minimnya pengembangan kepariwisataan daerah, maupun potensi degradasi lingkungan hidup yang semakin meningkat, dengan penjabaran sebagai berikut.

a. Belum Optimalnya Penggalian Potensi Produk Unggulan Lokal

Sektor unggulan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan adalah sektor pertanian dan perdagangan dengan penyumbang PDRB tertinggi selama beberapa tahun terakhir. Namun, optimalisasi dalam pengembangan potensi sektor tersebut dirasa masih belum mumpuni. Hal ini dikarenakan masih kurangnya SDM dalam pengelolaan potensi wilayah sebagai optimalisasi sektor agro wisata serta peningkatan ekonomi kreatif.

Selain itu, pengembangan usaha kecil dan menengah juga belum optimal dilakukan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Persentase koperasi aktif yang hanya sebesar 54,16%, tentu menjadi progress yang patut untuk diwaspadai. Investasi juga menjadi salah satu masalah dalam pengembangan perekonomian daerah di mana promosi wilayah dalam menarik investor masih belum berjalan dengan baik, bahkan terkesan minim. Oleh karena itu, investor masih belum banyak melirik Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan untuk menanamkan modalnya secara massif dalam mengembangkan usaha.

b. Potensi Pariwisata Daerah Belum Dikembangkan Dengan Baik

Sektor pariwisata merupakan salah satu *leading sector* untuk mampu membangkitkan perekonomian daerah. Hal ini dikarenakan dengan dana yang

minim, bisa memberikan pemasukan daerah atau negara yang cukup signifikan jika dikelola dengan baik dan optimal. Namun di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, pariwisata masih menjadi sektor yang belum dikembangkan secara optimal. Hal ini terlihat dari masih minimnya kontribusi PAD sektor pariwisita yang hanya sebesar 1,11%.

4. Belum Terwujudnya Implementasi *Good Governance*

Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan bentuk ideal perwujudan kinerja yang harus diraih oleh setiap pemerintahan daerah, termasuk Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Dalam rangka merealisasikan tata kelola pemerintahan yang baik, Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan harus memperhatikan dan menindaklanjuti prinsip-prinsip pelaksanaan pemerintahan, yakni: *accountability, transparancy, predictability,* dan *participation*, dalam realisasinya untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat berjalan pada koridor pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagai pendukung peningkatan capaian kinerja pembangunan nasional. Namun pada pelaksanaannya, terdapat berbagai permasalahan dalam mewujudkan implementasi tata kelola pemerintahan yang baik itu sendiri baik dari sisi kapasitas dan akuntabilitas kinerja Pemerintah, pengelolaan keuangan daerah maupun pelayanan publik kepada masyarakat. Permasalahan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan ditengarai oleh belum optimalnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja Pemerintah, belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah, serta masih rendahnya kualitas pelayanan publik, dengan penjabaran sebagai berikut.

a. Belum Optimalnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

Peningkatan kinerja aparatur daerah sebagai bagian dari upaya mewujudkan pemerintahan daerah yang memiliki kapasitas yang memadai untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah merupakan tantangan dan permasalahan utama kurun waktu lima tahun ke depan. Permasalahan lainnya adalah terbentuknya kelembagaan Pemerintah Daerah yang efisien dan efektif, meningkatnya efisiensi dan efektivitas penggunaan dana perimbangan daerah, Aparatur Pemerintah Daerah dan Anggota DPRD yang profesional, terlaksananya standar pelayanan minimal, serta penetapan dan pelaksanaan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Di sisi lain, dalam pelaksanaan pembangunan di era otonomi, sangat memungkinkan bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan berbagai inovasi dan kreasi sesuai kondisi dan kebutuhan daerah. Walaupun demikian, berdasarkan realitas yang ada, pengelolaan pemerintahan daerah di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan belum berjalan secara optimal. Hal ini antara lain terlihat dalam sistem dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yang belum berjalan sebagaimana mestinya. Implikasi yang ditimbulkan antara lain, adalah masih adanya tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun unit pelayanannya. Kondisi tersebut terutama disebabkan oleh kapasitas sumberdaya aparatur daerah yang masih terbatas dan tidak sesuai dengan kompentensinya.

b. Belum Optimalnya Pengelolaan Keuangan Daerah

Permasalahan lain yang juga menjadi salah satu perhatian Pemerintah adalah terkait administrasi keuangan yang masih memiliki cukup banyak temuan administrasi dalam pemeriksaan administrasi penggunaan keuangan daerah. Minimnya ASN yang mampu memahami pengelolaan keuangan daerah secara baik dan bertanggungjawab menjadi kunci dari permasalahan ini. Terlebih lagi, pendapatan asli daerah yang belum optimal pencapaiannya juga memiliki andil dalam permasalahan belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah ini.

c. Rendahnya Kualitas Pelayanan Publik

Pelayanan publik merupakan salah satu unsur penting bagi organisasi publik. Oleh karena itu pelayanan publik yang diberikan Aparatur Pemerintah harus senantiasa berorientasi pada kepentingan publik. Pemenuhan kepentingan tersebut harus memperhatikan kualitas pelayanan yang diberikan agar masyarakat yang dilayani dapat memberikan tanggapan positif tehadap hasil pelayanan yang telah diberikan Pemerintah.

Beberapa pelayanan utama terhadap masyarakat yang masih perlu dibenahi seperti pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, maupun pelayanan kependudukan. Selain dikarenakan sarana prasarana (khususnya IT) yang belum tersedia dengan baik, pelayanan minim oleh Pemerintah Daerah juga dikarenakan belum tercukupinya sumber daya manusia yang kompeten di bidangnya.

5. Tingginya Kemiskinan Wilayah

Kemiskinan merupakan permasalahan yang dihadapi oleh seluruh wilayah baik di Indonesia maupun di dunia internasional. Oleh karena itulah salah satu tujuan dari SDGs (*Sustainable Development Goals*) adalah mengentaskan kemiskinan hingga ke akar-akarnya. Selaras dengan pernyataan tersebut, salah satu indikator berhasilnya Pemerintah yaitu ketika Pemerintah mampu menanggulangi masalah kemiskinan. Tidak hanya cukup dengan menurunkan jumlah masyarakat miskin tetapi juga menuntaskan sumber utama penyebab kemiskinan. Beberapa perhatian terhadap permasalahan kemiskinan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan ditengarai oleh, belum optimalnya implementasi penanggulangan kemiskinan, serta masih rendahnya kualitas angkatan kerja dan tenaga kerja, dengan penjabaran sebagai berikut.

a. Belum Optimalnya Implementasi Penanggulangan Permasalahan Kemiskinan

Tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan selaras dengan tingginya kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan itu sendiri. Angka 9,86% kemiskinan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan cukup menjadikan angka tersebut berada di atas kemiskinan nasional (9,03%). Beberapa rincian permasalahan yang menjadi perhatian Pemerintah Daerah dalam mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan harus menjadikan dasar bagi perumusan program dan kegiatan pembangunan dalam lima tahun ke depan. Beberapa diantaranya permasalahan yang cukup mengemuka seperti belum optimalnya sarana dan prasarana dalam pengentasan kemiskinan, pendidikan masyarakat miskin beserta kompetensi kerjanya yang minim, maupun belum maksimalnya pemberian bantuan dan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin.

b. Rendahnya Kualitas Angkatan Kerja dan Tenaga Kerja

Kualitas sumber daya manusia (utamanya angkatan kerja) menentukan kemampuan tenaga kerja dalam memenuhi tuntutan spesifikasi pekerja dari sektor ekonomi. Dengan basis ekonomi wilayah yang sebagian didominasi sektor pertanian maupun perdagangan, sebenarnya tidak membutuhkan kompetensi tinggi untuk mampu berada di dalam pasar kerja. Namun kondisi positif ini akan menjadi berbeda pandangan ketika melihat kesejahteraan pekerja, khususnya sektor-sektor utama perekonomian Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Kualitas tenaga kerja yang tinggi merupakan kebutuhan dasar pembangunan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Tenaga kerja yang mempunyai skill handal dan dapat dipercaya dalam mengelola sumber daya dengan maksimal akan menjadikan daya saing tenaga kerja lebih *powerfull*. Efek dari kondisi tersebut selain meningkatkan penyerapan tenaga kerja masyarakat lokal, juga secara otomatis akan meningkatkan daya saing SDM Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Pendidikan tenaga kerja di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan masih sangat rendah, sebagian besar tenaga kerja hanya memiliki pendidikan hingga bangku sekolah dasar (SD) dengan persentase jumlah tenaga kerja sebesar 40,13%. Rendahnya pendidikan pekerja akan berkorelasi terhadap rendahnya pendapatan pekerja di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

2.9.2. Isu Strategis Daerah

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang menjadi perbincangan baik internasional, nasional, hingga regional yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah di masa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan di mana poin-poin dalam isu strategis dapat dikembangkan dalam rumusan kebijakan pembangunan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu, isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan. Terkait dengan hal tersebut, perlu kiranya isu-isu strategis menjadi salah satu acuan pokok dalam menyusun program kegiatan prioritas pembangunan agar pencapaian tujuan pembangunan daerah lebih terstruktur, tepat, dan cepat.

Berdasarkan telaahan dan analisis dari isu-isu strategis nasional dan isu-isu strategis regional, maka ditetapkanlah isu-isu strategis Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yang harus diperhatikan oleh Pemerintah Daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah. Untuk dapat mempermudah pemahaman, maka isu-isu strategis Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dijabarkan, sebagai berikut:

1. Optimalisasi Pembangunan Kualitas Sumber Daya Manusia

Kualitas SDM merupakan penggerak utama dalam pembangunan daerah. SDM yang memiliki kompetensi atau latar belakang pendidikan serta keahlian

yang memenuhi kebutuhan diharapkan akan mampu memenangkan persaingan di pasar tenaga kerja sehingga pada akhirnya memberi dampak pada kesejahteraan masyarakat. Peningkatan daya saing SDM masih dihadapkan pada besarnya jumlah angkatan kerja, jumlah pengangguran (setengah pengangguran atau sementara tidak bekerja), rendahnya budaya unggul, tingkat pendidikan, kemiskinan, komitmen Pemerintah, administrasi pemerintahan, segmentasi layanan pendidikan yang kurang berkeadilan serta ragam dan luasnya wilayah yang harus dilayani. Untuk membuat tenaga kerja berpengetahuan, memiliki *values* dan berketerampilan, akan sangat bergantung pada kualitas pendidikan dan pelatihan yang dihadirkan oleh Pemerintah.

Dari sisi pendidikan, pembangunan sektor pendidikan dilakukan melalui peningkatan aksesibilitas, kelembagaan, sumber daya manusia dan tata laksana yang meliputi penyediaan prasarana dan sarana sesuai standar, peningkatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan, pengelolaan sistem pendidikan yang berkualitas, termasuk pendidikan karakter, pengembangan nasionalisme substansi, dan pendidikan inklusi. Termasuk di dalamnya pendidikan informal, khususnya dalam peningkatan keterampilan dan keahlian angkatan kerja agar mampu bersaing dalam pencarian lapangan usaha maupun secara mandiri berwirausaha.

Dari sisi kesehatan, peningkatan kualitas pembangunan kesehatan dilakukan melalui peningkatan kualitas kelembagaan, sumber daya manusia, dan tata kelola yang meliputi antara lain peningkatan kualitas prasarana dan sarana kesehatan, kualitas tenaga medis dan paramedis, perbaikan sistem pelayanan dengan memerhatikan keterjangkauan dan ketersediaan pelayanan untuk seluruh masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, termasuk masyarakat miskin. Pembangunan kesehatan juga diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dan peningkatan perilaku masyarakat untuk hidup bersih dan sehat.

2. Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah

Kemiskinan adalah kondisi tidak terpenuhinya kebutuhan sehari-hari secara layak. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kurangnya kesempatan kerja, beban ekonomi keluarga, keterbatasan akses permodalan, tingkat pendidikan yang rendah. Pembangunan penanganan kemiskinan dilakukan melalui gerakan bersama penanggulangan kemiskinan daerah secara komprehensif dan terpadu yang dilakukan melalui perluasan kesempatan kerja, peningkatan kemampuan

dan keterampilan pencari kerja agar memiliki daya saing serta perluasan jaringan kerja.

Sebagai daerah yang memiliki tingkat kemiskinan cukup tinggi, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan harus berupaya untuk menurunkan angka kemiskinan melalui berbagai prioritas pembangunan daerah. Penanggulangan kemiskinan yang telah dilakukan saat ini memang memiliki progress positif, namun ke depan program dan kegiatan pengentasan kemiskinan perlu dipertajam untuk menjaga relevansi penurunan masyarakat miskin sehingga tepat sasaran dan tepat guna.

Selain dari sisi penanggulangan kemiskinan, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan harus memperhatikan pembangunan kesejahteraan sosial masyarakat yang mencakup kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta meningkatnya kearifan budaya lokal. Peningkatan pembangunan kesejahteraan sosial masyarakat dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup, rasa aman dan tenteram serta adil dalam segala bidang; penguatan karakter berbasis kearifan lokal, penguatan nilai-nilai kebangsaan dan budi pekerti; pelestarian dan pengembangan seni budaya.

3. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Wilayah

Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan merupakan daerah yang memiliki infrastruktur dasar dan konektivitas wilayah yang belum merepresentasikan keberhasilan pembangunan secara merata dan berkualitas. Keberhasilan pembangunan tersebut dapat diukur dari ketersediaan dan kecukupan serta kemampuan sarana dan prasarana yang mempunyai peranan penting terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan dan pengembangan wilayah melalui pengadaan sarana dan prasarana pembangunan bertujuan untuk memperkecil kesenjangan pertumbuhan dan ketimpangan antar wilayah.

Infrastruktur dapat didefinisikan sebagai fasilitas-fasilitas atau struktur-struktur dasar, peralatan-peralatan, instalasi-instalasi yang dibangun dan yang dibutuhkan untuk berfungsinya sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat. Dengan aset infrastruktur yang baik akan mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas.

Semisal keberhasilan pada sektor perhubungan antara lain dapat dilihat dari panjang jalan yang dimiliki, maka akan berdampak pada semakin tinggi akses masyarakat kepada berbagai aktivitas kehidupan termasuk aktivitas perekonomian, sehingga mobilisasi penduduk antar wilayah atau antar kota atau antar Desa juga semakin tinggi. Selain itu, infrastruktur penunjang

kehidupan lain harus diperhatikan ketersediaannya seperti listrik, air minum bersih dan layak, hingga fasilitas perumahan yang memadai.

Secara umum, pembangunan infrastruktur Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan merujuk pada penyediaan transportasi, kelistrikan dan air bersih, pengairan (irigasi), drainase, dan fasilitas publik lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik.

4. Percepatan Pengembangan Sektor Pariwisata

Pariwisata sebagai suatu sektor kehidupan, telah mengambil peran penting dalam pembangunan perekonomian bangsa-bangsa di dunia, khususnya dalam dua dekade terakhir, yang ditunjukkan dengan meningkatnya kesejahteraan ekonomi bangsa-bangsa di dunia yang semakin baik dan maju. Kemajuan dan kesejahteraan yang makin tinggi telah menjadikan pariwisata sebagai bagian pokok dari kebutuhan atau gaya hidup manusia, dan menggerakkan jutaan manusia untuk mengenal alam dan budaya ke belahan atau kawasan-kawasan dunia lainnya. Pergerakan jutaan manusia selanjutnya menggerakkan mata rantai ekonomi yang saling berkaitan menjadi industri jasa yang memberikan kontribusi penting bagi perekonomian dunia, perekonomian bangsa-bangsa, hingga peningkatan kesejahteraan ekonomi di tingkat masyarakat lokal.

Bagi Indonesia, pembangunan pariwisata juga memiliki kontribusi yang signifikan dalam pembangunan ekonomi nasional sebagai instrumen peningkatan perolehan devisa. Perolehan devisa dari kehadiran wisatawan mancanegara ke Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini melampaui aliran pemasukan devisa baik dari utang luar negeri Pemerintah maupun dari penanaman modal asing.

Sementara itu, dari perspektif pembangunan sumber daya manusia, pariwisata mempunyai potensi untuk dijadikan instrumen dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya penduduk sekitar destinasi pariwisata. Dengan demikian, pariwisata dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan saja kesejahteraan material dan spiritual, tetapi juga sekaligus meningkatkan kesejahteraan kultural dan intelektual. Ditilik dari perspektif bangsa yang lebih luas, pariwisata mempunyai potensi yang jauh lebih besar dan juga lebih mulia, yaitu dapat meningkatkan kualitas hubungan antarmanusia dan antarbangsa sehingga terjalin saling pengertian yang lebih baik, sikap saling menghargai, persahabatan, solidaritas, bahkan perdamaian.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025, pada Lampiran II menyebutkan bahwa Danau Ranau dan sekitarnya merupakan Kawasan Pembangunan Pariwisata Nasional (KPPN) yang berada di Provinsi Lampung. Secara geografis, danau ini terletak di perbatasan Kabupaten OKU Selatan Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung. Danau Ranau merupakan danau terbesar dan terindah di Sumatera Selatan. Danau Ranau memiliki luas sekitar 128 km^2, di mana 85,33 km^2 berada dalam wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, sedangkan sisanya berada dalam wilayah Propinsi Lampung.

Mengingat letak wilayah Danau Ranau juga berada di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan yang berbatasan langsung dengan wilayah Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung. Untuk itu, pengembangan Danau Ranau dan sekitarnya tidak hanya di wilayah Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung, tetapi harus juga di wilayah dan melibatkan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan.

5. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Secara Menyeluruh

Dalam mewujudkan pembangunan yang berkualitas, perlu diciptakan Birokrasi Pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Hal ini sejalan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi yang merupakan perubahan signifikan elemen-elemen birokrasi, antara lain kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas aparatur, pengawasan, dan pelayanan publik. Hal penting dalam reformasi birokrasi adalah perubahan *mind-set* dan *culture-set* serta pengembangan budaya kerja. Reformasi birokrasi diarahkan pada upaya-upaya mencegah dan mempercepat pemberantasan korupsi, secara berkelanjutan, dalam menciptakan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa (*good governance*), Pemerintah yang bersih (*clean government*), dan bebas KKN. Reformasi birokrasi memberikan sebuah harapan masyarakat pada Pemerintah agar mampu memerangi tindakan KKN dan membentuk pemerintahan yang bersih serta keinginan masyarakat untuk menikmati pelayanan publik yang efisien, responsif dan akuntabel. Dengan ini partisipasi masyarakat diperlukan agar reformasi birokrasi yang dilakukan saat ini berjalan dengan semestinya sesuai *road map* yang telah ditetapkan.

6. Pembangunan Bendungan Berskala Nasional

Pemerintah Pusat melakukan pembangunan bendungan berskala nasional di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yakni Bendungan Tiga Dihaji dan Bendungan Saka Gilas. Kedua proyek pembangunan bendungan ini merupakan proyek *multiyears* yang sudah dilaksanakan beberapa tahun lalu mulai dari perencanaan hingga konstruksi bendungan yang dilaksanakan pada periode pembangunan jangka menengah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2021-2026.

Bendungan Tiga Dihaji nantinya merupakan bendungan pertama di Provinsi Sumatera Selatan, kegiatan studi bendungan ini dimulai pada tahun 1982 berupa Pra-Feasibility Study oleh Konsultan Nippon Koei dengan dana pinjaman dari JICA, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan feasibility studi pada tahun 2013 dengan dana APBN. Tindak lanjut pada tahun 2017 oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Sumatera VIII dilaksanakan pembuatan detail desain, sertifikasi bendungan, pembebasan lahan, hingga pembangunan sarana air baku IKK Pulau Beringin dan IKK Ranau Tengah.

Bendungan yang ditargetkan selesai pada tahun 2023 ini memiliki beberapa manfaat bagi Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, seperti:

1. Meningkatkan produktivitas lahan pertanian di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan seluas 8.000 ha yang sebelumnya berupa sawah tadah hujan menjadi pertanian yang beririgasi teknis.;
2. Mendukung ketersediaan energi listrik sebesar 40-76,3 MW untuk Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten OKU;
3. Mendukung ketersediaan sumber air baku untuk PDAM sebesar 0,98 m^3/detik yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan air baku di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan sekitarnya;
4. Mendukung kegiatan wisata air (renang, memancing, dan bersantai), serta wisata alam jika diintegrasikan dengan Danau Ranau;
5. Mendukung usaha bisnis wisma dan penginapan di sekitar bendungan bagi pengunjung yang hendak bermalam dan beristirahat;
6. Sebagai sarana bagi usaha perikanan darat;
7. Pengembangan wilayah karena akan menambah infrastruktur jalan; dan
8. Selama pembangunan wilayah juga akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal.

Tak jauh beda dengan pembangunan Bendungan Tiga Dihaji, pembangunan Saka Gilas juga merupakan proyek berskala nasional untuk

mendukung prioritas nasional dalam program kedaulatan pangan nasional, penyediaan air baku, pengendalian banjir dan PLTA. Perencanaan yang dimulai dengan studi kelayakan pada tahun 2013 ini, dilakukan eksekusi pembangunan konstruksi pada tahun 2021 dan direncanakan akan selesai pada tahun 2025 dengan anggaran sebesar 1,49 triliun rupiah. Manfaat Bendungan Saka Gilas ini, antara lain:

1. Suplesi air baku ke Bendungan Perjaya pada bulan kering hingga 10m^3/det
2. Menyuplai kebutuhan air baku/air bersih 1,21 m^3/det untuk Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
3. Pengendalian banjir;
4. PLTA (2 x 4,5) MW yang akan mampu memberikan akses listrik bagi seluruh Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
5. Meningkatkan sektor ekonomi perikanan tangkap;
6. Meningkatkan pariwisata daerah dan pembinaan olahraga air; dan
7. Selama pembangunan akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja.

2.9.3. Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis Daerah Tahun 2025-2029

Untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan wajib melakukan pembuatan dan pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJMD berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2025-2029 telah disusun KLHS RPJMD yang saat ini sedang disusun sampai tahapan Laporan Akhir. Adapun identifikasi isu strategis pembangunan berkelanjutan sebagai berikut.

2.9.3.1. Daftar Panjang Isu Pembangunan Berkelanjutan

Berdasarkan hasil identifikasi isu-isu pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan melalui hasil telaah berbagai dokumen perencanaan terkait, FGD dan rapat Pokja KLHS, maka teridentifikasi sebanyak

17 isu pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yang selengkapnya disajikan pada Tabel II.90 berikut.

Tabel II.98
Daftar Isu Panjang *(Long-List)* Pembangunan Berkelanjutan
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan

NO	ISU PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	LOKASI	KETERANGAN
	ASPEK FISIK DAN LINGKUNGAN		
1	Pengelolaan Sampah	Setiap Kecamatan	1. Belum optimalnya penanganan permasalahan Pengelolaan limbah sampah rumah tangga; 2. Rendahnya pengetahuan masyarakat dalam pengelolaan limbah sampah.
2	Kualitas Sumber daya air(Sungai dan Danau)	Sungai Komering, Sungai Ogan Danau Ranau	1. Kualitas air danau; 2. Kualitas air sungai sebagai sumber air baku; 3. Jumlah ikan menurun karena ada bendungan di OKU Timur.
3	Tata Kelola SDA	Setiap kecamatan	1. Kerusakan SDA (yang dapat diperbarui seperti hutan dan yang tidak dapat diperbarui seperti bahan tambang dan galian C; 2. Penegakan regulasi yang masih minim; 3. Kesadaran Masyarakat dan swasta dalam mematuhi peraturan lingkungan hidup.
4	Alih fungsi lahan	Setiap kecamatan	1. Pembukaan hutan untuk pertanian agroindustri; 2. Alih fungsi ke kebun sawit dan lahan rumput untuk pakan ternak; 3. Menimbulkan longsor dan banjir.
5	Pembangunan waduk tiga dhaji		
6	Permukiman kumuh	Di daerah padat setiap kecamatan	1. Bangunan tidak tertata 2.Banyak bangunan di badan sungai
7	Alih fungsi lahan pertanian menjadi permukiman		
	ASPEK EKONOMI DAN INFRASTUKTUR		
8	Pendapatan masyarakat rendah	Di sektor pertanian	
9	Harga pasar yang tidak stabil	Di sektor pertanian	
10	Keterbatasan Sarana dan Prasarana Infrastruktur dasar kehidupan (jalan, dan kesehatan)	Di semua kecamatan	1. Belum optimalnya pemerataan pembangunan infrastruktur jalan 2. Belum optimalnya peningkatan akses dan pemerataan kesehatan
11	Keterbatasan Sarana Perekonomian	Sarana pasar dan toko saprodi	
	ASPEK SOSIAL-BUDAYA		
12	Kemiskinan	Jumlah penduduk miskin	Jumlah penduduk miskin masih tinggi
13	Minimnya pembangunan rumah adat	Masih banyak rumah adat yang terbengkalai/ rusak atau	Rumah adat yang ada rusak dan banyak suku yang belum memiliki rumah adat

NO	ISU PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	LOKASI	KETERANGAN
		belum terbangun	
14	Kurang Maksimalnya Pengembangan Potensi Pariwisata Daerah	Destinasi wisata masih perlu dipromosikan dan diperbaiki	Destinasi pariwisata belum digarap dengan serius terutama fasilitas pendukung seperti homestay, toilet, furniture luar ruang
15	Degradasi budaya	Banyak masyarakat tidak mengenal adatnya sendiri	
	ASPEK TATA KELOLA		
16	Kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah	Di semua OPD	1. Belum optimalnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah 2. Kurangnya komitmen dalam mengedepankan akuntabilitas dari sisi kinerja 3. Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP)
17	Ketersediaan dan pemerataan SDM Aparatur pemerintah	Kurangnya kualitas pelayanan publik yang efektif, kinerja yang akuntabel serta sumber daya aparatur yang handal	1. Pembangunan tata kelola pemerintahan sampai di tingkat desa/dusun 2. Pengembangan SDM di tingkat desa/dusun

Sumber: Rapat Pokja KLHS RPJPD Kabupaten OKU Selatan

2.9.3.2. Rumusan Isu Strategis Berdasarkan Gap Capaian TPB

Rumusan Isu Strategis berdasarkan Gap Capaian TPB ini, diambil dari 17 TPB, lalu dilakukan cross-cutting terhadap Gap Capaian TPB (Persentase data menunjukkan persentase data yang terisi capaiannya pada setiap TPB). akan dihasilkan TPB yang mendapatkan rangking 1 (satu), sebanyak 1(satu) TPB, yaitu TPB 6 (Air Bersih dan Sanitasi Layak). Adapun 17 (tujuh belas) Isu Strategis berdasarkan Gap Capaian TPB tersebut, sebagaimana dijelaskan pada Tabel II.91 berikut.

Tabel II.99
Rumusan Isu Strategis Berdasarkan Gap Capaian TPB

TPB	Tercapai	Tidak Ada Data	Tidak Tercapai	Rata-rata Total Kinerja Gap	Rank Gap
Tujuan 1: Tanpa Kemiskinan	10	1	7	33,24	2
Tujuan 2: Tanpa Kelaparan	6	0	1	9,90	7
Tujuan 3: Kehidupan Sehat dan Sejahtera	12	2	7	7,45	8
Tujuan 4: Pendidikan Berkualitas	3	0	9	23,65	5
Tujuan 5: Kesetaraan Gender	6	0	4	17,11	6
Tujuan 6: Air Bersih dan Sanitasi Layak	3	0	3	36,55	1

TPB	Tercapai	Tidak Ada Data	Tidak Tercapai	Rata-rata Total Kinerja Gap	Rank Gap
Tujuan 7: Energi Bersih dan Terjangkau	2	0	1	30,99	4
Tujuan 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	0	0	3	32,94	3
Tujuan 9: Industri, Inovasi dan Infrastruktur	3	0	0	-	10
Tujuan 10: Berkurangnya Kesenjangan	1	1	2	3,03	9
Tujuan 11: Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan	2	1	2	-	10
Tujuan 12: Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab	1	5	0	-	10
Tujuan 13: Penanganan Perubahan Iklim	0	3	0	-	10
Tujuan 14: Ekosistem Lautan	1	0	0	-	10
Tujuan 15: Ekosistem Daratan	0	11	0	-	10
Tujuan 16: Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh	7	0	1	-	10
Tujuan 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan	0	1	0	-	10

2.9.3.3. Rumusan Isu Paling Strategis

Penilaian keterkaitan antara isu Pembangunan Berkelanjutan dengan 10 kriteria pembangunan dilakukan berdasarkan pasal 9 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016. Tim Pokja kemudian melakukan skoring untuk menghasilkan peringkat isu dengan tujuan untuk menentukan isu pembangunan berkelanjutan paling strategis di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Hasil skoring menunjukkan tingkat rata-rata skor isu berada pada angka 119,81 dengan standar deviasi sebesar 13,18. Urutan isu pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan setelah hasil skoring selengkapnya disajikan pada Tabel II.92 berikut.

Tabel II.100
Hasil Skoring Pokja KLHS RPJPD Kabupaten OKUS 2025-2045

NO	ISU PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	Aspek	Skor
1	Kualitas Sumber daya air (Sungai dan Danau)	Fisik & Lingkungan	148
2	Alih fungsi lahan	Fisik & Lingkungan	136
3	Tata Kelola SDA	Fisik & Lingkungan	135
4	Pengelolaan Sampah	Fisik & Lingkungan	134
5	Pembangunan waduk tiga dhaji	Fisik & Lingkungan	131
6	Lahan LP2B menjadi permukiman	Fisik & Lingkungan	131
7	Kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah	Tata Kelola	129
8	Ketersediaan dan pemerataan SDM Aparatur pemerintah	Tata Kelola	123
9	Backlog Rumah Tinggal	Fisik & Lingkungan	122
10	Permukiman kumuh	Fisik & Lingkungan	120

NO	ISU PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	Aspek	Skor
11	Keterbatasan Sarana Perekonomian	Ekonomi	120
12	Kurang Maksimalnya Pengembangan Potensi Pariwisata Daerah	Sosial dan Budaya	118
13	Keterbatasan Sarana dan Prasarana Infrastruktur dasar kehidupan (jalan, dan kesehatan)	Ekonomi	117
14	Kemiskinan	Sosial dan Budaya	117
15	Pendapatan masyarakat rendah	Ekonomi	110
16	Harga pasar yang tidak stabil	Ekonomi	108
17	Revitalisasi Bandara Banding Agung	Ekonomi	107
18	Degradasi budaya	Sosial dan Budaya	105
19	Pemberdayaan perempuan dalam pembangunan masih kurang	Sosial dan Budaya	104
20	Masyarakat kurang berpartisipasi dalam keberhasilan pasar dan penyalahgunaan narkoba	Sosial dan Budaya	101
21	Minimnya pembangunan rumah adat	Sosial dan Budaya	100

BAB III
VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

3.1. Visi dan Misi

Visi dan Misi Kabupaten merupakan fondasi utama dalam perencanaan pembangunan daerah. Visi menggambarkan cita-cita atau tujuan jangka panjang yang ingin dicapai oleh Pemerintah Daerah, sementara misi merupakan langkah-langkah strategis yang akan diambil untuk mewujudkan visi tersebut. Perumusan visi dengan memperhatikan potensi dan tantangan yang dihadapi oleh daerah, serta aspirasi masyarakat. Visi dan Misi Pemerintah Daerah memiliki peran penting dalam mengarahkan pembangunan daerah. Dokumen RPJMD menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun rencana strategis dan rencana kerja tahunan. Selain itu, visi dan misi juga menjadi acuan bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah selama periode tertentu. Dengan adanya visi dan misi yang jelas, diharapkan pembangunan daerah dapat berjalan secara terarah, efektif, dan efisien, serta dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Visi Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2025-2029 sebagaimana yang telah disampaikan ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan pada saat pendaftaran peserta pemilihan kepala daerah tahun 2024 yang lalu. Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, khususnya dalam pasal 1 angka 12 disebutkan bahwa visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir perencanaan. Perumusan Visi Kabupaten mengacu kepada dokumen perencanaan di Tingkat Nasional, Provinsi, dan dokumen perencanaan jangka panjang daerah agar terjaga keselarasan antar dokumen perencanaan tersebut.

Visi Pembangunan Nasional Tahun 2025-2045 adalah Mewujudkan Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur. Untuk mewujudkan Visi jangka panjang tersebut, pada periode lima tahun ketiga ditetapkan; Visi Pembangunan Nasional Tahun 2025-2029 sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 adalah “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Sementara itu, Visi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 adalah “Sumsel Maju Terus untuk Semua”, sedangkan Visi Pembangunan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2025-2045 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kabupaten Ogan Komering

Ulu Selatan Tahun 2025-2045 yaitu: “OKU Selatan Harmonis dan andal, Ekonomi maju dan Berkelanjutan, Aman dan Tenteram 2045”.

Adapun visi Kabupaten Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2025-2029 adalah “*Bersatu Untuk OKU Selatan Maju, Adil, Aman Nyaman dan Sejahtera*”, dengan akronim “**OKU SELATAN BERJAYA”.** Adapun makna dari visi tersebut adalah:

- BERSATU: Terciptanya kebersamaan masyarakat, Lembaga Eksekutif, Legislatif, Yudikatif dan TNI, POLRI dalam peningkatan pembangunan;
- MAJU: Menghadirkan peningkatan pembangunan ke arah yang lebih baik dalam semua bidang seperti, keagamaan, budaya, ekonomi, pariwisata, sosial kemasyarakatan, kesehatan, pendidikan, tata kelola pemerintahan, pembangunan daerah baik dari segi SDM, SDA, kelembagaan, dan sarana prasarana;
- ADIL: Adil adalah perlakuan yang setara bagi semua individu, tanpa diskriminasi berdasarkan ras, jenis kelamin, agama, atau latar belakang sosial. Dalam hal membagi sumber daya atau keuntungan secara merata dan proporsional sesuai dengan kebutuhan atau kontribusi individu. Keadilan dalam memberikan hukuman atau penghargaan. Keadilan dalam memastikan bahwa proses dan prosedur yang digunakan untuk membuat keputusan atau menegakkan hukum dilakukan secara transparan, konsisten, dan tidak bias;
- AMAN NYAMAN: Terwujudnya stabilitas keamanan dan kenyamanan sosial wilayah Ogan Komering Ulu Selatan;
- SEJAHTERA: Terciptanya masyarakat yang makmur ditandai dengan derajat pendidikan dan kesehatan, serta kondisi ekonomi masyarakat yang lebih baik.

Perumusan misi merupakan upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Perumusan misi akan dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan yang lebih konkret dan terukur. Misi ini harus selaras dengan visi dan mengacu pada prioritas pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Dalam penyusunannya, misi juga harus memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, seperti partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. Dalam rangka mencapai Visi Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2025-2029, maka misi kepala daerah terpilih adalah sebagai berikut :

Misi 1: Membangun perekonomian yang tangguh melalui peningkatan sektor pertanian, perkebunan, penguatan industri dan UMKM kreatif dan inovatif untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan.

Misi 2: Meningkatkan kualitas dan keterjangkauan pelayanan kesehatan dan pendidikan dalam mewujudkan SDM yang sehat, berpendidikan, profesional, serta menjunjung tinggi nilai keimanan, ketaqwaan, kejujuran, dan integritas.

Misi 3: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik *(good governance)* bebas KKN melalui transparansi dan akuntabilitas berbasis teknologi, didukung aparatur yang berintegritas, profesional, responsif, serta meningkatkan keamanan dari segala tindak kejahatan dan perampasan hak.

Misi 4: Membangun dan meningkatkan kualitas serta kuantitas infrastruktur dasar untuk mempercepat pembangunan Wilayah Desa, Kecamatan, dan perbatasan, memperlancar arus barang dan mobilitas penduduk, serta mewujudkan daya saing daerah yang merata, berbasis potensi, dan seimbang.

Misi 5: Meningkatkan kehidupan beragama, seni, dan budaya untuk membentuk karakter sosial yang agamis, berbudaya, dan berprestasi, didukung kesehatan fisik melalui olahraga, serta mengembangkan pariwisata berbasis alam dan budaya.

3.2. Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029

Berdasarkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2025-2029, maka tujuan dan sasaran pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang adalah, sebagai berikut:

Misi 1 : "Membangun perekonomian yang tangguh melalui peningkatan sektor pertanian, perkebunan, penguatan industri dan UMKM kreatif dan inovatif untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan".

Tujuan 1 : Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan pengentasan kemiskinan;

Sasaran:

1.1. Meningkatnya Industri dan Perdagangan
1.2. Meningkatnya UMKM dan Koperasi
1.3. Meningkatnya Investasi
1.4. Meningkatnya Lapangan Kerja yang Berkualitas
1.5. Meningkatnya Ketahanan Pangan
1.6. Meningkatnya kesejahteraan sosial

Tujuan 2 : Meningkatkan kesejahteraan petani;

Sasaran:

2.1. Meningkatnya produktivitas hasil pertanian dan perkebunan

Misi 2 : "Meningkatkan kualitas dan keterjangkauan pelayanan kesehatan dan pendidikan dalam mewujudkan SDM yang sehat, berpendidikan, profesional, serta menjunjung tinggi nilai keimanan, ketaqwaan, kejujuran, dan integritas".

Tujuan 3 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia;

Sasaran:

3.1. Meningkatnya Kualitas Pendidikan yang inklusif dan adaptif

3.2. Meningkatnya Kualitas Kesehatan masyarakat dengan pelayanan yang tangguh dan responsive

3.3. Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Pengendalian Penduduk

Misi 3 : "Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) bebas KKN melalui transparansi dan akuntabilitas berbasis teknologi, didukung aparatur yang berintegritas, profesional, responsif, serta meningkatkan keamanan dari segala tindak kejahatan dan perampasan hak".

Tujuan 4: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance);

Sasaran:

4.1. Meningkatnya profesionalme dan integeritas aparatur pemerintah.

4.2. Meningkatnya Transparasi dan Akuntablitas

4.3. Meningkatnya kemandirian Fiskal daerah

4.4. Terciptanya pelayanan publik yang prima

Tujuan 5: Mewujudkan lingkungan masyarakat yang aman dan terlindungi;

Sasaran:

5.1. Terciptanya suasana aman dan tentram bagi seluruh masyarakat

Misi 4 : "Membangun dan meningkatkan kualitas serta kuantitas infrastruktur dasar untuk mempercepat pembangunan Wilayah Desa, Kecamatan, dan perbatasan, memperlancar arus barang dan mobilitas penduduk, serta mewujudkan daya saing daerah yang merata, berbasis potensi, dan seimbang".

Tujuan 6 : Meningkatkan infrastruktur daerah yang berkualitas dan berdaya saing;

Sasaran:

6.1. Meningkatnya infrastruktur dasar Masyarakat
6.2. Meningkatnya Pengelolaan Pertanahan
6.3. Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana
6.4. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
6.5. Meningkatnya Pembangunan Desa

Misi 5 : "Meningkatkan kehidupan beragama, seni, dan budaya untuk membentuk karakter sosial yang agamis, berbudaya, dan berprestasi, didukung kesehatan fisik melalui olahraga, serta mengembangkan pariwisata berbasis alam dan budaya".

Tujuan 7: Mewujudkan masyarakat yang berkarakter agamis dan berbudaya;

Sasaran:

7.1. Terwujudnya kerukunan umat beragama

Tujuan 8: Meningkatkan produktivitas sektor pariwisata, seni dan budaya;

Sasaran:

8.1. Meningkatnya pengembangan kepemudaan dan pariwisata

Tabel III.1
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2025-2029

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Base Line (2024)	Target						Ket
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Visi: Bersatu Untuk OKU Selatan Maju, Adil, Aman Nyaman dan Sejahtera											
Misi 1: Membangun perekonomian yang tangguh melalui peningkatan sektor pertanian, perkebunan, penguatan industri dan UMKM kreatif dan inovatif untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan.	1. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan pengentasan kemiskinan;		Pertumbuhan ekonomi	4,58	4,65	5,00	5,30	5,50	5,70	6,00	
			Persentase penduduk miskin	9,86	9,50	9,30	9,22	8,90	8,59	8,28	
			PDRB per Kapita (ADHB) (Rp Juta)	27,72	28,44	29,27	30,11	30,95	31,78	32,62	
			PDRB per Kapita (ADHK 2010) (Rp Juta)	15,89	17,00	18,00	19,00	20,00	21,00	22,00	
			Indeks gini rasio	0,356	0,315	0,310	0,303	0,295	0,278	0,262	
			Tingkat pengangguran terbuka (TPT)	1,80	1,79	1,78	1,76	1,74	1,73	1,71	
		1.1. Meningkatnya industri dan perdagangan	Kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB	8,19	8,19	8,20	8,21	8,22	8,23	8,24	
			Kontribusi perdagangan besar dan eceran reparasi mobil dan sepeda motor terhadap PDRB	24,43	24,44	24,45	24,46	24,47	24,48	24,49	
		1.2. Meningkatnya UMKM dan koperasi	Produktivitas UMKM, koperasi, BUMN terhadap PDRB	N/A	100	100	100	100	100	100	
			Persentase koperasi aktif	54,16	55,25	57,00	59,00	62,00	65,00	70,00	
		1.3. Meningkatnya investasi	Kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN/PMA (milyar rupiah)	1,71	23	24	25	26	27	28	
		1.4. Meningkatnya lapangan kerja	Tingkat partisripasi angkatan kerja	79,93	81,00	83,00	84,00	86,00	87,00	89,00	

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Base Line (2024)	Target						Ket
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		yang berkualitas									
		1.5. Meningkatnya ketahanan pangan	Indeks ketahanan pangan (IKP)	75.37	75,50	75,55	75,68	76,50	77,50	78,00	
		1.6. Meningkatnya kesejahteraan sosial	Persentase PMKS yang tertangani	29,65	32,00	35,00	39,00	44,00	50,00	56,00	
	2. Meningkatkan kesejahteraan petani;		Nilai tukar petani (NTP)	120,97	122,00	124,00	125,00	126,00	128,00	129,00	
		2.1. Meningkatnya produktivitas hasil pertanian dan perkebunan	Kontriubusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap PDRB	29,77	30,5	32	35	36	37	38	
			Produksi perikanan	91,25	92,00	93,00	94,00	95,00	96,00	97,00	
Misi 2: "Meningkatkan kualitas dan keterjangkauan pelayanan kesehatan dan pendidikan dalam mewujudkan SDM yang sehat, berpendidikan, profesional, serta menjunjung tinggi nilai keimanan, ketaqwaan,	3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia;		Indeks pembangunan manusia (IPM)	70,00	72,40	74,80	77,20	79,60	82,00	84,40	
		3.1. Meningkatnya kualitas pendidikan yang inklusif dan adaptif	Rata-rata Lama sekolah	8,25	8,43	8,68	8,76	8,98	9,05	9,20	
			Rata-rata harapan lama sekolah	11,82	11,90	11,92	11,94	12,00	12,50	12,90	
			Indeks pembangunan literasi masyarakat	29,27	32,00	35,00	38,00	42,00	46,00	51,00	
			Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk numerasi	16,86	18,71	21,33	25,17	30,71	38,70	50,31	
			Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum	18,27	20,28	23,12	27,28	33,28	41,94	54,52	

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Base Line (2024)	Target						Ket
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
kejujuran, dan integritas".			pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca								
		3.2. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dengan pelayanan yang tangguh dan responsive	Usia harapan hidup	73,44	73,64	74,03	74,42	74,81	75,21	75,61	
			Indeks keluarga sehat	N/A	0,60	0,81	0,84	0,87	0,90	0,94	
			Kabupaten/Kota Sehat	-	Padapa (9.656)	-	Wiwerda (11.016)	-	Wastara (12.376)	-	
			Cakupan peserta KB aktif	73,01	74,00	76,00	79,00	83,00	87,00	92,00	
			Prevalansi Stunting	12,20	12,00	11,80	11,60	11,40	11,20	12,20	
			Cakupan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja	39,00	40,00	41,00	42,00	43,00	44,00	45,00	
		3.3. Meningkatnya kesetaraan gender dan pengendalian penduduk	Indeks ketimpangan gender	0,570	0,379	0,366	0,354	0.341	0,328	0,316	
			Indeks pembangunan gender (IPG)	92,74	94,00	95,00	96,00	97,00	98,00	99,00	
			Indeks pemberdayaan gendar (IDG)	58,28	60,00	61,00	62,00	63,00	64,00	65,00	
			Indeks pembangunan kualitas keluarga	59	68.04	69,29	69,55	69,80	70,05	70,30	
			Rasio angka kelahiran	2,19	2,32	2,22	2,12	2,02	1,92	1,82	
			Kabupaten layak anak	Madya	Nindya (700-800)	Nindya (700-800)	Nindya (700-800)	Nindya (700-800)	Utama (800-900)	Utama (800-900)	
			Anugerah Parahita Ekapraya (APE)	Pratama (500-600)	Pratama (500-600)	Madya (600-700)	Madya (600-700)	Nindya (700-800)	Nindya (700-800)	Utama (800-900)	
Misi 3: "Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik *(good governance)* bebas KKN melalui	4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang *baik (good governance);*		Indeks Sakip	B	65,50 (B)	67,30 (B)	69,01 (B)	72,01 (BB)	76,50 (BB)	80,01 (A)	
			Indeks reformasi birokrasi	B	65,70 (B)	67,02 B	70,50 (BB)	73,01 (BB)	77,00 (BB)	80,70 (A)	
		4.1. Meningkatnya profesionalme dan integeritas	Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik	2,34	2,5	2,52	2,54	2,56	2,58	2,60	
			Skor maturitas SPIP	3,04	3,06	3,08	3,09	3,1	3,12	3,14	

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Base Line (2024)	Target						Ket
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
transparansi dan akuntabilitas berbasis teknologi, didukung aparatur yang berintegritas, profesional, responsif, serta meningkatkan keamanan dari segala tindak kejahatan dan perampasan hak".		aparatur Pemerintah	Indeks Berakhlak	Cukup Sehat	Cukup Sehat (60-70)	Cukup Sehat (60-70)	Cukup Sehat (60-70)	Sehat (70-85)	Sehat (70-85)	Sangat Sehat (86-100)	
			Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kepegawaian	Nilai	B (84)	B (84,25)	B (84,50)	B (84,75)	B (85,50)	A (90)	
			Indeks kepuasan Masyarakat	82,28	82,78	83,28	83,58	83,78	84,28	84,78	
			Cakupan layanan telekomunikasi	63,32	65,77	69,53	74,53	81	88,46	94,53	
		4.2. Meningkatnya transparasi dan akuntablitas	Opini BPK	WTP	WTP (>85)	WTP (>85)	WTP (>85)	WTP (>85)	WTP (>85)	WTP (>85)	
			Indeks pengelolaan keuangan daerah	71,035	74	78	81,5	82	84	85	
			indeks inovasi daerah	46,41	46,41	48,00	49,00	51,00	53,00	55,00	
			Persentase penggunaan arsip digital	N/A	50	70	90	100	100	100	
			Indeks tata kelola pengadaan	52,05	55,05	58,05	61,05	64,05	67,05	70,05	
			Indeks Demokrasi Indonesia	N/A	70,00	70,50	71,00	71,50	72,00	72,50	
		4.3. Meningkatnya kemandirian Fiskal daerah	Persentase derajat otonomi fiskal daerah	4,4	6,4	6,8	7,00	7,30	7,50	7,80	
		4.4. Terciptanya pelayanan publik yang prima	Indeks pelayanan publik	4,41	4,50	4,60	4,70	4,80	4,90	4,95	

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Base Line (2024)	Target						Ket
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	5. Mewujudkan lingkungan masyarakat yang aman dan terlindungi;		Angka kriminalitas	0,040	0,030	0,026	0,021	0,018	0,015	0,009	
		5.1. Terciptanya suasana aman dan tentram bagi seluruh masyarakat	Proporsi penduduk yang marasa aman berjalan sendirian diarea tempat tinggalnya	N/A	100	100	100	100	100	100	
			Persentase penegakan Perda	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
			Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang teratasi	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
			Pemasangan rambu rambu	1,118	1319	1557	1757	900	850	400	
Misi 4: "Membangun dan meningkatkan kualitas serta kuantitas infrastruktur dasar untuk mempercepat pembangunan Wilayah Desa, Kecamatan, dan perbatasan, memperlancar arus barang dan mobilitas penduduk, serta mewujudkan daya saing daerah yang	6. Meningkatkan Infrastruktur Daerah yang Berkualitas, Berdaya Saing, dan Berwawasan Lingkungan untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan;		Indeks daya saing daerah	3,23	3,30	3,50	3,70	3,90	4,00	4,00	
			Indeks kualitas lingkungan hidup	69,34	69,60	69,86	70,11	70,36	70,62	70,87	
			Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Kumulatif (Ton CO_2-e)	N/A	155.181,23	168.302,39	181.423,55	194.544,71	207.665,87	220.787,03	
		6.1. Meningkatnya infrastruktur dasar masyarakat	Persentase jalan dalam kondisi mantap	68,35	70,87	72,69	73,97	77,54	82,63	86,23	
			Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak	80,18	81,00	82,00	83,00	84,00	85,00	86,00	
			Persentase irigasi dalam kondisi baik	61,93	61,991	62,208	62,481	63,022	63,112	63,836	
			Rasio rumah layak huni	77,06	77,1	77,3	77,5	77,8	78	78,3	
			Rasio elektrikfikasi	92,91	100	100	100	100	100	100	
		6.2. Meningkatnya pengelolaan pertanahan	Persentase luas lahan bersertifikat	N/A	30	34	36	42	46	50	

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Base Line (2024)	Target						Ket
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
merata, berbasis potensi, dan seimbang".		6.3. Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Respon cepat darurat bencana	100	100	100	100	100	100	100	
			Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	N/A	70	73,5	77	80,5	84	87,5	
		6.4. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas air	60.56	63	65	67	68	69	70	
			Indeks Kualitas Udara	92.19	93	94	95	96	96,6	97	
			Indeks Kualitas Lahan (IKL)	42.15	43	44	45	45,5	46	47	
		6.5. Meningkatnya Pembangunan Desa	Persentase Desa Mandiri	0	0,00	1,59	4,37	5,95	7,14	7,94	
			Persentase Desa Maju	15,48	23,02	29,76	34,13	39,68	59,92	67,06	
Misi 5: "Meningkatkan kehidupan beragama, seni, dan budaya untuk membentuk karakter sosial yang agamis, berbudaya, dan berprestasi, didukung kesehatan fisik melalui olahraga, serta mengembangkan pariwisata berbasis alam dan budaya".	7. Mewujudkan masyarakat yang berkarakter agamis dan berbudaya;		Indeks Harmoni Indonesia	7,13	6,5	6,6	6,7	6,8	6,9	7,0	
		7.1. Terwujudnya kerukunan umat beragama	Indeks kerukunan umat beragama (IKUB)	76,47	78,00	78,50	79,00	79,50	80,00	80,5	
	8. Meningkatkan produktivitas sektor pariwisata, seni dan budaya;		PAD sektor pariwisata	1,11	2,00	2,10	2,31	2,54	2,8	3,07	
		8.1. Meningkatnya pengembangan kepemudaan dan pariwisata	Jumlah kunjungan wisata	36.309	100.000	105.000	110.000	120.000	130.000	140.000	
			Jumlah prestasi olahraga	Porprov	10 besar	0	5 besar	0	5 besar	0	
			Persentase wirausaha muda	N/A	20	35	45	50	75	85	
			Indeks pembangunan kebudayaan	N/A	40,00	45,60	49,70	54,20	58,70	59,00	

3.3. Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

3.3.1.Strategi Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran RPJMD

Strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2025-2029 disusun dengan memperhatikan arahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2025-2045 dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2021-2040, serta arahan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan. Arahan tersebut menuntun Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan pada prioritas pembangunan daerah sekaligus strategi terhadap penjabaran Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2025-2029. Secara umum strategi yang ditempuh dalam pembangunan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tahun 2025-2029 dapat dikelompokkan, sebagai berikut :

1. **Strategi Transformasi Ekonomi dalam Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat dan Penciptaan Landasan Pembangunan yang Kokoh**

Strategi transformasi ekonomi dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan penciptaan landasan pembangunan yang kokoh memerlukan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa setiap Kabupaten/Kota wajib mengarahkan strategi pembangunannya pada kebutuhan dasar rakyat untuk penciptaan landasan pembangunan yang kokoh. Strategi-strategi dimaksud, diarahkan pada enam sasaran pokok, yaitu: Pertama, fokus pada peningkatan produktivitas sektor-sektor strategis seperti pertanian, industri, dan jasa, dengan memanfaatkan teknologi dan inovasi, serta pembentukan Koperasi Desa Merah Putih di tingkat Desa dan Kelurahan, yang bertujuan memperkuat ekonomi lokal dan ketahanan pangan. Kedua, memperkuat infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, dan air bersih untuk mendukung kegiatan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Ketiga, meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja, pemberian makan bergizi untuk siswa, santri, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, serta penyediaan rumah layak huni untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama bagi mereka yang memiliki rumah tidak layak huni. Keempat, mendorong investasi yang inklusif dan berkelanjutan, dengan memberikan insentif bagi sektor-sektor yang menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kesenjangan. Kelima, memperkuat perlindungan sosial bagi kelompok rentan dan miskin,

dengan memastikan akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan bantuan sosial. Keenam, menjaga stabilitas ekonomi makro dan fiskal, dengan mengelola inflasi, defisit anggaran, dan utang secara hati-hati dalam menopang Visi dan Misi Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

2. Strategi Tata Kelola Pemerintahan dan Penataan Organisasi Perangkat Daerah

Tata kelola pemerintahan yang baik *(Good Governance)* adalah suatu konsep yang mengacu pada proses penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik. Strategi tata kelola pemerintahan yang baik didasarkan pada berbagai peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip yang berlaku. Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan melakukan penataan kembali Organisasi Perangkat Daerah.

Strategi tata kelola pemerintahan yang baik dan penataan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah kunci utama dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Tata kelola pemerintahan yang baik menekankan pada prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan supremasi hukum, yang diimplementasikan melalui kebijakan dan praktik yang berorientasi pada pelayanan publik. Sementara itu, penataan OPD bertujuan untuk menciptakan struktur organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran, sesuai dengan kebutuhan daerah dan perkembangan zaman. Ini mencakup evaluasi berkala terhadap kinerja OPD, penyederhanaan birokrasi, dan pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan. Kedua strategi ini saling terkait dan memerlukan komitmen kuat dari seluruh aparatur Pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, profesional, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Strategi penataan kembali struktur organisasi Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan lima tahun ke depan diarahkan untuk mendukung sistem ketatanegaraan Republik Indonesia berdasarkan semangat, jiwa, nilai dan konsensus dasar yang melandasi berdirinya Negara Kebangsaan Republik Indonesia yang meliputi Pancasila; UUD 1945 (terutama Pembukaan UUD 1945); tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan tetap berkembangnya pluralisme dan keberagaman dengan prinsip Bhineka Tunggal Ika. Urgensi penataan struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu

Selatan berkaitan dengan pembagian urusan Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Terkait dengan penataan kembali struktur organisasi Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, maka telah dilakukan pemberian kewenangan yang nyata dan bertanggungjawab kepada Desa sehingga pelaksanaan otonomi daerah, yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat, pelayanan public, dan daya saing daerah dapat dicapai dengan optimal.

3. Strategi Keterpaduan Antar Urusan

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, terdapat lima tujuan pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan nasional, yaitu mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu dan antar fungsi pemerintah maupun antar pusat dan daerah, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya yang efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjuta. Untuk meningkatkan keberhasilan pembangunan daerah, maka dalam RPJMD sangat perlu dilakukan sinergi antar urusan pemerintahan daerah. Sinergi antar urusan dalam RPJMD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2025-2029. Pada dasarnya mengacu pada konsep bahwa keberhasilan pembangunan daerah sangat ditopang oleh sinergi kebijakan, program prioritas dan hasil dari semua urusan dan dukungan para pemangku kepentingan. Dalam kerangka keterpaduan antar urusan, maka prinsip-prinsip keterpaduan menjadi landasan berpijak bagi seluruh pembangunan urusan pemerintahan daerah. Keterpaduan dilakukan dengan struktur kriteria sebagai berikut: (1) Keterpaduan bukanlah merupakan upaya yang terpisah dari kegiatan pembangunan urusan; (2) Keterpaduan tidaklah mengimplikasikan adanya tambahan pendanaan, dan (3) Keterpaduan dilakukan pada urusan terkait, dan diprioritaskan pada urusan penting yang terkait dengan isu-isu pembangunan.

4. Strategi Penanggulangan Kemiskinan

Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan merupakan salah satu program prioritas yang sangat mendesak untuk segera dilaksanakan. Penanggulangan Kemiskinan tidak dapat dilakukan secara sektoral, namun harus dilakukan secara terpadu melalui lintas Perangkat Daerah. Penyusunan Program sektoral dalam penanggulangan kemiskinan dimaksudkan sebagai

dasar atau acuan dalam menyusun kebijakan pengentasan kemiskinan tahun 2025-2029. Langkah-langkah penanggulangan kemiskinan memerlukan pendekatan yang sistematik, terpadu dan menyeluruh, sehingga dapat mengurangi beban dan tetap mampu memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak untuk menempuh dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Dari permasalahan penyebab kemiskinan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, maka strategi penanggulangan lima tahun kedepan dilakukan dengan pendekatan:

a. Fokus kepada akar permasalahan penyebab kemiskinan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, yaitu infrastruktur dasar, ketenagakerjaan, dan sumber mata pencaharian.
b. Perumusan rencana aksi penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi dalam sistem perencanaan pembangunan daerah.
c. Penguatan program pemberdayaan UMKM bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan akses pasar bagi pelaku usaha kecil dan menengah
d. Fokus pelaksanaan program pada lokasi banyak ditemukan penduduk miskin
e. Peningkatan dan penguatan koordinasi yang meliputi sinkronisasi, harmonisasi dan integritas berbagai program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan, perlu dilakukan penyusunan program lintas Perangkat Daerah dan fokus Tunggal social dan ekonomi social sebagai sumber data utama dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan social dan ekonomi untuk memastikan program pemerintah terlaksana secara tepat sasaran, efektif, efesien dan akuntabel.
f. Penguatan kelembagaan yang menangani koordinasi penanggulangan kemiskinan baik dengan pusat, maupun provinsi melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah.

5. Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Program prioritas yang lain yang perlu mendapat perhatian adalah kemandirian ekonomi. Kemandirian ekonomi dicapai apabila ketergantungan dengan dana alokasi umum dari pusat semakin berkurang; hal ini dapat terjadi bila pendapatan asli daerah meningkat secara proporsional. Sama halnya dengan pengentasan kemiskinan, maka peningkatan pendapatan asli daerah juga dilakukan melalui strategi lintas urusan/lintas perangkat daerah. Strategi peningkatan pendapatan daerah diantaranya dilakukan dengan:

1) Mengoptimalkan pendapatan asli daerah melalui intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi sumber-sumber pendapatan tanpa membebani masyarakat. Intensifikasi pendapatan asli daerah dilakukan dengan cara, antara lain:
   a. Pendaftaran/pendataan, pemutakhiran dan konfirmasi data pajak daerah.
   b. Pengelolaan Sistem Pajak (SISMIOP).
   c. Implementasi Aplikasi Simda Pendapatan.
   d. Sistem administrasi pemungutan pajak dan retribusi yang transparan dan akuntabel
   e. Intensifikasi penagihan/pemungutan PAD.
   f. Pelayanan dan penertiban pajak dan retribusi daerah.
   g. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan perbaikan aspek kelembagaan pengelola pendapatan asli daerah.

   Ekstensifikasi pendapatan asli daerah dilakukan dengan cara, antara lain:
   a. Penyusunan regulasi tentang pajak dan retribusi daerah.
   b. Sosialisasi dan publikasi pajak dan retribusi daerah.
   c. Penyelenggaraan Bulan Bakti PBB.
   d. Pembuatan papan himbauan pajak dan retribusi daerah
   e. Peningkatan koordinasi antar instansi terkait.
2) Mengoptimalkan pengelolaan aset dan kekayaan daerah agar dapat memberikan nilai tambah bagi pendapatan daerah, melalui profesionalisme manajemen.
3) Meningkatkan iklim investasi yang kondusif sehingga dapat mendorong investasi yang dapat memberikan kontribusi optimal bagi pendapatan daerah termasuk mendirikan BUMD dan/atau perusahaan milik Pemerintah Daerah yang *profitable*.

6. Strategi Pengembangan Wilayah

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Wilayah Kecamatan dan Desa memiliki peran yang sangat strategis sehingga diperlukan strategi pengembangan wilayah pada masing-masing Kecamatan dan Desa berdasarkan potensi dan permasalahan yang ada. Arahan pemanfaatan ruang, adalah upaya untuk mewujudkan struktur dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program pembangunan beserta pembiayaannya. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan merupakan pedoman pembangunan terutama dalam kegiatan pembangunan yang mempunyai implikasi ruang. Salah satu fungsi RTRW Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan adalah sebagai

acuan bagi Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dalam menyusun dan melaksanakan program 20 (dua puluh) tahunan. Indikasi program pembangunan tersebut merupakan penjabaran kebijaksanaan dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan ke dalam program-program pembangunan.

1) Kawasan Strategis Provinsi

Kawasan Strategis Provinsi (KSP) di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan adalah kawasan pada wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yang penataan ruangnya yang diprioritaskan karena mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam lingkup Provinsi terhadap fungsi dan daya dukung lingkungan. Berdasarkan RTRW Provinsi Sumatera Selatan, Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Sumatera Selatan yang berada di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan terdiri atas:

a. KSP Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi

(1) KSP Kawasan Pengembangan Ekonomoi Terpadu Danau Ranau terletak di Kecamatan Banding Agung, Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah, dan Kecamatan Warkuk Ranau Selatan.

(2) KSP Kawasan Minapolitan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan terletak di Kecamatan Banding Agung, Kecamatan Warkuk Ranau Selatan, dan Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah.

(3) KSP yang Memiliki Fungsi Pendayagunaan SDA/Teknologi Tinggi Kawasan panas bumi geothermal terletak di Danau Ranau (Kecamatan Warkuk Ranau Selatan, Kecamatan Banding Agung), Way Selabung (Kecamatan Mekakau Ilir), Aromantai (Kecamatan Pulau Beringin), Ulu Danau (Kecamatan Sindang Danau), dan Marga Bayur (Kecamatan Muaradua Kisam).

2) Kawasan Strategis Kabupaten

Kawasan strategis wilayah Kabupaten merupakan bagian wilayah Kabupaten yang penataan ruangnya diprioritaskan, karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Kabupaten terhadap ekonomi, sosial budaya, dan/atau lingkungan. Penentuan kawasan strategis Kabupaten lebih bersifat indikatif. Batasan fisik kawasan strategis Kabupaten akan ditetapkan lebih lanjut di dalam rencana tata ruang kawasan strategis.

a. Kawasan Strategis untuk Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi

Kawasan strategis mampu memacu pertumbuhan ekonomi wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, baik melalui keterkaitan fungsional keterpusatannya maupun melalui fungsi-fungsi ekonomi khusus yang dikembangkan pada kawasan tersebut, dan juga melalui keterpaduan sector-sektor perekonomian di kawasan tersebut. Rencana penetapan kawasan strategis ekonomi di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan terdiri dari:

1) Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) Agropolitan Buana Pemaca

Kecamatan Buana Pemaca sebagai kawasan inti di Desa Geminung dengan kawasan penyangga Desa-Desa di Kecamatan Buay Pemaca, Buay Rawan, Buay Sandang Aji, dan Simpang. Zona tersebut merupakan simpul distrik agropolitan yang terintegrasi secara sinergis dalam pengembangan kawasan agropolitan dengan sentra komoditas pertanian berupa komoditas unggulan Jagung.

2) Kawasan Strategis Kabupaten Wisata Danau Rakihan

Penetapan kawasan stategis Wisata Danau Rakihan terkait dengan potesi Danau Rakihan yang merupakan daerah tujuan wisata tirta danau selain Objek Wisata Danau Ranau. KSK Danau Rakihan meliputi Kecamatan Sindang Danau, Sungai Are, dan Pulau Beringin. Konsep pengembangan pola ruang KSK Wisata Danau Rakihan meliputi

a) Pengembangan kawasan inti yang berada di Danau Rakihan dan sekitarnya dan kawasan penyangga berada di kawasan sekitar Danau Rakihan yang telah berkembang kegiatan pemanfaatan ruang baik kawasan lindung maupun budidaya. Kawasan penyangga berada di Kecamatan Sungai Are dan Pulau Beringin.

b) Rencana Arah Perkembangan

(1) Kawasan Danau Rakihan dan sekitarnya ditetapkan sebagai KPPK (Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten) dan didukung oleh kawasan lain disekitarnya.

(2) Optimalisasi peran Kecamatan Pulau Beringin sebagai PPK (Pusat Pelayanan Kawasan) menjadi pusat pelayanan bagi KPPK.

(3) Optimalisasi peran Danau Rakihan dan sumber air jernih sebagai destinasi andalan di KPPK Danau Rakihan dan sekitarnya.

(4) Meningkatkan kualitas aksesibilitas menuju KPPK Danau Rakihan dan sekitarnya.

(5) Penyertaan aspek pengelolaan lingkungan dan mitigasi bencana dalam pengembangan pariwisata.
(6) Target pasar wisatawan: wisatawan nusantara untuk destinasi wisata masal. Wisatawan nusantara dan mancanegara untuk wisata minat khusus.

b. Kawasan Strategis Sosial Budaya

Kawasan sosial budaya di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan berupa pengembangan KSK Monumen Perang Paoh di Kecamatan Tiga Dihaji sebagai daerah inti dan daerah penyangganya kawasan perdesaan sekitar di Kecamatan Tiga Dihaji dan Buay Sandang Aji. Dalam pengembangan KSK Monumen Perang Paoh perlu di lakukan penelitian lebih lanjut terhadap sejarah Perang Paoh dan penetapan situs sebagai benda cagar budaya. Perang Paoh diperkiran terjadi sekitar tahun 1700 atau 104 tahun sejak ekspedisi Belanda yang pertama tiba di perairan Banten tanggal 27 Juni 1596 yang dipimpin oleh Cornelis De Houtman. Perang itu adalah perang rakyat Suku Haji melawan Belanda. Perang yang memakan korban jiwa dan harta bagi Suku Haji demi kehormatan. Sebelum Perang Paoh, terjadi perang yang pertama di daerah yang bernama Manggilan Sukarami Haji. Dalam perang yang pertama di daerah Manggilan itu Belanda mundur karena banyaknya korban dari pihak Belanda. Kesempatan mundurnya Belanda itu dimanfaatkan oleh pejuang Suku Haji untuk menyusun strategi. Dipilihlah daerah Paoh sebagai basis pertahanan. Sekitar 3 km dari Paoh ke arah Sungai Selabung dibangun benteng di atas bukit yang bersebelahan dengan sungai. Dalam penetapan sebagai KSK Monumen Perang Paoh direncanakan konsep pola ruang, meliputi:

1) Zona inti merupakan kawasan utama dari situs sejarah Perang Paoh di Kecamatan Tiga Dihaji terdapat tiga objek yang merupakan bekas peninggalan bersejarah yaitu: Situs Batu Pengaringan, Situs Batu Pemberasan, Situs Tapak Kerbau dan Benteng Pauh. Dalam menjaga situs bersejarah ini di zona inti, maka dilakukan tindakan pelestarian secara dinamis dan akif, yaitu konservasi pada kawasan inti. Selain itu juga harus ada sterilisasi zona inti dari kegiatan manusia, yaitu dengan memberikan barrier antara lokasi inti dengan aktivitas manusia. Kegiatan yang dilakukan di zona ini adalah kegiatan yang berhubungan dengan penelitian dan kegiatan pelestarian.
2) Zona penyangga merupakan area yang melidungi zona inti yang berkaitan dengan tindakan pelestarian dan aktivitas kegiatan masyarakat Desa. Lokasi zona penyangga merupakan desa-desa yang berada pada radius tertentu dari

situs Perang Paoh di Kecamatan Tiga Dihaji dan Buay Sandang Aji. Terdapat permukiman yang diperkirakan berkaitan erat dengan pejuang Perang Pauh di Desa Sukarami Aji Kecamatan Buay Sandang Aji.

3) Zona pengembangan wisata cagar budaya merupakan kawasan yang secara langsung mendukung kegiatan wisata cagar budaya yang merupakan pusat dari fasilitas pelayanan kegiatan pariwisata yang dibutuhkan oleh masyarakat dan juga wisatawan seperti perdagangan jasa. Pada zona pengembangan kegiatan yang dilakukan adalah melakukan tindakan pemeliharaan terhadap objek wisata alam dan wisata budaya, agar tetap terjaga kelestariannya.

c. Kawasan Strategis Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup

Penetapan kawasan strategis fungsi daya dukung lingkungan hidup di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan adalah KSK Bendungan Saka. Kawasan strategis ini merupakan kawasan pelestarian sumber daya air terkait dengan pembangunan Waduk Tiga Dihaji. KSK Bendungan Saka, meliputi Kecamatan Runjung Agung dan Buay Runjung. Dalam pengembangan KSK Bendungan Saka di rencanakan konsep pola ruang meliputi:

1) Kawasan inti merupakan kawasan perlindungan sumber daya air sekitar Bendungan Saka dengan radius ±1,5 Km. Pengembangan kawasan budidaya terbatas yang sesuai dengan daya tampung dan daya dukung lingkungannya untuk melestarikan sumber daya alam dan lingkungan.
2) Kawasan penyangga merupakan kawasan sekitar meliputi administrasi wilayah Kecamatan Runjung Agung dan Buay Runjung yang telah berkembang berbgai kegiatan pemanfaatan ruang yang perlu dikendalikan untuk mendukung fungsi lindung dan konservasi pada kawasan inti.

Keterkaitan antara misi, tujuan, sasaran, dan strategi dalam RPJMD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2025-2029, disajikan pada Tabel III.2 berikut.

Tabel III.2
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi
Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan

Misi dan Tujuan	Sasaran	Strategi				
		Tahap I (2026)	**Tahap II (2027)**	**Tahap III (2028)**	**Tahap IV 2029**	**Tahap V 2030**
Visi: Bersatu Untuk OKU Selatan Maju, Adil, Aman Nyaman dan Sejahtera						
Misi 1: Membangun perekonomian yang tangguh melalui peningkatan sektor pertanian, perkebunan, penguatan industri dan UMKM kreatif dan inovatif untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan.						
T-1.1: Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan pengentasan kemiskinan;	S-1.1.1: Meningkatnya Industri dan Perdagangan	Merevitalisasi dan memperkuat peran Koperasi, pasar rakyat (kalangan), dan penguatan kelembagaan di sektor pertanian, perikanan, peternakan, UMKM, pariwisata, dan ekonomi kreatif	Peningkatan peran Koperasi, pasar rakyat (kalangan), dan penguatan kelembagaan di sektor pertanian, perikanan, peternakan, UMKM, pariwisata, dan ekonomi kreatif	Akselerasi peran Koperasi, pasar rakyat (kalangan), dan penguatan kelembagaan di sektor pertanian, perikanan, peternakan, UMKM, pariwisata, dan ekonomi kreatif	Penguatan peran Koperasi, pasar rakyat (kalangan), dan kelembagaan di sektor pertanian, perikanan, peternakan, UMKM, pariwisata, dan ekonomi kreatif	Pemantapan peran Koperasi, pasar rakyat (kalangan), dan kelembagaan di sektor pertanian, perikanan, peternakan, UMKM, pariwisata, dan ekonomi kreatif
		Merevitalisasi pasar rakyat tradisional dengan layanan modern dan bersih	Peningkatan pasar rakyat tradisional dengan layanan modern dan bersih	Penguatan pasar rakyat tradisional dengan layanan modern dan bersih	Perwujudan pasar rakyat tradisional dengan layanan modern dan bersih	Pemantapan pasar rakyat tradisional dengan layanan modern dan bersih
	S-1.1.2: Meningkatnya UMKM dan Koperasi.	Mendorong sistem digitalisasi UMKM sebagai salah satu jalan utama dalam memperkuat perekonomian	Peningkatan sistem digitalisasi UMKM sebagai salah satu jalan utama dalam memperkuat perekonomian	Pemerataan sistem digitalisasi UMKM sebagai salah satu jalan utama dalam memperkuat perekonomian	Penguatan sistem digitalisasi UMKM sebagai salah satu jalan utama dalam memperkuat perekonomian	Pemantapan sistem digitalisasi UMKM sebagai salah satu jalan utama dalam memperkuat perekonomian
		Mendorong pertumbuhan usaha serta melakukan pendampingan bagi wirausaha pemula	Peningkatan pertumbuhan usaha serta melakukan pendampingan bagi wirausaha pemula	Optimalisasi usaha baru serta melakukan pendampingan bagi wirausaha pemula	Pemantapan pertumbuhan usaha serta melakukan pendampingan bagi wirausaha pemula	Perwujudan pertumbuhan usaha serta melakukan pendampingan bagi wirausaha pemula

Misi dan Tujuan	Sasaran	Strategi				
		Tahap I (2026)	**Tahap II (2027)**	**Tahap III (2028)**	**Tahap IV 2029**	**Tahap V 2030**
Visi: Bersatu Untuk OKU Selatan Maju, Adil, Aman Nyaman dan Sejahtera						
	S-1.1.3: Meningkatnya Investasi	Pemetaan pengembangan sistem permodalan	Mendorong pengembangan sistem permodalan	Pengembangan sistem permodalan	Penguatan sistem permodalan	Pemantapan sistem permodalan
		Mendorong sistem kondisi/iklim Investasi yang kondusif	Peningkatan sistem kondisi/iklim Investasi yang kondusif	Akselerasi sistem kondisi/iklim Investasi yang kondusif	Penguatan sistem kondisi/iklim Investasi yang kondusif	Pemantapan sistem kondisi/iklim Investasi yang kondusif
	S-1.1.4: Meningkatnya Lapangan Kerja yang Berkualitas	Mendorong Kewirausahaan untuk Menciptakan Lapangan Kerja yang Berkualitas	Peningkatan Kewirausahaan untuk Menciptakan Lapangan Kerja yang Berkualitas	Akselererasi Pemberdayaan Kewirausahaan untuk Menciptakan Lapangan Kerja yang Berkualitas	Penguatan Kewirausahaan untuk Menciptakan Lapangan Kerja yang Berkualitas	Pemantapan Kewirausahaan untuk Menciptakan Lapangan Kerja yang Berkualitas
		Pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan ketenagaan kerjaan dan kewirausahan	Peningkatan sumber daya manusia melalui pelatihan ketenagaan kerjaan dan kewirausahan	Akselererasi sumber daya manusia melalui pelatihan ketenagaan kerjaan dan kewirausahan	Penguatan sumber daya manusia melalui pelatihan ketenagaan kerjaan dan kewirausahan	Pemantapan pemberdayaan sumber daya manusia melalui pelatihan ketenagaan kerjaan dan kewirausahan
	S-1.1.5: Meningkatnya Ketahanan Pangan	Meningkatkan sistem produksi pangan	Akselerasi sistem produksi pangan	Penguatan sistem produksi pangan	Pemantapan sistem produksi pangan	Perwujudan sistem produksi pangan
		Menjaga stabilitas ketersedian pangan lokal	Mendorong sistem stabilitas ketersedian pangan lokal	Aselerasi peningkatan sistem stabilitas ketersedian pangan lokal	Pemantapan sistem stabilitas ketersedian pangan lokal	Perwujudan sistem stabilitas ketersedian pangan lokal
	S-1.1.6: Meningkatnya kesejahteraan sosial	Menciptakan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru, ekonomi kreatif, usaha rintisan,	Mendorong sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru, ekonomi kreatif, usaha rintisan,	Akselerasi Peningkatan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru, ekonomi kreatif,	Pemantapan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru, ekonomi kreatif, usaha rintisan,	Perwujudan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru, ekonomi kreatif, usaha rintisan,

Misi dan Tujuan	Sasaran	Strategi				
		Tahap I (2026)	**Tahap II (2027)**	**Tahap III (2028)**	**Tahap IV 2029**	**Tahap V 2030**
Visi: Bersatu Untuk OKU Selatan Maju, Adil, Aman Nyaman dan Sejahtera						
		termasuk tata kelola pariwisata dengan membangun komunitas sadar wisata yang di kelola secara bersama bumdes	termasuk tata kelola pariwisata dengan membangun komunitas sadar wisata yang di kelola secara bersama bumdes	usaha rintisan, termasuk tata kelola pariwisata dengan membangun komunitas sadar wisata yang di kelola secara bersama bumdes	termasuk tata kelola pariwisata dengan membangun komunitas sadar wisata yang di kelola secara bersama bumdes	termasuk tata kelola pariwisata dengan membangun komunitas sadar wisata yang di kelola secara bersama bumdes
		Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Program Perlindungan Sosial	Akserelasi Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Program Perlindungan Sosial	Penguatan Efektivitas dan Efisiensi Program Perlindungan Sosial	Pemantapan Efektivitas dan Efisiensi Program Perlindungan Sosial	Perwujudan Efektivitas dan Efisiensi Program Perlindungan Sosial
		Hilirisasi sistem produk-produk hasil pertanian dan perkebunan untuk mendapatkan nilai tambah bagi masayarakat	Akselerasi sistem Hilirisasi produk-produk hasil pertanian dan perkebunan untuk mendapatkan nilai tambah bagi masayarakat	Peningkatan sistem Hilirisasi produk-produk hasil pertanian dan perkebunan untuk mendapatkan nilai tambah bagi masayarakat	Penguatan sistem Hilirisasi produk-produk hasil pertanian dan perkebunan untuk mendapatkan nilai tambah bagi masayarakat	Pemantapan sistem Hilirisasi produk-produk hasil pertanian dan perkebunan untuk mendapatkan nilai tambah bagi masayarakat
T-1.2: Meningkatkan kesejahteraan petani	S-1.2.1: Meningkatnya produktivitas hasil pertanian dan perkebunan	Mengamankan kepastian ketersedian pupuk dan saprodi bagi petani	Akselerasi kepastian ketersedian pupuk dan saprodi bagi petani	Pemerataan kepastian ketersedian pupuk dan saprodi bagi petani	Penguatan kepastian ketersedian pupuk dan saprodi bagi petani	Pemantapan ketersedian pupuk dan saprodi bagi petani
Misi 2: Meningkatkan kualitas dan keterjangkauan pelayanan kesehatan dan pendidikan dalam mewujudkan SDM yang sehat, berpendidikan, profesional, serta menjunjung tinggi nilai keimanan, ketaqwaan, kejujuran, dan integritas.						
T-2.1: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	S-2.1.1: Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Memaksimalkan program sekolah gratis untuk pendidikan SD, SMP, meningkatkan	Akselerasi Peningkatan program sekolah gratis untuk pendidikan SD,	Pemerataan Peningkatan program sekolah gratis untuk pendidikan SD,	Penguatan Peningkatan program sekolah gratis untuk pendidikan SD,	Perwujudan program sekolah gratis untuk pendidikan SD, SMP, meningkatkan

Misi dan Tujuan	Sasaran	Strategi				
		Tahap I (2026)	**Tahap II (2027)**	**Tahap III (2028)**	**Tahap IV 2029**	**Tahap V 2030**
Visi: Bersatu Untuk OKU Selatan Maju, Adil, Aman Nyaman dan Sejahtera						
	yang inklusif dan adaptif	mutu layanan Pendidikan, dan fasilitas sekolah serta akreditasi kelembagaan dan kopetensi guru	SMP, meningkatkan mutu layanan Pendidikan, dan fasilitas sekolah serta akreditasi kelembagaan dan kopetensi guru	SMP, meningkatkan mutu layanan Pendidikan, dan fasilitas sekolah serta akreditasi kelembagaan dan kopetensi guru	SMP, meningkatkan mutu layanan Pendidikan, dan fasilitas sekolah serta akreditasi kelembagaan dan kopetensi guru	mutu layanan Pendidikan, dan fasilitas sekolah serta akreditasi kelembagaan dan kopetensi guru
	S-2.1.2: Meningkatnya Kualitas Kesehatan masyarakat dengan pelayanan yang tangguh dan responsive	Membangun dan perluas jaringan fasilitas kesehatan dengan peningkatan dan pembangunan Puskesmas Rawat inap	Peningkatan dan perluas jaringan fasilitas kesehatan dengan peningkatan dan pembangunan Puskesmas Rawat inap	Akselerasi Peningkatan dan perluas jaringan fasilitas kesehatan dengan peningkatan dan pembangunan Puskesmas Rawat inap	Penguatan dan perluas jaringan fasilitas kesehatan dengan peningkatan dan pembangunan Puskesmas Rawat inap	Pemantapan perluas jaringan fasilitas kesehatan dengan peningkatan dan pembangunan Puskesmas Rawat inap
		Meningkatkan sumber daya manusia dan mutu pelayanan Kesehatan	Akselerasi sumber daya manusia dan mutu pelayanan Kesehatan	Penguatan sumber daya manusia dan mutu pelayanan Kesehatan	Pemantapan sumber daya manusia dan mutu pelayanan Kesehatan	Perwujudan sumber daya manusia dan mutu pelayanan Kesehatan
	S-2.1.3: Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Pengendalian Penduduk	Mendorong peran serta Perempuan dalam penyusunan kebijakan daerah	Menjaga peran serta Perempuan dalam penyusunan kebijakan daerah	Penguatan peran serta Perempuan dalam penyusunan kebijakan daerah	Pemerataan peran serta Perempuan dalam penyusunan kebijakan daerah	Pemantapan peran serta Perempuan dalam penyusunan kebijakan daerah
Misi 3: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) bebas KKN melalui transparansi dan akuntabilitas berbasis teknologi, didukung aparatur yang berintegritas, profesional, responsif, serta meningkatkan keamanan dari segala tindak kejahatan dan perampasan hak						
T-3.1: Meningkatkan tata kelola	S-3.1.1: Meningkatnya profesionalme	Melakukan sistem penguatan aparatur pemerintah dengan	Peningkatan sistem penguatan aparatur pemerintah dengan	Akselerasi sistem penguatan aparatur pemerintah dengan	Pemantapan sistem penguatan aparatur pemerintah dengan	Perwujudan sistem aparatur pemerintah

Misi dan Tujuan	Sasaran	Strategi				
		Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV 2029	Tahap V 2030
Visi: Bersatu Untuk OKU Selatan Maju, Adil, Aman Nyaman dan Sejahtera						
pemerintahan yang baik (good governance)	dan integeritas aparatur pemerintah	program pelatihan etika dan anti-KKN	program pelatihan etika dan anti-KKN	program pelatihan etika dan anti-KKN	program pelatihan etika dan anti-KKN	dengan etika dan anti-KKN
	S-3.1.2: Meningkatnya Transparasi dan Akuntablitas	Penyusunan sistem kebijakan dan peraturan yang mendorong transparansi, akuntabilitas, dan integritas di semua lini pemerintahan	Peningkatan sistem kebijakan dan peraturan yang mendorong transparansi, akuntabilitas, dan integritas di semua lini pemerintahan	Akselerasi sistem kebijakan dan peraturan yang mendorong transparansi, akuntabilitas, dan integritas di semua lini pemerintahan	Penguatan sistem kebijakan dan peraturan yang mendorong transparansi, akuntabilitas, dan integritas di semua lini pemerintahan	Pemantapan sistem kebijakan dan peraturan yang mendorong transparansi, akuntabilitas, dan integritas di semua lini pemerintahan
	S-3.1.3: Meningkatnya kemandirian Fiskal daerah	Optimalisasi dan peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak dan retribusi daerah	Peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak dan retribusi daerah	Akselerasi Peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak dan retribusi daerah	Penguatan pendapatan daerah dari sektor pajak dan retribusi daerah	Pemantapan pendapatan daerah dari sektor pajak dan retribusi daerah
	S-3.1.4: Terciptanya pelayanan publik yang prima	Optimalisasi sistem pelayanan terhadap Masyarakat	Peningkatan sistem pelayanan terhadap Masyarakat	Peningkatan dan pemerataan sistem pelayanan terhadap Masyarakat	Penguatan Akses sistem pelayanan terhadap Masyarakat	Pemantapan sistem pelayanan terhadap Masyarakat
T-3.2: Mewujudkan lingkungan masyarakat yang aman dan terlindungi	S-3.2.1: Terciptanya suasana aman dan tentram bagi seluruh masyarakat	Peningkatan rasa aman terhadap kejahatan dan perampasan hak	Akselerasi Peningkatan rasa aman terhadap kejahatan dan perampasan hak	Optimalisasi Peningkatan rasa aman terhadap kejahatan dan perampasan hak	Penguatan Peningkatan rasa aman terhadap kejahatan dan perampasan hak	Pemantapan Peningkatan rasa aman terhadap kejahatan dan perampasan hak
Misi 4: Membangun dan meningkatkan kualitas serta kuantitas infrastruktur dasar untuk mempercepat pembangunan Wilayah Desa, Kecamatan, dan perbatasan, memperlancar arus barang dan mobilitas penduduk, serta mewujudkan daya saing daerah yang merata, berbasis potensi, dan seimbang						
T-4.1: Meningkatkan Infrastruktur	S-4.1.1: Meningkatnya infrastruktur	Melanjutkan dan memperluas pembangunan jalan	Peningkatan dan perluas pembangunan jalan	Optimalisasi pembangunan jalan yang terkoneksi,	Penguatan pembangunan jalan yang terkoneksi,	Pemantapan dan Pembangunan jalan yang terkoneksi,

Misi dan Tujuan	Sasaran	Strategi				
		Tahap I (2026)	**Tahap II (2027)**	**Tahap III (2028)**	**Tahap IV 2029**	**Tahap V 2030**
Visi: Bersatu Untuk OKU Selatan Maju, Adil, Aman Nyaman dan Sejahtera						
Daerah yang Berkualitas, Berdaya Saing, dan Berwawasan Lingkungan untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan	dasar Masyarakat	yang terkoneksi, jaringan irigasi, air bersih, sanitasi, listrik, kesehatan, dan pendidikan	yang terkoneksi, jaringan irigasi, air bersih, sanitasi, listrik, kesehatan, dan pendidikan	jaringan irigasi, air bersih, sanitasi, listrik, kesehatan, dan pendidikan	jaringan irigasi, air bersih, sanitasi, listrik, kesehatan, dan pendidikan	jaringan irigasi, air bersih, sanitasi, listrik, kesehatan, dan pendidikan
	S-4.1.2: Meningkatnya Pengelolaan Pertanahan	Peningkatan sistem inventarisasi pertanahan dan pelayanan sengketa	Akselerasi Peningkatan sistem inventarisasi pertanahan dan pelayanan sengketa	Penguatan sistem inventarisasi pertanahan dan pelayanan sengketa	Pemantapan sistem inventarisasi pertanahan dan pelayanan sengketa	Perwujudan sistem inventarisasi pertanahan dan pelayanan sengketa
	S-4.1.3: Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Peningkatan respon cepat penanganan bencana dan lakukan pemetaan mitigasi bencana	Akselerasi Peningkatan respon cepat penanganan bencana dan lakukan pemetaan mitigasi bencana	Penguatan respon cepat penanganan bencana dan lakukan pemetaan mitigasi bencana	Pemantapan respon cepat penanganan bencana dan lakukan pemetaan mitigasi bencana	Perwujudan respon cepat penanganan bencana dan lakukan pemetaan mitigasi bencana
	S-4.1.4: Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Akselerasi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Penguatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Pemantapan sistem Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Perwujudan sistem Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
		Peningkatan sistem partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan hidup	Akselerasi Peningkatan sistem partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan hidup	Penguatan sistem partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan hidup	Pemantapan sistem partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan hidup	Perwujudan sistem partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan hidup

Misi dan Tujuan	Sasaran	Strategi				
		Tahap I (2026)	**Tahap II (2027)**	**Tahap III (2028)**	**Tahap IV 2029**	**Tahap V 2030**
Visi: Bersatu Untuk OKU Selatan Maju, Adil, Aman Nyaman dan Sejahtera						
	S-4.1.5: Meningkatnya Pembangunan Desa	Peningkatan sumber daya dan keterampilan Masyarakat desa	Akselerasi Peningkatan sumber daya dan keterampilan Masyarakat desa	Penguatan sistem sumber daya dan keterampilan Masyarakat desa	Pemantapan sumber daya dan keterampilan Masyarakat desa	Perwujudan sumber daya dan keterampilan Masyarakat desa
		Peningkatan kesadaran Masyarakat desa terhadap lingkungan, Kesehatan dan pendidikan	Akselerasi Peningkatan kesadaran Masyarakat desa terhadap lingkungan, Kesehatan dan pendidikan	Penguatan kesadaran Masyarakat desa terhadap lingkungan, Kesehatan dan pendidikan	Pemantapan kesadaran Masyarakat desa terhadap lingkungan, Kesehatan dan pendidikan	Perwujudan kesadaran Masyarakat desa terhadap lingkungan, Kesehatan dan pendidikan
Misi 5: Meningkatkan kehidupan beragama, seni, dan budaya untuk membentuk karakter sosial yang agamis, berbudaya, dan berprestasi, didukung kesehatan fisik melalui olahraga, serta mengembangkan pariwisata berbasis alam dan budaya						
T-5.1: Mewujudkan masyarakat yang berkarakter agamis dan berbudaya	S-5.1.1: Terwujudnya kerukunan umat beragama	Penguatan sistem nilai-nilai keagamaan dan kebudayaan melalui program fasilitasi dan kerjasama pelbagai kegiatan keagamaan dan kebudayaan	Akselerasi sistem Penguatan nilai-nilai keagamaan dan kebudayaan melalui program fasilitasi dan kerjasama pelbagai kegiatan keagamaan dan kebudayaan	Optimalisasi sistem nilai-nilai keagamaan dan kebudayaan melalui program fasilitasi dan kerjasama pelbagai kegiatan keagamaan dan kebudayaan	Pemantapan sistem nilai-nilai keagamaan dan kebudayaan melalui program fasilitasi dan kerjasama pelbagai kegiatan keagamaan dan kebudayaan	Perwujudan sistem nilai-nilai keagamaan dan kebudayaan melalui program fasilitasi dan kerjasama pelbagai kegiatan keagamaan dan kebudayaan
T-5.2: Meningkatkan produktivitas sektor pariwisata, seni dan budaya;	S-5.2.1: Meningkatnya pengembangan kepemudaan dan pariwisata	Meningkatkan sistem pemberdayaan pemuda dalam pembangunan masyarakat	Akselerasi sistem pemberdayaan pemuda dalam pembangunan masyarakat	Penguatan sistem pemberdayaan pemuda dalam pembangunan masyarakat	Pemantapan sistem pemberdayaan pemuda dalam pembangunan masyarakat	Perwujudan sistem pemberdayaan pemuda dalam pembangunan masyarakat
		Meningkatkan prestasi dibidang olahraga	Akselerasi peningkatan prestasi dibidang olahraga	Optimalisasi prestasi dibidang olahraga	Penguatan prestasi dibidang olahraga	Pemantapan prestasi dibidang olahraga

Misi dan Tujuan	Sasaran	Strategi				
		Tahap I (2026)	**Tahap II (2027)**	**Tahap III (2028)**	**Tahap IV 2029**	**Tahap V 2030**
Visi: Bersatu Untuk OKU Selatan Maju, Adil, Aman Nyaman dan Sejahtera						
		Membangun akses infrastruktur dan layanan pariwisata yang terjangkau oleh masyarakat	Akselerasi Peningkatan akses infrastruktur dan layanan pariwisata yang terjangkau oleh masyarakat	Peningkatan akses infrastruktur dan layanan pariwisata yang terjangkau oleh masyarakat	Penguatan akses infrastruktur dan layanan pariwisata yang terjangkau oleh masyarakat	Pemantapan akses infrastruktur dan layanan pariwisata yang terjangkau oleh masyarakat
		Mengembangkan promosi dan event pariwisata	Akselerasi Peningkatan sistem promosi dan event pariwisata	Peningkatan dan Optimalisasi sistem promosi dan event pariwisata	Penguatan Upaya sistem promosi dan event pariwisata	Pemantapan sistem promosi dan event pariwisata

3.3.2.Arah Kebijakan

Perumusan arah kebijakan pembangunan berdasarkan strategi yang ditetapkan agar fokus untuk mencapai apa yang diinginkan pada akhir tahun perencanaan. Berdasarkan hubungan antara tujuan, sasaran dan strategi yang telah diuraikan di atas, maka ditetapkan arah kebijakan pembangunan jangka menengah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2025-2029 yang disajikan pada Tabel III.3 berikut :

Tabel III.3
Arah Kebijakan
Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan

NO	MISI	ARAH KEBIJAKAN	KET.
1	Membangun perekonomian yang tangguh melalui peningkatan sektor pertanian, perkebunan, penguatan industri dan UMKM kreatif dan inovatif untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan.	• Mendorong pengembangan energi terbarukan dan meningkatkan kesadaran masyarakat. • Mengembangkan ekosistem digital untuk UMKM dan meningkatkan keamanan siber, serta inovasi digital untuk layanan publik. • Meningkatkan kapasitas adaptasi sektor pertanian dan perikanan. • Penguatan kebijakan ekonomi hijau, serta meningkatkan investasi swasta. • Pemantapan ekonomi hijau yang berkelanjutan dan berdaya saing, serta meningkatkan kontribusi sektor ekonomi hijau terhadap pertumbuhan ekonomi. • Mengembangkan program perlindungan sosial yang responsif terhadap bencana dan krisis, serta meningkatkan efektivitas penyaluran bantuan. • Memperkuat sistem jaminan sosial dan memperluas cakupan program, dengan sistem identifikasi penerima bantuan yang terintegrasi • Pemantapan sistem perlindungan Sosial Adaptif: • Pemantapan sistem perlindungan sosial nasional yang inklusif dan berkelanjutan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.	
2	Meningkatkan kualitas dan keterjangkauan pelayanan kesehatan dan pendidikan dalam mewujudkan SDM yang sehat, berpendidikan, profesional, serta menjunjung tinggi nilai keimanan, ketaqwaan, kejujuran, dan integritas.	• Memperluas akses layanan kesehatan dasar, terutama di daerah terpencil, dengan integrasi data kesehatan untuk efisiensi. • Memberikan layanan jaminan Kesehatan Masyarakat. • Meningkatkan jaminan ketenagakerjaan. • Meningkatkan akses pendidikan anak usia dini dan memperkuat kurikulum berbasis kompetensi, didukung integrasi data Pendidikan.	

NO	MISI	ARAH KEBIJAKAN	KET.
		• Memfokuskan pada peningkatan kualitas layanan kesehatan ibu dan anak, serta pengendalian penyakit menular dan tidak menular. • Meningkatkan akses layanan kesehatan dan mengembangkan sistem informasi kesehatan yang terintegrasi. • Meningkatkan kualitas pendidikan di daerah tertinggal dan mengembangkan program beasiswa, serta meningkatkan partisipasi masyarakat. • Mengembangkan platform digital untuk perdagangan dan investasi, serta meningkatkan kapasitas SDM di bidang teknologi digital. • Penguatan sistem kesehatan nasional, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan Kesehatan. • Pemantapan sistem kesehatan nasional yang tangguh dan adaptif, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui kesehatan yang optimal. • Pemantapan pendidikan Berkualitas Merata: sistem pendidikan nasional yang berdaya saing global, serta meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan yang unggul • Pemantapan lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui lingkungan yang sehat • Peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam lingkup pemerintahan	
3	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) bebas KKN melalui transparansi dan akuntabilitas berbasis teknologi, didukung aparatur yang berintegritas, profesional, responsif, serta meningkatkan keamanan dari segala tindak kejahatan dan perampasan hak	• Mengembangkan infrastruktur digital dan meningkatkan literasi digital, serta membangun layanan publik digital. • Memperkuat pengawasan dan transparansi, serta menyederhanakan regulasi untuk mendukung investasi, dengan layanan digital • Meningkatkan kualitas layanan publik berbasis digital dan memperkuat sistem pencegahan korupsi • Mengembangkan program perlindungan sosial berbasis pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan akses terhadap layanan keuangan inklusif. • Penguatan sistem regulasi dan tata kelola pemerintahan, serta meningkatkan efektivitas penegakan hukum • Pemantapan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik	

NO	MISI	ARAH KEBIJAKAN	KET.
4	Membangun dan meningkatkan kualitas serta kuantitas infrastruktur dasar untuk mempercepat pembangunan Wilayah Desa, Kecamatan, dan perbatasan, memperlancar arus barang dan mobilitas penduduk, serta mewujudkan daya saing daerah yang merata, berbasis potensi, dan seimbang	• Meningkatkan infrastruktur dasar untuk konektivitas antar wilayah kecamatan dan desa serta dengan wilayah berbatasan antar daerah • Mengendalikan pencemaran lingkungan dan mengelola limbah secara berkelanjutan, serta merehabilitasi lahan kritis. • Meningkatkan kapasitas mitigasi dan adaptasi bencana, serta mengembangkan sistem peringatan dini yang efektif • Meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana dan mengembangkan sistem asuransi bencana. • Mengembangkan teknologi ramah lingkungan dan meningkatkan investasi dalam sektor energi terbarukan. • Mengembangkan kawasan konservasi dan meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan, serta pengelolaan risiko lingkungan • Penguatan kebijakan lingkungan hidup, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. • Penguatan sistem penanggulangan bencana dan perubahan iklim, serta meningkatkan kapasitas penelitian. • Pemantapan resiliensi nasional terhadap bencana dan perubahan iklim, serta meningkatkan keamanan dan kesejahteraan masyarakat.	
5	Meningkatkan kehidupan beragama, seni, dan budaya untuk membentuk karakter sosial yang agamis, berbudaya, dan berprestasi, didukung kesehatan fisik melalui olahraga, serta mengembangkan pariwisata berbasis alam dan budaya	• Penanaman nilai-nilai spiritual dan moral melalui pendidikan dan pembinaan keagamaan yang inklusif, serta pelestarian, pengembangan, dan apresiasi seni dan budaya. • Mendorong peningkatan kualitas pendidikan dan penyediaan dukungan yang memadai untuk mendorong lahirnya masyarakat yang berprestasi dan mampu bersaing • Membangun partisipasi masyarakat dalam aktivitas olahraga dan penyediaan akses fasilitas olahraga yang memadai • Optimalisasi potensi destinasi wisata alam dan budaya sebagai penggerak ekonomi lokal, dengan tetap memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan dan pelestarian budaya melalui peningkatan infrastruktur, promosi efektif, dan pemberdayaan masyarakat lokal dalam pengelolaan pariwisata untuk menciptakan pengalaman yang otentik dan bertanggung jawab.	

NO	MISI	ARAH KEBIJAKAN	KET.
		• Menciptakan ekosistem yang mendukung pembentukan karakter sosial yang agamis, berbudaya, berprestasi, dan sehat secara fisik, memastikan semua komponen bekerja selaras demi kemajuan bersama.	

Berdasarkan hasil perumusan strategi dan arah kebijakan yang telah dirumuskan sebelumnya, Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan atau tema tahunan pada periode tahun 2025-2029, antara lain sebagai berikut :

Tabel III.4
Tema Penahapan Pembangunan

Tahun I (2026)	Tahun II (2027)	Tahun III (2028)	Tahun IV (2029)	Tahun V (2030)
Penguatan Fondasi Ekonomi dan SDM Berkualitas	Pengembangan Infrastruktur dan Konektivitas Wilayah	Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Potensi Lokal	Peningkatan Daya Saing Daerah dan Investasi	Bersatu Untuk OKU Selatan Maju, Adil, Aman dan Sejahtera

3.3.3. Program-Program Prioritas Daerah Dalam Pencapaian Tujuan dan Sasaran

Program pembangunan daerah dirumuskan dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program prioritas. Program Pembangunan daerah menggambarkan kepaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan sebagai jalan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan. Meskipun penekanan program prioritas pada setiap tahapan berbeda, namun memiliki sinkronisasi dan konsistensi dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan RPJMD secara khusus dan sasaran perencanaan jangka panjang pada umumnya. Oleh karena itu, dalam menyusun arah kebijakan perlu adanya sinergi berbagai dokumen perencanaan guna menyelaraskan berbagai program pembangunan antar periode maupun antar tingkatan administrasi pemerintahan. Adapun program prioritas yang dilaksanakan adalah :

1. Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal
2. Penurunan angka kemiskinan
3. Peningkatan kualitas SDM yang sehat, cerdas, dan berkarakter

4. Tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif
5. Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan
6. Pengembangan pariwisata, seni dan budaya

Perumusan program pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan. Pencapaian sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan startegi dan arah kebijakan jangka menengah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan melalui rumusan program prioritas sebagai berikut.

Tabel III. 5
Keterkaitan Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Prioritas
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
Misi 1: "Membangun perekonomian yang tangguh melalui peningkatan sektor pertanian, perkebunan, penguatan industri dan UMKM kreatif dan inovatif untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan"				
1. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan pengentasan kemiskinan;	1. Meningkatnya industri dan perdagangan	1. Meningkatnya Pertumbuhan ekonomi	1. Pertumbuhan ekonomi	Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal
		2. Meningkatnya PDRB per Kapita (ADHB) (Rp Juta)	2. PDRB per Kapita (ADHB) (Rp Juta)	
		3. Meningkatnya PDRB per Kapita (ADHK 2010) (Rp Juta)	3. PDRB per Kapita (ADHK 2010) (Rp Juta)	
		4. Meningkatnya Kontribusi Industri Pengolahan Terhadap PDRB	4. Kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB	
		5. Meningkatnya Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/Terhadap PDRB	5. Kontribusi perdagangan besar dan eceran reparasi mobil dan sepeda motor terhadap PDRB	
	2. Meningkatnya UMKM dan koperasi	6. Meningkatnya Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMN Terhadap PDRB	6. Produktivitas UMKM, koperasi, BUMN terhadap PDRB	
			7. Persentase koperasi aktif	
		7. Meningkatnya Kenaikan/penurunan Nilai	8. Kenaikan/penurunan nilai realisasi	
	3. Meningkatnya investasi	8. Realisasi PMDN/PMA(milyar rupiah)	9. PMDN/PMA (milyar rupiah)	
	4. Meningkatnya lapangan kerja yang berkualitas	9. Meningkatnya Tingkat partisipasi angkatan kerja	10. Tingkat partisripasi angkatan kerja	
		10. Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka	11. Tingkat pengangguran terbuka (TPT)	
	5. Meningkatnya ketahanan pangan	11. Meningkatnya Indeks Ketahanan Pangan (IKP) (indeks)	12. Indeks ketahanan pangan (IKP)	Penurunan angka kemiskinan
	6. Meningkatnya kesejahteraan sosial	12. Meningkatnya PMKS yang tertangani	13. Persentase PMKS yang tertangani	
		13. Menurunnya Persentase penduduk miskin	14. Persentase penduduk miskin	
		14. Menurunnya Indeks gini rasio	15. Indeks gini rasio	

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
2. Meningkatkan kesejahteraan petani;	7. Meningkatnya produktivitas hasil pertanian dan perkebunan	15. Meningkatnya Nilai tukar petani (point)	16. Nilai tukar petani (NTP)	
		16. Meningkatnya Kontriubusi Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB	17. Kontriubusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap PDRB	
			18. Produksi perikanan	
Misi 2: "Meningkatkan kualitas dan keterjangkauan pelayanan kesehatan dan pendidikan dalam mewujudkan SDM yang sehat, berpendidikan, profesional, serta menjunjung tinggi nilai keimanan, ketaqwaan, kejujuran, dan integritas".				
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia;	8. Meningkatnya kualitas pendidikan yang inklusif dan adaptif	17. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia/Angka	19. Indeks pembangunan manusia (IPM)	Peningkatan kualitas SDM yang sehat, cerdas, dan berkarakter
		18. Meningkatnya Angka Rata-rata Lama Sekolah	20. Rata-rata Lama sekolah	
		19. Meningkatnya Rata-rata Harapan Lama Sekolah	21. Rata-rata harapan lama sekolah	
		20. Meningkatnya Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (indeks)	22. Indeks pembangunan literasi masyarakat	
			23. Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk numerasi	
			24. Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca	
	9. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dengan pelayanan yang tangguh dan responsive	21. Meningkatnya Usia Harapan Hidup (Tahun)	25. Usia harapan hidup	
		22. Meningkatnya Indeks Keluarga Sehat (indeks)	26. Indeks keluarga sehat	
			27. Kabupaten/Kota Sehat	
			28. Cakupan peserta KB aktif	
		23. Menurunnya Indeks Ketimpangan Gender	29. Indeks ketimpangan gender	

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
	10. Meningkatnya kesetaraan gender dan pengendalian penduduk	24. Meningkatnya Indeks pembangunan gender (IPG)	30. Indeks pembangunan gender (IPG)	
		25. Meningkatnya Indeks pemberdayaan gendar (IDG)	31. Indeks pemberdayaan gendar (IDG)	
		26. Meningkatnya Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (indeks)	32. Indeks pembangunan kualitas keluarga	
		27. Terkendalinya Pertambahan jumlah penduduk	33. Rasio angka kelahiran	
		28. Meningkatnya capaian Kabupaten layak anak	34. Kabupaten layak anak	
		29. Meningkatnya capaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE)	35. Anugerah Parahita Ekapraya (APE)	
Misi 3: "Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) bebas KKN melalui transparansi dan akuntabilitas berbasis teknologi, didukung aparatur yang berintegritas, profesional, responsif, serta meningkatkan keamanan dari segala tindak kejahatan dan perampasan hak".				
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance);	11. Meningkatnya profesionalme dan integeritas aparatur Pemerintah	30. Meningkatnya Indeks Sakip	36. Indeks Sakip	Tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif, serta meningkatkan rasa aman dan tentram bagi seluruh masyarakat
		31. Meningkatnya Indeks reformasi birokrasi	37. Indeks reformasi birokrasi	
		32. Meningkatnya Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	38. Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik	
		33. Meningkatnya Skor Maturitas SPIP	39. Skor maturitas SPIP	
		34. Tersedianya Rencana Kerja Tahunan DPRD	40. Tersedianya rencana kerja tahunan DPRD	
		35. Meningkatnya Indeks Berakhlak	41. Indeks Berakhlak	
		36. Meningkatnya Indeks Profesionalisme ASN	42. Indeks Profesionalisme ASN	
		37. Sistem Merit	43. Sistem Merit	
		38. Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat	44. Indeks kepuasan masyarakat	
		39. Meningkatnya Cakupan layanan telekomunikasi	45. Cakupan layanan telekomunikasi	
	12. Meningkatnya transparasi dan akuntablitas	40. Meningkatnya Opini BPK	46. Opini BPK	
		41. Meningkatnya Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	47. Indeks pengelolaan keuangan daerah	
		42. Meningkatnya Skor indeks inovasi daerah	48. Skor indeks inovasi daerah	

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
		43. Meningkatnya Persentase Penggunaan Arsip Digital	49. Persentase penggunaan arsip digital	
		44. Meningkatnya Indeks tata kelola Pengadaan	50. Indeks tata kelola pengadaan	
		45. Meningkatnya Indeks Demokrasi Indonesia	51. Indeks demokrasi indonesia	
	13. Meningkatnya kemandirian Fiskal daerah	46. Meningkatnya Persentase Derajat Otonomi Fiskal Daerah	52. Persentase derajat otonomi fiskal daerah	
	14. Terciptanya pelayanan publik yang prima	47. Meningkatnya Indeks Pelayanan Publik	53. Indeks pelayanan publik (point)	
5. Mewujudkan lingkungan masyarakat yang aman dan terlindungi;	15. Terciptanya suasana aman dan tentram bagi seluruh masyarakat	48. Meningkatnya Proporsi Penduduk yang marasa aman berjalan sendirian diarea tempat tinggalnya	54. Proporsi penduduk yang marasa aman berjalan sendirian diarea tempat tinggalnya	
		49. Menurunnya Angka Kriminalitas	55. Angka kriminalitas (%)	
		50. Meningkatnya Persentase Penegakan Perda	56. Persentase penegakan Perda	
		51. Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang teratasi	57. Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang teratasi	
		52. Meningkatnya Pemasangan Rambu rambu	58. Pemasangan rambu rambu	
Misi 4: "Membangun dan meningkatkan kualitas serta kuantitas infrastruktur dasar untuk mempercepat pembangunan Wilayah Desa, Kecamatan, dan perbatasan, memperlancar arus barang dan mobilitas penduduk, serta mewujudkan daya saing daerah yang merata, berbasis potensi, dan seimbang".				
6. Meningkatkan Infrastruktur Daerah yang Berkualitas, Berdaya Saing, dan Berwawasan Lingkungan untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan;	16. Meningkatnya infrastruktur dasar masyarakat	53. Meningkatnya Indeks Daya Saing Daerah	59. Indeks daya saing daerah	Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan
		54. Meningkatnya Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	60. Persentase jalan dalam kondisi mantap	
		55. Meningkatnya Persentase penduduk pengguna air bersih layak	61. Persentase penduduk pengguna air bersih layak	
		56. Meningkatnya Persentase penduduk berakses air minum	62. Persentase penduduk berakses air minum	
		57. Meningkatnya Persentase pendudukl bersanitasi layak	63. Persentase penduduk bersanitasi layak	

Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
		58. Meningkatnya Persentase irigasi dalam kondisi baik	64. Persentase irigasi dalam kondisi baik	
		59. Meningkatnya Rasio rumah layak huni	65. Rasio rumah layak huni	
		60. Meningkatnya Rasio elektrikfikasi	66. Rasio elektrikfikasi	
	17. Meningkatnya pengelolaan pertanahan	61. Meningkatnya Persentase luas Lahan bersertifikat	67. Persentase luas lahan bersertifikat	
	18. Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	62. Meningkatnya Respon Cepat Darurat Bencana	68. Respon cepat darurat bencana	
		63. Meningkatnya Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	69. Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	
	19. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	64. Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	70. Indeks kualitas lingkungan hidup	
		65. Menurunnya Emisi GRK Tahunan (%)	71. Penurunan emisi GRK tahunan (%)	
	20. Meningkatnya Pembangunan Desa	66. Meningkatnya Persentase Desa Mandiri	72. Persentase Desa Mandiri	
		67. Meningkatnya Persentase Desa Maju	73. Persentase Desa Maju	
Misi 5: "Meningkatkan kehidupan beragama, seni, dan budaya untuk membentuk karakter sosial yang agamis, berbudaya, dan berprestasi, didukung kesehatan fisik melalui olahraga, serta mengembangkan pariwisata berbasis alam dan budaya".				
7. Mewujudkan masyarakat yang berkarakter agamis dan berbudaya;	21. Terwujudnya kerukunan umat beragama	68. Meningkatnya Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	74. Indeks kerukunan umat beragama (IKUB)	Pengembangan pariwisata, seni dan budaya

Tabel III.6
Keterkaitan Sasaran dan Program Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Program Prioritas	Program Perangkat Daerah
Misi 1: "Membangun perekonomian yang tangguh melalui peningkatan sektor pertanian, perkebunan, penguatan industri dan UMKM kreatif dan inovatif untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan"			
1. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan pengentasan kemiskinan;	1.1 Meningkatnya industri dan perdagangan	1. Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal 2. Penurunan angka kemiskinan	1. Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian 2. Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian 3. Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi 4. Program penilaian kesehatan ksp/usp koperasi 5. Program pendidikan dan latihan perkoperasian 6. Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi 7. Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM) 8. Program pengembangan umkm 9. Program penguatan badan hukum koperasi 10. Program pengembangan iklim penanaman modal 11. Program promosi penanaman modal 12. Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata 13. Program pemasaran pariwisata 14. Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual 15. Program pengembangan sumber
	1.2 Meningkatnya UMKM dan koperasi		
	1.3 Meningkatnya investasi		
	1.4 Meningkatnya lapangan kerja yang berkualitas		
	1.5 Meningkatnya ketahanan pangan		
	1.6 Meningkatnya kesejahteraan sosial		
2. Meningkatkan kesejahteraan petani;	2.1 Meningkatnya produktivitas hasil pertanian dan perkebunan		

Tujuan	Sasaran	Program Prioritas	Program Perangkat Daerah
			daya pariwisata dan ekonomi kreatif
Misi 2: "Meningkatkan kualitas dan keterjangkauan pelayanan kesehatan dan pendidikan dalam mewujudkan SDM yang sehat, berpendidikan, profesional, serta menjunjung tinggi nilai keimanan, ketaqwaan, kejujuran, dan integritas".			
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia;	3.1 Meningkatnya kualitas pendidikan yang inklusif dan adaptif	3. Peningkatan kualitas SDM yang sehat, cerdas, dan berkarakter	1. Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan 2. Program perlindungan perempuan 3. Program peningkatan kualitas keluarga 4. Program pengelolaan sistem data gender dan anak 5. Program pemenuhan hak anak (pha) 6. Program perlindungan khusus anak 7. Program penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan 8. Program rehabilitasi sosial 9. Program perlindungan dan jaminan sosial 10. Program penanganan bencana 11. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat 12. Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan 13. Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman 14. Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan 15. Program pengelolaan pendidikan 16. Program pengembangan kurikulum
	3.2 Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dengan pelayanan yang tangguh dan responsive		
	3.3 Meningkatnya kesetaraan gender dan pengendalian penduduk		

Tujuan	Sasaran	Program Prioritas	Program Perangkat Daerah
			17. Program pendidik dan tenaga kependidikan 18. Program pengendalian perizinan pendidikan 19. Program pembinaan perpustakaan
Misi 3: "Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) bebas KKN melalui transparansi dan akuntabilitas berbasis teknologi, didukung aparatur yang berintegritas, profesional, responsif, serta meningkatkan keamanan dari segala tindak kejahatan dan perampasan hak".			
4 Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang *baik (good governance);*	4.1 Meningkatnya profesionalme dan integeritas aparatur Pemerintah	4. Tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif	1. Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik 2. Program pengelolaan aplikasi informatika 3. Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah 4. Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah 5. Program pengelolaan keuangan daerah 6. Program pengelolaan barang milik daerah 7. Program pengelolaan pendapatan daerah 8. Program kepegawaian daerah 9. Program pengembangan sumber daya manusia 10. Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi 11. Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public 12. Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum
	4.2 Meningkatnya transparasi dan akuntablitas		
	4.3 Meningkatnya kemandirian Fiskal daerah		
	4.4 Terciptanya pelayanan publik yang prima		
5 Mewujudkan lingkungan masyarakat yang aman dan terlindungi;	5.1 Terciptanya suasana aman dan tentram bagi seluruh masyarakat		
Misi 4: "Membangun dan meningkatkan kualitas serta kuantitas infrastruktur dasar untuk mempercepat pembangunan Wilayah Desa, Kecamatan, dan perbatasan, memperlancar arus barang dan mobilitas penduduk, serta mewujudkan daya saing daerah yang merata, berbasis potensi, dan seimbang".			

Tujuan	Sasaran	Program Prioritas	Program Perangkat Daerah
6 Meningkatkan infrastruktur daerah yang berkualitas dan berdaya saing;	6.1 Meningkatnya infrastruktur dasar masyarakat	5. Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan	1. Program pengelolaan sumber daya air (sda) 2. Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum 3. Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional 4. Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah 5. Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase 6. Program pengembangan permukiman 7. Program penataan bangunan gedung 8. Program penataan bangunan dan lingkungannya 9. Program penyelenggaraan jalan 10. Program pengembangan jasa konstruksi 11. Program penyelenggaraan penataan ruang 12. Program kawasan permukiman 13. Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh 14. Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) 15. Program peningkatan pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman
	6.2 Meningkatnya pengelolaan pertanahan		
	6.3 Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		
	6.4 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		
	6.5 Meningkatnya Pembangunan Desa		
Misi 5: "Meningkatkan kehidupan beragama, seni, dan budaya untuk membentuk karakter sosial yang agamis, berbudaya, dan berprestasi, didukung kesehatan fisik melalui olahraga, serta mengembangkan pariwisata berbasis alam dan budaya".			

Tujuan	Sasaran	Program Prioritas	Program Perangkat Daerah
7 Mewujudkan masyarakat yang berkarakter agamis dan berbudaya;	7.1 Terwujudnya kerukunan umat beragama	6. Pengembangan pariwisata, seni dan budaya	1. Program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan 2. Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik 3. Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan 4. Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya 5. Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata\ 6. Program pemasaran pariwisata 7. Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual 8. Program pengembangan kebudayaan 9. Program pengembangan kesenian tradisional 10. Program pembinaan sejarah 11. Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya 12. Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan 13. Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan
8 Meningkatkan produktivitas sektor pariwisata, seni dan budaya;	8.1 Meningkatnya pengembangan kepemudaan dan pariwisata		

3.4 Penyesuaian dengan RPJMN Nasional

Misi Pembangunan Nasional berfokus pada penguatan ideologi Pancasila, demokrasi, dan HAM, serta mewujudkan daya saing daerah melalui peningkatan kualitas SDM dan tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini selaras dengan upaya Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dalam Meningkatkan kualitas dan keterjangkauan pelayanan kesehatan dan pendidikan dalam mewujudkan SDM yang sehat, berpendidikan, profesional, serta menjunjung tinggi nilai keimanan, ketaqwaan, kejujuran, dan integritas serta membangun dan meningkatkan kualitas serta kuantitas infrastruktur dasar untuk mempercepat pembangunan Wilayah Desa, Kecamatan, dan perbatasan, memperlancar arus barang dan mobilitas penduduk, serta mewujudkan daya saing daerah yang merata, berbasis potensi, dan seimbang.

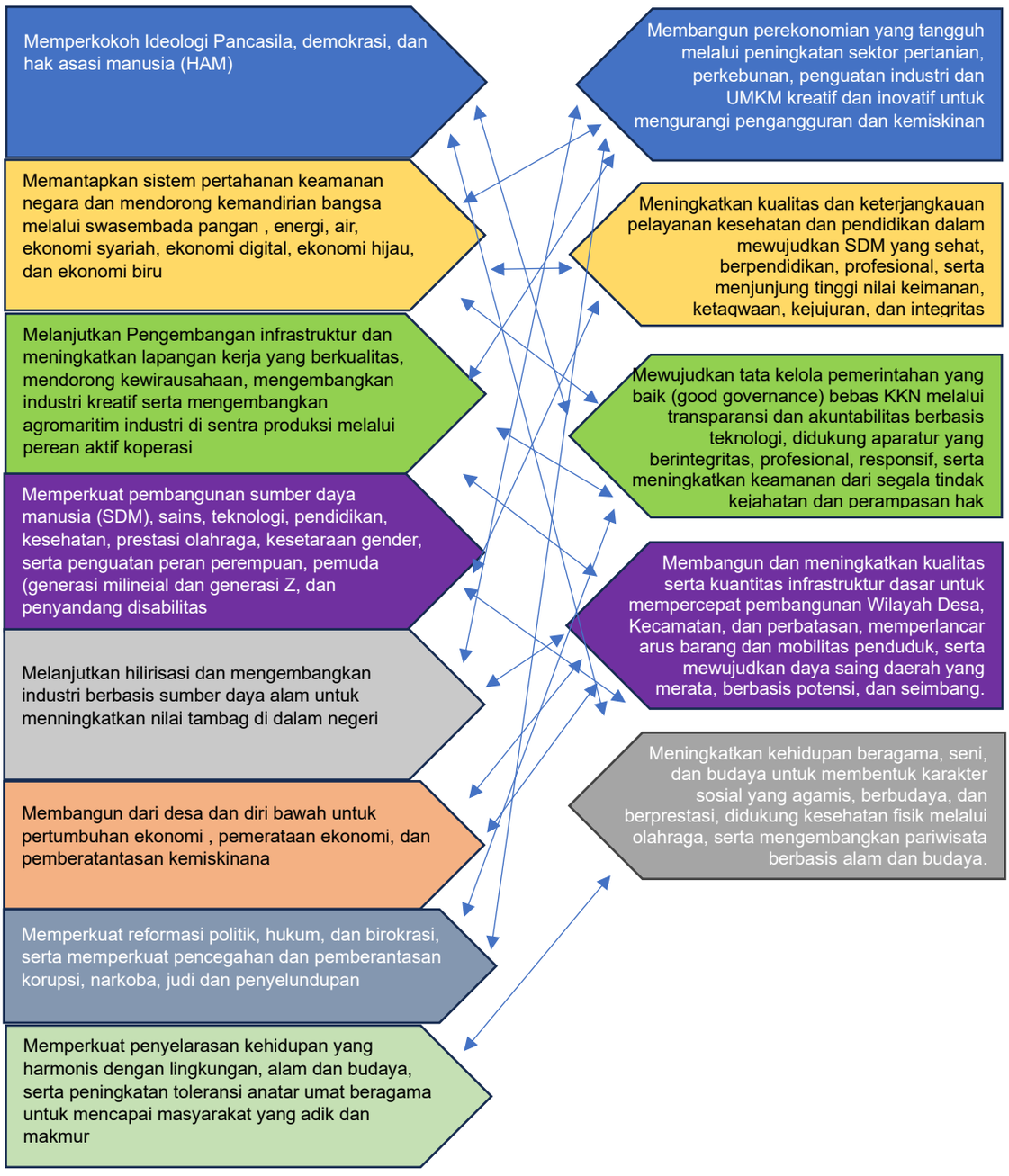

Gambar III. 1 Keterkaitan Misi Pembangunan Nasional dengan Misi Pembangunan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan

Selain itu, Misi Nasional juga mencakup pemantapan sistem pertahanan keamanan, kemandirian pangan, energi, air, ekonomi syariah, digital, hijau, dan biru, yang berhubungan dengan kelanjutan hilirisasi dan pengembangan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Pembangunan infrastruktur dan peningkatan lapangan kerja berkualitas, mendorong kewirausahaan, serta pengembangan industri kreatif dan agromaritim sejalan dengan upaya Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan untuk mewujudkan kualitas serta kuantitas infrastruktur dasar untuk mempercepat pembangunan Wilayah Desa, Kecamatan, dan perbatasan, memperlancar arus barang dan mobilitas penduduk, serta mewujudkan daya saing daerah yang merata, berbasis potensi, dan seimbang. Terakhir, Misi Nasional dalam memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan serta memperkuat penyelarasan kehidupan harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama berkesinambungan dengan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) bebas KKN melalui transparansi dan akuntabilitas berbasis teknologi, didukung aparatur yang berintegritas, profesional, responsif, serta meningkatkan keamanan dari segala tindak kejahatan dan perampasan hak di Ogan Komering Ulu Selatan.

3.5 Penyesuaian dengan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan

Misi Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang berkualitas, sehat, cerdas, inovatif, produktif, berakhlak, berkeadilan, dan berkeadaban melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan SDM yang berdaya saing. Ini berkorelasi dengan misi Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dalam meningkatkan kualitas dan keterjangkauan pelayanan kesehatan dan pendidikan dalam mewujudkan SDM yang sehat, berpendidikan, profesional, serta menjunjung tinggi nilai keimanan, ketaqwaan, kejujuran, dan integritas. Selanjutnya, Provinsi Sumatera Selatan berupaya mewujudkan ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal dan berkelanjutan, yang sejalan dengan misi Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan untuk membangun perekonomian yang tangguh melalui peningkatan sektor pertanian, perkebunan, penguatan industri dan UMKM kreatif dan inovatif untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi antar kabupaten/kota dan pelayanan dasar di tingkat provinsi mendukung misi Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan untuk Membangun dan meningkatkan kualitas serta kuantitas infrastruktur dasar

untuk mempercepat pembangunan Wilayah Desa, Kecamatan, dan perbatasan, memperlancar arus barang dan mobilitas penduduk, serta mewujudkan daya saing daerah yang merata, berbasis potensi, dan seimbang. Upaya Provinsi Sumatera Selatan dalam memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja serta perlindungan sosial untuk menurunkan angka kemiskinan juga mendukung tujuan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dalam Meningkatkan kualitas dan keterjangkauan pelayanan kesehatan dan pendidikan dalam mewujudkan SDM yang sehat, berpendidikan, profesional, serta menjunjung tinggi nilai keimanan, ketaqwaan, kejujuran, dan integritas. Terakhir, peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis digital dan mewujudkan kehidupan beragama, seni, dan budaya yang menjunjung tinggi toleransi dan kearifan lokal di tingkat provinsi selaras dengan misi Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan untuk meningkatkan kehidupan beragama, seni, dan budaya untuk membentuk karakter sosial yang agamis, berbudaya, dan berprestasi, didukung kesehatan fisik melalui olahraga, serta mengembangkan pariwisata berbasis alam dan budaya.



Gambar III. 3 Keterkaitan Misi Pembangunan Provinsi Sumsel dengan Misi Pembangunan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan

BAB IV
PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

4.1. Program Perangkat Daerah

Bagian Bab ini menyajikan rumusan Program Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun periode RPJMD dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Penyusunan program dan Kegiatan Perangkat Daerah, serta Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan berbagai analisis dan metodologi perumusan program/kegiatan, hal ini tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025. Sesuai rancang bangun perencanaan yang memisahkan antara aspek strategis dan operasional, program prioritas juga dipisahkan menjadi dua, yaitu program prioritas untuk perencanaan strategis dan program prioritas untuk perencanaan operasional. Pada dasarnya, program prioritas untuk perencanaan operasional dimaksudkan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.

Tabel IV.1
Program Perangkat Daerah
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2026-2030

Bidang Urusan/Program/Outcome	Indicator Outcome	Base Line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										OPD Penanggung Jawab
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR													
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN													
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota *OUTCOME*: Meningkatnya Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	262.054.429.170,00	100%	269.916.062.045,10	100%	278.013.543.906,45	100%	286.353.950.223,65	100%	294.944.568.730,36	Dinas Pendidikan
Program pengelolaan pendidikan *OUTCOME:* Meningkatnya partsipasi anak usia sekolah	APM SD/MI	99.82	99.84	59.748.923.580,00	99.86	61.541.391.287,40	99.88	63.387.633.026,02	99.9	65.289.262.016,80	99.9	67.247.939.877,31	
	APM SMP/MTs	80.63	81.03		81.43		81.83		82.23		82.23		
	APM SMA/SMK/MA	57.86	58.86		59.86		60.86		61.86		61.86		
	Pencapaian Pemenuhan SPM PAUD	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
	Pencapaian Pemenuhan SPM Pendidikan SD	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
	Pencapaian Pemenuhan SPM Pendidikan SMP	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
	Pencapaian Pemenuhan SPM Pendidikan Kesetaraan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
Program pengembangan kurikulum *OUTCOME:*	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan		100%	100.000.000,00	100%	100.000.000,00	100%	100.000.000,00	100%	100.000.000,00	100%	100.000.000,00	

Bidang Urusan/Program/Outcome	Indicator Outcome	Base Line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										OPD Penanggung Jawab
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Meningkatnya Kualitas Kurikulum Pendidikan	Kurikulum Muatan Lokal												
Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan *OUTCOME:* Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV		97,27	200.000.000,00	93,27	500.000.000,00	94,27	500.000.000,00	95,27	500.000.000,00	96,27	500.000.000,00	
Program pengendalian perizinan pendidikan *OUTCOME:* Meningkatnya Kualitas dan distribusi institusi Pendidikan	Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/ Diperbarui		100%	100.000.000,00	100%	100.000.000,00	100%	100.000.000,00	100%	100.000.000,00	100%	100.000.000,00	
Program pengembangan bahasa dan sastra *OUTCOME:* Terlestarikannya bahasa dan sastra daerah	Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra		100%	74.271.000,00	100%	76.499.130,00	100%	78.794.103,90	100%	81.157.927,02	100%	83.592.664,83	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN													
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota *OUTCOME:* Meningkatnya Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	80.074.268.462,00	100%	82.476.496.515,86	100%	84.950.791.411,34	100%	87.499.315.153,68	100%	90.124.294.608,29	Dinkes
Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat *OUTCOME:*	Angka Kematian Ibu (AKI)		1	106.201.312.922,00	0	109.387.352.309,66	00	112.668.972.878,95	0	116.049.042.065,32	0	119.530.513.327,28	
	Prevelensi Stunting		11,80		11,60		11,40		11,20		11		

Bidang Urusan/Program/Outcome	Indicator Outcome	Base Line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										OPD Penanggung Jawab
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat													
Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan *OUTCOME:* Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia kesehatan	Rasio tenaga medis per satuan penduduk		100%	1.626.747.115,00	100%	1.675.549.528,45	100%	1.725.816.014,30	100%	1.777.590.494,73	100%	1.830.918.209,57	
Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman *OUTCOME:* Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin di Puskesmas		100%	213.286.500,00	100%	219.685.095,00	100%	226.275.647,85	100%	233.063.917,29	100%	240.055.834,80	
Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan *OUTCOME:* Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)		100%	93.839.600,00	100%	96.654.788,00	100%	99.554.431,64	100%	102.541.064,59	100%	105.617.296,53	
	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan		100%		100%		100%		100%		100%		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota *OUTCOME:*	Presentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	20.500.000.000,00	100%	22.550.000.000,00	100%	24.750.000.000,00	100%	27.225.000.000,00	100%	29.947.000.000,00	BLUD RSUD Muaradua

Bidang Urusan/Program/Outcome	Indicator Outcome	Base Line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										OPD Penanggung Jawab
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Meningkatnya Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah													
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG													
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota *OUTCOME:* Meningkatnya Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	10.900.953.378,00	100%	11.227.981.979,34	100%	11.564.821.438,72	100%	11.911.766.081,88	100%	12.269.119.064,34	Dinas PUPR
Program pengelolaan sumber daya air (SDA)	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik		100%	9.681.397.000,00	100%	9.971.838.910,00	100%	10.270.994.077,30	100%	10.579.123.899,62	100%	10.896.497.616,61	
OUTCOME: Meningkatnya perlingdungan Masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses Masyarakat terhadap irigasi	Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir		100%		100%		100%		100%		100%		
Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Persentase penduduk berakses Air Minum		100%	1.895.890.000,00	100%	1.952.766.700,00	100%	2.011.349.701,00	100%	2.071.690.192,03	100%	2.133.840.897,79	
OUTCOME: Meningkatnya akses Masyarakat terhadap system penyediaan air minum	Persentase Rumah Tangga Dengan Sumber Air Minum Layak		90,55		91,95		93,35		94,75		96,15		
Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional *OUTCOME:*	Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST Regional		50%	200.000.000,00	70%	500.000.000,00	800%	500.000.000,00	90%	500.000.000,00	100%	500.000.000,00	

Bidang Urusan/Program/Outcome	Indicator Outcome	Base Line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										OPD Penanggung Jawab
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Menigkatnya layanan persampahan regional													
Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah *OUTCOME*: Meningkatnya akses Masyarakat terhadap system pengelolaan air limbah	Capaian Pelayanan SPALD-S Akses Dasar Air Limbah Domestik		84,58		86,58		88,58		90,58		92,58		
	Capaian Pelayanan SPALD- S Akses Aman Air Limbah Domestik		76,71		78,71		80,71		82,71		84,71		
	Capaian Pelayanan SPALD-T Akses Aman Air Limbah Domestik		8,45		12,45		16,45		20,45		24,45		
	Capaian Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik		77,7		78,74		79,78		80,82		81,86		
	Persentase Penungkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman)		90,55		91,95		93,35		94,75		96,15		
Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase *OUTCOME*: Meningkatnya kualitas system drainase perkotaan	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat		100%	598.086.000,00	100%	616.028.580,00	100%	634.509.437,40	100%	653.544.720,52	100%	673.151.062,14	
Program pengembangan permukiman *OUTCOME*: Meningkatnya kualitas infrastrukt ur permukiman	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS		100	1.000.000.000,00	100	1.000.000.000,00	100	1.000.000.000,00	100	1.000.000.000,00	100	1.000.000.000,00	

Bidang Urusan/Program/Outcome	Indicator Outcome	Base Line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										OPD Penanggung Jawab
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Kewenangan Kab/Kota												
	Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik		70%		80%		90%		100%		100%		
Program penataan bangunan gedung *OUTCOME*: Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Rasio bangunan ber- IMB persatuan bangunan		100%	8.489.963.658,81	100%	12.286.929.702,79	100%	21.226.041.622,00	100%	10.862.822.870,66	100%	11.863.804.586,99	
	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik		70%		80%		90%		100%		100%		
Program Penataan Bangunan Dan Lingkungan *OUTCOME*: Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan		70%	1.000.000.000,00	80%	1.000.000.000,00	90%	1.000.000.000,00	100%	1.000.000.000,00	100%	1.000.000.000,00	
Program penyelenggaraan jalan *OUTCOME*: Meningkatnya aksesibilitas Masyarakat yang aman dan nyaman	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik		61,07 %	139.191.024.639,19	63,41 %	151.218.766.857,44	65,75%	156.689.061.291,45	68,09 %	163.843.484.429,82	72,43%	170.222.865.515,83	
Program pengembangan jasa konstruksi *OUTCOME*: Meningkatnya kompetensi tenaga kontruksi	Rasio tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi		100%	60.000.000,00	100%	61.800.000,00	100%	63.654.000,00	100%	65.563.620,00	100%	67.530.528,60	
	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli		100%		100%		100%		100%		100%		
Program penyelenggaraan penataan ruang	Luas wilayah produktif		100%	101.250.000,00	100%	104.287.500,00	100%	107.416.125,00	100%	110.638.608,75	100%	113.957.767,01	

Bidang Urusan/Program/Outcome	Indicator Outcome	Base Line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										OPD Penanggung Jawab
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
OUTCOME: Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang													
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN													
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota *OUTCOME:* Meningkatnya Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	5.948.845.980,00	100%	6.127.311.359,40	100%	6.311.130.700,18	100%	6.500.464.621,19	100%	6.695.478.559,82	Dinas Perkimtan
Program pengembangan perumahan *OUTCOME* : Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Persentase rumah layak huni		100%	165.995.900,00	100%	170.975.777,00	100%	176.105.050,31	100%	181.388.201,82	100%	186.829.847,87	
	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota		100%		100%		100%		100%		100%		
	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		100%		100%		100%		100%		100%		
Program kawasan permukiman *OUTCOME*: Meningkatnya Kualitas kawasan permukiman	Persentase lingkungan pemukiman kumuh		100%	290.664.300,00	100%	293.384.229,00	100%	396.185.755,87	100%	499.071.328,55	100%	402.043.468,40	
	Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang Ditangani		100%		100%		100%		100%		100%		

Bidang Urusan/Program/Outcome	Indicator Outcome	Base Line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										OPD Penanggung Jawab
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh *OUTCOME* : *Meningkatnya penanganan kawasan permukiman kumuh*	Persentase berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)		100%	200.000.000,00	100%	200.000.000,00	100%	200.000.000,00	100%	200.000.000,00	100%	200.000.000,00	
Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) *OUTCOME* : Meningkatnya penyediaan penyediaan PSU permukiman	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)		100%	18.750.248.600,00	100%	12.875.263.516,00	100%	12.067.779.326,96	100%	15.331.846.086,58	100%	17.671.756.851,77	
Program peningkatan pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman *OUTCOME:* Meningkatnya pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman	Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perecanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU		100%	200.000.000,00	100%	200.000.000,00	100%	200.000.000,00	100%	200.000.000,00	100%	200.000.000,00	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT													
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota *OUTCOME*:	Presentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	4.660.300.225,00	100%	4.800.109.231,75	100%	4.944.112.508,70	100%	5.092.435.883,96	100%	5.245.208.960,48	Satpol PP

Bidang Urusan/Program/Outcome	Indicator Outcome	Base Line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										OPD Penanggung Jawab
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Meningkatnya Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah													
Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum *OUTCOME*: Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap perda dan Perkada *OUTCOME:* Meningkatnya Penanganan Gangguan ketenteraman dan ketertiban umum *OUTCOME:* Meningkatnya perlindungan terhadap Masyarakat	Persentase Penegakan Perda		100%	960.821.240,00	100%	2.011.895.877,20	100%	2.190.252.753,52	100%	2.270.960.336,12	100%	2.454.089.146,21	
	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas		100%		100%		100%		100%		100%		
	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat		100%		100%		100%		100%		100%		
	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya		50%		50%		50%		50%		50%		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota *OUTCOME*: Meningkatnya Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah		100%	2.681.651.578,00	100%	2.762.101.125,34	100%	2.844.964.159,10	100%	2.930.313.083,87	100%	3.018.222.476,39	BPBD
Program penanggulangan bencana *OUTCOME*: Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Respon Cepat Darurat Bencana		100%	1.006.739.700,00	100%	1.009.941.891,00	100%	1.313.240.147,73	100%	1.216.637.352,16	100%	1.320.136.472,73	
	Komunikasi Informasi dan Edukasi Rawan Bencana		100%		100%		100%		100%		100%		
	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana		100%		100%		100%		100%		100%		

Bidang Urusan/Program/Outcome	Indicator Outcome	Base Line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										OPD Penanggung Jawab
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
OUTCOME: Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat *OUTCOME:* Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana *OUTCOME:* Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana *OUTCOME:* Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat *OUTCOME:* Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca Bencana	Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana												
	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana		100%		100%		100%		100%		100%		
	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana		100%		100%		100%		100%		100%		
	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana		100%		100%		100%		100%		100%		
	Persentase Penanganan Pasca Bencana dan Edukasi Rawan Bencana		100%		100%		100%		100%		100%		
	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana		100%		100%		100%		100%		100%		
	Persentase Penanganan Pasca Bencana		100%		100%		100%		100%		100%		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota *OUTCOME*: Meningkatnya Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	2.839.854.059,00	100%	2.925.049.680,77	100%	3.012.801.171,19	100%	3.103.185.206,33	100%	3.196.280.762,52	Dinas Damkarmat
Program pencegahan, penanggulangan,	Tingkat waktu tanggap (response		100%	1.387.950.950,00	100%	2.429.589.478,50	100%	2.472.477.162,86	100%	2.516.651.477,74	100%	2.562.151.022,07	

Bidang Urusan/Program/Outcome	Indicator Outcome	Base Line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										OPD Penanggung Jawab
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran *OUTCOME*: Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran *OUTCOME*: Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban	time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)												
	Cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan kebakaran		100%		100%		100%		100%		100%		
	Cakupan layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran		100%		100%		100%		100%		100%		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL													
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota *OUTCOME*: Meningkatnya Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	4.468.582.116,00	100%	4.602.639.579,48	100%	4.740.718.766,86	100%	4.882.940.329,87	100%	5.029.428.539,77	Dinas Sosial
Program pemberdayaan social *OUTCOME*: Meningkatnya pemberdayaan sosial	Persentase PMKS yang tertangani		100%	75.761.000,00	100%	78.033.830,00	100%	80.374.844,90	100%	82.786.090,25	100%	85.269.672,95	
	Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial		100%		100%		100%		100%		100%		
Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan *OUTCOME*:	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Tertangani		100%	5.000.000,00	100%	5.000.000,00	100%	5.000.000,00	100%	5.000.000,00	100%	5.000.000,00	

Bidang Urusan/Program/Outcome	Indicator Outcome	Base Line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										OPD Penanggung Jawab
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Meningkatnya layanan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan													
Program rehabilitasi social OUTCOME: Meningkatnya rehabilitasi sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar Di Luar Panti Sosial		70,67 %	371.868.400,00	72,67 %	383.024.452,00	74,67 %	394.515.185,56	76,6 %	406.350.641,13	78,67%	418.541.160,36	
	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar Di Luar Panti Sosial		32,57 %		34,57 %		36,57 %		38,57 %		40,57 %		
	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Telantar Di Luar Panti Sosial		44,5 %		51,5 %		55%		62,5 %		70%		
	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis Di Luar Panti Sosial		54 %		56%		58%		60%		62%		
Program perlindungan dan jaminan social *OUTCOME*: Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Persentase PMKS yang emperoleh bantuan sosial		100%	367.059.300,00	100%	378.071.079,00	100%	389.413.211,37	100%	401.095.607,71	100%	413.128.475,94	
Program penanganan bencana *OUTCOME*: Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat		100%	205.668.650,00	100%	211.838.709,50	100%	218.193.870,79	100%	224.739.686,91		231.481.877,52	
	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana		100%		100%		100%		100%		100%		

Bidang Urusan/Program/Outcome	Indicator Outcome	Base Line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										OPD Penanggung Jawab
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	bagi Korban Bencana daerah kabupaten/kota												
Program pengelolaan taman makam pahlawan *OUTCOME*: Meningkatnya tata kelola Taman Makam Pahlawan	Cakupan pengelolaan Taman Makam Pahlawan		100%	200.000.000,00	100%	200.000.000,00	100%	200.000.000,00	100%	200.000.000,00	100%	200.000.000,00	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR													
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA													
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota *OUTCOME*: Meningkatnya Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	3.830.121.485,00	100%	3.945.025.129,55	100%	4.063.375.883,44	100%	4.185.277.159,94	100%	4.310.835.474,74	Distrannaker
Program perencanaan tenaga kerja *OUTCOME*: Terkelolanya informasi tenaga kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja		100%	161.033.600,00	100%	165.864.608,00		170.840.546,24	100%	175.965.762,63	100%	181.244.735,51	
Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja *OUTCOME*: Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi		100%	6.544.500,00	100%	6.740.835,00	100%	6.943.060,05	100%	7.151.351,85	100%	7.365.892,41	
	Persentase Tenaga Kerja di Sektor Prioritas yang Meningkat Produktivitasnya		100%		100%		100%		100%		100%		
Program penempatan tenaga kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan		100%	34.222.200,00	100%	35.248.866,00	100%	36.306.331,98	100%	37.395.521,94	100%	38.517.387,60	

Bidang Urusan/Program/Outcome	Indicator Outcome	Base Line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										OPD Penanggung Jawab
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
OUTCOME: Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri		10 %		10 %		10 %		10 %		10 %		
Program hubungan industrial	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja		100%	1.999.631.157,00	100%	2.059.620.091,71	100%	2.121.408.694,46	100%	2.185.050.955,30		2.250.602.483,95	
OUTCOME: Meningkatnya pekerja Indonesia yang terlindungi	Jumlah Pekerja pada Perusahaan yang Menerapkan Perlindungan Hak-Hak Pekerja dan Dialog Sosial		100%		100%		100%		100%		100%		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK													
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	5.410.271.628,00	100%	5.572.579.776,84	100%	5.739.757.170,15	100%	5.911.949.885,25	100%	6.089.308.381,81	Dinas PPPAPPKB
OUTCOME: Meningkatnya Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah													
Program pengarus utamaan gender dan pemberdayaan perempuan	Persentase ARG pada belanja langsung APBD		100%	154.565.250,00	100%	159.202.207,50	100%	163.978.273,73	100%	168.897.621,94	100%	173.964.550,59	
OUTCOME: Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam Pembangunan	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan		50 %		50 %		50 %		50 %		50 %		
Program perlindungan perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000		100%	119.228.000,00	100%	122.804.840,00	100%	126.488.985,20	100%	130.283.654,76	100%	134.192.164,40	

Bidang Urusan/Program/Outcome	Indicator Outcome	Base Line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										OPD Penanggung Jawab
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
OUTCOME: Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	penduduk perempuan)												
Program peningkatan kualitas keluarga *OUTCOME*: Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar		100%	50.426.250,00	100%	51.939.037,50	100%	53.497.208,63	100%	55.102.124,88	100%	56.755.188,63	
Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak *OUTCOME*: Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak Dalam Perencanaan, Evaluasi dan /atau Penyusunan Kebijakan		100%	119.228.000,00	100%	122.804.840,00	100%	126.488.985,20	100%	130.283.654,76	100%	134.192.164,40	
Program pemenuhan hak anak (PHA) OUTCOME: Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten		100%	192.322.100,00	100%	198.091.763,00	100%	204.034.515,89	100%	210.155.551,37	100%	216.460.217,91	
	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)		100		100		100		100		100		
Program perlindungan khusus anak OUTCOME: Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, ekploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten		100%	446.979.000,00	100%	460.388.370,00	100%	474.200.021,10	100%	488.426.021,73	100%	503.078.802,38	
	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif		100%		100%		100%		100%		100%		

Bidang Urusan/Program/Outcome	Indicator Outcome	Base Line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										OPD Penanggung Jawab
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)		100%		100%		100%		100%		100%		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN													
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota *OUTCOME*: Meningkatnya Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	2.627.751.057,00	100%	2.706.583.588,71	100%	2.787.781.096,37	100%	2.871.414.529,26	100%	2.957.556.965,14	DKP
Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan *OUTCOME* : Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Persentase Jumlah Cadangan Pangan		100%	47.479.000,00	100%	47.479.000,00	100%	47.479.000,00	100%	47.479.000,00	100%	47.479.000,00	
Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat *OUTCOME* : Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Ketersediaan pangan utama		100%	217.108.000,00	100%	217.108.000,00	100%	217.108.000,00	100%	217.108.000,00	100%	217.108.000,00	
Program penanganan kerawanan pangan *OUTCOME* : Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan		0%	19.537.900,00	0%	19.537.900,00	0%	19.537.900,00	0%	19.537.900,00	0%	19.537.900,00	
Program pengawasan keamanan pangan	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi		100%	20.000.000,00	100%	20.000.000,00	100%	20.000.000,00	100%	20.000.000,00	100%	20.000.000,00	

Bidang Urusan/Program/Outcome	Indicator Outcome	Base Line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										OPD Penanggung Jawab
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
OUTCOME : Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan												
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN													
Program pengelolaan izin lokasi *OUTCOME* :	Persentase penyelesaian izin lokasi		100%	20.000.000,00	100%	20.000.000,00	100%	20.000.000,00	100%	20.000.000,00	100%	20.000.000,00	Dinas Perkimtan
Program penyelesaian sengketa tanah garapan *OUTCOME*: Terselesaikannya sengketa tanah garapan	Persentase penyelesaian kasus tanah garapan		100%	6.534.700,00	100%	6.730.741,00	100%	6.932.663,23	100%	7.140.643,13	100%	7.354.862,42	
	Persentase Terselesaikannya Kasus Tanah Garapan Belum Bersertifikasi yang Dilakukan melalui Mediasi		100%		100%		100%		100%		100%		
Program penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan *OUTCOME*: Terselesaikannya ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan		100%	20.000.000,00	100%	20.000.000,00	100%	20.000.000,00	100%	20.000.000,00	100%	20.000.000,00	
	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan		100%		100%		100%		100%		100%		
Program penetapan tanah ulayat *OUTCOME*: Meningkatnya penetapan tanah ulayat	Persentase Penetapan Tanah Ulayat		100%	20.000.000,00	100%	20.000.000,00	100%	20.000.000,00	100%	20.000.000,00	100%	20.000.000,00	

Bidang Urusan/Program/Outcome	Indicator Outcome	Base Line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										OPD Penanggung Jawab
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Program pengelolaan tanah kosong *OUTCOME*: Meningkatnya pengelolaan tanah kosong	Persentase Pengelolaan Tanah Kosong		100%	20.000.000,00	100%	20.000.000,00	100%	20.000.000,00	100%	20.000.000,00	100%	20.000.000,00	
Program pengelolaan izin membuka tanah *OUTCOME* :	Persentase pengelolaan izin membuka tanah umum		100%	20.000.000,00	100%	20.000.000,00	100%	20.000.000,00	100%	20.000.000,00	100%	20.000.000,00	
Program penatagunaan tanah *OUTCOME*: Meningkatnya tertib pertanahan dan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah	Persentase Luas Lokasi Konsolidasi Tanah		100%	51.233.650,00	100%	51.233.650,00	100%	51.233.650,00	100%	51.233.650,00	100%	51.233.650,00	
Program Pengurusan Hak Hak Atas Tanah *OUTCOME*: Meningkatnya kejelasan hak-hak atas tanahbagi pemerintah dan Masyarakat miskin	Ditetapkannya Hak Atas Tanah dalam Penguasaan dan Pengelolaan Pemerintah Daerah		100%	51.233.650,00	100%	53.795.332,50	100%	56.485.099,13	100%	59.309.354,08	100%	62.274.821,79	
Program Survei, Pengukuran Dan Pemetaan *OUTCOME*: Meningkatnya kejelasan hak milik atas tanah	Persentase Kejelasan Hak Milik Atas Tanah		100%	51.233.650,00	100%	53.795.332,50	100%	56.485.099,13	100%	59.309.354,08	100%	62.274.821,79	
Program Pengembangan Dan Pembinaan SDM Dan Kelembagaan Pertanahan *OUTCOME*: Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan SDM bidang tanah	Persentase SDM Bidang Pertanahan yang Ditingkatkan Kompetensinya		100%	20.000.000,00	100%	20.000.000,00	100%	20.000.000,00	100%	20.000.000,00	100%	20.000.000,00	

Bidang Urusan/Program/Outcome	Indicator Outcome	Base Line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										OPD Penanggung Jawab
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Program Pengelolaan Sistem Informasi Pertanahan *OUTCOME*: Meningkatnya tata Kelola system informasi manajemen pertanahan	Persentase Informasi Pertanahan yang Dimanfaatkan		100%	20.000.000,00	100%	20.000.000,00	100%	20.000.000,00	100%	20.000.000,00	100%	20.000.000,00	
Program Penanganan Konflik, Sengketa Dan Perkara Pertanahan *OUTCOME*: Meningkatnya penyelesaian konflik, sengketa, dan perkara pertanahan	Persentase Penyelesaian Konflik, Sengketa, dan Perkara Pertanahan		100%	20.000.000,00	100%	20.000.000,00	100%	20.000.000,00	100%	20.000.000,00	100%	20.000.000,00	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP													
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota *OUTCOME*: Meningkatnya Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	3.466.362.199,00	100%	3.639.680.308,95	100%	3.821.664.324,40	100%	4.012.747.540,62	100%	4.213.384.917,65	DLH
Program perencanaan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		69,86	0	70,11	100.000.000,00	70,36	150.000.000,00	70,51	150.000.000,00	70,87	150.000.000,00	
OUTCOME: Meningkatnya perencanaan lingkungan hidup	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti		100%		100%		100%		100%		100%		
Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Indeks kualitas air		65	0	67	100.000.000,00	68	150.000.000,00	69	150.000.000,00	70	150.000.000,00	

Bidang Urusan/Program/Outcome	Indicator Outcome	Base Line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										OPD Penanggung Jawab
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
OUTCOME: Meningkatnya pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Udara		94		95		96		96,5		97		
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) *OUTCOME* : *Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati*	Persentase RTH		1 Ha	0	1 Ha	40.000.000,00	1 Ha	40.000.000,00	1 Ha	40.000.000,00	1 Ha	40.000.000,00	
Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) *OUTCOME*: Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Persentase Limbah B3 yang Terkelola		100%	80.672.000,00	100%	85.672.000,00	100%	90.672.000,00	100%	95.672.000,00	100%	100.672.000,00	
Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) *OUTCOME* :	Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH		100%	20.683.000,00	100%	20.683.000,00	100%	20.683.000,00	100%	20.683.000,00	100%	20.683.000,00	
Program pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (mha), kearifan lokal dan hak mha yang terkait dengan PPLH	Persentase MHA yang Ditingkatkan Kapasitasnya		100%	50.000.000,00	100%	50.000.000,00	100%	50.000.000,00	100%	50.000.000,00	100%	50.000.000,00	

Bidang Urusan/Program/Outcome	Indicator Outcome	Base Line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										OPD Penanggung Jawab
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
OUTCOME: Meningkatnya MHA dan kearifan lokal													
Program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat *OUTCOME* : *Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup*	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya		100%	50.000.000,00	100%	50.000.000,00	100%	50.000.000,00	100%	50.000.000,00	100%	50.000.000,00	
Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat *OUTCOME*: *Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup*	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		100%	18.757.000,00	100%	18.757.000,00	100%	18.757.000,00	100%	18.757.000,00	100%	18.757.000,00	
Program penanganan pengaduan lingkungan hidup *OUTCOME* : *Meningkatnya penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana lingkungan hidup*	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota		0	50.903.000,00	0	50.903.000,00	0	50.903.000,00	0	50.903.000,00	0	50.903.000,00	
	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup		100%		100%		100%		100%		100%		

Bidang Urusan/Program/Outcome	Indicator Outcome	Base Line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										OPD Penanggung Jawab
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Program pengelolaan persampahan *OUTCOME* : *Meningkatnya tata Kelola persampahan*	Persentase jumlah sampah yang tertangani		100%	4.497.796.948,00	100%	4.497.796.948,00	100%	4.497.796.948,00	100%	4.497.796.948,00	100%	4.497.796.948,00	
	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah		100%		100%		100%		100%		100%		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL													
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota *OUTCOME*: Meningkatnya Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	4.125.845.967,00	100%	4.125.845.967,00	100%	4.125.845.967,00	100%	4.125.845.967,00	100%	4.125.845.967,00	Disduk dan Capil
Program pendaftaran penduduk *OUTCOME*: Meningkatnya Kualitas Layanan Pendaftaran Penduduk	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)		100%	200.021.000,00	100%	200.021.000,00	100%	200.021.000,00	100%	200.021.000,00	100%	200.021.000,00	
	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA		100%		100%		100%		100%		100%		
	Kepemilikan akta kelahiran		100%		100%		100%		100%		100%		
	Persentase Kepemilikan Indentitas Kependudukan Digital		100%		100%		100%		100%		100%		
	Persentase Kepemilikan Kartu Indentitas Anak		100%		100%		100%		100%		100%		

Bidang Urusan/Program/Outcome	Indicator Outcome	Base Line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										OPD Penanggung Jawab
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Program pencatatan sipil *OUTCOME*: Meningkatnya Kualitas Layanan Pencatatan Sipil	Persentase pelaksanaan pencatatan sipil		100%	37.206.900,00	100%	37.206.900,00	100%	37.206.900,00	100%	37.206.900,00	100%	37.206.900,00	
	Persentase administrasi kependudukan yang diterbitkan		100%		100%		100%		100%		100%		
Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan *OUTCOME*: Meningkatnya Pendapatan Informasi kependudukan	Persentase pengelolaan informasi administrasi kependudukan		100%	37.891.800,00	100%	37.891.800,00	100%	37.891.800,00	100%	37.891.800,00	100%	37.891.800,00	
	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan		100%		100%		100%		100%		100%		
Program pengelolaan profil kependudukan *OUTCOME*: Meningkatnya kualitas profil kependudukan	Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama		100%	37.891.800,00	100%	37.891.800,00	100%	37.891.800,00	100%	37.891.800,00	100%	37.891.800,00	
	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan		100%		100%		100%		100%		100%		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA													
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota *OUTCOME*: Meningkatnya Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	3.703.788.852,00		3.888.978.294,60		4.083.427.209,33		4.287.598.569,80		4.501.978.498,29	Dinas PMPD

Bidang Urusan/Program/Outcome	Indicator Outcome	Base Line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										OPD Penanggung Jawab
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Program penataan desa *OUTCOME* : *Meningkatnya kualitas pentaan desa*	Persentase Fasilitas Penataan Desa		100%	400.000.000,00	100%	400.000.000,00	100%	400.000.000,00	100%	400.000.000,00	100%	400.000.000,00	
Program peningkatan kerjasama desa *OUTCOME*: *Meningkatnya efektivitas kerjsa sama desa*	Persentase Fasilitas Kerjasama Desa		100%	199.999.950,00	100%	199.999.950,00	100%	199.999.950,00	100%	199.999.950,00	100%	199.999.950,00	
Program administrasi pemerintahan desa *OUTCOME* : *Menignkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerinatan desa*	Persentase aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan		100%	199.999.950,00	100%	7.199.999.950,00	100%	199.999.950,00	100%	5.199.999.950,00	100%	199.999.950,00	
	Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa		100%		100%		100%		100%		100%		
Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat *OUTCOME* : *Meningkatnya kapasitas Lembaga kemasyrarkatan.* Lembaga adat dan Masyarakat hukum adat dalam pembangunan	Persentase desa mandiri		0,00	612.000.450,00	1,59	612.000.450,00	4,37	612.000.450,00	7,14	612.000.450,00	7,94	612.000.450,00	
	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)		100%		100%		100%		100%		100%		
	Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga ADAT Desa dan Lembaga Hukum Adat		100%		100%		100%		100%		100%		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2. Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga ADAT												

Bidang Urusan/Program/Outcome	Indicator Outcome	Base Line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										OPD Penanggung Jawab
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Desa dan Lembaga Hukum Adat												
Program pengendalian penduduk *OUTCOME* : Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 tahun		21,9	595.493.700,00	18,9	595.493.700,00	15,9	595.493.700,00	12,9	595.493.700,00	9,9	595.493.700,00	Dinas PPPAPPKB
Program pembinaan keluarga berencana (KB) *OUTCOME*: Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan keluarga berencana (KB)	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)		100%	6.507.615.300,00	100%	6.832.996.065,00	100%	7.174.645.868,25	100%	7.533.378.161,66	100%	7.910.047.069,75	Dinas PPPAPPKB
Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS) *OUTCOME*: Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga sejahtera (KB)	Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga		100%	2.342.320.000,00	100%	2.459.436.000,00	100%	2.582.407.800,00	100%	2.711.528.190,00	100%	2.847.104.599,50	Dinas PPPAPPKB
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN													
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota *OUTCOME*: Meningkatnya Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	4.835.749.714,00	100%	5.077.537.199,70	100%	5.331.414.059,69	100%	5.597.984.762,67	100%	5.877.884.000,80	Dishub

Bidang Urusan/Program/Outcome	Indicator Outcome	Base Line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										OPD Penanggung Jawab
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan transportasi		100%	451.044.404,00	100%	451.044.404,00	100%	451.044.404,00	100%	451.044.404,00	100%	451.044.404,00	
OUTCOME:	Konektivitas Darat		100%		100%		100%		100%		100%		
Program pengelolaan pelayaran *OUTCOME*:	Persentase pengelolaan pelayaran		100%	489.551.000,00	100%	489.551.000,00	100%	489.551.000,00		489.551.000,00	100%	489,551,000.800	
Program pengelolaan penerbangan *OUTCOME*:	Persentase pengelolaan penerbangan		100%	100.000.000,00	100%	100.000.000,00	100%	100.000.000,00	100%	100.000.000,00	100%	100.000.000,00	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA													
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota *OUTCOME*: Meningkatnya Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	3.510.642.273,00	100%	3.686.174.386,65	100%	3.870.483.105,98	100%	4.064.007.261,28	100%	4.267.207.624,35	Dinas Kominfo
Program pengelolaan informasi dan komunikasi public *OUTCOME*:	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintahan daerah (Survei)			1.116.332.950,00		1.116.332.950,00		1.116.332.950,00		1.116.332.950,00		1.116.332.950,00	
Program pengelolaan aplikasi informatika	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang		100%	910.000.000,00	100%	910.000.000,00	100%	910.000.000,00	100%	910.000.000,00	100%	910.000.000,00	

Bidang Urusan/Program/Outcome	Indicator Outcome	Base Line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										OPD Penanggung Jawab
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
OUTCOME:	terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo												
	Indeks SPBE		2,52		2,54		2,56		2,58		2,60		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH													
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota *OUTCOME*: Meningkatnya Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	4.209.717.105,00	100%	4.420.202.960,25	100%	4.641.213.108,26	100%	4.873.273.763,68	100%	5.116.937.451,86	Dinas Koperasi UKM, Perindag
Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam *OUTCOME:* Meningkatnya kualitas layanan izin usaha simpan pinjam	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	5%	5%	50.000.000,00	5%	50.000.000,00	5%	50.000.000,00	5%	50.000.000,00	5%	50.000.000,00	
Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi *OUTCOME:* Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Koperasi	Persentase koperasi aktif		100%	20.489.800,00	100%	30.489.800,00	100%	40.489.800,00	100%	50.489.800,00	100%	70.489.800,00	
	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi		100%		100%		100%		100%		100%		
Program Penilaian Kesehatan Ksp/UspKoperasi *OUTCOME*: Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi	Persentase Koperasi Aktif		100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000	

Bidang Urusan/Program/Outcome	Indicator Outcome	Base Line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										OPD Penanggung Jawab
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Program pendidikan dan latihan perkoperasian *OUTCOME* : Meningkatnya Kualitas SDM perkoperasian	Persentase koperasi aktif		100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000	
	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan		100%		100%		100%		100%		100%		
Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM) *OUTCOME* : Meningkatnya Kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha		100%	20.489.800,00	100%	30.489.800,00	100%	40.489.800,00	100%	50.489.800,00	100%	70.489.800,00	
	Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal		100%		100%		100%		100%		100%		
	Pertumbuhan Wirausaha		10%		10%		15%		15%		15%		
Program pengembangan UMKM *OUTCOME* : Meningkatnya daya saing UMKM	Promosi UMKM MenjalinKemitraan dan Ekspor		100%	20.000.000,00	100%	100.000.000,00	100%	100.000.000,00	100%	100.000.000,00	100%	100.000.000,00	
Program Penguatan Badan Hukum Koperasi *OUTCOME:* Meningkatnya Legalitas Koperasi	Persentase Koperasi yang Memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam		100%	50.000.000,00	100%	50.000.000,00	100%	50.000.000,00	100%	50.000.000,00	100%	50.000.000,00	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL													
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota *OUTCOME*: Meningkatnya Penyelenggaraan	Presentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	3.190.998.760,00	100%	3.190.998.760,00	100%	3.190.998.760,00	100%	3.190.998.760,00	100%	3.190.998.760,00	Dinas PMPPTSP

Bidang Urusan/Program/Outcome	Indicator Outcome	Base Line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										OPD Penanggung Jawab
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah													
Program pengembangan iklim penanaman modal	Nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)			15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00	
OUTCOME: meningkatnya kemudahan berinvestasi	Realisasi Total Terhadap Target Investasi												
Program promosi penanaman modal	Nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)			69.523.494,00		69.523.494,00		69.523.494,00		69.523.494,00		69.523.494,00	
OUTCOME: Meningkatnya Jangkauan Promosi Penanaman modal	Persentase Peningkatan Investor Yang Berinvestasi												
Program pelayanan penanaman modal	Nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)			15.300.000,00		15.300.000,00		15.300.000,00		15.300.000,00		15.300.000,00	
OUTCOME: Meningkatnya perizinan berusaha berbasis resiko	PersentasePelaku Usaha Yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan												
Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)			25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00	
OUTCOME: Terkendalinya Pelaksanaan Penanaman modal	Persentase Penyelesaia n Permasalahan dan hambatan Yang Dihadapi Pelaku Usaha Dalam Membuka Usaha												
Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	Nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)			24.364.600,00		24.364.600,00		24.364.600,00		24.364.600,00		24.364.600,00	
OUTCOME: Meningkatnya Pemanfaatan dan informasi penanaman modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal												

Bidang Urusan/Program/Outcome	Indicator Outcome	Base Line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										OPD Penanggung Jawab
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA													
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota *OUTCOME*: Meningkatnya Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	3.727.021.092,00	100%	3.727.021.092,00	100%	3.727.021.092,00	100%	3.727.021.092,00	100%	3.727.021.092,00	Diskepora
Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan *OUTCOME*: Meningkatnya daya saing kepemudaan	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan		100%	595.759.647,00	100%	595.759.647,00	100%	595.759.647,00	100%	595.759.647,00	100%	595.759.647,00	
	Rasio Wirausahaan Pemuda		60%		60%		70%		70%		70%		
Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan *OUTCOME*: Meningkatnya pemberdayaan dan prestasi olahraga	Peningkatan prestasi olahraga			4.534.204.818,00		4.760.915.058,90		4.998.960.811,85		5.248.908.852,44		5.511.354.295,06	
Program pengembangan kapasitas kepramukaan *OUTCOME*: Meningkatnya kualitas kepramukaan	Persentase organisasi pemuda yang aktif		100%	200.000.000,00		200.000.000,00	100%	200.000.000,00	100%	200,000,00.00	100%	200.000.000,00	
	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan		100%		100%		100%		100%		100%		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK													
Program penyelenggaraan statistik sektoral *OUTCOME*:	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang		100%	50.000.000,00	100%	50.000.000,00	100%	50.000.000,00	100%	50.000.000,00	100%	50.000.000,00	Dinas Kominfo

Bidang Urusan/Program/Outcome	Indicator Outcome	Base Line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										OPD Penanggung Jawab
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah												
	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah		100%		100%		100%		100%		100%		
	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	2,29	2,40		2,50		2,55		2,60		2,70		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN													
Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi *OUTCOME*:	Tingkat keamanan informasi pemerintah		100%	13.485.050,00	100%	13.485.050,00	100%	13.485.050,00	100%	13.485.050,00	100%	13.485.050,00	Dinas Kominfo
	Tingkat Kesiapan Pengamanan informasi Pemerintahan Daerah		100%		100%		100%		100%		100%		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN													
Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota *OUTCOME*: Meningkatnya Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelaksanaan penunjang pemerintah daerah	100%	100%	6.440.399.255,00		6.440.399.255,00		6.440.399.255,00		6.440.399.255,00		6.440.399.255,00	Dinas Budpar

Bidang Urusan/Program/Outcome	Indicator Outcome	Base Line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										OPD Penanggung Jawab
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Program pengembangan kebudayaan *OUTCOME*: Meningkatnya Peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Tingkat Partisifasi Masyarakat Terhadap Pengembanga n Kebudayaan		100%	482.825.000,00	100%	482.825.000,00	100%	482.825.000,00	100%	482.825.000,00	100%	482.825.000,00	
Program pengembangan kesenian tradisional *OUTCOME*: Meningkatnya Peran Serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional	Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestraikan dan Dikembangkan		2 Event	200.000.000,00	2 Event	200.000.000,00	2 Event	200.000.000,00	2 Event	200.000.000,00	2 Event	200.000.000,00	
Program Pembinaan Sejarah *OUTCOME*: Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah	Tingkat Partisipasi Masyarakat TerhadapTinjauan Sejarah Lokal		100%	50.000.000,00	100%	50.000.000,00	100%	50.000.000,00	100%	50.000.000,00	100%	50.000.000,00	
Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya *OUTCOME*: Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan		100%	50.000.000,00	100%	50.000.000,00	100%	50.000.000,00	100%	50.000.000,00	100%	50.000.000,00	
	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan		0		1		1		1		1		
Program Pengelolaan Permuseuman *OUTCOME*: Meningkatnya tata kelola museum	PersentaseKunjungan W isatawan Ke Museum		0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN													

Bidang Urusan/Program/Outcome	Indicator Outcome	Base Line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										OPD Penanggung Jawab
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota *OUTCOME*: Meningkatnya Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	3.400.783.381,00		3.400.783.381,00		3.400.783.381,00		3.400.783.381,00		3.400.783.381,00	DPK
Program pembinaan perpustakaan *OUTCOME*: Meningkatnya layanan perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat			125.179.000,00		125.179.000,00		125.179.000,00		125.179.000,00		125.179.000,00	
	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat												
Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno *OUTCOME*: Meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki			20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN													
Program pengelolaan arsip *OUTCOME*: Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis	Persentase Tingkaat Ketersediaan Arsip		100%	104.972.300,00	100%	104.972.300,00	100%	104.972.300,00	100%	104.972.300,00	100%	104.972.300,00	DPK

Bidang Urusan/Program/Outcome	Indicator Outcome	Base Line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										OPD Penanggung Jawab
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Program perlindungan dan penyelamatan arsip *OUTCOME*: Meningkatnya Perlindungan dan Penyelamatan arsip sesuai NSPK	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip		100%	100.000.000,00	100%	100.000.000,00	100%	100.000.000,00	100%	100.000.000,00	100%	100.000.000,00	
Program Perizinan Penggunaan Arsip *OUTCOME*: Meningkatnya akses masyarakat terhadap penggunaan arsip yang bersifat tertutup	Persentase Akses Masyarakat Terhadap Penggunaan Arsip yang bersipat tertutup		100%	100.000.000,00	100%	100.000.000,00	100%	100.000.000,00	100%	100.000.000,00	100%	100.000.000,00	
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN													
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota *OUTCOME*: Meningkatnya Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	3.314.502.536,00	100%	3.514.502.536,00	100%	3.614.502.536,00	100%	3.714.502.536,00	100%	3.914.502.536,00	Dinas Perikanan
Program pengelolaan perikanan tangkap *OUTCOME* : Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Jumlah Produksi Perikanan tangkap		100 Kg	153.661.000,00	100 Kg	153.661.000,00	100 Kg	153.661.000,00	100 Kg	153.661.000,00	100 Kg	153.661.000,00	

Bidang Urusan/Program/Outcome	Indicator Outcome	Base Line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										OPD Penanggung Jawab
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Program pengelolaan perikanan budidaya *OUTCOME* : Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya		2 ton	236.775.000,00		236.775.000,00	2 ton	236.775.000,00	2 ton	236.775.000,00	2 ton	236.775.000,00	
Program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan *OUTCOME*: Meningkatnya Kelestarian laut dan keanekaragaman hayati	Cakupan bina kelompok nelayan		5	50.000.000,00	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00	
	Luasan Kawasan Konservasi												
Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan *OUTCOME*: Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	Angka Konsumsi Ikan		2 ton	100.000.000,00	2 ton	100.000.000,00	2 ton	100.000.000,00	2 ton	100.000.000,00	2 ton	100.000.000,00	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA													
Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata *OUTCOME*: Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Persentase Pertumbuhan Kunjungan wisatawan		15 %	383.549.670,00	15 %	402.727.153,50	15 %	422.863.511,18	15 %	444.006.686,73	15 %	466.207.021,07	Dinas Budpar
Program pemasaran pariwisata *OUTCOME*: Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata		100 %	210.735.400,00	100 %	210.735.400,00	100 %	210.735.400,00	100 %	210.735.400,00	100 %	210.735.400,00	

Bidang Urusan/Program/Outcome	Indicator Outcome	Base Line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										OPD Penanggung Jawab
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual *OUTCOME*: Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual		5 %	50.000.000,00	5 %	50.000.000,00	5 %	50.000.000,00	5 %	50.000.000,00	5 %	50.000.000,00	
Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif *OUTCOME*: Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang aktif dan tervalidasi		100 %	582.383.550,00	100 %	582.383.550,00	100 %	582.383.550,00	100 %	582.383.550,00	100 %	582.383.550,00	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN													
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota *OUTCOME*: Meningkatnya Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	9.561.850.791,00	100%	9.561.850.791,00	100%	9.561.850.791,00	100%	9.561.850.791,00	100%	9.561.850.791,00	Dinas Pertanian
Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian *OUTCOME*: Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan		20%	467.758.108,00	20%	567.758.108,00	20%	667.758.108,00	20%	767.758.108,00	20%	867.758.108,00	
	Persentase Peningkatan Produksi Holtikultura		20%		20%		20%		20%		20%		
	Persentase Peningkatan Produksi		20%		20%		20%		20%		20%		

Bidang Urusan/Program/Outcome	Indicator Outcome	Base Line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										OPD Penanggung Jawab
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Komoditas Peternakan												
Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian *OUTCOME*: Meningkatnya Distribusi dan Kualitas Prasarana Pertanian	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B		10 Ha	1.096.369.500,00	15 Ha	1.096.369.500,00	15 Ha	1.096.369.500,00	15 Ha	1.096.369.500,00		1.096.369.500,00	
Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner *OUTCOME*: Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesejahteraan masyarakat veteriner	Tingkat Pendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)		100%	100.000.000,00	100%	100.000.000,00	100%	100.000.000,00	100%	100.000.000,00	100%	100.000.000,00	
	Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)												
Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian *OUTCOME*: Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase Penanganan Bencana Pertanian		100%	82.000.000	100%	100.000.000,00	100%	100.000.000,00	100%	100.000.000,00	100%	100.000.000,00	
	Persentase penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian												
Program Perizinan Usaha Pertanian *OUTCOME*:	PersentaseIzin Usaha Pertanian yang Diterbitkan		100%	300.000.000,00	100%	300.000.000,00	100%	300.000.000,00	100%	300.000.000,00	100%	300.000.000,00	

Bidang Urusan/Program/Outcome	Indicator Outcome	Base Line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										OPD Penanggung Jawab
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Meningkatnya kualitas dan kemudahan perizinan usaha pertanian													
Program penyuluhan pertanian	Cakupan bina kelompok tani		100%	336.615.987,00	100%	436.615.987,00	100%	736.615.987,00	100%	636.615.987,00	100%	711.933.319,00	
OUTCOME: Meningkatnya Kapasitas SDM bidang penyulusan pertanian	Persentase SDM Penyuluhan Pertanian yang di Tingkatkan		100%		100%		100%		100%		100%		
	Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang Dibentuk dan Beroperasi		100%		100%		100%		100%		100%		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN													
Program perizinan dan pendaftaran perusahaan *OUTCOME*: Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi		100%	5.498.100,00	100%	5.498.100,00	100%	5.498.100,00	100%	5.498.100,00	100%	5.498.100,00	Dinas Koperasi UKM, Perindag
Program peningkatan sarana distribusi perdagangan Outcome: Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisiens, merata dan terintegrasi	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya		100%	30.831.750,00	100%	30.831.750,00	100%	30.831.750,00	100%	30.831.750,00	100%	30.831.750,00	Dinas Koperasi UKM, Perindag
Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting OUTCOME : Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting		100%	6.159.650,00	100%	6.159.650,00	100%	6.159.650,00	100%	6.159.650,00	100%	6.159.650,00	Dinas Koperasi UKM, Perindag

Bidang Urusan/Program/Outcome	Indicator Outcome	Base Line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										OPD Penanggung Jawab
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
harga barang kebutuhan pokok dan barang penting													
Program Pengembangan Ekspor *OUTCOME*: Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor	Nilai Ekspor Barang		100%	5.000.000,00	100%	5.000.000,00	100%	5.000.000,00	100%	5.000.000,00	100%	5.000.000,00	Dinas Koperasi UKM, Perindag
Program standardisasi dan perlindungan konsumen *OUTCOME*: Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkap annya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku		100%	5.000.000,00	100%	5.000.000,00	100%	5.000.000,00	100%	5.000.000,00	100%	5.000.000,00	Dinas Koperasi UKM, Perindag
	Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen		100%		100%		100%		100%		100%		
Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri *OUTCOME*: Meningkatnya Penggunaan dan pemasaran dalam negeri	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/Dilaksanakan		100%	5.000.000,00	100%	5.000.000,00	100%	5.000.000,00	100%	5.000.000,00	100%	5.000.000,00	Dinas Koperasi UKM, Perindag
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN													
Program perencanaan dan pembangunan industry *OUTCOME*: Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Persentase Realisasi Invstasi Sektor industri dan Kawasan Industri		100%	299,782,500.00	100%	444,782,500.00	100%	444,782,500.00	100%	444,782,500.00	100%	544,782,500.00	Dinas Koperasi UKM, Perindag

Bidang Urusan/Program/Outcome	Indicator Outcome	Base Line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										OPD Penanggung Jawab
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Program pengendalian izin usaha industry *OUTCOME*: Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan		100%	27,000,000.00	100%	27,000,000.00	100%	27,000,000.00	100%	27,000,000.00	100%	27,000,000.00	
Program pengelolaan sistem informasi industri nasional *OUTCOME:* Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Industri	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini		100%	69,500,000.00	100%	69,500,000.00	100%	69,500,000.00	100%	69,500,000.00	100%	69,500,000.00	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI													
Program perencanaan kawasan transmigrasi *OUTCOME*: Meningkatnya pelaksanaan Tranmigrasi	Persentase Program Transmigrasi yang Dilaksanakan		100%	25.000.000,00	100%	25.000.000,00	100%	25.000.000,00	100%	25.000.000,00 0	100%	25.000.000,00	Distrannaker
Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi *OUTCOME*: Meningkatnya kualitas pembangunan kawasan tranmigrasi	Persentase Luas Kawasan Transmigrasi yang Berkembang		0%	34.944.700,00	0%	34.944.700,00	5%	34.944.700,00	5%	34.944.700,00	5%	34.944.700,00	
Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi *OUTCOME*: Meningkatnya pemberdayaan dan kapasitas transmigran dalam pengembangan kawasan taranmigrasi	Persantase Transmigran yang Dibina dan Diberdayakan		100%	25.000.000,00	100%	25.000.000,00	100%	25.000.000,00	100%	25.000.000,00	100%	25.000.000,00	
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN													

Bidang Urusan/Program/Outcome	Indicator Outcome	Base Line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										OPD Penanggung Jawab
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
SEKRETARIAT DAERAH													
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota *OUTCOME*: Meningkatnya Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	60.689.238.983,00	100%	61.903.023.762,66	100%	63.141.084.237,91	100%	64.403.905.922,67	100%	65.691.984.041,12	Setda
Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat *OUTCOME*: Meningkatnya kualitas kebijakan kesejateraan rakyat	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	100%	100%	10.875.385.414,00	100%	11.477.620.354,00	100%	12.036.359.068,00	100%	12.036.359.068,00	100%	12.336.359.068,00	
Program perekonomian dan pembangunan *OUTCOME*: Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	100%	100%	3.776.335.656,00	100%	3.962.652.439,0	100%	4.158.285.061,00	100%	4.363.699.314,00	100%	4.758.285.061,00	
SEKRETARIAT DPRD													
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota *OUTCOME*: Meningkatnya Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	54.646.025.277	100%	56.646.025.277	100%	57.646.025.277	100%	59.646.025.277	100%	54.646.025.277	Set DPRD
Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Persentase rancangan perda yang dibahas	100%	100%	39.082.564.028	100%	43.859.791.649	100%	47.523.399.596	100%	53.402.334.094	100%	55.604.080.986	Set DPRD

Bidang Urusan/Program/Outcome	Indicator Outcome	Base Line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										OPD Penanggung Jawab
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
OUTCOME: Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	2	2		2		2		2		2		
	Persentase Penetapan Raperda Tahun N	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN													
PERENCANAAN													
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota *OUTCOME*: Meningkatnya Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	7.560.288.949	100%	7.928.120.196	100%	8.383.927.510	100%	8.790.503.229	100%	9.217.179.114	Bapperida
Program perencanaan. pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah *OUTCOME*: Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	100%	100%	1.470.759.950	100%	1.676.039.981	100%	2.039.841.980	100%	2.206.834.078	100%	2.283.281.309	Bapperida
	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah *OUTCOME*: Meningkatya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Persentase Keselarasan RKPD dengan RenjaPD pada Bidang Pemerintah an dan Pembangunan Manusia	95%	100%	1.997.195.836	100%	2.106.786.383	100%	2.204.523.631	100%	2.316.271.220	100%	2.422.345.863	Bapperida
	Persentase Keselarasan RKPD dengan RenjaPD pada Bidang	95%	100%		100%		100%		100%		100%		

Bidang Urusan/Program/Outcome	Indicator Outcome	Base Line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										OPD Penanggung Jawab
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
OUTCOME: Meningkatya kualitas perencanaan pembangunan bidang Infrastruktur dan Kewilayahan *OUTCOME*: Meningkatya kualitas perencanaan pembangunan bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Infrastruktur dan Kewilayahan												
	Persentase Keselarasan RKPD dengan RenjaPD pada Bidang Perekonomian dan SDA	95%	100%		100%		100%		100%		100%		
KEUANGAN													
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota *OUTCOME*: Meningkatnya Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	144.425.821.088.00	100%	147.314.337.510	100%	150.260.624.260	100%	153.265.836.745	100%	156.331.153.480	BPKAD
Program pengelolaan keuangan daerah *OUTCOME*: Meningkatnya tata kelola anggaran *OUTCOME*: Meningkatnya tata kelola perbendaharan *OUTCOME*: Meningkatnya tata kelola akutansi dan pelaporan	Opini BPK	WTP	WTP	311.065.382.909.00	WTP	317.286.690.567.18	WTP	318.632.424.378,00	WTP	320.105.072.866.09	WTP	322.707.174.323.42	BPKAD
	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjuangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD	20%	20%		20%		20%		20%		20%		
	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	40%	40%		40%		40%		40%		40%		
	Persentase Realisasi anggaran Belanja Urusan wajib Pelayanan dasar												
	Persentase Penurunan Silpa	3%	3%		3%		3%		3%		3%		

Bidang Urusan/Program/Outcome	Indicator Outcome	Base Line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										OPD Penanggung Jawab
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Program pengelolaan barang milik daerah *OUTCOME*: Menigkatnya tata kelola aset daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap		5 %	1.311.240.000.00	5 %	1.311.240.000.00	5 %	1.311.240.000.00	5 %	1.311.240.000.00	5 %	1.311.240.000.00	BPKAD
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota *OUTCOME*: Meningkatnya Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	8.035.782.527.00	100%	8.035.782.527.00	100%	8.035.782.527.00	100%	8.035.782.527.00	100%	8.035.782.527.00	Bapenda
Program pengelolaan pendapatan daerah *OUTCOME*: Meningkatnya upaya ekstensifikasi pendapatan	Persentase PAD terhadap pendapatan daerah	4.4	6.4	1.315.720.000.00	6.8	1.315.720.000.00	7.00	1.315.720.000.00	7.30	1.315.720.000.00	7.80	1.315.720.000.00	Bapenda
KEPEGAWAIAN													
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota *OUTCOME*: Meningkatnya Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	5.016.133.114.00	100%	5.016.133.114.00	100%	5.016.133.114.00	100%	5.016.133.114.00		5.016.133.114.00	BKPSDM
Program kepegawaian daerah OUTCOME : Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian	Indeks profesionalisme ASN		75	234.051.750.00	76	234.051.750.00	77	234.051.750.00	78	234.051.750.00	79	234.051.750.00	BKPSDM
	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi		100		100		100		100		100		

Bidang Urusan/Program/Outcome	Indicator Outcome	Base Line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										OPD Penanggung Jawab
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN													
Program pengembangan sumber daya manusia OTCOME:	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan structural			424.170.500.00		424.170.500.00		424.170.500.00		424.170.500.00		424.170.500.00	BKPSDM
	Persentase ASN yang Mendapatkan Pembangunan Kompetensi Dasar. Manajerial. dan Fungsional												
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN													
Program penelitian dan pengembangan daerah *OUTCOME*: Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan perrencanaan pembangunan *OUTCOME*: Meningkatnya Kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam pengembangan potensi unggulan *OUTCOME*: Meningkatnya Kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam penyelesaian permasalahan daerah	Persentase Perangkat Daerah Yang Difasilitasi Dalam Penerapan Inovasi Daerah		100%	500.000.000,00	100%	500.000.000,00	100%	500.000.000,00	100%	500.000.000,00	100%	500.000.000,00	Bapperida

Bidang Urusan/Program/Outcome	Indicator Outcome	Base Line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										OPD Penanggung Jawab
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
OUTCOME: Meningkatnya fasilitasi. pembinaan. bimbingan teknis dan supervise terkait penelitian. pengembangan. pengkajian dan penerapan Riset dan Inovasi daerah *OUTCOME*: Meningkatnya pemanfaatan inovasi daerah dalam pembangunan *OUTCOME*: Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam pengembangan potensi unggulan daerah *OUTCOME*: Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembanguan daerah dalam penyelesaian permasalahan daerah *OUTCOME*: Meningkatnya Fasilitasi. pembinaan. Bimbingan teknis dan supervisi terkait riset dan inovasi di daerah													
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN													
INSPEKTORAT DAERAH													
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota *OUTCOME*:	Presentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	7.711.589.888.00	100%	7.711.589.888.00	100%	7.711.589.888.00	100%	7.711.589.888.00	100%	7.711.589.888.00	Inspektorat Kabupaten

Bidang Urusan/Program/Outcome	Indicator Outcome	Base Line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										OPD Penanggung Jawab
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Meningkatnya Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah													
Program penyelenggaraan pengawasan OUTCOME: Menurunnya terjadinya Penyelewengan atau Penyimpangan. baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3.04	3.08	1.410.457.700.00	3.09	2.538.823.860.00	3.1	3.808.235.790.00	3.12	4.712.353.685.00	3.14	4.968.530.527.50	Inspektorat Kabupaten
	Tindak lanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1												
Program perumusan kebijakan. pendampingan dan asistensi *OUTCOME*: Meningkatnya Kualitas pendampingan dan asistensi	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)		3.30	176.784.500.00	3.40	176.784.500.00	3.45	176.784.500.00	3.50	176.784.500.00	3.60	176.784.500.00	Inspektorat Kabupaten
	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3.04	3.08		3.09		3.1		3.12		3.14		
UNSUR KEWILAYAHAN													
KECAMATAN													
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota *OUTCOME*: Meningkatnya Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	6.012.093.979.00	100%	6.222.517.268.00	100%	6.440.305.372.00	100%	6.665.716.060.00	100%	6.899.016.122.00	Kec. Muaradua
Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public *OUTCOME* Meningkatnya pelayanan publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	100%	61.651.000.00	100%	63.808.785.00	100%	66.042.092.00	100%	68.353.565.00	100%	70.745.940.00	Kec. Muaradua

Bidang Urusan/Program/Outcome	Indicator Outcome	Base Line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										OPD Penanggung Jawab
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan *OUTCOME*: Menigkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase pemberdayaan desa dan kelurahan	100%	100%	1.407.296.014.00	100%	1.456.551.374.00	100%	1.507.530.672,00	100%	1.560.294.246.00	100%	1.614.904.544.00	Kec. Muaradua
Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum *OUTCOME*: Meningkatnya ketenteraman masyarakat	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	100%	100%	1.000.000,00	100%	1.000.000,00	100%	1.000.000,00	100%	1.000.000,00	100%	1.000.000,00	Kec. Muaradua
Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum *OUTCOME*: Meningkatnya penyelenggaran pemerintahan umum di kecamatan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan umum yang dilaksanakan	100%	100%	1.500.000.00	100%	1.552.500.00	100%	1.606.837.00	100%	1.663.076.00	100%	1.721.284.00	Kec. Muaradua
Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa *OUTCOME*: Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintahan desa	Persentase desa yang dilaksanakan pembinaan dan pengawasaan	100%	100%	10.250.000.00	100%	10.608.750.00	100%	10.980.056.00	100%	11.364.358.00	100%	11.762.110.00	Kec. Muaradua
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota *OUTCOME*: Meningkatnya Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	1.340.706.015.00	100%	1.387.630.725.00	100%	1.436.197.800.00	100%	1.486.464.723.00	100%	1.538.490.989.00	Kec. Pulau Beringin
Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public	Persentase Penyelenggaraan	100%	100%	28.976.000.00	100%	29.990.160.00	100%	31.039.815.00	100%	32.126.209.00	100%	33.250.626.00	Kec. Pulau Beringin

Bidang Urusan/Program/Outcome	Indicator Outcome	Base Line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										OPD Penanggung Jawab
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
OUTCOME Meningkatnya pelayanan publik	Pemerintahan dan Pelayanan Publik												
Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan *OUTCOME*: Menigkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase pemberdayaan desa dan kelurahan	100%	100%	9.044.000.00	100%	9.360.540.00	100%	9.688.158.00	100%	10.027.244.00	100%	10.378.198.00	Kec. Pulau Beringin
Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum *OUTCOME*: Meningkatnya ketenteraman masyarakat	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	100%	100%	1.000.000,00	100%	1.000.000,00	100%	1.000.000,00	100%	1.000.000,00	100%	1.000.000,00	Kec. Pulau Beringin
Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum *OUTCOME*: Meningkatnya penyelenggaran pemerintahan umum di kecamatan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan umum yang dilaksanakan	100%	100%	1.000.000,00	100%	1.000.000,00	100%	1.000.000,00	100%	1.000.000,00	100%	1.000.000,00	Kec. Pulau Beringin
Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa *OUTCOME*: Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintahan desa	Persentase desa yang dilaksanakan pembinaan dan pengawasaan	100%	100%	1.000.000,00	100%	1.000.000,00	100%	1.000.000,00	100%	1.000.000,00	100%	1.000.000,00	Kec. Pulau Beringin
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota *OUTCOME*: Meningkatnya Penyelenggaraan	Presentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	3.865.011.396.00	100%	4.000.286.794.00	100%	4.140.296.832.00	100%	4.285.207.221.00	100%	4.435.189.474.00	Kec. Banding Agung

Bidang Urusan/Program/Outcome	Indicator Outcome	Base Line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										OPD Penanggung Jawab
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah													
Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public *OUTCOME* Meningkatnya pelayanan publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	100%	60.249.000.00	100%	62.357.715.00	100%	64.540.235.00	100%	66.799.143.00	100%	69.137.113.00	Kec. Banding Agung
Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan *OUTCOME*: Menigkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase pemberdayaan desa dan kelurahan	100%	100%	400.499.250.00	100%	414.516.723.00	100%	429.024.809.00	100%	444.040.677.00	100%	459.582.101.00	Kec. Banding Agung
Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum *OUTCOME*: Meningkatnya ketenteraman masyarakat	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	100%	100%	1.000.000,00	100%	1.000.000,00	100%	1.000.000,00	100%	1.000.000,00	100%	1.000.000,00	Kec. Banding Agung
Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum *OUTCOME*: Meningkatnya penyelenggaran pemerintahan umum di kecamatan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan umum yang dilaksanakan	100%	100%	1.000.000,00	100%	1.000.000,00	100%	1.000.000,00	100%	1.000.000,00	100%	1.000.000,00	Kec. Banding Agung
Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa *OUTCOME*: Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintahan desa	Persentase desa yang dilaksanakan pembinaan dan pengawasaan	100%	100%	6.285.000.00	100%	6504975	100%	6732649.13	100%	6968291.84	100%	7.212.182.00	Kec. Banding Agung
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase pelaksanaan	100%	100%	2.635.256.334.00	100%	2.727.490.305.00	100%	2.822.952.466.00	100%	2.921.755.802.00	100%	3.024.017.255.00	Kec. Mda Kisam

Bidang Urusan/Program/Outcome	Indicator Outcome	Base Line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										OPD Penanggung Jawab
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
OUTCOME: Meningkatnya Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	penunjang urusan pemerintah daerah												
Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public *OUTCOME* Meningkatnya pelayanan publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	100%	51.882.000.00	100%	53.697.870.00	100%	55.577.295.00	100%	57.522.500.00	100%	59.535.788.00	Kec. Mda Kisam
Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan *OUTCOME*: Menigkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase pemberdayaan desa dan kelurahan	100%	100%	5.255.000.00	100%	5.438.925.00	100%	5.629.287.00	100%	5.826.312.00	100%	6.030.233.00	Kec. Mda Kisam
Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum *OUTCOME*: Meningkatnya ketenteraman masyarakat	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	100%	100%	5.170.000.00	100%	5.350.950.00	100%	5.538.233.00	100%	5.732.071.00	100%	5.932.693.00	Kec. Mda Kisam
Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum *OUTCOME*: Meningkatnya penyelenggaran pemerintahan umum di kecamatan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan umum yang dilaksanakan	100%	100%	5.255.000.00	100%	5.438.925.00	100%	5.629.287.00	100%	5.826.312.00	100%	6.030.233.00	Kec. Mda Kisam
Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase desa yang dilaksanakan pembinaan dan pengawasaan	100%	100%	5.257.000.00	100%	5.440.995.00	100%	5.631.429.00	100%	5.828.529.00	100%	6.032.528.00	Kec. Mda Kisam

Bidang Urusan/Program/Outcome	Indicator Outcome	Base Line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										OPD Penanggung Jawab
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
OUTCOME: Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintahan desa													
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota *OUTCOME*: Meningkatnya Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	2.603.246.467.00	100%	2.694.360.093.00	100%	2.788.662.696.00	100%	2.886.265.890.00	100%	2.987.285.197.00	Kec. Simpang
Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public *OUTCOME* Meningkatnya pelayanan publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	100%	24.128.532.00	100%	24.973.030.00	100%	25.847.086.00	100%	26.751.734.00	100%	27.688.045.00	Kec. Simpang
Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan *OUTCOME*: Menigkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase pemberdayaan desa dan kelurahan	100%	100%	5.190.000.00	100%	5.371.650.00	100%	5.559.657.00	100%	5.754.245.00	100%	5.955.644.00	Kec. Simpang
Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum *OUTCOME*: Meningkatnya ketenteraman masyarakat	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	100%	100%	5.000.000.00	100%	5.175.000.00	100%	5.356.125.00	100%	5.543.589.00	100%	5.737.615.00	Kec. Simpang
Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum *OUTCOME*: Meningkatnya penyelenggaran pemerintahan umum di kecamatan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan umum yang dilaksanakan	100%	100%	1.000.000,00	100%	1.000.000,00	100%	1.000.000,00	100%	1.000.000,00	100%	1.000.000,00	Kec. Simpang

Bidang Urusan/Program/Outcome	Indicator Outcome	Base Line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										OPD Penanggung Jawab
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa *OUTCOME*: Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintahan desa	Persentase desa yang dilaksanakan pembinaan dan pengawasaan	100%	100%	1.000.000,00	100%	1.000.000,00	100%	1.000.000,00	100%	1.000.000,00	100%	1.000.000,00	Kec. Simpang
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota *OUTCOME*: Meningkatnya Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	3.335.252.862.00	100%	3.451.986.712.00	100%	3.572.806.247.00	100%	3.697.854.465.00	100%	3.827.279.372.00	Kec. BSA
Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public *OUTCOME* Meningkatnya pelayanan publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	100%	12.217.000.00	100%	12.644.595.00	100%	13.087.155.00	100%	13.545.206.00	100%	14.019.288.00	Kec. BSA
Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan *OUTCOME*: Menigkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase pemberdayaan desa dan kelurahan	100%	100%	5.820.000.00	100%	6.023.700.00	100%	6.234.529.00	100%	6.452.738.00	100%	6.678.583.00	Kec. BSA
Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum *OUTCOME*: Meningkatnya ketenteraman masyarakat	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	100%	100%	1.000.000,00	100%	1.000.000,00	100%	1.000.000,00	100%	1.000.000,00	100%	1.000.000,00	Kec. BSA
Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan	100%	100%	1.000.000,00	100%	1.000.000,00	100%	1.000.000,00	100%	1.000.000,00	100%	1.000.000,00	Kec. BSA

Bidang Urusan/Program/Outcome	Indicator Outcome	Base Line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										OPD Penanggung Jawab
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
OUTCOME: Meningkatnya penyelenggaran pemerintahan umum di kecamatan	umum yang dilaksanakan												
Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa *OUTCOME*: Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintahan desa	Persentase desa yang dilaksanakan pembinaan dan pengawasaan	100%	100%	1.000.000,00	100%	1.000.000,00	100%	1.000.000,00	100%	1.000.000,00	100%	1.000.000,00	Kec. BSA
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota *OUTCOME*: Meningkatnya Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	2.863.197.758.00	100%	2.963.409.679.00	100%	3.067.129.018.00	100%	3.174.478.533.00	100%	3.285.585.282.00	Kec. Buay Runjung
Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public *OUTCOME* Meningkatnya pelayanan publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	100%	41.000.000.00	100%	42.435.000.00	100%	43.920.225.00	100%	45.457.432.00	100%	47.048.443.00	Kec. Buay Runjung
Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan *OUTCOME*: Menigkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase pemberdayaan desa dan kelurahan	100%	100%	10.000.000.00	100%	10.350.000.00	100%	10.712.250.00	100%	11.087.178.00	100%	11.475.230.00	Kec. Buay Runjung
Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum *OUTCOME*: Meningkatnya ketenteraman masyarakat	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	100%	100%	5.000.000.00	100%	5.175.000.00	100%	5.356.125.00	100%	5.543.589.00	100%	5.737.615.00	Kec. Buay Runjung

Bidang Urusan/Program/Outcome	Indicator Outcome	Base Line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										OPD Penanggung Jawab
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum *OUTCOME*: Meningkatnya penyelenggaran pemerintahan umum di kecamatan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan umum yang dilaksanakan	100%	100%	5.000.000.00	100%	5175000	100%	5356125	100%	5543589.38	100%	5737615	Kec. Buay Runjung
Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa *OUTCOME*: Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintahan desa	Persentase desa yang dilaksanakan pembinaan dan pengawasaan	100%	100%	15.000.000.00	100%	15.525.000.00	100%	16.068.375.00	100%	16.630.768.00	100%	17.212.845.00	Kec. Buay Runjung
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota *OUTCOME*: Meningkatnya Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	2.216.990.980.00	100%	2.294.585.664.00	100%	2.374.896.162.00	100%	2.458.017.528.00	100%	2.544.048.141.00	Kec. Mekakau Ilir
Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public *OUTCOME* Meningkatnya pelayanan publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	100%	62.118.500.00	100%	64292647.5	100%	66.542.890.00	100%	68.871.891.00	100%	71.282.407.00	Kec. Mekakau Ilir
Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan *OUTCOME*: Menigkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase pemberdayaan desa dan kelurahan	100%	100%	9.500.000.00	100%	9.832.500.00	100%	10.176.637.00	100%	10.532.819.00	100%	10.901.468.00	Kec. Mekakau Ilir

Bidang Urusan/Program/Outcome	Indicator Outcome	Base Line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										OPD Penanggung Jawab
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum *OUTCOME*: Meningkatnya ketenteraman masyarakat	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	100%	100%	1.000.000,00	100%	1.000.000,00	100%	1.000.000,00	100%	1.000.000,00	100%	1.000.000,00	Kec. Mekakau Ilir
Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum *OUTCOME*: Meningkatnya penyelenggaran pemerintahan umum di kecamatan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan umum yang dilaksanakan	100%	100%	1.000.000,00	100%	1.000.000,00	100%	1.000.000,00	100%	1.000.000,00	100%	1.000.000,00	Kec. Mekakau Ilir
Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa *OUTCOME*: Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintahan desa	Persentase desa yang dilaksanakan pembinaan dan pengawasaan	100%	100%	5.122.500.00	100%	5.301.787.00	100%	5.487.350.00	100%	5679407.31	100%	5878186.57	Kec. Mekakau Ilir
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota *OUTCOME*: Meningkatnya Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	2.027.642.847.00	100%	2.098.610.346.00	100%	2.172.061.708.00	100%	2.248.083.868.00	100%	2.326.766.803.00	Kec. Buay Pemaca
Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public *OUTCOME* Meningkatnya pelayanan publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	100%	87.992.000.00	100%	91.071.720.00	100%	94.259.230.00	100%	97.558.303.00	100%	100.972.843.00	Kec. Buay Pemaca
Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase pemberdayaan	100%	100%	5.000.000.00	100%	5.175.000.00	100%	5.356.125.00	100%	5.543.589.00	100%	5.737.615.00	Kec. Buay Pemaca

Bidang Urusan/Program/Outcome	Indicator Outcome	Base Line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										OPD Penanggung Jawab
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
OUTCOME: Menigkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	desa dan kelurahan												
Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum *OUTCOME*: Meningkatnya ketenteraman masyarakat	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	100%	100%	5.000.000.00	100%	5.175.000.00	100%	5.356.125.00	100%	5.543.589.00	100%	5.737.615.00	Kec. Buay Pemaca
Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum *OUTCOME*: Meningkatnya penyelenggaran pemerintahan umum di kecamatan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan umum yang dilaksanakan	100%	100%	5.000.000.00	100%	5.175.000.00	100%	5.356.125.00	100%	5.543.589.00	100%	5.737.615.00	Kec. Buay Pemaca
Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa *OUTCOME*: Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintahan desa	Persentase desa yang dilaksanakan pembinaan dan pengawasaan	100%	100%	15.000.000.00	100%	15.525.000.00	100%	16.068.375.00	100%	16.630.768.00	100%	17.212.845.00	Kec. Buay Pemaca
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota *OUTCOME*: Meningkatnya Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	2.341.882.832.00	100%	2.423.848.731.00	100%	2.508.683.436.00	100%	2.596.487.356.00	100%	2.687.364.414.00	Kec. Kisam Tinggi
Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public *OUTCOME*	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	100%	64.420.100.00	100%	66.674.803.00	100%	69.008.421.00	100%	71.423.716.00	100%	73.923.546.00	Kec. Kisam Tinggi

Bidang Urusan/Program/Outcome	Indicator Outcome	Base Line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										OPD Penanggung Jawab
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Meningkatnya pelayanan publik													
Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan *OUTCOME*: Menigkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase pemberdayaan desa dan kelurahan	100%	100%	5.005.000.00	100%	5.180.175.00	100%	5.361.481.00	100%	5.549.132.00	100%	5.743.352.00	Kec. Kisam Tinggi
Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum *OUTCOME*: Meningkatnya ketenteraman masyarakat	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	100%	100%	5.600.000.00	100%	5.796.000.00	100%	5.998.860.00	100%	6.208.820.00	100%	6.426.128.00	Kec. Kisam Tinggi
Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum *OUTCOME*: Meningkatnya penyelenggaran pemerintahan umum di kecamatan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan umum yang dilaksanakan	100%	100%	5.500.000.00	100%	5.692.500.00	100%	5.891.737.00	100%	6.097.948.00	100%	6.311.376.00	Kec. Kisam Tinggi
Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa *OUTCOME*: Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintahan desa	Persentase desa yang dilaksanakan pembinaan dan pengawasaan	100%	100%	5.500.000.00	100%	5.692.500.00	100%	5.891.737.00	100%	6.097.948.00	100%	6.311.376.00	Kec. Kisam Tinggi
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota *OUTCOME*: Meningkatnya Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	1.499.198.572.00	100%	1.551.670.522.00	100%	1.605.978.990.00	100%	1.662.188.254.00	100%	1.720.364.843.00	Kec. Kisam Ilir

Bidang Urusan/Program/Outcome	Indicator Outcome	Base Line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										OPD Penanggung Jawab
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public *OUTCOME* Meningkatnya pelayanan publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	100%	70.000.000.00	100%	72.450.000.00	100%	74.985.750.00	100%	77.610.251.00	100%	80.326.610.00	Kec. Kisam Ilir
Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan *OUTCOME*: Menigkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase pemberdayaan desa dan kelurahan	100%	100%	9.998.000.00	100%	10.347.930.00	100%	10.710.107.00	100%	11.084.961.00	100%	11.472.934.00	Kec. Kisam Ilir
Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum *OUTCOME*: Meningkatnya ketenteraman masyarakat	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	100%	100%	4.999.000.00	100%	5.173.965.00	100%	5.355.053.00	100%	5.542.480.00	100%	5.736.467.00	Kec. Kisam Ilir
Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum *OUTCOME*: Meningkatnya penyelenggaran pemerintahan umum di kecamatan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan umum yang dilaksanakan	100%	100%	1.000.000,00	100%	1.000.000,00	100%	1.000.000,00	100%	1.000.000,00	100%	1.000.000,00	Kec. Kisam Ilir
Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa *OUTCOME*: Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintahan desa	Persentase desa yang dilaksanakan pembinaan dan pengawasaan	100%	100%	1.000.000,00	100%	1.000.000,00	100%	1.000.000,00	100%	1.000.000,00	100%	1.000.000,00	Kec. Kisam Ilir
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota *OUTCOME*:	Presentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	4.010.634.224.00	100%	4.151.006.421.00	100%	4.296.291.646.00	100%	4.446.661.854.00	100%	4.602.295.019.00	Kec. BPR Ranau Tengah

Bidang Urusan/Program/Outcome	Indicator Outcome	Base Line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										OPD Penanggung Jawab
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Meningkatnya Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah													
Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public *OUTCOME* Meningkatnya pelayanan publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	100%	65.968.100.00	100%	68.276.983.00	100%	70.666.677.00	100%	73.140.011.00	100%	75.699.912.00	Kec. BPR Ranau Tengah
Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan *OUTCOME*: Menigkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase pemberdayaan desa dan kelurahan	100%	100%	304.650.432.00	100%	315.313.197.00	100%	326.349.159.00	100%	337.771.379.00	100%	349.593.377.00	Kec. BPR Ranau Tengah
Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum *OUTCOME*: Meningkatnya ketenteraman masyarakat	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	100%	100%	1.000.000,00	100%	1.000.000,00	100%	1.000.000,00	100%	1.000.000,00	100%	1.000.000,00	Kec. BPR Ranau Tengah
Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum *OUTCOME*: Meningkatnya penyelenggaran pemerintahan umum di kecamatan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan umum yang dilaksanakan	100%	100%	1.000.000,00	100%	1.000.000,00	100%	1.000.000,00	100%	1.000.000,00	100%	1.000.000,00	Kec. BPR Ranau Tengah
Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa *OUTCOME*: Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintahan desa	Persentase desa yang dilaksanakan pembinaan dan pengawasaan	100%	100%	10.000.000.00	100%	10.350.000.00	100%	10.712.250.00	100%	11.087.178.00	100%	11.475.230.00	Kec. BPR Ranau Tengah

Bidang Urusan/Program/Outcome	Indicator Outcome	Base Line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										OPD Penanggung Jawab
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota *OUTCOME*: Meningkatnya Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	2.772.967.958.00	100%	2.870.021.836.00	100%	2.970.472.600.00	100%	3.074.439.141.00	100%	3.182.044.511.00	Kec. Warkuk Ranau Selatan
Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public *OUTCOME* Meningkatnya pelayanan publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	100%	43.445.000.00	100%	44.965.575.00	100%	46.539.370.00	100%	48.168.248.00	100%	49.854.136.00	Kec. Warkuk Ranau Selatan
Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan *OUTCOME*: Menigkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase pemberdayaan desa dan kelurahan	100%	100%	5.040.000.00	100%	5.216.400.00	100%	5.398.974.00	100%	5.587.938.00	100%	5.783.515.00	Kec. Warkuk Ranau Selatan
Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum *OUTCOME*: Meningkatnya ketenteraman masyarakat	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	100%	100%	1.000.000,00	100%	1.000.000,00	100%	1.000.000,00	100%	1.000.000,00	100%	1.000.000,00	Kec. Warkuk Ranau Selatan
Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum *OUTCOME*: Meningkatnya penyelenggaran pemerintahan umum di kecamatan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan umum yang dilaksanakan	100%	100%	5.040.000.00	100%	5.216.400.00	100%	5.398.974.00	100%	5.587.938.00	100%	5.783.515.00	Kec. Warkuk Ranau Selatan
Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase desa yang dilaksanakan	100%	100%	5.040.000.00	100%	5.216.400.00	100%	5.398.974.00	100%	5.587.938.00	100%	5.783.515.00	Kec. Warkuk

Bidang Urusan/Program/Outcome	Indicator Outcome	Base Line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										OPD Penanggung Jawab
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
OUTCOME: Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintahan desa	pembinaan dan pengawasaan												Ranau Selatan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota *OUTCOME*: Meningkatnya Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	2.056.855.640.00	100%	2.128.845.587.00	100%	2.203.355.182.00	100%	2.280.472.614.00	100%	2.360.289.155.00	Kec. Runjung Agung
Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public *OUTCOME* Meningkatnya pelayanan publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	100%	47.125.000.00	100%	48.774.375.00	100%	50.481.478.00	100%	52.248.329.00	100%	54.077.021.00	Kec. Runjung Agung
Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan *OUTCOME*: Menigkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase pemberdayaan desa dan kelurahan	100%	100%	9.300.000.00	100%	9.625.500.00	100%	9.962.392.00	100%	10.311.076.00	100%	10.671.963.00	Kec. Runjung Agung
Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum *OUTCOME*: Meningkatnya ketenteraman masyarakat	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	100%	100%	1.250.000.00	100%	1.293.750.00	100%	1.339.031.00	100%	1.385.897.00	100%	1.434.403.00	Kec. Runjung Agung
Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum *OUTCOME*: Meningkatnya penyelenggaran	Persentase penyelenggaraan pemerintahan umum yang dilaksanakan	100%	100%	2.000.000.00	100%	2.070.000.00	100%	2.142.450.00	100%	2.217.435.00	100%	2.295.046.00	Kec. Runjung Agung

Bidang Urusan/Program/Outcome	Indicator Outcome	Base Line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										OPD Penanggung Jawab
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
pemerintahan umum di kecamatan													
Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa *OUTCOME*: Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintahan desa	Persentase desa yang dilaksanakan pembinaan dan pengawasaan	100%	100%	3.000.000.00	100%	3.105.000.00	100%	3.213.675.00	100%	3.326.153.00	100%	3.442.569.00	Kec. Runjung Agung
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota *OUTCOME*: Meningkatnya Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	1.411.869.360.00	100%	1.461.284.787.00	100%	1.512.429.755.00	100%	1.565.364.796.00	100%	1.620.152.564.00	Kec. Sungai Are
Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public *OUTCOME* Meningkatnya pelayanan publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	100%	66.198.100.00	100%	68.515.033.00	100%	70.913.059.00	100%	73.395.016.00	100%	75.963.842.00	Kec. Sungai Are
Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan *OUTCOME*: Menigkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase pemberdayaan desa dan kelurahan	100%	100%	5.000.000.00	100%	5.175.000.00	100%	5.356.125.00	100%	5.543.589.00	100%	5.737.615.00	Kec. Sungai Are
Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum *OUTCOME*: Meningkatnya ketenteraman masyarakat	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	100%	100%	1.000.000,00	100%	1.000.000,00	100%	1.000.000,00	100%	1.000.000,00	100%	1.000.000,00	Kec. Sungai Are

Bidang Urusan/Program/Outcome	Indicator Outcome	Base Line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										OPD Penanggung Jawab
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum *OUTCOME*: Meningkatnya penyelenggaran pemerintahan umum di kecamatan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan umum yang dilaksanakan	100%	100%	5.000.000.00	100%	5.175.000.00	100%	5.356.125.00	100%	5.543.589.00	100%	5.737.615.00	Kec. Sungai Are
Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa *OUTCOME*: Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintahan desa	Persentase desa yang dilaksanakan pembinaan dan pengawasaan	100%	100%	5.000.000.00	100%	5.175.000.00	100%	5.356.125.00	100%	5.543.589.00	100%	5.737.615.00	Kec. Sungai Are
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota *OUTCOME*: Meningkatnya Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	1.272.525.226.00	100%	1.317.063.608.00	100%	1.363.160.835.00	100%	1.410.871.464.00	100%	1.460.251.965.00	Kec. Sindang Danau
Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public *OUTCOME* Meningkatnya pelayanan publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	100%	62.047.000.00	100%	64.218.645.00	100%	66.466.297.00	100%	68.792.617.00	100%	71.200.359.00	Kec. Sindang Danau
Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan *OUTCOME*: Menigkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase pemberdayaan desa dan kelurahan	100%	100%	5.000.000.00	100%	5.175.000.00	100%	5.356.125.00	100%	5.543.589.00	100%	5.737.615.00	Kec. Sindang Danau

Bidang Urusan/Program/Outcome	Indicator Outcome	Base Line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										OPD Penanggung Jawab
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum *OUTCOME*: Meningkatnya ketenteraman masyarakat	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	100%	100%	1.000.000,00	100%	1.000.000,00	100%	1.000.000,00	100%	1.000.000,00	100%	1.000.000,00	Kec. Sindang Danau
Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum *OUTCOME*: Meningkatnya penyelenggaran pemerintahan umum di kecamatan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan umum yang dilaksanakan	100%	100%	5.000.000.00	100%	5.175.000.00	100%	5.356.125.00	100%	5.543.589.00	100%	5.737.615.00	Kec. Sindang Danau
Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa *OUTCOME*: Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintahan desa	Persentase desa yang dilaksanakan pembinaan dan pengawasaan	100%	100%	5.000.000.00	100%	5.175.000.00	100%	5.356.125.00	100%	5.543.589.00	100%	5.737.615.00	Kec. Sindang Danau
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota *OUTCOME*: Meningkatnya Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	1.813.896.637.00	100%	1.877.383.019.00	100%	1.943.091.424.00	100%	2.011.099.624.00	100%	2.081.488.111.00	Kec. Buana Pemaca
Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public *OUTCOME* Meningkatnya pelayanan publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	100%	51.205.000.00	100%	52.997.175.00	100%	54.852.076.00	100%	56.771.898.00	100%	58.758.915.00	Kec. Buana Pemaca
Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase pemberdayaan	100%	100%	10.000.000.00	100%	10.350.000.00	100%	10.712.250.00	100%	11.087.178.00	100%	11.475.230.00	Kec. Buana Pemaca

Bidang Urusan/Program/Outcome	Indicator Outcome	Base Line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										OPD Penanggung Jawab
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
OUTCOME: Menigkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	desa dan kelurahan												
Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum *OUTCOME*: Meningkatnya ketenteraman masyarakat	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	100%	100%	5.000.000.00	100%	5.175.000.00	100%	5.356.125.00	100%	5.543.589.00	100%	5.737.615.00	Kec. Buana Pemaca
Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum *OUTCOME*: Meningkatnya penyelenggaran pemerintahan umum di kecamatan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan umum yang dilaksanakan	100%	100%	5.000.000.00	100%	5.175.000.00	100%	5.356.125.00	100%	5.543.589.00	100%	5.737.615.00	Kec. Buana Pemaca
Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa *OUTCOME*: Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintahan desa	Persentase desa yang dilaksanakan pembinaan dan pengawasaan	100%	100%	15.000.000.00	100%	15.525.000.00	100%	16.068.375.00	100%	16.630.768.00	100%	17.212.845.00	Kec. Buana Pemaca
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota *OUTCOME*: Meningkatnya Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	1.909.065.062.00	100%	1.975.882.339.00	100%	2.045.038.221.00	100%	2.116.614.558.00	100%	2.190.696.068.00	Kec. Tiga Dihaji
Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public *OUTCOME*	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	100%	34.464.000.00	100%	35.670.240.00	100%	36.918.698.00	100%	38.210.852.00	100%	39.548.232.00	Kec. Tiga Dihaji

Bidang Urusan/Program/Outcome	Indicator Outcome	Base Line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										OPD Penanggung Jawab
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Meningkatnya pelayanan publik													
Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan *OUTCOME*: Menigkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase pemberdayaan desa dan kelurahan	100%	100%	1.000.000,00	100%	1.000.000,00	100%	1.000.000,00	100%	1.000.000,00	100%	1.000.000,00	Kec. Tiga Dihaji
Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum *OUTCOME*: Meningkatnya ketenteraman masyarakat	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	100%	100%	1.000.000,00	100%	1.000.000,00	100%	1.000.000,00	100%	1.000.000,00	100%	1.000.000,00	Kec. Tiga Dihaji
Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum *OUTCOME*: Meningkatnya penyelenggaran pemerintahan umum di kecamatan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan umum yang dilaksanakan	100%	100%	1.000.000,00	100%	1.000.000,00	100%	1.000.000,00	100%	1.000.000,00	100%	1.000.000,00	Kec. Tiga Dihaji
Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa *OUTCOME*: Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintahan desa	Persentase desa yang dilaksanakan pembinaan dan pengawasaan	100%	100%	6.105.000.00	100%	6.318.675.00		6.539.828.00		6.768.722.00		7.005.627.00	Kec. Tiga Dihaji
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota *OUTCOME*: Meningkatnya Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	1.925.112.382.00	100%	1.992.491.315.00		2.062.228.511.00		2.134.406.509.00		2.209.110.737.00	Kec. Buay Rawan

Bidang Urusan/Program/Outcome	Indicator Outcome	Base Line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										OPD Penanggung Jawab
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public *OUTCOME* Meningkatnya pelayanan publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	100%	51.863.000.00	100%	53.678.205.00		55.556.942.00		57.501.435.00		59.513.985.00	Kec. Buay Rawan
Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan *OUTCOME*: Menigkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase pemberdayaan desa dan kelurahan	100%	100%	13.436.000.00	100%	13.906.260.00		14.392.979.00		14.896.733.00		15.418.119.00	Kec. Buay Rawan
Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum *OUTCOME*: Meningkatnya ketenteraman masyarakat	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	100%	100%	2.000.000.00	100%	2.070.000.00		2.142.450.00		2.217.435.00		2.295.046.00	Kec. Buay Rawan
Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum *OUTCOME*: Meningkatnya penyelenggaran pemerintahan umum di kecamatan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan umum yang dilaksanakan	100%	100%	1.500.000.00	100%	1.552.500.00		1.606.837.00		1.663.076.00		1.721.284.00	Kec. Buay Rawan
Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa *OUTCOME*: Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintahan desa	Persentase desa yang dilaksanakan pembinaan dan pengawasaan	100%	100%	11.000.000.00	100%	11.385.000.00		11.783.475.00		12.195.896.00		12.622.753.00	Kec. Buay Rawan
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM													
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK													

Bidang Urusan/Program/Outcome	Indicator Outcome	Base Line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										OPD Penanggung Jawab
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota *OUTCOME*: Meningkatnya Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	2.865.712.180,00		2.885.712.180,00		3.344.054.616,00		4.009.265.539,00		4.807.518.647,00	Badan Kesbang Pol
Program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan *OUTCOME*: Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah konflik IPOLEKSOSBUD			82.940.450.00		82.940.450.00		82.940.450.00		82.940.450.00		82.940.450.00	Badan Kesbang Pol
	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan												
Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik *OUTCOME*: Meningkatnya etika dan budaya politik	Tingkat Partispasi politik masyarakat dalam pemilu serentak			120.456.210.00		2.120.456.210.00		2.226.479.020.50		2.337.802.971.53		32.454.693.120.10	Badan Kesbang Pol
	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik												
Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan *OUTCOME*: Meningkatnya Ketertiban organisasi kemasyarakatan	Jumlah konflik IPOLEKSOSBUD			20.000.000.00		20.000.000.00		200.000.00		200.000.00		200.000.00	Badan Kesbang Pol
	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif												
Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi. sosial. dan budaya	Jumlah konflik IPOLEKSOSBUD		100%	1.000.000,00	100%	1.000.000,00	100%	1.000.000,00	100%	1.000.000,00	100%	1.000.000,00	Badan Kesbang Pol
	Persentase Kebijakan di												

Bidang Urusan/Program/Outcome	Indicator Outcome	Base Line 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										OPD Penanggung Jawab
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
OUTCOME: Meningkatnya ketahanan ekonomi. sosial dan budaya masyarakat	Bidang Ekonomi. Sosial. Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika. Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan												
Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik social *OUTCOME*: Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Jumlah konflik IPOLEKSOSBUD			356.659.000.00		356.659.000.00		356.659.000.00		356.659.000.00		356.659.000.00	Badan Kesbang Pol
	Persentase Konflik Sosial yang diselesaikan												
TOTAL				**1.563.658.047.769.00**		**1.605.443.917.443.00**		**1.661.258.189.459.00**		**1.701.525.688.370.00**		**1.743.510.309.860.00**	

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perlu diawali dengan perencanaan kinerja. Proses ini diawali dengan penetapan Indikator Kinerja yang berfungsi sebagai acuan utama dalam menentukan arah dan ukuran keberhasilan suatu organisasi. Penetapan Indikator Kinerja bertujuan untuk merumuskan secara jelas mengenai tujuan yang ingin dicapai serta metode pengukurannya guna memastikan transparansi dalam proses perencanaan. Indikator Kinerja Daerah memiliki peran strategis dalam mengevaluasi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah serta Wakil Kepala Daerah. Indikator ini dikategorikan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU), yang mencerminkan target utama yang ingin dicapai, serta Indikator Kinerja Kunci (IKK), yang mengukur efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sebagai alat ukur, indikator kinerja berfungsi untuk mengidentifikasi perubahan yang terjadi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam suatu kondisi tertentu. Lebih lanjut, indikator ini memiliki 2 (dua) fungsi utama, yaitu: (1) memberikan kejelasan terkait capaian, ukuran, serta progres pelaksanaan program, kebijakan, atau kegiatan suatu organisasi; dan (2) membangun kesepahaman di antara berbagai pemangku kepentingan guna meminimalisir perbedaan persepsi dalam implementasi serta evaluasi kebijakan dan program. Dengan demikian, penetapan indikator kinerja daerah berfungsi sebagai pedoman dalam menilai tingkat keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakilnya. IKU dan IKK menjadi instrumen evaluasi utama yang akan digunakan pada akhir periode kepemimpinan guna memastikan akuntabilitas serta efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah

4.2.1. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan alat ukur yang digunakan untuk menilai kinerja perangkat daerah dalam mendukung pencapaian target kinerja Kepala Daerah. IKU juga berfungsi sebagai sarana untuk mengukur keberhasilan Kepala Daerah dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan, melalui penentuan tujuan, sasaran, dan strategi yang telah dirumuskan. Berikut adalah Indikator Makro dan Indikator Kinerja Utama yang digunakan untuk menilai sasaran pembangunan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan periode 2025-2029 :

Tabel IV.2
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2025-2030

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Pertumbuhan ekonomi	Persen	4,65	5,00	5,30	5,50	5,70	6,00	Sekretariat Daerah
2.	Persentase penduduk miskin	Persen	9,50	9,30	9,22	8,90	8,59	8,28	Bapperida
3.	PDRB per Kapita (ADHB)	Juta Rupiah	28,44	29,27	30,11	30,95	31,78	32,62	Bapperida
4.	Indeks gini rasio	Indeks	0,344	0,327	0,311	0,295	0,278	0,262	Bapperida
5.	Tingkat pengangguran terbuka (TPT)	1,80	1,79	1,78	1,76	1,74	1,73	1,71	Distransnaker
6.	Nilai tukar petani (NTP)	Persen	122,00	124,00	125,00	126,00	128,00	129,00	Dinas Pertanian
7.	Indeks pembangunan manusia (IPM)	Persen	72,40	74,80	77,20	79,60	82,00	84,40	Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan
8.	Indeks Sakip	Skor	65,50 (B)	67,30 (B)	69,01 (B)	72,01 (BB)	76,50 (BB)	80,01 (A)	Semua Perangkat Daerah
9.	Indeks reformasi birokrasi	Indeks	65,70 (B)	67,02 B	70,50 (BB)	73,01 (BB)	77,00 (BB)	80,70 (A)	Semua Perangkat Daerah
10.	Angka kriminalitas	Persen	0,030	0,026	0,021	0,018	0,015	0,009	Badan Kesbangpol
11.	Indeks daya saing daerah	Indeks	3,30	3,50	3,70	3,90	4,00	4,00	Bapperida
12.	Indeks kualitas lingkungan hidup	Indeks	69,61	69,86	70,11	70,36	70,51	70,87	Dinas Lingkungan Hidup
13.	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Kumulatif (Ton CO_2-e)		155.181, 23	168.302, 39	181.423, 55	194.544, 71	207.665, 87	220.787, 03	Dinas Lingkungan Hidup
14.	Indeks Harmoni Indonesia	Indeks	6,5	6,6	6,7	6,8	6,9	7,0	Badan Kesbangpol
15.	PAD sektor pariwisata	Milyar	2,00	2,10	2,31	2,54	2,8	3,07	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
16.	Indeks Pelayanan Publik	Angka	4,50	4,60	4,70	4,80	4,90	4,95	Semua Perangkat Daerah

4.2.2. Indikator Kinerja Daerah (IKD)

Indikator Kinerja Kunci (IKK), merupakan indikator perangkat daerah sesuai dengan urusan yang diemban dalam rangka menunjang pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran daerah. IKK pada awalnya dikembangkan dari Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (P-EPPD). Indikator Kinerja Kunci (IKK) dalam Evaluasi Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah (EKPOD). Kaidah imperatif pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 dengan merumuskan pedoman evaluasi daerah yang meliputi: evaluasi terhadap penyelenggaraan otonomi daerah dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Tabel IV.3
Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kabupaten OKU Selatan Tahun 2025-2030

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
I.	**ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI**								
1.	Indeks Ketahanan Pangan	Angka	75,5	75,55	75,68	76,5	77,5	78	
2.	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan	%	13	12	11	10	9	8	
3.	Konsumsi Listrik Per Kapita	kWh/kapita	750	780	810	830	870	910	
4.	Akses Rumah Tangga terhadap Air Minum Perpipaan	%	34	42	47	51	55	67	
5.	Rumah Tangga Menggunakan Sumber Air Minum Bersih	%	55,5	56	56,5	57	57,5	60	
6.	Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Air Minum Layak	%	81	82	83	84	85	86	
7.	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	%	59,97	61	62,4	63,67	64,74	70	
8.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Angka	69,60	69,60	69,86	70,11	70,36	70,62	
9.	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Angka	0,32	0,33	0,34	0,34	0,36	0,37	

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
10.	Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Sanitasi Layak	%	63,6	63,8	64	64,2	64,6	64,8	
11.	Pengelolaan sampah (Timbunan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah)	%	40,89	42	43	45	46,02	48	
12.	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Kumulatif (Ton CO_2-e	ton CO2-Ekuivalen	155.181,23	168.302,39	181.423,55	194.544,71	207.665,87	220.787,03	
13.	Persentase Penurunan Emisi GRK								
	- Persentase Penurunan Kumulatif	%	47,52	47,56	47,58	47,6	47,64	47,7	
	- Persentase Penurunan Tahunan	%	50,3	50,3	50,3	50,3	50,94	50,3	
	- Proyeksi Emisi Tahunan	ton CO2 eq	1.086.860,41	1.100.860,41	1.120.860,41	1.134.860,41	1.144.520,48	1.167.860,41	
14.	Ketahanan Energi	Angka	5,97	6,02	6,12	6,45	6,66	6,89	
15.	Kapasitas Tampungan Air	m3/detik	95,22	110,21	124,54	140,21	149,39	165,21	
16.	Indeks Risiko Bencana	Angka	60	50	40	30	20	10	
17.	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	-3,1	-3	-2,9	-2,7	-2,6	-2,5	
18.	Kepadatan Penduduk	Orang/km2	73,8	73,7	73,6	73,5	73,4	73,3	

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
II.	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**								
1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,65	5,00	5,30	5,50	5,70	6,00	
2.	Tingkat Kemiskinan	%	9,50	9,30	9,22	8,90	8,59	8,28	
3.	PDRB Per Kapita	Rp Juta	28,44	29,27	30,11	30,95	31,78	32,62	
4.	Tingkat pengangguran terbuka	%	1,79	1,78	1,76	1,74	1,73	1,71	
5.	Indeks Gini	Angka	0,344	0,327	0,311	0,295	0,278	0,262	
6.	Indeks Modal Manusia/Indeks Pembangunan Manusia	Angka	72,40	74,80	77,20	79,60	82,00	84,40	
7.	Usia Harapan Hidup	Tahun	73,64	74,03	74,42	74,81	75,21	75,61	
8.	Indeks Keluarga Sehat	Angka	0,6	0,81	0,84	0,87	0,9	0,94	
9.	Prevalensi Stunting	%	12	11,8	11,6	11,4	11,2	12,2	
10.	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,43	8,68	8,76	8,98	9,05	9,2	
11.	Harapan Lama Sekolah	Tahun	11,9	11,92	11,94	12	12,5	12,9	
12.	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	%	22,82	23,98	24,54	25,01	26,68	27,34	
13.	Indeks pembangunan literasi masyarakat	Angka	32	35	38	42	46	51	
14.	Indeks Masyarakat Digital	Angka	45	47	48	49	50	52	

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
15.	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	%	40	41	42	43	44	45	
16.	Indeks kerukunan umat beragama (IKUB)	Angka	78	78,5	79	79,5	80	80,5	
17.	Indeks pembangunan kebudayaan	Angka	40	45,6	49,7	54,2	58,7	59	
18.	Indeks pembangunan kualitas keluarga	Angka	68.04	69,29	69,55	69,8	70,05	70,3	
19.	Indeks Ketimpangan Gender	Angka	0,379	0,366	0,354	0.341	0,328	0,316	
20.	Indeks pembangunan gender (IPG)	Angka	94	95	96	97	98	99	
21.	Indeks pemberdayaan gendar (IDG)	Angka	60,00	61,00	62,00	63,00	64,00	65,00	
22.	Kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB	%	8,19	8,20	8,21	8,22	8,23	8,24	
23.	Kontribusi perdagangan besar dan eceran reparasi mobil dan sepeda motor terhadap PDRB	%	24,44	24,45	24,46	24,47	24,48	24,49	
24.	Tingkat partisripasi angkatan kerja	%	81,00	83,00	84,00	86,00	87,00	89,00	
25.	Kontriubusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap PDRB	%	30,5	32	35	36	37	38	
26.	Kabupaten/Kota Sehat		Padapa (9.656)	-	Wiwerda (11.016)	-	Wastara (12.376)	-	
27.	Cakupan peserta KB aktif	%	74,00	76,00	79,00	83,00	87,00	92,00	
28.	Rasio angka kelahiran	Angka	2,32	2,22	2,12	2,02	1,92	1,82	

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
29.	Kabupaten layak anak		Nindya (700-800)	Nindya (700-800)	Nindya (700-800)	Nindya (700-800)	Utama (800-900)	Utama (800-900)	
30.	Anugerah Parahita Ekapraya (APE)		Pratama (500-600)	Madya (600-700)	Madya (600-700)	Nindya (700-800)	Nindya (700-800)	Utama (800-900)	
31.	Opini BPK		WTP (>85)	WTP (>85)	WTP (>85)	WTP (>85)	WTP (>85)	WTP (>85)	
32.	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Angka	74	78	81,5	82	84	85	
33.	Indeks Akses Keuangan Daerah	Indeks	2,34	2,47	2,53	2,59	2,66	2,72	
34.	Persentase derajat otonomi fiskal daerah	%	6,4	6,8	7,00	7,30	7,50	7,80	
35.	Indeks kualitas air	Angka	63	65	67	68	69	70	
36.	Indeks Kualitas Udara	Angka	93	94	95	96	96,6	97	
37.	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Angka	43	44	45	45,5	46	47	
38.	Persentase wirausaha muda	%	20	35	45	50	75	85	
39.	Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	81.00	83.00	84.00	86.00	87.00	89.00	
40.	Persentase PMKS yang tertangani	%	32	35	39	44	50	56	
41.	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk numerasi	%	18,71	21,33	25,17	30,71	38,70	50,31	
42.	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca	%	20,28	23,12	27,28	33,28	41,94	54,52	

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
III.	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**								
1.	Angka Ketergantungan	%	42,3	41,7	41,2	40,7	40,1	39,5	
2.	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	8,19	8,2	8,21	8,22	8,22	8,23	
3.	Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum	%	0,5	0,6	0,7	0,9	1	1,2	
4.	Rasio Kewirausahaan	%	22,09	22,3	22,9	23,6	24,03	25	
5.	Tingkat partisripasi angkatan kerja	%	81	83	84	86	87	89	
6.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	56,52	56,78	57,21	57,9	58,8	58,9	
7.	Indeks Inovasi Daerah	Angka	46,41	48	49	51	53	55	
8.	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	Rp	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600	
9.	Net Ekspor Barang dan Jasa	%	-7	-4	1	2	3	4	
10.	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	%	58,42	58,54	58,69	58,8	59,91	60,2	
11.	Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB ADHB	%	0,34	0,356	0,375	0,389	0,409	0,423	
12.	Kontribusi PDRB Sub Sektor Perikanan	%	3,1	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5	

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
13.	Kontribusi PDRB Kabupaten OKU Selatan di Provinsi Sumatera Selatan	%	2,06	2,1	2,3	2,4	2,58	2,7	
14.	Indeks Perkembangan Harga	Angka	2	2	2	2	2	2	
15.	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB	%	3	4	5	6	7	8	
16.	Nilai Transaksi Saham Per Kapita Per Provinsi (Rupiah)	Rp.	100.000	110.000	115.000	120.000	125.000	134.000	
17.	Total Kredit/PDRB	%	1,5	1,6	1,7	1,8	20	2,2	
18.	Rasio PDRB Sektor Jasa Keuangan	%	0,7	0,71	0,714	0,718	0,72	0,73	
19.	Persentase Desa Mandiri	%	0	1,59	4,37	5,95	7,14	7,94	
20.	Persentase Desa Maju	%	23,02	29,76	34,13	39,68	59,92	67,06	
IV.	**ASPEK PELAYANAN UMUM**								
1.	Indeks Reformasi Hukum	Angka	40	41	42	43	43	45	
2.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Angka	2,5	2,52	2,54	2,56	2,58	2,6	
3.	Indeks Pelayanan Publik	Angka	4,50	4,60	4,70	4,80	4,90	4,95	
4.	Persentase Penegakan Peraturan Daerah	%	100	100	100	100	100	100	
5.	Persentasi Capaian Aksi HAM	%	75,,00	76	77	78	78	79	

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
6.	Indeks Demokrasi Indonesia	%	70	70,5	71	71,5	72	72,5	
7.	Angka Kriminalitas	Angka	0,030	0,026	0,021	0,018	0,015	0,009	
8.	Indeks Daya Saing Daerah	Angka	3,30	3,50	3,70	3,90	4,00	4,00	
9.	Survey Penilaian Integritas (SPI)	Angka	67	68	68	69	69	70	
10.	Persentase Perda yang disahkan oleh DPRD	%	70	70	70	70	72	70	
11.	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu Terakhir (5 Tahunan)	%	70	71	72	73	75	76	
12.	Indeks Sakip	Skala	65,50 (B)	67,30 (B)	69,01 (B)	72,01 (BB)	76,50 (BB)	80,01 (A)	
13.	Skor maturitas SPIP	Angka	3,06	3,08	3,09	3,1	3,12	3,14	
14.	Indeks Berakhlak	Angka	Cukup Sehat (60-70)	Cukup Sehat (60-70)	Cukup Sehat (60-70)	Sehat (70-85)	Sehat (70-85)	Sangat Sehat (86-100)	
15.	Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kepegawaian	Nilai	B (84)	B (84,25)	B (84,50)	B (84,75)	B (85,50)	A (90)	
16.	Indeks kepuasan Masyarakat	Angka	82,78	83,28	83,58	83,78	84,28	84,78	
17.	Cakupan layanan telekomunikasi	%	65,77	69,53	74,53	81	88,46	94,53	
18.	Persentase penggunaan arsip digital	%	50	70	90	100	100	100	
19.	Indeks tata kelola pengadaan	Angka	55,05	58,05	61,05	64,05	67,05	70,05	
20.	Proporsi penduduk yang marasa aman berjalan sendirian diarea tempat tinggalnya	%	100	100	100	100	100	100	
21.	Persentase penegakan Perda	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
22.	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang teratasi	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
23.	Pemasangan rambu rambu	Unit	1319	1557	1757	900	850	400	
24.	Persentase jalan dalam kondisi mantap	%	71,87	75,69	79,97	84,54	89,63	92,23	
25.	Persentase irigasi dalam kondisi baik	%	61,991	62,208	62,481	63,022	63,112	63,836	
26.	Rasio rumah layak huni	%	77,06	77,1	77,3	77,5	77,8	78	
27.	Rasio elektrikfikasi	%	92,91	100	100	100	100	100	
28.	Persentase luas lahan bersertifikat	%	30	34	36	42	46	50	
29.	Respon cepat darurat bencana	%	100	100	100	100	100	100	
30.	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	%	70	73,5	77	80,5	84	87,5	
V.	**INDIKATOR KINERJA KUNCI**								
A.	**Pendidikan**								
1.	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	%	22,82	23,98	24,54	25,01	26,68	27,34	
2.	Angka Partisipasi Kasar Usia Sekolah								
	- PAUD	Persen	48,34	50,02	52,21	53,04	54,41	54,81	
	- SD/MI	Persen	111,56	111,56	111,56	111,56	111,57	111,8	
	- SMP/MTS	Persen	91,92	92,2	92,41	93,01	93,4	93,8	

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
	- SMA/SMK/MA	Persen	82,2	83,1	84,3	85	85,2	86,1	
	- Perguruan Tinggi	Persen	22,82	23	24	25	26,68	27	
3.	Angka Partisipasi Murni								
	- SD/MI	Persen	99,82	99,84	99,86	99,88	99,9	99,92	
	- SMP/MTs	Persen	80,63	81,03	81,43	81,83	82,23	82,63	
	- SMA/SMK/MA	Persen	57,86	58,86	59,86	60,86	61,86	62,86	
4.	Angka Partisipasi Sekolah								
	- 7-12	Persen	99,77	99,78	99,79	99,8	99,82	99,9	
	- 13-15	Persen	92	92,13	92,26	92,39	92,52	92,65	
	- 16-18	Persen	72,02	72,62	73,22	73,82	74,42	75,02	
5.	Angka Kelulusan								
	- Angka kelulusan (AL) SD/MI	Persen	100	100	100	100	100	100	
	- Angka kelulusan (AL) SMP/MTs	Persen	100	100	100	100	100	100	
	- Angka kelulusan (AL) SMA/ SMK/ MA	Persen	100	100	100	100	100	100	
6.	Angka Melanjutkan (AM)								
	- Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	Persen	116,86	118,36	119,86	121,36	122,86	124,36	
	- Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	Persen	90,85	92,35	93,85	95,35	96,85	98,35	

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
7.	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	Persen	99,42	99,52	99,62	99,72	99,82	100	
8.	Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik	Persen	94,62	95,42	96,22	97,02	97,82	99	
9.	Persentase SD/MI Berakreditasi Minimal B	Persen	55,29	57,29	59,29	61,29	63,29	65,29	
10.	Persentase SMP/MTs Berakreditasi Minimal B	Persen	48,16	52,16	56,16	60,16	64,16	68,16	
11.	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar								
	- SD/MI	Rasio	0,149	0,151	0,153	0,155	0,157	0,159	
	- SMP/MTs	Rasio	0,217	0,219	0,221	0,223	0,225	0,227	
12.	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar								
	- SD/MI	Rasio	01:11	01:10,7	01:10,2	01:09,8	01:09,6	01:09	
	- SMP/MTs	Rasio	01:09	01:08,7	01:08,2	01:07,9	01:07,5	01:07,1	
13.	Rasio guru terhadap murid pendidikan menengah	Rasio	01:13	01:12	01:12	01:11	01:10	01:10	
14.	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	Persen	91,27	92,27	93,27	94,27	95,27	96,27	
15.	Pencapaian Pemenuhan SPM PAUD	Persen	53,35	54,45	55,55	56,65	57,75	60	

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
16.	Pencapaian Pemenuhan SPM Pendidikan SD	Persen	89,57	90,17	90,77	91,37	91,97	92,57	
17.	Pencapaian Pemenuhan SPM Pendidikan SMP	Persen	53,04	54,54	56,04	57,54	59,04	60,54	
18.	Pencapaian Pemenuhan SPM Pendidikan Kesetaraan	Persen	3,97	4,47	4,97	5,47	5,97	6,47	
B.	**Kesehatan**								
1	Angka Kesakitan	Persen	20,15	18	16	14	12	10	
2	Jumlah Kematian Bayi	Bayi	9	7	6	5	3	0	
3	Jumlah Kematian Ibu	Ibu	2	1	0	0	0	0	
4	Persentase balita gizi buruk	Persen	0,061	0,051	0,041	0,031	0,021	0	
5	Prevalensi balita gizi kurang	Persen	0,01	0,005	0,001	0	0	0	
6	Cakupan Desa Siaga Aktif	Persen	92,39	92,89	93,89	94,89	95,89	96,89	
7	Rasio posyandu per satuan balita	Rasio	10,01	10	9,7	9,2	8,8	8,4	
8	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	Rasio	01:07,0	01:07,0	01:07,0	01:06,5	01:06,5	01:06,5	
9	Rasio rumah sakit per satuan penduduk	Rasio	0,00232	0,00232	0,00232	0,00232	0,00232	0,00232	
10	Rasio dokter per satuan penduduk	Rasio	0,086	0,096	0,106	0,116	0,126	0,136	

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
11	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	Rasio	3,06	3,08	3,1	3,12	3,14	3,16	
12	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	Persen	77,65	71	75	79	83	97	
13	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	Persen	81,37	82,87	84,37	85,87	87,37	88,87	
14	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	Persen	100	100	100	100	100	100	
15	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	Persen	75	79	83	87	91	95	
16	Cakupan balita pneumonia yang ditangani	Persen	0	0	0	0	0	0	
17	Penanganan Tuberkulosis:	Persen							
18	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)*	Persen	100	90	85	80	70	60	
19	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)*	Persen	100	100	100	100	100	100	
20	Penderita diare yang ditangani	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
21	Angka kejadian malaria	Persen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
22	Tingkat kematian akibat malaria	Persen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23	Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
24	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	Persen	0.0005	0.0004	0	0	0	0	
25	Cakupan kunjungan bayi	Persen	87,32	89,72	92,12	94,52	96,92	99	
26	Cakupan puskesmas	Persen	0.0054	0.0054	0.0054	0.0064	0.0064	0.0064	
27	Cakupan pembantu puskesmas	Persen	13.13	13.13	13.13	13.13	13.13	13.13	
28	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	Persen	99.5	99.5	100	100	100	100	
29	Pemberian Makanan Tambahan untuk Ibu Hamil KEK	Persen	84	85	86	88	90	92	
30	Ibu hamil mengonsumsi makanan beragam	Persen	48	52	60	70	80	90	
31	Pemeriksaan kehamilan (ANC) 6 kali selama masa kehamilan		80	82	85	88	90	92	
32	Praktik Inisisasi Menyusu Dini		50	55	60	65	75	85	
33	Bayi usia 0-5 bulan mendapat air susu ibu (ASI) ekslusif		73	76	79	82	85	88	

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
34	Makanan Pendamping ASI (MPASI) beragam setelah 6 bulan		73	76	79	82	85	88	
35	Pemberian ASI Ekslusif sampai 6 bulan, dilanjutkan sampai 2 tahun		61	64	67	70	73	76	
36	BADUTA gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk		91	92	93	94	95	96	
37	BADUTA yang dipantau pertumbuhan dan perkembangan		50	55	60	65	70	75	
38	BADUTA gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi		65	70	75	80	85	90	
39	BADUTA mendapatkan Imunisasi Rutin Lengkap		95	95	95	95	95	95	
40	Pemberian oralit dan zinc sesuai standar pada BADUTA		50	55	60	65	75	80	
41	Pemberian obat cacing pada anak BADUTA		87	90	84	87	89	91	
42	Tatalaksana BALITA yang bermasalah gizi		65	70	75	80	85	90	
43	Stimulasi dan Pemantauan Perkembangan pada BALITA		92	95	95	95	95	95	

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
44	Balita gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi		65	68	71	76	81	86	
45	Pemberian oralit dan zinc sesuai standar pada anak usia 24-59 bulan		99	100	100	100	100	100	
46	Penemuan kasus pneumonia balita		7,15	10	15	20	25	30	
47	Pemberian obat cacing Pada anak BALITA		85	87	88	91	91	91	
48	Remaja putri yang Konsumsi TTD		65	67	70	75	80	85	
49	Remaja putri yang diskrining anemia		75	77	80	83	85	87	
50	Pemeriksaan kesehatan pranika		50	55	60	65	70	75	
51	Cakupan pelayanan nifas	Persen	72,13	72,13	72,13	72,13	72,13	72,13	
52	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	Persen	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	
53	Cakupan pelayanan anak balita	Persen	78,65	82,25	85,85	89,45	93,05	95	
54	Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat	Persen	97,22	97,78	98,34	98,9	99,46	100	

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
55	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
56	Jumlah puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa	Puskesmas	19	19	19	19	19	19	
57	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Desa/Kel	259	259	259	259	259	259	
58	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)	Desa/Kel	225	230	235	240	245	250	
59	Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin di Puskesmas	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
60	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	Persen	96,38	98	99	100	100	100	
61	Fasilitas Kesehatan								
	- Jumlah Rumah Sakit Umum Daerah	Angka	1	1	1	1	1	1	
	- Jumlah Rumah Sakit Umum Tipe C	Angka	0	0	1	1	1	1	
	- Jumlah Rumah Sakit Tipe D	Angka	1	1	0	0	0	0	

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
	- Jumlah Puskesmas	Angka	19	19	19	19	19	19	
	- Jumlah Puskesmas Pembantu	Angka	28	28	28	28	28	28	
62	Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persen	86,25	89,05	91,85	94,65	97,45	100	
63	Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan	Persen	93,31	95	100	100	100	100	
64	Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persen	90,39	98	100	100	100	100	
65	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Persen	92,02	92,82	93,62	94,42	95,22	96,02	
66	Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persen	95,68	96,48	97,28	98,08	98,88	100	
67	Persentase Orang Usia 15-59 Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar	Persen	30,48	34,48	38,48	42,48	46,48	50,48	
68	Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun Ke Atas	Persen	88,02	88,72	89,42	90,12	90,82	91,52	

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
	Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standard								
69	Persentase Penderita Hipertensi Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persen	13,45	18,45	23,45	28,45	33,45	38,45	
70	Persentase Penderita DM Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Persen	18,14	21,14	24,14	27,14	30,14	33,14	
71	Persentase ODGJ Berat Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa Sesuai Standar	Persen	83,85	85,85	87,85	89,85	91,85	93,85	
72	Persentase Orang Terduga TBC Mendapatkan Pelayanan TBC Sesuai Standar	Persen	40,21	44,21	48,21	52,21	56,21	60,21	
73	Persentase Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pelayanan Deteksi Dini HIV Sesuai Standar	Persen	30,38	34,38	38,38	42,38	46,38	50,38	
C.	**Pekerjaan Umum da Penataan Ruang**								

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
	Pekerjaan Umum								
1.	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	Persen	58,73	61,07	63,41	65,75	68,09	72,43	
2.	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	Persen	0,213	0,2143	0,2156	0,2169	0,2182	0,2195	
3.	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	Persen	1,48	1,784	2,088	2,392	2,696	3	
4.	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak	Persen	76,66	77,46	78,26	79,06	79,86	80,66	
5.	Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	Persen	36,65	38,65	40,65	42,65	44,65	46,65	
6.	Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor	Persen	3,13	5,63	8,13	10,63	13,13	15,63	
7.	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	Persen	62,94	65,44	67,94	70,44	72,94	75,44	
8.	Persentase rumah tangga dengan sumber air minum layak	Persen	89,15	90,55	91,95	93,35	94,75	96,15	

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
9.	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	Persen	0,18	0,19	0,2	0,21	0,22	0,23	
10.	Capaian Pelayanan SPALD-S Akses Dasar Air Limbah Domestik	Persen	82,58	84,58	86,58	88,58	90,58	92,58	
11.	Capaian Pelayanan SPALD- S Akses Aman Air Limbah Domestik	Persen	74,71	76,71	78,71	80,71	82,71	84,71	
12.	Capaian Pelayanan SPALD-T Akses Aman Air Limbah Domestik	Persen	4,45	8,45	12,45	16,45	20,45	24,45	
13.	Capaian Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Persen	76,66	77,7	78,74	79,78	80,82	81,86	
14.	Akses terhadap Air Minum Aman		93,02	95,11	96	96,5	97	97,5	
15.	Akses terhadap Sanitasi Aman		80	83,5	85	87,5	90	92,5	
16.	Fasilitas Publik Pusat Kota Kecamatan Setingkat Ibukota Kabupaten	Kecamatan	0	0	0	1	1	2	
17.	Pembangunan Jalan Kisau Pemkab	Km	0	0	1	1	2	2	
18.	Pembangunan Jembatan Kisau Pemkab	Unit	0	0	0	1	1	1	

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
19.	Pembukaan dan pembangunan jalan Komplek Perkantoran Pemkab-Simpang Kotaway-RSUD Muaradua	Km	0	0	1	1	1	4	
	Penataan Ruang								
1.	Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah	Rasio	36,3	38	41	43	46	50	
2.	Jumlah bangunan ber-IMB	Unit	458	498	538	578	618	658	
D.	**Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**								
1.	Persentase rumah layak huni	Persen	77,1	77,3	77,5	77,8	78	78,3	
2.	Rasio permukiman layak huni	Rasio	0,98	0,99	1	1	1	1	
3.	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	Persen	3,28	2,98	2,68	2,38	2,08	1,78	
4.	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
5.	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
E.	**Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat**								
1.	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	Persen	0,1674	10	15	17	25	30	
2.	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Persen	54,64	61,14	67,64	74,14	80,64	80	
3.	Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Per 10.000 Penduduk	Rasio	6,6	7,6	7,6	8,6	8,6	9,6	
4.	Jumlah Linmas Pemilu Per Jumlah 10.000 Penduduk	Rasio	93,34	93,34	93,34	93,34	96,34	96,34	
5.	Jumlah Kegiatan Pembinaan Terhadap LSM, Ormas, dan OKP	Kegiatan	1	1	2	2	2	2	
6.	Jumlah Kegiatan Pembinaan Politik Daerah	Kegiatan	1	1	2	2	2	2	
7.	Jumlah Organisasi Kemasyarakatan	Ormas	25	25	25	25	25	25	
8.	Jumlah desa tangguh bencana yang terbentuk	Desa	2	4	6	8	10	12	
9.	Banyaknya sistem peringatan dini	Sistem	1	1	2	2	2	2	

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
10.	Dokumen strategi Pengurangan Risiko Bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah								
11.	Rencana Penanggulangan Bencana Daerah (RPBD),	Dokumen	1	1	2	2	2	3	
	- Indeks Risiko Bencana (IRB)	Indeks	100,11	99,87	98,12	97,78	97,01	96,97	
	- Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Indeks	0,67	0,70	0,73	0,75	0,76	0,77	
	- Rencana Aksi Daerah Adaptasi Perubahan Iklim (RAD API).	Dokumen	1	1	1	1	1	1	
	- Rencana kontigensi Menghadapi Bencana Banjir Kabupaten OKU Selatan	Dokumen	1	1	1	1	1	1	
12.	Komunikasi Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
13.	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persen	49,65	53,65	57,65	61,65	65,65	69,65	
14.	Respon Cepat Darurat Bencana	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
15.	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Persen	40	40	40	40	40	40	
F.	**Urusan Sosial**								
1.	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	Persen	33,52	34,56	35,6	36,64	37,68	38,72	
2.	Persentase PMKS yang tertangani	Persen	32	35	39	44	50	56	
3.	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	Persen	9,53	10,01	10,49	10,97	11,45	11,93	
4.	Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha sosial (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	Persen	0,41	0,42	0,43	0,44	0,45	0,46	
5.	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial	Persen	0	0	0	0	0	0	
6.	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	Persen	100	100	100	100	100	100	

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
7.	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	Persen	100	100	100	100	100	100	
8.	Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapatkan Bantuan Tunai Bersyarat/ Program Keluarga Harapan	KPM	18,589	18,589	18,589	18,589	18,589	18,589	
9.	Jumlah sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi								
	- Jumlah panti asuhan	Panti	6	6	6	6	6	6	
	- Jumlah panti jompo	Panti	0	0	0	0	0	0	
	- Panti rehabilitasi	Panti	0	0	0	0	0	0	
10.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar Di Luar Panti Sosial	Persen	68,67	70,67	72,67	74,67	76,67	78,67	
11.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar Di Luar Panti Sosial	Persen	30,57	32,57	34,57	36,57	38,57	40,57	
12.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Telantar Di Luar Panti Sosial	Persen	40	44,5	51,5	55	62,5	70	

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
13.	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis Di Luar Panti Sosial	Persen	52	54	56	58	60	62	
14.	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah kabupaten/kota	Persen	28,52	36,52	44,52	52,52	65	80	
G.	**Tenaga Kerja**								
1.	Tingkat partisipasi angkatan kerja	Persen	81.00	83.00	84.00	86.00	87.00	89.00	
2.	Tingkat pengangguran terbuka	Persen	1,79	1,78	1,76	1,74	1,73	1,71	
3.	Persentase Kerja Formal	Persen	25	27	30	32	35	38	
H.	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**								
1.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Persen	92,84	93,14	93,44	93,74	94,04	94,34	
2.	Indeks Pemberdayaan Gendar (IDG)	Persen	59,21	60,41	61,61	62,81	64,01	65,21	
3.	Rasio KDRT	Rasio	0,05	0,04	0,03	0,02	0,01	0	

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
4.	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan	Perda	1	1	1	1	1	1	
5.	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan	Persen	19	19	19	19	19,06	19,06	
I.	**Pangan**								
1.	Ketersediaan pangan utama	Persen	100	100	100	100	100	100	
2.	Ketersediaan energi dan protein perkapita								
	- Ketersediaan energi perkapita (Kkal)	Kkal	4.422	4.622	4.822	5.022	5.222	5.422	
	- Ketersediaan protein perkapita (gr)	Gr	78,28	81,28	84,28	87,28	90,28	93,28	
3.	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	Persen	100	100	100	100	100	100	
J.	**Lingkungan Hidup**								

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1.	Pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
2.	Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat pengawas lingkungan hidup di daerah (PPLHD) di kabupaten/kota								
	- Jumlah PPLHD yang dilatih dan/atau dibina	Orang	0	0	1	1	1	1	
	- Jumlah sarana prasarana PPLHD yang memenuhi standar minimum	Unit	0	0	0	0	0	0	
3.	Jumlah MHA yang diakui		1	1	1	1	1	1	
4.	Jumlah MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional yang di verifikasi		1	1	1	1	1	1	

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
5.	Jumlah hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional yang terverifikasi		1	1	1	1	1	1	
6.	Penetapan hak MHA		0	0	0	0	0	0	
7.	Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan	Persen	0	0	0	0	0	0	
8.	Terfasilitasi penyediaan sarana/prasarana	Persen	0	0	0	0	0	0	
9.	Jumlah pelatihan yang diberikan kepada lembaga kemasyarakatan yang ada di satu kabupaten/kota	Pelatihan	0	0	1	1	1	1	
10.	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup		Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	
11.	Pengaduan okasikat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, okasi usaha dan dampaknya di daerah kabupaten/kota	Persen	0	0	0	0	0	0	
12.	Timbulan sampah yang ditangani	Persen	93.01	97	100	100	100	100	

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
13.	Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R	Persen	0	0	0	0	0	0	
14.	Persentase cakupan area pelayanan	Persen	48,92	51,92	54,92	57,92	60,92	63,92	
15.	Persentase jumlah sampah yang tertangani	Persen	10,38	12,88	15,38	17,88	20,38	22,88	
16.	Nilai TPA (Program Adipura) ≥ 71	Persen	0	0	0	0	0	1	
17.	Persentase izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diterbitkan	Persen	0	20	25	27	30	40	
18.	Persentase pengelolaan sampah oleh swasta yang taat terhadap peraturan perundang-undangan	Persen	25	39	54	62	71	80	
19.	Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	Persen	3.20	4.21	8.22	10.23	15.24	20.25	
20.	Jumlah Limbah B3 Yang Terkelola dan Proporsi Limbah B3 Yang Diolah Sesuai Peraturan Perundangan (sektor industri)		0	0	0	0	0	0	
21.	Indeks kualitas air		63	65	67	68	69	70	
22.	Indeks Kualitas Udara		93	94	95	96	96,6	97	
23.	Indeks Kualitas Lahan (IKL)		43	44	45	45,5	46	47	

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
K.	**Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**								
1.	Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk	Rasio	0,83	0,86	0,89	0,92	0,95	0,98	
2.	Persentase Anak Yang Memiliki Akta Kelahiran	Persen	99,69	99,71	99,89	99,94	100	100	
3.	Rasio pasangan berakte nikah	Rasio	35,76	40,76	45,76	50,76	55,76	60,76	
4.	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
5.	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK		Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	
6.	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	Persen	78,33	82,33	86,33	90,33	94,33	98,33	
L.	**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**								
1.	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	Persen	60	64	68	72	76	80	
2.	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	Rata-rata	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
3.	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	Rata-rata	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	
4.	Persentase LPM berprestasi	Persen	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	
5.	Persentase PKK aktif	Persen	70	90	100.00	100.00	100.00	100.00	
6.	Persentase Posyandu aktif	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
M.	**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**								
1.	Rata-rata jumlah anak per keluarga	Rata-rata	1,27	1,47	1,67	1,87	2,07	2,27	
2.	Ratio akseptor KB	Rasio	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	
3.	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49	Persen	73,01	73,71	74,41	75,11	75,81	76,51	
4.	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19)	Persen	24,9	21,9	18,9	15,9	12,9	9,9	
5.	Cakupan pasangan usia subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	Persen	26,34	25	23	20	15	10	
6.	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	Persen	6,43	5,93	5,43	4,93	4,43	3,93	

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
7.	Persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	Persen	17,75	18,25	18,75	19,25	19,75	20,25	
8	Keluarga Berencana dan jarak kelahiran		74	76	79	83	87	91	
9	Pendampingan keluarga 1000 HPK		12	11,8	11,6	11,4	11,2	11	
10	Total Fertility Rate (TFR)								
N.	**Perhubungan**								
1.	Jumlah arus penumpang angkutan umum	Orang	94,56	94,66	94,76	94,86	94,96	95,06	
2.	Rasio ijin trayek per 10.000 penduduk	Rasio	0,48	0,49	0,5	0,51	0,52	0,53	
3.	Jumlah uji kir angkutan umum	Unit	658	698	738	778	818	858	
	- Mobil penumpang umum	Unit	0	0	0	0	0	0	
	- Mobil bus	Unit	120	125	130	135	140	145	
	- Mobil barang	Unit	543	583	623	663	703	743	
	- Kereta gandengan	Unit	0	0	0	0	0	0	
	- Kereta tempelan	Unit	0	0	0	0	0	0	
4.	Jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bis								
	- Jumlah dermaga	Buah	3	3	3	3	3	3	

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
	- Terminal type B Muaradua	Buah	1	1	1	1	1	1	
5.	Pemasangan Rambu-rambu	Buah	1319	1557	1757	900	850	400	
O.	**Komunikasi dan Informatika**								
1.	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di Tingkat Kecamatan	Persen	100	100	100	100	100	100	
2.	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	Persen	78,227	78,244	78,261	78,278	78,295	78,312	
3.	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	Persen	1,87	6,87	11,87	16,87	21,87	26,87	
4.	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	Persen	0,2	0,7	1,2	1,7	2,2	2,7	
P.	**Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah**								
1.	Persentase koperasi aktif	Persen	55,25	57,00	59,00	62,00	65,00	70,00	
2.	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah	Persen	96,06	95,89	95,23	94,56	94,12	93,34	
3.	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	Persen	0,084	0,095	0,098	0,101	0,104	0,11	

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
Q.	**Penanaman Modal**								
1.	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Investor	23	24	25	26	27	28	
2.	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Rupiah	110	120	130	140	150	160	
3.	Rasio daya serap tenaga kerja	Rasio	27,56	28,86	30,16	31,46	32,76	34,06	
4.	Kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN/PMA	Milyar Rupiah	23	24	25	26	27	28	
R.	**Kepemudaan dan Olah Raga**								
1.	Persentase organisasi pemuda yang aktif	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
2.	Jumlah kegiatan kepemudaan	Kegiatan	4	5	6	6	6	6	
3.	Cakupan pembinaan olahraga	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
4.	Cakupan pelatih yang bersertifikasi	Persen	20	22	24	26	28	30	
S.	**Statistik**								
1.	Buku ”kabupaten dalam angka”		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
2.	Buku ”PDRB”		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
3.	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi		Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
T.	**Persandian**								
1.	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	Persen	2.08	2.08	2.08	2.08	2.08	2.08	
U.	**Kebudayaan**								
1.	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Event	2	2	3	3	4	4	
2.	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	Cagar Budaya	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	
3.	Persentase benda bangunan,struktur, situs dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total pendaftaran	Persen	10	15	15	15	20	20	
4.	Persentase Warisan Budaya tak benda yang telah ditetapkan terhadap total pendaftaran	%	10	15	15	15	20	20	
V.	**Perpustakaan**								

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1.	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Orang	62.000	62.500	63.000	63.500	64.000	64.500	
2.	Rasio perpustakaan per satuan penduduk	Rasio	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	
3.	Jumlah rata-rata pengunjung pepustakaan/tahun	Orang	5,162	5,23	5,67	5,96	6,5	7,6	
4.	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	Judul	72,542	73,1	73,5	73,97	74,8	75,1	
5.	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	Orang	2	2	2	3	3	4	
W.	**Kearsipan**								
1.	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	%	9	10	12	14	16	18	
2.	Peningkatan SDM pengelola kearsipan								
	- Menunjukkan jumlah Kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan	Kegiatan	4	6	8	8	9	10	
X.	**Pariwisata**								
1.	Kunjungan wisata	Orang	100.000	105.000	110.000	120.000	130.000	140.000	

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
2.	PAD sektor pariwisata	Persen	2,00	2,10	2,31	2,54	2,8	3,07	
3.	Lama Kunjungan	Hari	2	2	2	3	3	4	
Y.	**Pertanian**								
1.	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	%							
2.	Cakupan bina kelompok petani	%	68,02	71,02	74,02	77,02	80,02	83,02	
3.	Produksi Tanaman Pangan								
	- Padi	Ton	66.772,09	73.449,30	80.794,23	88.873,65	97.761,02	107.537,12	
	- Jagung	Ton	360.486,13	378.510,43	397.435,95	417.307,75	438.173,14	460.081,80	
	- Ketela Pohon	Ton	369,78	388,27	407,68	428,06	449,47	471,94	
	- Ketela Rambat	Ton	692,74	762,01	838,21	922,03	1.014,23	1.115,66	
	- Kedelai	Ton	-	-	-	-	-	-	
	- Kacang Hijau	Ton	-	-	-	-	-	-	
4.	Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya per hektar								
	- Provitas Padi	Ton/Ha	6,25	6,56	6,89	7,23	7,59	7,97	
	- Provitas Jagung	Ton/Ha	6,58	6,91	7,26	7,62	8	8,4	
	- Provitas Kedelai	Ton/Ha	-	-	-	-	-	-	
5.	Produksi Sayur-Sayuran								

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
	- Bawang Daun	Ton	2.930,55	3.077,08	3.230,93	3.392,48	3.562,10	3.740,21	
	- Kentang	Ton	-	-	-	-	-	-	
	- Kubis	Ton	3.919,65	4.115,63	4.321,41	4.537,48	4.764,36	5.002,58	
	- Petsai/Sawi	Ton	4.349,63	4.567,11	4.795,46	5.035,23	5.287,00	5.551,35	
	- Kacang Merah	Ton	367,5	385,88	405,17	425,43	446,7	469,03	
	- Kacang Panjang	Ton	1.114,05	1.169,75	1.228,24	1.289,65	1.354,13	1.421,84	
	- Cabe Besar	Ton	8.539,13	8.966,08	9.414,39	9.885,10	10.379,36	10.898,33	
	- Cabe Rawit	Ton	8.512,88	8.938,52	9.385,44	9.854,72	10.347,45	10.864,83	
6.	Provitas Sayur-Sayuran								
	- Provitas cabe	Ton/Ha	42,69	44,83	47,07	49,42	51,89	54,49	
	- Provitas bawang merah	Ton/Ha	3,7	3,88	4,07	4,28	4,49	4,72	
7.	Produksi Buah-Buahan								
	- Alpukat	Ton	6.562,50	6.890,63	7.235,16	7.596,91	7.976,76	8.375,60	
	- Duku	Ton	24.699,15	25.934,11	27.230,81	28.592,35	30.021,97	31.523,07	
	- Durian	Ton	3.743,36	3.930,52	4.127,05	4.333,40	4.550,07	4.777,57	
	- Jeruk	Ton	590,63	620,16	651,16	683,72	717,91	753,8	
	- Mangga	Ton	337,26	354,12	371,83	390,42	409,94	430,44	
	- Nangka	Ton	-	-	-	-	-	-	
	- Pepaya	Ton	7.273,35	7.637,02	8.018,87	8.419,81	8.840,80	9.282,84	
	- Pisang	Ton	4.890,69	5.135,22	5.391,99	5.661,59	5.944,66	6.241,90	
8.	Provitas Buah-Buahan								
	- Provitas Pisang	Ton/Ha	40,43	42,45	44,57	46,8	49,14	51,59	

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
	- Provitas Alpukat	Ton/Ha	51,95	54,55	57,28	60,14	63,15	66,31	
	- Provitas Durian	Ton/Ha	15,74	16,53	17,35	18,22	19,13	20,09	
	- Provitas Duku	Ton/Ha	10,5	11,03	11,58	12,16	12,76	13,4	
9.	Populasi Ternak								
	- Sapi	Ekor	7,119	7,474	7,774	8,075	8,375	8,676	
	- Kerbau	Ekor	18	260	300	320	370	450	
	- Domba	Ekor	121	160	179	215	236	270	
	- Kambing	Ekor	34,869	35000	36,5	37,8	38,7	40,45	
10.	Produksi Perkebunan								
	- Kopi Robusta	Ton	68.707,80	72.143,19	75.750,35	79.537,87	83.514,76	87.690,50	
	- Karet	Ton	3.349,50	3.516,90	3.692,80	3.877,40	4.071,30	4.274,90	
	- Kakao	Ton	512	538,461	56	59	623	65	
	- Lada	Ton	3.019,32	3.170,29	3.328,80	3.495,24	3.670,01	3.853,51	
	- Tembakau	Ton	4,41	4,6	4	5,1	5,36	5,6	
Z.	**Energi dan Sumber Daya Mineral**								
1.	Rasio Elektrifikasi	%	94,41	96,41	98,41	100	100	100	
AA.	**Perdagangan**								
1.	Kontribusi perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda terhadap PDRB	%	24,44	24,45	24,46	24,47	24,48	24,49	

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
AB.	**Perindustrian**								
1.	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB	%	8,19	8,2	8,21	8,22	8,23	8,24	
AC.	**Transmigrasi**								
1.	Persentase transmigran swakarsa	%	65	65	65	65	65	65	
AD.	**Kelautan dan Perikanan**								
1.	Konsumsi ikan	%	98,47	98,52	98,57	98,62	98,67	98,72	
2.	Produksi perikanan kelompok nelayan	%	38,76	42,26	45,76	49,26	52,76	56,26	
3.	Produksi perikanan	%	92,00	93,00	94,00	95,00	96,00	97,00	
AE.	**Perencanaan Pembangunan**								
1.	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
2.	Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
3.	Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
4.	Indeks Perencanan Pembangunan Daerah	Indeks	72	75	78	81	83	84	
AF.	**Keuangan**								
1.	Persentase SILPA	%	2,9	1,5	1	0,7	0,6	0,5	
2.	Persentase belanja pendidikan (20%)	%	22,1	22	22	22	22	22	
3.	Persentase belanja kesehatan (10%)	%	18	16	15	15	15	15	
4.	Penetapan APBD		Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	
AG.	**Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan**								
1	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	%	58,96	60,46	61,96	63,46	64,96	66,46	
2	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	4,51	8,51	12,51	16,51	20,51	24,51	

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
AH.	**Penelitian dan Pengembangan**								
1.	Persentase Perangkat Daerah Yang Difasilitasi Dalam Penerapan Inovasi Daerah	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
AI.	**Pengawasan**								
1.	Persentase tindak lanjut temuan	%	92	93	94	96	97	100	
2.	Persentase pelanggaran pegawai	%	0	0	0	0	0	0	
3.	Jumlah temuan BPK	Kasus	20	17	13	11	7	0	
AJ.	**Sekretariat Dewan**								
1.	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	

BAB V
PENUTUP

Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan merupakan penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah yang berpedoman kepada RPJPD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, memperhatikan RTRW Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, serta RPJMD Provinsi Sumatera Selatan. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

RPJMD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2025-2029, dijadikan pedoman dalam :

1. Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja (Renja) dan perencanaan penganggaran;
2. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan antara lintas OPD maupun wilayah di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan maupun dengan Provinsi Sumatera Selatan dan Nasional.

5.1. Kaidah Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2025-2029 ini hendaknya dapat dilaksanakan secara konsisten, jujur, transparan, profesional, partisipatif, dan penuh tanggung jawab, dengan kaidah-kaidah pelaksanaan, sebagai berikut:

1) Perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, masyarakat, pemangku kepentingan, serta dunia usaha agar melaksanakan program-program dalam RPJMD Tahun 2025-2029 ini dengan sebaik-baiknya.
2) Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2025-2029 ini selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan.
3) Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan berkewajiban menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah

(Renstra-PD) yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah masing-masing, yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2025-2029, yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).

4) Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2025-2029, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan berkewajiban melakukan fasilitasi, pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap penjabaran RPJMD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2025-2029 secara berkala. Untuk menjaga sinergitas, harmonisasi dan sinkronisasi dengan Renstra PD, maka Bappeda Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan berkewajiban melaksanakan fasilitasi, pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja Renstra PD.
5) Bupati berkewajiban menyebarluaskan dokumen Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2025-2029 kepada masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2025-2029, Bappeda Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penjabaran RPJMD beserta indikatornya ke dalam Renstra Perangkat Daerah serta ketercapaian dalam pelaksanaannya. Pengendalian dan evaluasi RPJMD terdiri dari beberapa tahap, yaitu :

1) Pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Hasil pemantauan dan supervisi digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah oleh Kepala Daerah telah berpedoman pada RPJPD dan RTRW, mengacu pada RPJMD dan memperhatikan RTRW kabupaten Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
2) Pemantauan dan supervisi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah, RKPD dan Renja Perangkat daerah untuk memastikan program dan indikasi rencana program prioritas berjalan sesuai rencana.
3) Pemantauan dan evaluasi untuk menjamin kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah telah dilaksanakan melalui RKPD;
4) Mengidentifikasi kesesuaian atau ketidaksesuaian antara rencana dan pelaksanaan, penyimpangan yang terjadi, kemudian melakukan tindakan

perbaikan atau penyempurnaan terhadap ketidaksesuaian atau penyimpangan yang ada.

5.2 Pedoman Transisi

Dalam rangka menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, maka diperlukan pedoman penyusunan RKPD 2030 yang akan dilaksanakan pada tahun 2029. Diketahui, tahun 2029 merupakan tahun terakhir periode RPJMD ini, sedangkan masa jabatan Bupati terpilih tahun 2025-2030. Oleh karena itu, Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, RPJMD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan ini memuat perencanaan pembangunan hingga tahun 2030 sebagai bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan daerah dan pijakan penyusunan RKPD Tahun 2030. Selain itu, penyusunan RKPD tahun 2030 pada saat belum ada RPJMD baru, berpedoman pada arah kebijakan RPJPD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2025-2045, RKPD tahun 2029, dan program strategis nasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat yang berlaku saat itu.

Keberhasilan dan implementasi pelaksanaan RPJMD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2025-2029, sangat tergantung pada kesepakatan, kesepahaman dan komitmen bersama antara Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dengan seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Upaya tersebut dilakukan untuk menjaga agar hasil pembangunan dapat dinikmati secara merata dan berkeadilan oleh seluruh lapisan masyarakat Ogan Komering Ulu Selatan sebagai bagian dari proses pencapaian visi **"Bersatu Untuk OKU Selatan Maju, Adil, Aman Nyaman dan Sejahtera"**. Oleh karena itu, konsistensi, kerjasama, transparansi dan inovasi, serta rasa tanggungjawab yang tinggi diperlukan guna pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2025-2029.

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

ABUSAMA, SH